Ilmu Pengetahuan Sosial 2

Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kelas VIII
Semester 1 dan 2

Herlan Firmansyah
Dani Ramdani

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Herlan Firmansyah, Dani Ramdani Ilmu Pengetahuan Sosial Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII

Ilmu Pengetahuan Sosial

Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kelas VIII

Semeter 1 dan 2

Herlan Firmansyah
Dani Ramdani

PUSAT PERBUKUAN
Departemen Pendidikan Nasional

Ilmu Pengetahuan Sosial

Untuk Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah

Kelas VIII

Semeter 1 dan 2

300.7
HER
i

HERLAN Firmansyah
Ilmu Pengetahuan Sosial 2 : untuk Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah Kelas VIII /Semester 1 dan 2 / penulis Herlan Firmansyah, Dani Ramdani ; editor, Emy Kusmiati ; Ilustrator, Tim Redaksi. — Jakarta : Pusat Perbukuan, Departemen Pendidikan Nasional, 2009
viii, 237 hlm. : ilus. ; 25 cm.

Bibliografi : hlm. 236-237
Indeks
ISBN 978-979-068-675-5 (no.jil.lengkap)
ISBN 978-979-068-678-6

1. Ilmu-ilmu Sosial-Studi dan Pengajaran I Judul II. Dani Ramdani III. Emy Kusmiati III. Tim Redaksi

Diterbitkan oleh Pusat Perbukuan
Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2009

Diperbanyak oleh …..

KATA SAMBUTAN

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya, Pemerintah, dalam hal ini, Departemen Pendidikan Nasional, pada tahun 2009, telah membeli hak cipta buku teks pelajaran ini dari penulis/penerbit untuk disebarluaskan kepada masyarakat melalui situs internet (*website*) Jaringan Pendidikan Nasional.

Buku teks pelajaran ini telah dinilai oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan telah ditetapkan sebagai buku teks pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 12 Februari 2009.

Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para penulis/ penerbit yang telah berkenan mengalihkan hak cipta karyanya kepada Departemen Pendidikan Nasional untuk digunakan secara luas oleh para siswa dan guru di seluruh Indonesia.

Buku-buku teks pelajaran yang telah dialihkan hak ciptanya kepada Departemen Pendidikan Nasional ini, dapat diunduh (*down load*), digandakan, dicetak, dialihmediakan, atau difotokopi oleh masyarakat. Namun, untuk penggandaan yang bersifat komersial harga penjualannya harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Diharapkan bahwa buku teks pelajaran ini akan lebih mudah diakses sehingga siswa dan guru di seluruh Indonesia maupun sekolah Indonesia yang berada di luar negeri dapat memanfaatkan sumber belajar ini.

Kami berharap, semua pihak dapat mendukung kebijakan ini. Kepada para siswa kami ucapkan selamat belajar dan manfaatkanlah buku ini sebaik-baiknya. Kami menyadari bahwa buku ini masih perlu ditingkatkan mutunya. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat kami harapkan.

Jakarta,   Juni 2009
Kepala Pusat Perbukuan

KATA PENGANTAR

Buku Ilmu Pengetahuan Sosial ini diperuntukkan bagi siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) kelas VIII. Disusun berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang diberlakukan oleh pemerintah sejak tahun 2006.

Dengan membaca buku ini, kamu akan mendapatkan wawasan menyeluruh tentang ilmu pengetahuan sosial yang merupakan paduan dari ilmu geografi, sosiologi, ekonomi dan sejarah. Buku ini disampaikan dengan bahasa yang cukup mudah untuk dimengerti dan dilengkapi dengan gambar-gambar.

Dalam rangka menguji kompetensi dan memperdalam pemahamanmu, buku ini disertai dengan soal-soal latihan dalam bentuk pilihan ganda dan uraian, serta tugas untuk kamu kerjakan diluar jam pelajaran, baik secara kelompok maupun individu.

Setelah membaca buku ini, diharapkan kamu dapat memahami secara mendalam ruang lingkup ilmu pengetahuan sosial, serta dapat merespon fenomena-fenomena kontekstual dalam kehidupan sehari-hari secara baik dan benar. Sebagai pengayaan, alangkah lebih baik jika kamu membaca referensi lainnya yang relevan, seperti dari buku umum, buku pelajaran lain, majalah, koran, serta dari internet sehingga pengetahuanmu semakin berkembang.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah membantu menyelesaikan buku ini dengan baik, tidak lupa pula kepada para pembaca semua yang sudah menggunakan buku ini sebagai pilihan terbaik. Penulis menyadari bahwa dalam buku ini masih terdapat ketidak sempurnaan. Oleh karena itu, penulis berharap kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran demi perbaikan buku ini di kemudian hari.

Bandung, Oktober 2008

Penulis

Daftar Isi

Bab I

KONDISI FISIK WILAYAH INDONESIA

Standar Kompetensi

Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan kondisi fisik wilayah dan penduduk.

Sudah tahukah kamu letak wilayah Indonesia dilihat dari peta dunia? Wilayah Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua, yaitu Benua Asia dan Benua Australia serta memiliki kondisi fisik yang bervariasi. Kondisi tersebut dapat dilihat dari segi astronomis, segi geografis, dan segi geologis. Dalam bab ini, akan dibahas masing-masing aspek yang mempengaruhi kondisi fisik suatu wilayah terutama negara Indonesia.
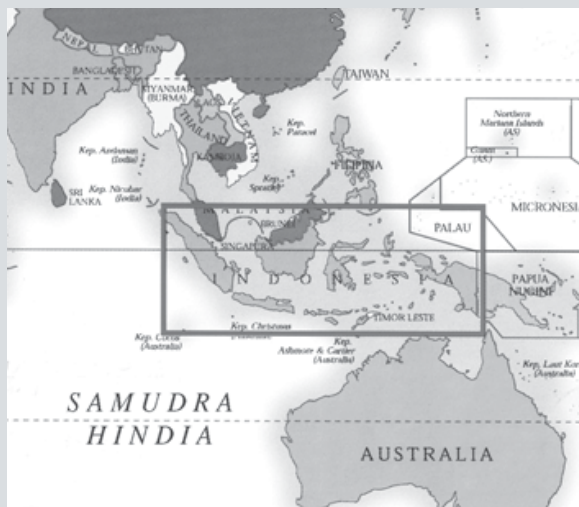
Peta letak geografis Indonesia
Sumber: Ensiklopedia Geografi

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Kondisi fisik
- Letak geografis
- Letak astronomis
- Iklim
- Pembagian waktu
- WIB
- WIT
- WITA
- Flora
- Fauna

A. LETAK GEOGRAFIS DAN ASTRONOMIS INDONESIA

1. Letak Geografis Indonesia

Letak geografis suatu wilayah adalah keberadaan posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi. Untuk melihat letak wilayah Indonesia secara geografis, dapat dilihat pada peta dunia sebagai berikut.
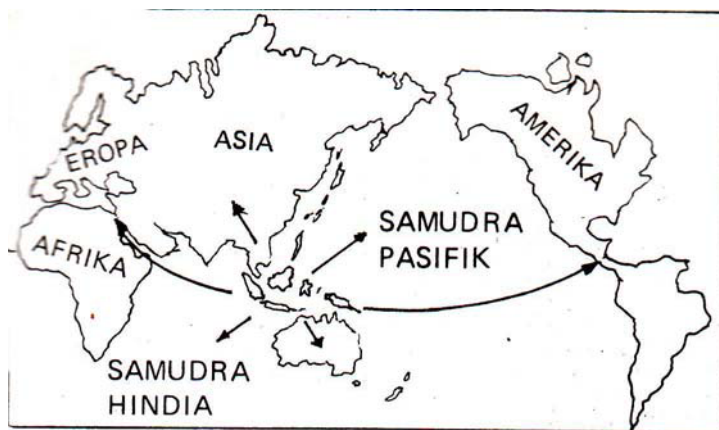
Gambar 1.1 Peta letak geografis Indonesia
Sumber: Atlas Indonesia dan dunia

Berdasarkan gambar di atas dapat diketahui bahasa dilihat secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:

a) Letak Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia.
b) Letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

Beberapa keuntungan yang diperoleh berdasarkan letak geografis Indonesia, antara lain sebagai berikut.

a) Indonesia yang terletak di antara dua benua dan dua samudra memungkinkan menjadi persimpangan lalu lintas dunia, baik lalu lintas udara maupun laut.
b) Indonesia sebagai titik persilangan kegiatan perekonomian dunia, antara perdagangan negara-negara industri dan negara-negara yang sedang berkembang. Misalnya antara Jepang, Korea, dan RRC dengan negara-negara di Asia, Afrika, dan Eropa.

Karena letak geografisnya pula Indonesia mendapat pengaruh berbagai kebudayaan dan peradaban dunia, serta secara alami dipengaruhi oleh angin musim. Sekitar bulan Oktober-April angin bertiup dari Asia ke Australia yang membawa banyak uap air dari Samudra Pasifik sehingga menimbulkan musim hujan. Sekitar bulan April-Oktober angin

bertiup dari Australia ke Asia yang sedikit membawa uap air dari Samudra Hindia sehingga menimbulkan musim kemarau.

Pengaruh musim tersebut di atas menyebabkan Indonesia menjadi negara agraris terkemuka. Pertanian di Indonesia maju pesat dan banyak menghasilkan beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, karet, kopi, gula, tembakau, dan lain-lain yang sangat berguna bagi kemakmuran dan keberlangsungan penduduk Indonesia, secara ekonomi pun menjadi peluang untuk berperan serta dalam perdagangan internasional.

Letak geografis Indonesia mempunyai pengaruh terhadap aspek ekonomi, aspek sosial, dan aspek budaya.

a. Pengaruh aspek ekonomi

Sebagai bangsa yang hidup di wilayah persimpangan kegiatan perekonomian dunia, Indonesia tentu akan terlibat dalam kegiatan tersebut. Keikutsertaannya akan memberi dampak yang positif bagi negara dalam rangka meningkatkan prokdutivitas ekonomi dan menambah sumber-sumber pembiayaan bagi pembangunan nasional.

b. Pengaruh sosial

Letak Indonesia berpengaruh juga terhadap bidang sosial. Letaknya yang strategis memudahkan bangsa Indonesia berhubungan dengan bangsa-bangsa lain sehingga proses interaksi sosial lebih dinamis.

c. Pengaruh kebudayaan

Wilayah Indonesia yang terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional.

2. Letak Astronomis Indonesia

Letak astronomis adalah letak suatu wilayah dipandang dari kedudukan garis lintang dan garis bujur. Letak wilayah Indonesia dari segi astronomis adalah di antara 6ºLU-11ºLS dan antara 95º BT- 141ºBT. Berdasarkan letak tersebut, Indonesia memiliki iklim tropis. Dengan posisi wilayah Indonesia berada di antara garis lintang dan garis bujur, maka wilayah Indonesia dilewati oleh garis khatulistiwa. **Garis khatulistiwa** adalah garis khayal keliling bumi, terletak melintang pada nol derajat yang membagi bumi menjadi dua belahan yang sama, yaitu Belahan Bumi Utara dan Belahan Bumi Selatan. Beberapa tempat atau wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa antara lain Bonjol (Sumatra Barat), Pontianak (Kalimantan Barat), Tambu (Sulawesi Tengah), dan Halmahera (Maluku).

Letak astronomis wilayah Indonesia sangat berpengaruh terhadap keadaan iklim yang sangat menguntungkan, seperti cukup mendapat air hujan, cukup memperoleh cahaya

matahari sepanjang tahun, dan angin yang bertiup rata-rata berkecepatan sedang. Suhu udara pun tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi.

Suhu udara rata-rata di Indonesia sebesar 26ºC menyebabkan beberapa hal berikut ini:

a. Terjadinya hujan zenithal, yaitu hujan yang disebabkan oleh naiknya udara yang mengandung uap air ke angkasa secara tegak. Selanjutnya, mengalami kondensasi karena pendinginan temperatur akhirnya turun menjadi hujan. Naiknya udara tersebut karena adanya pemanasan di atas permukaan bumi sehingga udara membumbung ke atas.
b. Batu-batuan lebih cepat melapuk.
c. Adanya berbagai macam tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah tropis.
d. Adanya sikap tertentu dari penduduk untuk menghadapi suhu udara tropis seperti tecermin pada perumahan, pakaian, dan mata pencaharian.
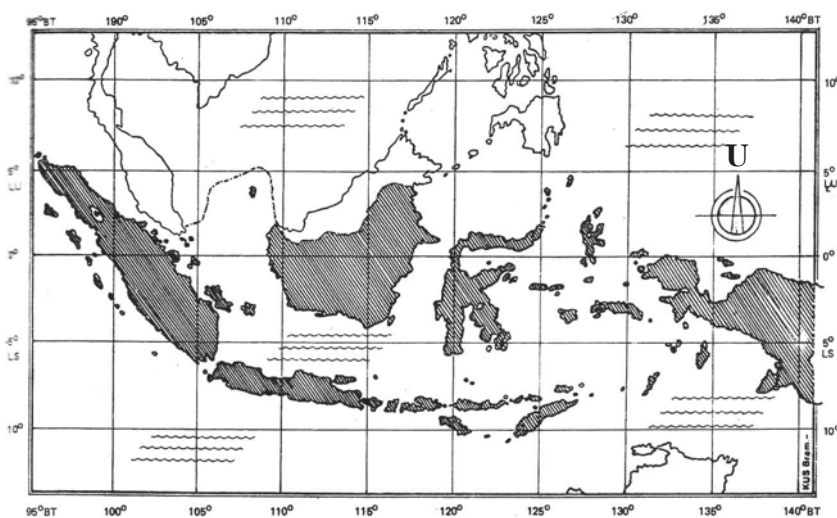
Gambar 1.2 Peta letak astronomis Indonesia
Sumber: Atlas Indonesia dan dunia

B. HUBUNGAN LETAK GEOGRAFIS DENGAN IKLIM

Berdasarkan posisi, garis lintangnya, dan ketinggiannya, setiap wilayah di permukaan bumi mempunyai ciri-ciri yang berbeda-beda, baik secara fisik maupun aktivitas kehidupannya. Faktor fisik tersebut meliputi topografis, lingkungan georafis, cuaca, iklim, dan sinar matahari.

Iklim adalah pola cuaca khas di suatu daerah dalam jangka waktu yang lama. Secara umum, iklim dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa hal berikut ini:

1. Lintang astronomis yang disebut juga klasifikasi iklim berdasarkan kedudukan matahari atau iklim matahari yang pembagiannya sebagai berikut:

a) Daerah iklim tropik, yaitu daerah yang melingkari globe bumi, dibatasi oleh $23\frac{1}{2}^{o}$ Lintang Utara dan 23^{o} Lintang Selatan.

b) Daerah iklim sedang yang letaknya di daerah bumi utara. Posisinya terletak pada globe bumi yang dibatasi oleh oleh 23^{o} dan 66^{o} Lintang Utara atau lingkungan Kutub Utara, sedangkan di Belahan Bumi Selatan daerah ini dibatasi oleh 23^{o} dan 66^{o} Lintang Selatan (lingkungan Kutub Selatan).

c) Daerah kutub di Belahan Bumi Utara yang dibatasi lintang terluarnya 66^{o} Lintang Utara, dengan titik Kutub Utara sebagai titik pusatnya dan di Belahan Bumi Selatan dibatasi oleh lintang terluarnya 66^{o} Lintang Selatan dan titik kutub selatan sebagai titik pusatnya.

2. Variabel fisikal sebagai proyeksi dari radiasi matahari yang disebut sistem iklim fisikal, yaitu sebagai berkut:
   a) variabel suhu (*temperature*);
   b) pembakuan bulan terdingin;
   c) pembakuan bulan terpanas;
   d) variabel curahan hujan;
   e) pembakuan bulan kering;
   f) pembakuan bulan basah;
   g) indikator (penunjuk) vegetasi;
   h) potensi penguapan;
   i) periode-periode yang berhubungan dengan suhu dan curahan hujan.

Berdasarkan kedudukan bumi terhadap matahari, bumi dapat dibagi menjadi tujuh wilayah iklim sebagai berikut.

1. Wilayah Iklim Tropik

Wilayah iklim tropik terletak di antara garis lintang $23^{o}30^{'}$ LU – $23^{o}30^{'}$ LS, suhu udara rata-rata tinggi sepanjang tahun, yaitu berkisar 20^{o}C – 28^{o}C. Daerah musim tropik sebagai tempat gerakan-gerakan aliran udara konveksi atau gerakan udara secara vertikal. Wilayah iklim tropik meliputi Indonesia, Malaysia, Amazon, Kongo, Kamerun, dan Guenia hulu.

Wilayah iklim tropik di daerah sabana terletak pada garis lintang 5^{o} – 15^{o}LU/LS, perbedaan musim hujan dan musim kemaraunya akan tampak jelas. Iklim sabana ditandai dengan jarang hujan sehingga jenis vegetasinya berbentuk semak belukar dan padang rumput. Wilayah Indonesia yang memiliki iklim sabana adalah Aceh Timur, Aceh Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

2. Wilayah Iklim Subtropik Utara dan Selatan

Wilayah beriklim subtropik utara dan selatan terletak di garis lintang $23^o30'$LU – 40^oLU dan $23^o30'$LS – 40^oLS. Temperatur udara di wilayah musim subtropik tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Wilayah ini sebagai tempat turunnya angin antipasat yang kering dan panas. Selain itu, wilayah ini mempunyai tekanan udara maksimum.Wilayah subtropik mengenal empat macam musim, yaitu musim panas (*summer*), semi (*spring*), dingin (*winter*), dan gugur (*autumn*).

3. Wilayah Iklim Sedang Utara dan Selatan

Wilayah iklim ini terletak di antara 40^oLU – $66^o30'$LU dan 40^oLS – $66^o30'$LS. Wilayah iklim ini dipengaruhi oleh iklim laut serta dipengaruhi oleh sifat keringnya udara yang bertiup di atas garis atau *continental*. Wilayah ini mempunyai empat musim, yaitu musim panas (*summer*), musim semi (*spring*), musim dingin (*winter*), dan musim gugur (*autumn*).

Keadaan wilayah iklim sedang di wilayah Eropa, cuaca atau udaranya lembap, langit berawan, dan curah hujan tinggi. Wilayah-wilayah yang beriklim *continental* besifat panas, kering, dan jarang turun hujan. Pada musim panas udaranya panas, dan pada musim dingin temperaturnya rendah. Wilayah yang iklimnya sedang meliputi Amerika Utara dan Amerika Timur, ujung Amerika Selatan, Eropa Timur, ujung Afrika Selatan, Kanada Tengah, dan Australia Selatan.

4. Wilayah Iklim Dingin

Wilayah iklim dingin terletak di daerah Kutub Utara dan Kutub Selatan, tepatnya pada garis lintang $66^o30'$LU – 90^oLU dan $66^o30'$LS – 90^oLS. Wilayah ini setiap tahun selama 8 – 11 bulan rata-rata suhu udara di bawah 0^o.

Wilayah iklim dingin dibagi dua, yaitu sebagai berikut.

1) Wilayah iklim tundra di sekitar Laut Arktik, pesisir Amerika Utara, Kanada Utara, dan Siberia Utara.
2) Wilayah iklim dingin diwarnai corak musim dingin sangat panjang sehingga hampir semua daratan tertutup salju putih dan es tebal.

Pembagian iklim di atas sudah memberikan gambaran kepadamu tentang macam-macam iklim yang ada di bumi. Untuk memperkaya pengetahuanmu, berikut akan diuraikan tentang pembagian iklim menurut beberapa ahli klimatologi.

a. Wladimir Koppen

Wladimir Koppen adalah seorang ahli klimatologi dari Austria. Ia membagi iklim atas dasar rata-rata suhu udara dan curah hujan bulanan dan tahunan. Koppen berpendapat bahwa suatu iklim termasuk basah atau kering ditentukan oleh indeks hujan. Klasifikasi iklim menurut Koppen dapat diperinci sebagai berikut.

1) Iklim A (tropis), yaitu daerah bersuhu 18°C untuk bulan terdingin.
2) Iklim B (tundra dan kutub), yaitu daerah bersuhu 10°C untuk bulan terpanas.
3) Iklim C dan D (sedang), iklim C menempati pinggiran benua yang dipengaruhi iklim laut sehingga disebut iklim sedang hangat. Iklim D menempati pedalaman benua sehingga dinamakan iklim salju atau boreal. Adapun batas antara iklm C dan D pada daerah bersuhu 3°C untuk bulan terdingin.

Berdasarkan klasifikasi iklim di atas, Indonesia termasuk iklim A (tropis). Menurut Koppen, iklim A dapat dikelompokkan menjadi beberapa daerah sebagai berikut.

1) Iklim hujan tropis meliputi beberapa daerah yang bercurah hujan tinggi. Daerah yang bercurah hujan tinggi terdapat di Pulau Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
2) Iklim sabana meliputi daerah Nusa Tenggara Timur dan sekitarnya.
3) Iklim laut basah meliputi hampir seluruh kepulauan Indonesia terutama Sumatra, Kalimantan, dan Papua.
4) Iklim salju abadi terdapat di puncak Pegunungan Jaya Wijaya.

b. Schmidt-Ferguson

Schmidt-Ferguson membagi kriteria iklimnya sebagai berikut.

1) Bulan basah, artinya suatu daerah yang dalam satu tahun curah hujannya lebih dari 100 mm/bulan.
2) Bulan lembap, artinya suatu daerah yang dalam satu tahun curah hujannya 60 sampai dengan 100mm/bulan.
3) Bulan kering, artinya suatu daerah yang dalam satu tahun memiliki curah hujan kurang dari 60mm/bulan.

Untuk menentukan iklim, dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Q = \frac{\text{Rata-rata bulan kering}}{\text{Rata-rata bulan basah}} \times 100\%$$

c. Oldeman

Oldeman membagi kriteria iklim dengan pedoman jumlah bulan basah secara berurutan sebagai berikut.

1) Bulan basah, artinya suatu daerah dalam satu tahun memiliki curah hujan lebih dari 200mm/bulan.
2) Bulan lembap, artinya suatu daerah dalam satu tahun memiliki curah hujan antara 100 sampai dengan 200mm/bulan.

3) Bulan kering, artinya suatu daerah dalam satu tahun memiliki curah hujan kurang dari 100mm/bulan.

Prinsip dasar penentuam iklim menurut Oldeman adalah jika bulan basah berturut-turut sebagai berikut.

1) Iklim A jika jumlah bulan basah suatu daerah secara berturut-turut lebih dari 9 bulan.
2) Iklim B jika jumlah bulan basah suatu daerah secara berturut-turut antara 7-9 bulan.
3) Iklim C jika jumlah bulan basah suatu daerah secara berturut-turut antara 5-6 bulan.
4) Iklim D jika jumlah bulan basah suatu daerah secara berturut-turut antara 3-4 bulan.
5) Iklim E jika jumlah bulan basah suatu daerah secara berturut-turut kurang dari 3 bulan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa letak Indonesia yang berada di daerah tropis atau berada di sekitar garis khatulistiwa serta diapit oleh dua benua dan dua samudra, sangat berpengaruh terhadap keadaan iklimnya. Indonesia mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan temperatur udara yang tinggi serta curah hujan yang dipengaruhi oleh musim. Adanya perubahan arah angin juga berpengaruh terhadap keadaan musim di Indonesia yang terbagi menjadi musim hujan dan musim kemarau.

C. HUBUNGAN LETAK GEOGRAFIS DENGAN WAKTU DI INDONESIA

Bumi kita berbentuk bulat dan setiap harinya selalu berputar. Bumi berputar pada porosnya disebut rotasi. Bumi kita berputar pada sumbunya dari arah barat ke timur. Untuk satu kali putaran dibutuhkan waktu 24 jam. Maksud sekali putaran adalah bumi berputar 360^o dalam waktu 24 jam. Dengan demikian, setiap jam bumi berputar $360^o : 24 = 15^o$.

Adapun akibat dari rotasi bumi adalah sebagai berikut:

1) terjadinya siang dan malam;
2) terjadinya perbedaan waktu pada tempat yang berbeda letak meridian/bujurnya;
3) pembelokan arah angin.

Jika memperhatikan perhitungan waktu yang telah dipaparkan di atas, dapat ditentukan bahwa apabila matahari di tempat A mulai tampak, di tempat yang terletak 15^o sebelah baratnya matahari akan tampak satu jam kemudian. Jadi, pada setiap wilayah yang terletak antara pergeseran 15^oBT dari timur ke barat berselisih waktu 1 jam. Misalnya, Kota Jayapura di Provinsi Irian Jaya terletak pada 140^oBT, dan Kota Manado di Sulawesi Utara terletak pada 125^oBT. Selisih kedua kota tersebut dari garis BT adalah $140^o – 125^o = 15^o$. Maka, apabila di Jayapura pukul tujuh, di Manado berarti pukul enam.

Menurut perhitungan, lebar bujur di tanah air kita adalah 46^{o} sebab letaknya antara 95^{o}BT- 141^{o}BT. Jadi, selisihnya adalah $141^{o} – 95^{o} = 46^{o}$. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dibagi dalam tiga wilayah waktu, yaitu sebagai berikut.

1) Standar wilayah meridian 105^{o} BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) yang meliputi seluruh wilayah Pulau Sumatra, Jawa dan Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Perbedaan waktu antara WIB dengan GMT atau waktu Greenwich adalah sebanyak 7 jam.
2) Standar meridian 120^{o} BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), yang meliputi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi. Perbedaan waktu antara WITA dengan GMT adalah sebanyak 8 jam.
3) Standar meridian 135^{o} BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT), yang meliputi Kepulauan Maluku dan Irian Jaya. Perbedaan dengan GMT sebanyak 9 jam.

Dari penetapan tersebut, dapat diketahui bahwa selisih waktu untuk Indonesia barat, tengah, dan timur adalah 60 menit atau satu jam. Adapun yang menjadi pegangan dalam menentukan waktu adalah garis bujur.

Sejarah Pembagian wilayah waktu di Indonesia dimulai dengan terbitnya Keputusan Presiden RI. No.243 Tahun 1963 yang membagi Indonesia dalam 3 (tiga) wilayah waktu dan berlaku mulai 1 Januari 1964.

Gambar 1.3 *Pembagian Wilayah Waktu di Indonesia*
Sumber: www.bmg.go.id

D. PERUBAHAN MUSIM DI INDONESIA

Seperti yang sudah kamu ketahui dari pembahasan sebelumnya, Indonesia merupakan wilayah iklim tropik dan memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

1. Musim Kemarau di Indonesia

Berlangsungnya musim kemarau di Indonesia bersamaan dengan bertiupnya angin musim timur dan terjadi antara bulan Maret-September. Namun pada bulan Maret dan September, gerakan angin belum menentu sehingga pada bulan tersebut dapat terjadi turun hujan. Secara umum, jika iklimnya berjalan normal, musim kemarau di Indonesia kebanyakan berlangsung antara bulan April sampai bulan September. Pada saat itu, kelembapan udara sangat rendah sehingga terjadi kekeringan di beberapa daerah Indonesia.

2. Musim Hujan di Indonesia

Berlangsungnya musim hujan di Indonesia bersamaan dengan bertiupnya angin musim barat dan terjadi antara bulan September dan bulan Maret. Namun pada bulan itu, gerakan angin belum menentu sehingga kemungkinan bulan tersebut curah hujannya belum menentu. Secara umum jika iklimnya berjalan normal, musim hujan di Indonesia kebanyakan berlangsung antara bulan Oktober sampai bulan Febuari. Di beberapa wilayah sering kali hujannya sedemikian lebat hingga terjadi banjir.

E. PERSEBARAN FLORA DAN FAUNA DI INDONESIA

Pada zaman glasial, yaitu suatu zaman ketika air permukaan didominasi dalam bentuk es yang beku dan terakumulasi di sekitar kutub, volume air laut masih sedikit sehingga permukaan darat lebih luas. Pada saat itu, landas kontinental (lempeng) Asia masih dalam bentuk daratan yang bersatu dan tidak terpisahkan oleh laut sehingga fauna yang ada di wilayah Asia dapat bermigrasi, baik yang melalui perjalanan darat maupun terbawa angin atau sungai. Begitu pula yang terjadi di landas kontinental (lempeng) Australia.

Setelah zaman glasial berakhir, es di kutub mencair dan volume air laut bertambah sehingga dataran rendah di pesisir banyak yang tergenang dan berubah seperti sekarang ini. Oleh karena itu, ada kesamaan fauna antara Pulau Sumatra, Jawa, dan Kalimantan serta pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya karena wilayah tersebut tadinya terhampar dalam satu daratan yang tidak terpisah oleh laut.

Berdasarkan wilayah flora dan fauna, Indonesia terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut.

1) Indonesia bagian barat, meliputi Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya.
2) Indonesia bagian tengah, meliputi Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Kepulauan Nusa Tenggara;
3) Indonesia bagian timur, meliputi wilayah Papua dan pulau-pulau lain di sekitarnya.

Wilayah fauna Indonesia bagian barat dengan fauna bagian tengah dibatasi oleh *garis Wallace*, sedangkan wilayah fauna Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur dibatasi oleh *garis Weber*.

Penyebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut di antaranya:

1) keadaan iklim;
2) keadaan tanah;
3) pengaruh makhluk hidup atau biotik.
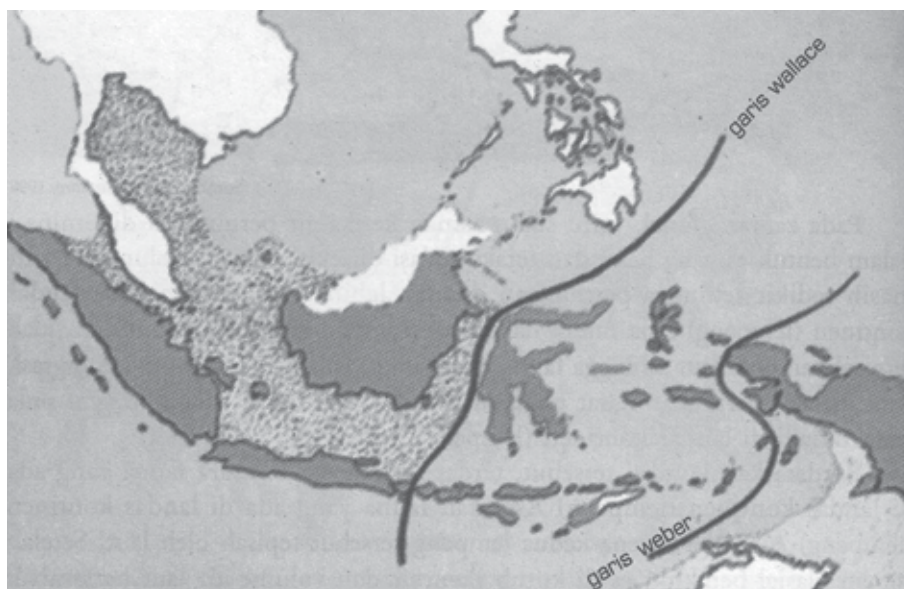
Gambar 1.4 Peta batas flora-fauna Indonesia
Sumber: *Flora-Fauna Nusantara.1995*

1. Flora dan Fauna di Landas Kontinen Asia (Dangkalan Sunda)

Jenis fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat di antaranya sebagai berikut.

a) Jenis mamalia yang terdiri atas gajah, badak bercula satu, tapir, rusa, banteng, kerbau, monyet, orang utan, macan, tikus, bajing, kijang, landak, dan babi hutan.
b) Jenis reptil yang terdiri atas buaya, kura-kura, kadal, biawak, ular, bunglon, dan trenggiling.
c) Jenis burung terdiri atas burung hantu, elang, jalak, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas.
d) Berbagai jenis serangga.
e) Berbagai macam ikan tawar, yaitu sejenis lumba-lumba dari Sungai Mahakam.

Flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia bagian barat (Dangkalan Sunda) dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

a. Flora dan Fauna di Pulau Sumatra dan Sekitarnya

Flora khas Sumatra yang masih terpelihara dengan baik di antaranya terdapat di Taman Nasional Gunung Leuser. Taman Nasional Gunung Leuser terdapat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kekhasan flora pada beberapa daerah ada yang dijadikan maskot atau identitas daerah, seperti cempaka kuning dijadikan maskot Nanggroe Aceh Darussalam. Adapun fauna yang dijadikan maskotnya adalah burung murai kuning atau murai emas. Oleh karena itu, maskot Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sering disebut burung cempaka kuning.

Bunga kenanga dijadikan maskot masyarakat Sumatra Utara. Bunga ini digunakan untuk upacara adat terutama pada upacara pemakaman dan ziarah kubur. Burung beo merupakan burung khas Pulau Nias. Adapun pohon andalas dijadikan maskot Sumatra Barat.

Fauna kawasan Sumatra Barat terdapat berbagai jenis hewan liar, seperti gajah, harimau, rusa, dan kera. Jenis flora yang ada di Taman Nasional Gunung Leuser juga tersebar di Bengkulu, seperti meranti, damar, kayu manis, dan suweg raksasa yang dijadikan maskot pemerintah Bengkulu, sedangkan faunanya beruang madu.

Di Provinsi Riau, banyak dijumpai meranti, kemenyan, kamper, merawang, rotan, dan damar. Provinsi Riau mempunyai tanaman langka, yaitu nibung. Tanaman ini digunakan untuk pipa air bagi lantai rumah panggung, dan bahan jembatan. Selain pohon nibung, burung serindit juga dijadikan maskot Provinsi Riau. Adapun di Provinsi Jambi, flora terkenal di antaranya pohon pinang yang merupakan tanaman hias. Faunanya yang terkenal adalah harimau sumatra.

Flora khas Provinsi Sumatra Selatan adalah tanaman buah duku. Faunanya yang terkenal adalah gajah, badak, harimau, tapir, siamang, beruang, buaya, dan ikan duyung. Di Provinsi Lampung, flora khas yang terkenal adalah jenis bunga yang mempunyai kebiasaan mekar di waktu sore, yaitu bunga ashar. Fauna yang banyak ditemukan adalah gajah, badak sumatra, harimau, kera, babi, badak, kijang, dan musang.

b. Flora dan Fauna Pulau Jawa dan Bali

Flora khas DKI Jakarta di antaranya salak condet. Tanaman ini banyak ditanam di daerah Condet. Provinsi DKI Jakarta pada awalnya memiliki banyak rawa dan hutan mangrove (bakau). Hutan ini sebagai habitat yang baik untuk berbagai jenis burung di antaranya elang bendol. Elang bendol ini dijadikan maskot Provinsi DKI Jakarta.

Flora khas Banten banyak dijumpai adalah hutan hujan tropis. Hujan sekundernya banyak dijumpai di daerah yang padat penduduknya, seperti hutan jati, pinus, albasia, dan kayu putih. Fauna khas Provinsi Banten adalah badak bercula satu, kera, banteng, kura-kura, penyu, dan buaya.

Flora khas yang banyak dijumpai di Provinsi Jawa Barat adalah hutan hujan tropik. Hutan sekundernya banyak dijumpai yaitu karet, kina, cengkeh, kopi, cokelat, tebu, kapuk, dan lain-lain. Flora yang dijadikan maskot Provinsi Jawa Barat adalah Gandaria.

Flora khas yang banyak dijumpai di Provinsi Jawa Tengah adalah jati dan tembakau. Faunanya banyak dijumpai di hutan sebagai satwa liar, di antaranya kera, harimau, babi hutan, dan ular. Flora khas yang dijumpai di Provinsi DI Yogyakarta adalah pohon kepel. Tanaman ini dijadikan maskot Provinsi DI Yogyakarta. Fauna khas Yogyakarta di antaranya musang, harimau, landak, dan burung. Burung perkutut adalah binatang yang dijadikan maskot Provinsi DI Yogyakarta.

Flora khas Provinsi Jawa Timur antara lain jati, mahoni, dan akasia. Fauna yang dijumpai antara lain rusa, babi hutan, anjing hutan, dan harimau jawa. Flora identitas Jawa Timur adalah bunga sedap malam.

Flora yang terkenal di Provinsi Bali antara lain sawo kecik, kepelan, munde, kwanitan, pandak, cempaka kuning, dan duren. Fauna yang ada di Provinsi Bali antara lain babi hutan, kijang, rusa, banteng, dan harimau.

c. Flora dan Fauna di Daerah Pulau Kalimantan

Flora yang dijumpai di Provinsi Kalimantan Barat adalah tengkawang tungkul. Fauna yang ada di Kalimantan Barat antara lain burung enggang gading yang dijadikan maskot daerah. Flora khas di Provinsi Kalimantan Tengah adalah tenggaring. Tanaman ini mirip dengan rambutan di Jawa Barat. Tanaman ini dijadikan maskot daerah Kalimantan Tengah. Fauna maskot Kalimantan Tengah adalah burung kuau melayu.

Adapun flora yang terkenal di Provinsi Kalimantan Timur di antaranya meranti, ulin, keruing, damar, lempung, agates, rotan, bambo, dan pakis. Flora yang dijadikan maskotnya adalah anggrek hitam. Fauna yang banyak ditemukan di Provinsi Kalimantan Timur antara lain kera, orang utan, babi, musang, dan ikan.

Sementara, flora yang terdapat di Provinsi Kalimantan Selatan antara lain hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, padang ilalang, dan rawa. Flora endemik Kalimantan

Selatan adalah kasturi. Fauna endemik yang perlu dilindungi dan dijadikan maskot Provinsi Kalimantan Selatan adalah bekantan. Binatang ini merupakan spesies kera, sejenis lutung.

2. Flora dan Fauna di Landas Kontinen Australia (Dangkalan Sahul)

Flora yang terkenal di daerah Papua antara lain agathis, podocarpus, nipah, kayu putih, rotan, anggrek, sagu, dan umbi-umbian. Flora yang dijadikan maskot Pemda Papua adalah matoa. Fauna di wilayah Indonesia bagian timur di antaranya sebagai berikut.

a) Jenis mamalia yang terdiri atas kanguru, wallaby, beruang, nokdiak (landak irian), dan kuskus.
b) Jenis reptil yang terdiri atas buaya, biawak, ular, kadal, dan kura-kura.
c) Jenis amfibi yang terdiri atas katak pohon, katak terbang, katak air.
d) Jenis burung yang terdiri atas nuri raja udang, cendrawasih, dan kasuari.
e) Berbagai jenis ikan.

Burung cendrawasih dijadikan maskot Provinsi Papua. Burung tersebut dianggap fauna asli Papua dan populasinya dewasa ini sudah langka.

3. Flora dan Fauna di Wilayah Wallace

Daerah Wallace meliputi wilayah Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tengara. Flora yang ditetapkan sebagai maskot Provinsi Sulawesi Utara adalah langsei. Tanaman ini merupakan spesies beringin khas Sulawesi. Fauna di wilayah Sulawesi Utara di antaranya babi, rusa, anoa, maleo, kera, buaya, ular, dan tangkasi. Tangkasi adalah sejenis monyet terkecil di dunia. Binatang ini dijadikan maskot Sulawesi Utara.

Flora khas Provinsi Sulawesi Tengah adalah anggrek putri donggal, aghatis, meranti, kayu palupi, rotan, dan kayu eboni. Fauna di wilayah ini yaitu tapir, anoa, babi rusa, monyet, dan burung maleo. Flora di wilayah Sulawesi Selatan antara lain kayu hitam, akasia, rotan, kemiri, bambu, markisa, dan anggrek. Flora yang dijadikan maskot daerah ini adalah lontar. Jenis faunanya adalah babi rusa, anoa, dan babun jambul. Fauna yang dijadikan maskot burung ranggong atau enggang sulawesi.

Flora yang dijumpai di Sulawesi Tenggara antara lain rotan, bakau, damar, dan bambu.Fauna yang terkenal antara lain kera, babi hutan, burung maleo, dan anoa yang dijadikan maskot. Adapun flora yang banyak dijumpai di Provinsi Maluku yaitu meranti, kayu besi, kayu goppasa, jati, cendana, rotan, sagu, dan kayu putih di Pulau Buru. Fauna di wilayah Maluku antara lain rusa, babi hutan, kerbau liar, sapi liar, kuskus, biawak, dan penyu yang dijadikan maskot adalah burung nuri raja atau nuri Ambon.

Flora yang banyak dijumpai di Provinsi Nusa Tenggara Barat, yaitu kareng dan kayu hitam serta ajan kallicung sejenis kayu hitam yang agak merah kekuningan. Maskot pemda NTB adalah ajan kallicung. Fauna di wilayah ini adalah rusa, kijang, monyet, sapi liar, biawak, ular, kuda, kerbau sapi, dan domba.

Flora yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah cendana, akasia, lontar gewang, kayu putih, meranti, dan sirih hutan. Maskot Pemda Nusa Tenggara Timur adalah kayu cendana. Fauna di wilayah NTT, misalnya kuda, rusa, babi hutan, kuskus, dan berbagai jenis reptil seperti komodo.

F. PERSEBARAN JENIS TANAH DI INDONESIA

Indonesia mempunyai daratan seluas ± 2 juta km², dari luas tersebut tidak seluruhnya dapat diusahakan sebagai lahan pertanian, karena permukaannya berbeda-beda. Di satu sisi kita sering mendengar "Indonesia" mempunyai tanah yang subur. Benarkah? Seperti apakah tanah yang subur itu? Di daerah mana saja tanah yang subur itu di Indonesia dan berapa besar penyebarannya?

Tanah merupakan lapisan bumi paling luar sebagai tempat tumbuhnya tanaman. Tanah berasal dari hasil pelapukan batuan induk dan bahan-bahan organik dari tumbuhan dan hewan yang telah membusuk. Bahan yang menyusun tanah terdiri atas zat padat, cair, gas, dan organisme. Pelapukan batuan induk pembentuk tanah di daerah tropis sangat dipengaruhi oleh faktor suhu dan kelembapan udara.

Jenis tanah yang ada di suatu tempat ditentukan oleh batuan induk, iklim, topografi, bahan organik, dan umur. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia sebagai berikut.

1) Tanah aluvial atau tanah endapan adalah yang terbentuk dari material halus hasil pengendapan aliran sungai di dataran rendah atau lembah. Tanah ini terdapat di pantai timur Sumatra, pantai utara Jawa, dan sepanjang Sungai Barito, Mahakam, Musi, Citarum, Batanghari, dan Bengawan Solo.
2) Tanah vulkanis adalah tanah yang berasal dari abu hasil peletusan gunung berapi yang sudah mengalami proses pelapukan. Tanah andosol terdapat di lereng-lereng gunung api, seperti di daerah Sumatra, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, dan Minahasa. Vegetasi yang tumbuh di tanah andosol adalah hutan hujan tropis, bambo, dan rumput.
3) Tanah regosol adalah tanah berbutir kasar dan berasal dari material gunung api. Tanah regosol berupa tanah aluvial yang baru diendapkan dan tanah pasir terdapat di Bengkulu, pantai Sumatra Barat, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Barat. Material jenis tanah ini berupa tanah regosol, abu vulkan, napal, dan pasir vulkan. Tanah regosol sangat cocok ditanami padi, tebu, palawija, tembakau, dan sayuran.
4) Tanah kapur atau tanah mediteran adalah tanah yang terbentuk dari batu kapur yang mengalami pelapukan. Tanah kapur terdapat di daerah perbukitan kapur Sumatra Selatan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Tanaman yang hidup di daerah kapur adalah palawija, stepa, savana, dan hutan jati atau hutan musim.
5) Tanah litosol adalah tanah berbatu-batu. Bahan pembentuknya berasal dari batuan keras yang belum mengalami pelapukan secara sempurna. Jenis tanah ini juga disebut

tanah azonal. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah litosol adalah rumput ternak, palawija, dan tanaman keras.

6) Tanah argonosol atau tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan rawa yang mengalami pembusukan. Jenis tanah ini berwarna hitam hingga cokelat. Tanah ini terdapat di rawa Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Tanaman yang dapat tumbuh di tanah argonosol adalah karet, nanas, palawija, dan padi.
7) Tanah grumusol atau margalith adalah tanah yang terbentuk dari material halus berlempung. Jenis tanah ini berwarna kelabu hitam dan bersifat subur, tersebar di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Tanaman yang tumbuh di tanah grumosol adalah padi, jagung, kedelai, tebu, kapas, tembakau, dan jati.
8) Tanah latosol adalah tanah yang banyak mengandung zat besi dan aluminium.Tanah ini sudah sangat tua sehingga kesuburannya rendah. Warna tanahnya merah hingga kuning sehingga sering disebut tanah merah. Tanah latosol mempunyai sifat cepat mengeras jika tersingkap atau berada di udara terbuka disebut tanah laterit. Tanah latosol tersebar di Sumatra Utara, Sumatra Barat, lampung, Jawa Barat, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Papua. Tumbuhan yang dapat hidup di tanah latosol adalah padi, palawija, sayuran, buah-buahan, karet, sisal, cengkih, kakao, kopi, dan kelapa sawit.

Kondisi tanah di Indonesia dikenal dengan kesuburannya sehingga ketika ditanami suatu tanaman senantiasa tumbuh dan memberikan manfaat kepada pemiliknya. Suatu tanah dikatakan subur apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) banyak mengandung unsur hara atau zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya;
2) cukup mengandung air yang berguna untuk melarutkan unsur hara agar dapat diserap oleh akar tumbuhan;
3) struktur tanahnya baik, artinya susunan butir-butir tanah tidak terlalu padat dan tidak terlalu lenggang.

RANGKUMAN

1. Letak geografis suatu wilayah adalah keberadaan posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi.
2. Dilihat secara geografis, wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis dan menguntungkan karena beberapa alasan sebagai berikut:
   a) letak Indonesia di antara Benua Asia dan Benua Australia;
   b) letak Indonesia di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.

3. Indonesia mempunyai iklim tropis yang ditandai dengan temperatur udara yang tinggi serta curah hujan yang dipengaruhi oleh musim. Adanya perubahan arah angin juga berpengaruh terhadap keadaan musim di Indonesia yang terbagi menjadi musim hujan dan musim kemarau.
4. Indonesia dibagi dalam tiga wilayah waktu berikut ini.
   a) Standar wilayah meridian 105°BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) yang meliputi seluruh wilayah Pulau Sumatra, Jawa dan Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Perbedaan waktu antara WIB dengan GMT atau waktu Greenwich adalah sebanyak 7 jam.
   b) Standar meridian 120°BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), yang meliputi wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, dan Sulawesi. Perbedaan waktu antara WITA dengan GMT adalah sebanyak 8 jam.
   c) Standar meridian 135°BT, ditetapkan Waktu Indonesia Bagian Timur (WIT), yang meliputi Kepulauan Maluku dan Irian Jaya. Perbedaan dengan GMT sebanyak 9 jam.
5. Wilayah fauna Indonesia bagian barat dengan fauna bagian timur dibatasi oleh *garis Wallace*, sedangkan wilayah fauna Indonesia bagian tengah dengan wilayah Indonesia bagian timur dibatasi oleh *garis Weber*.
6. Penyebaran flora dan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut di antaranya:
   a) keadaan iklim;
   b) keadaan tanah;
   c) pengaruh makhluk hidup atau biotok.
7. Suatu tanah dikatakan subur apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a) banyak mengandung unsur hara atau zat-zat yang diperlukan tanaman untuk pertumbuhannya;
   b) cukup mengandung air yang berguna untuk melarutkan unsur hara agar dapat diserap oleh akar tumbuhan;
   c) struktur tanahnya baik, artinya susunan butir-butir tanah tidak terlalu padat dan tidak terlalu lenggang.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Keberadaan posisi wilayah tersebut sesuai dengan bentuk dan letaknya di bumi disebut ....
   a. letak geologis
   b. letak astronomis
   c. letak strategis
   d. letak geografis
2. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu ....
   a. Benua Asia dan Benua Australia
   b. Benua Asia dan Benua Amerika
   c. Benua Australia dan Eropa
   d. Samudra Pasifik dan Samudra Hindia
3. Laut yang terletak antara pulau-pulau Indonesia disebut ....
   a. laut teritorial
   b. laut nusantara
   c. laut kontinen
   d. laut wilayah
4. Akibat letak geografisnya, Indonesia memiliki dua musim yaitu ....
   a. hujan dan tropis
   b. hujan dan semi
   c. kemarau dan hujan
   d. semi dan salju
5. Musim kemarau di Indonesia pada umumnya berlangsung pada bulan ....
   a. April – Oktober
   b. Oktober – April
   c. September – Januari
   d. Februari – Maret
6. Wilayah Indonesia yang masuk ke dalam WITA adalah ....
   a. Kalimatan Barat
   b. Kalimantan Tengah
   c. Bali
   d. Jawa Barat

7. Berikut yang *tidak* termasuk wilayah fauna Wallace adalah ....
   a. NTT
   b. Sulawesi
   c. Sumatra
   d. Maluku
8. Jenis tanah yang dihasilkan oleh proses pelapukan material batuan gunung api adalah ....
   a. tanah vulkanik
   b. tanah aluvial
   c. tanah gambut
   d. tanah laterit
9. Pada tahun 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan diputuskan oleh Mahkamah Internasional termasuk wilayah ....
   a. Indonesia
   b. Malaysia
   c. Singapura
   d. Filipina
10. Wilayah Indonesia bagian tengah dan wilayah Indonesia bagain barat dibatasi oleh ....
   a. paparan
   b. sahul
   c. wallace
   d. weber

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan letak geografis dengan letak astronomis!
2. Sebutkan tiga wilayah yang termasuk Waktu Indonesia Tengah (WITA)!
3. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan jenis flora dan fauna di setiap daerah?
4. Sebutkan jenis-jenis tanah yang ada di Indonesia!
5. Jelaskan sikap kamu jika salah satu pulau milik Negara Indonesia tiba-tiba diakui oleh negara lain !

TUGAS

Berkunjunglah ke kelurahan atau kantor kepala desa tempat kamu tinggal. Mintalah informasi tentang letak geografis daerahmu beserta informasi tentang flora dan faunanya. Buatlah laporan tertulis dan sampaikan kepada gurumu!

Bab II

PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DAN PENANGGULANGANNYA

Standar Kompetensi

Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan upaya penanggulangannya.

Tahukah kamu bahwa kualitas sumber daya manusia Indonesia dibandingkan dengan negara lain di dunia saat ini masih sangat rendah? Berdasarkan data yang dipublikasikan oleh United Nation Development Program (UNDP) tahun 2004, Indonesia berada pada peringkat terbawah di antara negara-negara ASEAN setelah Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Adapun jika dibandingkan dengan negara-negara di dunia, Indonesia berada pada peringkat 111, jauh di bawah Singapura yang berada di peringkat 25.

Hal yang diuraikan di atas merupakan salah satu permasalahan kependudukan di Indonesia secara kualitas. Pada bab ini, kamu akan mempelajarinya lebih jauh.

Mata Pencaharian Penduduk
Sumber: CD ClipArt Volume 3

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Kependudukan
- Pertumbuhan penduduk
- Ledakan penduduk
- Kepadatan penduduk
- Piramida penduduk
- Komposisi penduduk
- Usia harapan hidup
- Mobilisasi penduduk

A. PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN FAKTOR-FAKTORNYA

Penduduk adalah orang-orang yang mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dan sebagainya) dan tercatat sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di tempat itu. Adapun penduduk menurut UUD 1945 Bab X Pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sampai dengan tahun 2007 penduduk Indonesia berjumlah 220.953.634 jiwa dan berada pada peringkat ke empat setelah Cina, India, Amerika Serikat

Untuk mengetahui jumlah penduduk, biasanya dilakukan sensus penduduk. Tahukah kamu apa itu sensus penduduk? *Sensus penduduk* adalah keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu.

Jumlah penduduk suatu daerah selalu mengalami perubahan. Perubahan jumlah penduduk tersebut disebabkan adanya pertumbuhan penduduk, baik pertumbuhan penduduk positif maupun pertumbuhan negatif. Apabila terjadi pertumbuhan penduduk yang positif, jumlah penduduk akan bertambah, sebaliknya apabila pertumbuhan penduduk negatif, akan mengakibatkan jumlah penduduk mengalami penurunan.

Perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.

1) Fertilitas (kelahiran) adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya, maksudnya masa seorang wanita siap untuk melahirkan keturunan.
2) Mortalitas (kematian) adalah meninggalnya seorang penduduk menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk.
3) Migrasi adalah berpindahnya seorang penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk. Bentuk migrasi di antaranya, imigrasi (pindahnya penduduk ke negara lain), emigrasi (masuknya penduduk dari negara lain), transmigrasi (pindahnya penduduk ke pulau lain dalam suatu negara), dan urbanisasi (pindahnya penduduk dari desa ke kota).

Adapun pertumbuhan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut.

1. Pertumbuhan Penduduk Alami

Pertumbuhan penduduk alami adalah pertumbuhan yang diperhitungkan dari selisih kelahiran dan kematian.

$$P = L - M$$

P = pertumbuhan penduduk yang dicari
L = jumlah kelahiran
M = jumlah kematian

Kriteria yang digunakan untuk mengukur tinggi rendahnya angka kelahiran dan kematian adalah sebagai berikut.

a) Penggolongan angka kelahiran:
   1) angka kelahiran rendah, jika angka kelahiran kurang dari 30;
   2) angka kelahiran sedang, jika angka kelahiran antara 30-40;
   3) angka kelahiran tinggi, jika angka kelahiran lebih dari 40.
b) Penggolongan angka kematian:
   1) angka kematian rendah, jika angka kematian kurang dari 10;
   2) angka kematian sedang, jika angka kematian antara 10-20;
   3) angka kematian tinggi, jika angka kematian lebih dari 20.

2. Pertumbuhan Penduduk Migrasi

Pertumbuhan penduduk migrasi adalah pertumbuhan penduduk yang disebabkan oleh perbedaan antara jumlah migrasi masuk (imigrasi) dan migrasi keluar (emigrasi). Jumlah imigrasi yang melebihi jumlah emigrasi akan menambah jumlah penduduk di negara yang bersangkutan. Sebaliknya, jika emigrasi lebih besar dari imigrasi, jumlah penduduknya akan mengalami penurunan. Adapun rumus pertumbuhan penduduk migrasi adalah:

$$PM = I - E$$

PM = jumlah penduduk migrasi
I = jumlah imigrasi (penduduk yang masuk)
E = jumlah emigrasi (penduduk yang keluar)

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik benang merahnya bahwa pertumbuhan penduduk di suatu negara ditentukan oleh pertumbuhan penduduk alami dan migrasi yang disebut dengan pertumbuhan penduduk total. Pertumbuhan penduduk total biasanya disingkat dengan pertumbuhan penduduk. Adapun rumus pertumbuhan penduduk adalah:

$$P = (L - M) + (I - E)$$

P = pertumbuhan penduduk yang dicari
L = jumlah kelahiran
M = jumlah kematian

I = jumlah penduduk yang masuk

E = jumlah penduduk yang keluar

Klasifikasi pertumbuhan penduduk yang digunakan adalah:

a) Pertumbuhan penduduk rendah, jika berada pada kisaran 0 – 1 %
b) Pertumbuhan penduduk sedang, jika berada pada kisaran 1 – 2 %
c) Pertumbuhan penduduk tinggi, jika di atas 2 %

Untuk mengetahui jumlah penduduk Indonesia, perhatikan tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Jumlah Penduduk Indonesia Tahun 2007 Berdasarkan Provinsi
(Data per 30 Januari 2008)

No	Provinsi	Jumlah
1	Bali	3.487.764
2	Bangka Belitung	1.018.255
3	Banten	9.127.923
4	Bengkulu	1.610.361
5	DI Yogyakarta	3.279.701
6	DKI Jakarta	9.111.488
7	Gorontalo	916.488
8	Irian Jaya	566.5638
9	Jambi	2.698.667
10	Jawa Barat	39.130.756
11	Jawa Tengah	32.952.040
12	Jawa Timur	37.076.283
13	Kalimantan Barat	4.078.246
14	Kalimantan Selatan	3.245.705
15	Kalimantan Tengah	1.902.454
16	Kalimantan Timur	2.950.531
17	Kepulauan Riau	4.546.591
18	Lampung	7.161.671
19	Maluku	1.330.676
20	Maluku Utara	912.209
21	Nanggroe Aceh Darussalam	3.899.290
22	Nusa Tenggara Barat	4.161.431

23	Nusa Tenggara Timur	4.174.571
24	Papua	1.841.548
25	Riau	1.198.526
26	Sulawesi Barat	966.535
27	Sulawesi Selatan	7.475.882
28	Sulawesi Tengah	2.324.025
29	Sulawesi Tenggara	1.965.958
30	Sulawesi Utara	566.563
31	Sumatra Barat	4.549.383
32	Sumatra Selatan	6.798.189
33	Sumatra Utara	12.333.974
	Jumlah Total	**220.953.634**

Sumber: www.wikipedia.com dari Departemen Dalam Negeri

Sebagai pembanding, berikut adalah peringkat negara-negara di dunia berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2007:

1. Republik Rakyat Cina (1.306.313.812 jiwa)
2. India (1.103.600.000 jiwa)
3. Amerika Serikat (298.186.698 jiwa)
4. Indonesia (220.953.634 jiwa)
5. Brasil (186.112.794 jiwa)
6. Pakistan (162.419.946 jiwa)
7. Bangladesh (144.319.628 jiwa)
8. Rusia (143.420.309 jiwa)
9. Nigeria (128.771.988 jiwa)
10. Jepang (127.417.244 jiwa)

B. ANGKA KELAHIRAN DAN KEMATIAN PENDUDUK

Kamu sudah mengetahuinya dari pembahasan di atas bahwa kelahiran atau yang biasa disebut dengan natalitas adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Maksudnya masa seorang wanita siap untuk melahirkan keturunan. Natalitas dapat dibedakan menjadi dua sebagai berikut.

1) Angka kelahiran kasar, yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk selama 1 tahun.

$$CBR = \frac{B}{P} \times 1.000$$

CBR (*crude birth rate*) = angka kelahiran kasar
B (*birth*) = jumlah kelahiran
P (*population*) = jumlah penduduk

2) Angka kelahiran khusus, yaitu banyaknya bayi yang lahir hidup setiap 1.000 penduduk wanita usia tertentu (usia subur) selama satu tahun. Usia subur atau usia melahirkan seorang wanita adalah umur antara 15 – 49 tahun.

Setiap tahun angka kelahiran dapat bertambah ataupun berkurang. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong angka kelahiran di antaranya sebagai berikut:

1) kawin usia muda;
2) adanya beberapa anggapan di masyarakat, seperti:
   a) anak sebagai penentu status sosial;
   b) punya banyak anak merasa terpandang di mata masyarakat;
   c) anak sebagai penerus keturunan;
   d) banyak anak banyak rezeki.

Selain faktor pendorong di atas, terdapat pula faktor-faktor penghambat angka kelahiran, di antaranya yaitu:

1) pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB);
2) alasan ekonomi atau pendidikan, orang menunda perkawinan;
3) wanita karier, merasa repot jika mempunyai anak banyak;
4) karena suatu penyakit tertentu yang diderita perempuan, seperti kangker rahim, atau keguguran ketika melahirkan;
5) adanya ketentuan Undang-Undang Pokok Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang menentukan umur minimal kawin seorang laki-laki 19 tahun dan wanita 16 tahun.

Selain kelahiran, hal yang berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan penduduk adalah kematian atau mortalitas. Kematian adalah waktu ketika seseorang diambil nyawanya oleh sang Pencipta sehingga ia tidak dapat melangsungkan kehidupanya di dunia atau meninggalnya seorang penduduk menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk. Kematian dapat dibedakan menjadi sebagai berikut.

1) Angka kelahiran kasar adalah banyaknya orang yang mati setiap 1.000 penduduk per tahun.

$$\text{CDR} = \frac{D}{P} \times 1.000$$

CDR (*crude death rate*) = angka kematian kasar
D (*death*) = jumlah kematian
P (*population*) = jumlah penduduk

2) Angka kematian khusus adalah banyaknya orang yang mati setiap 1.000 penduduk usia tertentu per tahun.

Sama halnya seperti angka kelahiran, angka kematian dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1) Faktor-faktor penunjang kematian:
   a) adanya bencana alam dan wabah penyakit;
   b) fasilitas kesehatan yang kurang;
   c) tingkat kesehatan masyarakat yang rendah;
   d) makanan kurang bergizi;
   e) kecelakaan lalu lintas;
   f) adanya peperangan.
2) Faktor-faktor penghambat kematian:
   a) fasilitas kesehatan yang lengkap;
   b) kemajuan pendidikan dan kesadaran masyarakat terhadap kesehatan;
   c) larangan agama membunuh orang;
   d) makanan cukup bergizi;
   e) lingkungan yang bersih dan teratur.

C. LEDAKAN PENDUDUK DAN UPAYA MENGATASINYA

Tahukah kamu apa artinya ledakan penduduk? Bagaimana ledakan penduduk di perkotaan dengan di pedesaan? Ledakan penduduk dapat diartikan suatu keadaan kependudukan yang memperlihatkan pertumbuhan yang melonjak cepat dalam jangka waktu yang relatif pendek. Ledakan penduduk biasanya terjadi karena angka kelahiran sangat tinggi, sedangkan angka kematian mengalami penurunan yang drastis.

Penurunan angka kematian yang drastis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain karena membaiknya kondisi kesehatan dan perbaikan gizi masyarakat. Pada umumnya, ledakan penduduk terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang, termasuk di

Indonesia. Pertambahan penduduk Indonesia dalam kurun waktu hanya 40 tahun meningkat lebih dari 100%. Pada tahun 1961, jumlah penduduk Indonesia hanya 97.985.000 jiwa, tetapi pada tahun 2000 telah meningkat menjadi 203.456.000 jiwa.

Ledakan penduduk sebagai akibat pertumbuhaan penduduk yang cepat seperti itu memberikan dampak yang buruk bagi kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Beberapa dampak negatif yang timbul sebagai akibat terjadinva ledakan penduduk di antaranya sebagai berikut.

1) Tingkat kemiskinan semakin meningkat karena pertumbuhan penduduk yang cepat biasanya tidak serta merta diikuti oleh pertumbuhan ekonomi yang cepat.
2) Pertumbuhan penduduk yang cepat tidak seimbang dengan peningkatan produksi pangan dapat mendorong kekurangan pangan.
3) Timbulnya permukiman atau daerah kumuh di perkotaan sebagai akibat mahalnya harga tanah dan rumah.
4) Pemerintah mengalami kesulitan menyediakan sarana kebutuhan masyarakat seperti sarana pendidikan dan kesehatan, perumaham, dan lain-lain disebabkan memerlukan dana yang besar dan lokasinya padat oleh permukiman penduduk.

Jika dampak dari ledakan penduduk tidak segera diatasi, dapat mengakibatkan suatu negara mengalami kesulitan dalam mempercepat proses pembangunannya. Terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi dampak ledakan penduduk, di antaranya:

1) melaksanakan program Keluarga Berencana (KB), yaitu mengendalikan pertumbuhan penduduk melalui cara pengendalian kelahiran;
2) menggalakan program transmigrasi;
3) meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga kemampuannya bekerja untuk membangun dirinya menjadi lebih baik;
4) memperluas lapangan kerja;
5) pengiriman tenaga kerja ke negara tetangga.

D. KEPADATAN PENDUDUK

Tahukah kamu apa artinya kepadatan penduduk? Bagaimana kepadatan penduduk di Indonesia? Mengapa orang berbondong-bondong pergi ke Jakarta sehingga penduduk Jakarta sangat padat, sedangkan daerah di Irian Jaya masih banyak yang kosong? Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas. Tingkat kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris.

1. Kepadatan Penduduk Aritmatik

Kepadatan penduduk aritmatik adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km^2. Kepadatan penduduk aritmatik ini sering kali hanya disebut kepadatan penduduk. Rumus untuk menghitung kepadatan penduduk aritmatik adalah:

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas wilayah (km}^2\text{)}}$$

Contoh:

Jika diketahui hasil survei penduduk Provinsi X tahun 2006 sebesar Rp12.457.777 jiwa dan luas wilayahnya sebesar 81.860 km^2. Jadi, kepadatan penduduk provinsi tersebut adalah:

$$\text{Kepadatan penduduk} = \frac{12.457.777}{81.860}$$

$$= 152.18 \text{ (dibulatkan menjadi 152)}$$

Angka 152 menunjukkan bahwa setiap 1 km^2 wilayah Provinsi X ditempati oleh 152 jiwa penduduk.

2. Kepadatan Penduduk Agraris

Kepadatan penduduk agraris adalah jumlah penduduk rata-rata yang menempati wilayah seluas 1 km^2, yang tanahnya dapat diolah untuk pertanian. Kepadatan penduduk ini biasa disebut juga dengan kepadatan penduduk netto. Adapun rumus untuk menghitungnya adalah:

$$\text{Kepadatan penduduk agraris} = \frac{\text{Jumlah penduduk (jiwa)}}{\text{Luas tanah pertanian (km}^2\text{)}}$$

Tingkat kepadatan penduduk di setiap daerah senantiasa tidak merata karena memang pada lahan-lahan tertentu seperti lahan curam puncak-puncak gunung yang tinggi, daerah rawa dan daerah gurun pasir kurang cocok untuk dijadikan tempat tinggal. Adapun daerah yang akses ke berbagai pusat perbelanjaan, industri, atau yang tanahnya subur biasanya tingkat kepadatan penduduknya relatif tinggi.

Untuk mengetahui tingkat kepadatan penduduk di Indonesia, perhatikan tabel di bawah ini yang menggambarkan tingkat kepadatan penduduk menurut provinsi.

Daerah di Indonesia yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi adalah Pulau Jawa. Adapun yang terendah adalah daerah Papua (Irian Jaya). Terdapat beberapa faktor yang memengaruhi tingkat kepadatan penduduk suatu daerah sebagai berikut:

a) tingkat kesuburan tanah;
b) bentuk lahan;
c) iklim yang baik;
d) pusat pemerintahan;
e) pusat kegiatan ekonomi dan industri;
f) ketersediaan prasarana jalan;
g) ketersediaan pusat pendidikan.

Kepadatan penduduk yang kurang merata menimbulkan beberapa dampak negatif bagi kehidupan, baik bagi daerah yang terlalu padat maupun yang kurang. Sebagai contoh bagi daerah yang kepadatan penduduknya tinggi seperti DKI Jakarta menimbulkan kemacetan di jalan raya setiap harinya sehingga menghambat produktivitas kerja penduduknya.

Berikut merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk.

a) Menggalakan program transmigrasi penduduk dari daerah padat ke daerah yang masih kurang penduduknya.
b) Penyebaran pendirian pusat-pusat industri dan perdagangan ke berbagai daerah sehingga penduduk tidak memusat hanya di suatu daerah.
c) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya seperti pembangunan jalan raya dan fasilitas pendidikan.
d) Pemanfaatan Iptek untuk mengolah daerah-daerah yang tanahnya tidak subur dan gersang menjadi daerah yang subur dan nyaman untuk digunakan sebagai tempat tinggal.
e) Membuat peraturan pemerintah yang mengatur tentang imigrasi dan emigrasi.

E. PIRAMIDA DAN KOMPOSISI PENDUDUK

Piramida penduduk adalah diagram batang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur yang disusun horizontal. Berdasarkan bentuknya, piramida penduduk dibedakan sebagai berikut.

1) Piramida penduduk bentuk kerucut atau limas. Bentuk piramida ini menggambarkan pertumbuhan penduduk yang cepat karena terjadi penurunan tingkat kelahiran bayi dan anak-anak, tetapi tingkat fertilitas masih tinggi.
2) Piramida penduduk bentuk pucuk granat. Bentuk piramida ini menggambarkan angka kelahiran dan tingkat kelahiran yang rendah.

3) Piramida penduduk bentuk kepala nisan. Bentuk piramida ini menggambarkan tingkat kelahiran mengalami penurunan yang tajam dan tingkat kematian yang sangat rendah.

Piramida penduduk dapat dibedakan pula atas tiga macam, yaitu e*kspansif, konstruktif,* dan *stasioner*. Piramida ekspansif adalah piramida yang terjadi apabila sebagian besar penduduk berada pada kelompok usia muda. Adapun piramida konstruktif adalah piramida yang terjadi apabila kelompok usia muda jumlahnya sedikit, sedangkan piramida stasioner adalah piramida yang terjadi apabila banyaknya penduduk dalam setiap kelompok usia relatif sama.

Adapun yang dimaksud dengan komposisi penduduk adalah susunan atau tata susun penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu. Komposisi penduduk dapat dikaji dengan tujuan sebagai berikut.

1) Setiap penduduk memiliki usia dan jenis kelamin yang berbeda sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang berbeda pula.
2) Menata sarana dan prasarana kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa sesuai dengan perkembangan penduduk.
3) Mengendalikan dan memantau pemanfaatan sumber daya alam agar dapat hidup berkelanjutan.

Komposisi penduduk berdasarkan umur produktif dapat digunakan untuk menghitung angka ketergantungan (*dependency ratio*). Cara untuk menghitung angka ketergantungan adalah:

$$\textit{Dependency ratio} = \frac{\text{Jumlah penduduk usia nonproduktif}}{\text{Jumlah penduduk usia produktif}} \times 100\%$$

Contoh soal:

Indonesia pada tahun 1990 memiliki jumlah penduduk 179.300.000 jiwa. Setelah dibuat tabel berdasarkan umur produktif yang tergolong umur antara 0 – 15 tahun sebesar 65.531.780 jiwa, sedangkan yang tergolong umur lebih dari 65 tahun sebesar 6.230.435 jiwa. Hitunglah berapa indeks *dependency ratio*-nya.

Penyeleseian:

Diketahui: Jumlah penduduk keseluruhan = 179.300.000 jiwa
Jumlah penduduk nonproduktif = 65.531.780 jiwa + 6.230.435 jiwa
= 71.762.215 jiwa

Ditanya: Berapa indeks *dependency ratio*-nya?

Jawab:

Jumlah penduduk produktif = 179.300.000 jiwa – 71.762.215 jiwa
= 107.537.785 jiwa

$$\textit{Dependency ratio} = \frac{71.762.215}{107.537.785} \times 100\% = 66,73$$

Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin, dapat digunakan untuk menghitung *sex ratio*. *Sex ratio,* yaitu perbandingan jumlah perempuan dan laki-laki dalam jumlah penduduk tertentu (setiap 100 perempuan).

$$\textit{Sex Ratio} = \frac{\text{Jumlah penduduk laki-laki}}{\text{Jumlah penduduk perempuan}} \times 100\%$$

Contoh soal:

Indonesia pada tahun 1990 memiliki jumlah penduduk 179.300.000 jiwa. Setelah dibuat tabel berdasarkan jenis kelamin, yang tergolong laki-laki sebesar 89.256.467 jiwa, sedangkan yang tergolong perempuan sebesar 90.043.528 jiwa. Hitunglah *sex ratio*-nya.

Penyelesaian:

Diketahui: Jumlah penduduk keseluruhan = 179.300.000 jiwa
Jumlah penduduk laki-laki = 89.256.467 jiwa
Jumlah penduduk perempuan = 90.043.528 jiwa

Ditanyakan: Berapa *sex ratio*-nya?

Jawab:

$$\text{Sex ratio} = \frac{89.256.467}{90.043.523} \times 100\%$$
$$= 99,13$$

Berdasarkan perhitungan tersebut, berarti di Indonesia pada tahun 1990 setiap ada 100 perempuan terdapat 99 laki-laki.

F. USIA HARAPAN HIDUP PENDUDUK

Usia harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu. Berdasarkan serangkaian *Age Specific*

Rate atau rata-rata umur spesifik dari kematian, besar kecilnya usia harapan hidup suatu generasi sangat dipengaruhi oleh banyaknya penduduk yang mampu melewati umur tertentu, dan banyaknya penduduk yang dilahirkan hidup dari suatu generasi sampai mencapai umur tertentu.

Harapan hidup berbeda dengan lama hidup. Lama hidup atau panjang hidup, yaitu jumlah tahun maksimum penduduk untuk dapat hidup. Berbeda dengan harapan hidup, lama hidup antara penduduk suatu negara atau daerah dengan daerah lainnya tidak terlalu berbeda karena umur manusia ada batas maksimumnya.

Usia harapan hidup ditentukan oleh besarnya angka jumlah kematian bayi. Jika kematian bayi jumlahnya besar, usia harapan hidup akan rendah. Oleh karenanya, biasanya di negara-negara maju harapan hidupnya tinggi karena pada umumnya tingkat kesehatan ibu dan bayinya tinggi. Sebaliknya, di negara berkembang biasanya relatif rendah karena buruknya tingkat kesehatan.

Cara untuk menentukan usia harapan hidup adalah dengan menunjukkan dan merata-ratakan semua umur dari seluruh kematian pada waktu tertentu. Contohnya jika di suatu daerah diketahui bahwa terdapat 50 orang yang meninggal, umur masing-masing yang meninggal berbeda-beda, ada yang 2 tahun, ada yang 40 tahun, bahkan ada yang 95 tahun. Umur masing-masing yang meninggal dijumlahkan semuanya dan kemudian dibagi dengan jumlah orang yang meninggal pada tahun itu, yaitu sebanyak 50 orang. Misalnya, ketika dijumlahkan semua umur orang yang meninggal diperoleh sebesar 2.500, maka usia harapan hidup dapat dihitung sebagai berikut:

$$\text{Usia harapan hidup} = \frac{2.500}{50} = 50 \text{ tahun}$$

G. INFORMASI KEPENDUDUKAN DI PETA, TABEL, DAN GRAFIK

Seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, informasi kependudukan dapat disajikan dalam bentuk peta, tabel dan grafik. Bahkan, bentuk-bentuk tersebut dapat disajikan dalam format digital sehingga tampak lebih menarik dan membantu memudahkan dalam memahaminya. Peta yang menyajikan informasi tentang kependudukan disebut peta tematik.

H. MOBILITAS PENDUDUK

1. Pengertian, Jenis, dan Faktor-Faktor Migrasi

Tahukah kamu apa artinya migrasi? Mengapa orang melakukan migrasi? Bagaimana dampak dari migrasi itu sendiri? Mobilitas penduduk dapat diartikan sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lain. Lengkapnya, *migrasi* adalah perpindahan penduduk dari suatu tempat ke tempat lain di lokasi geografis yang berbeda dengan tujuan menetap. Setiap terjadi migrasi mengakibatkan terjadinya perubahan tempat tinggal dari suatu lokasi geografis tertentu ke lokasi geografis lainnya.

Migrasi tidak hanya bermakna perpindahan penduduk dari suatu negara ke negara lain, tetapi perpindahan dalam suatu negara pun dimaknai migrasi. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan berikut ini yang akan menguraikan tentang jenis-jenis migrasi.

Berdasarkan ruang gerak atau jangkauannya, migrasi dapat dibagi atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

a) **Migrasi internasional** yaitu perpindahan penduduk antara satu negara dan negara lainnya. Migrasi internasional dapat dibedakan atas tiga macam yaitu sebagai berikut.
   1) *Imigrasi* yaitu masuknya penduduk dari negara lain ke dalam suatu negara. Orang-orang yang melakukan imigrasi disebut imigran. Contohnya, orang-orang Thailand, Hong Kong, dan Malaysia yang datang ke Indonesia untuk bekerja.
   2) *Emigrasi,* yaitu perpindahan penduduk dari dalam satu negara ke negara lain. Contohnya, penduduk Indonesia yang pergi ke Timur Tengah untuk bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI).
   3) *Remigrasi* atau *repatriasi* yaitu perpindahan penduduk dari suatu negara kembali ke negaranya sendiri. Remigrasi sering juga disebut kembali ke tanah air. Contohnya, penduduk Indonesia yang bekerja di Timur Tengah, ataupun mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang melanjutkan pendidikan di Mesir kembali ke tanah air.

b) **Migrasi Nasional** yaitu perpindahan penduduk di dalam satu negara. Migrasi nasional terdiri atas beberapa jenis, yaitu sebagai berikut.
   1) *Urbanisasi* yaitu perpindahan penduduk dari desa ke kota dengan tujuan menetap. Terjadinya urbanisasi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:
      (a) ingin mencari pekerjaan karena di kota lebih banyak lapangan kerja;
      (b) ingin melanjutkan pendidikan karena di kota banyak sekolah jenjang tinggi;
      (c) ingin mencari pengalaman baru di kota;
      (d) ingin mendapatkan lebih banyak hiburan, fasilitas untuk hiburan di kota relatif lebih banyak daripada di desa.
   2) *Transmigrasi* yaitu perpidahan penduduk dari salah satu pulau untuk menetap di pulau lain dalam wilayah negara Republik Indonesia untuk kepentingan pembangunan negara atau alasan-alasan yang dipandang perlu oleh pemerintah.

Transmigrasi pertama kali dilakukan di Indonesia pada tahun 1905 oleh pemerintah Belanda dari daerah Kedu ke daerah Lampung sebanyak 155 keluarga.

Adanya program transmigrasi ditujukan untuk hal-hal sebagai berikut:

(a) pemerataan persebaran penduduk;
(b) peningkatan taraf hidup para transmigran di daerah transmigrasi;
(c) pengolahan sumber daya alam yang selama ini belum tersentuh di daerah baru;
(d) penyediaan lapangan kerja bagi transmigran di daerah transmigrasi;
(e) pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia;
(f) peningkatan kesatuan dan persatuan bangsa;
(g) peningkatan pertahanan dan keamanan nasional.

Berdasarkan pelaksanaannya, transmigrasi di Indonesia dapat dibedakan berikut ini.

(a) *Transmigrasi umum* yaitu transmigrasi yang dilaksanakan dan dibiayai oleh pemerintah.
(b) *Transmigrasi khusus* yaitu transmigrasi yang dilaksanakan oleh pemerintah yang sifatnya khusus dengan tujuan tertentu. Misalnya, transmigrasi yang dilakukan pada penduduk yang terkena bencana alam.
(c) *Transmigrasi spontan atau swakarya* yaitu transmigrasi yang dilakukan oleh penduduk atas kemauan dan biaya sendiri dengan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah berupa lahan garapan seluas dua hektar dan lain-lain.
(d) *Transmigrasi swakarya* yaitu transmigrasi yang sebagian biayanya ditanggung oleh pemerintah, sedangkan untuk pembukaan lahan ditanggung oleh transmigran.
(e) *Transmigrasi lokal* yaitu transmigrasi yang terjadi dari satu daerah ke daerah lainnya di dalam satu provinsi.
(f) *Transmigrasi bedol desa* yaitu perpindahan penduduk meliputi seluruh penduduk desa beserta kepala desa dan perangkat-perangkatnya ke daerah lain.
(g) *Transmigrasi sektoral* yaitu perpindahan penduduk yang biayanya ditanggung bersama oleh pemerintah daerah tujuan transmigrasi.

3) *Ruralisasi* yaitu perpindahan penduduk dari kota ke desa dengan tujuan menetap. Ruralisasi merupakan kebalikan dari urbanisasi. Hal tersebut dapat terjadi disebabkan:

(a) adanya kerinduan untuk kembali ke desa asal;
(b) pekerjaan di kota sudah selesai sehingga kembali ke desa;
(c) merasa sudah bosan di kota dan ingin tenang hidup di desa;
(d) ingin mengabdi pada desa dan sebagainya.

4) **Migrasi musiman** yaitu perpindahan penduduk yang terjadi pada musim-musim tertentu. Contohnya, pada musim panen di suatu daerah, banyak penduduk daerah lain yang datang untuk membantu dalam proses panen tersebut.
5) **Migrasi sirkuler** yaitu perpindahan penduduk sementara karena mendekati tempat pekerjaan. Contohnya, seorang penduduk Cianjur yang bekerja di Bandung dan tinggal sementara di Bandung. Akan tetapi, pada waktu-waktu tertentu secara teratur pulang ke tempat tinggalnya di Cianjur karena semua keluarganya tinggal di Cianjur.

Adapun tentang alasan seseorang melakukan migrasi tentunya beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Secara umum, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya migrasi sebagai berikut.

a) Faktor ekonomi yaitu ingin memperoleh kesejahteraan yang lebih baik di tempat yang baru.
b) Faktor pendidikan yaitu migrasi yang terjadi karena ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Lokasi perguruan tinggi biasanya terpusat di suatu wilayah tertentu, khususnya perkotaan.
c) Faktor pekerjaan yaitu migrasi yang terjadi karena penugasan yang diberikan oleh pemimpin tempatnya bekerja.
d) Faktor keselamatan yaitu daerah yang sering dilanda bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan bencana-bencana alam lainnya. Hal itu menyebabkan banyak penduduk di tempat tersebut yang bermigrasi ke tempat lain yang bebas dari gangguan bencana alam.
e) Faktor keamanan yaitu migrasi yang terjadi akibat adanya gangguan keamanan di tempat mereka sebelumnya.
f) Faktor politik yaitu migrasi yang terjadi karena adanya perbedaan politik di antara warga masyarakat.
g) Faktor agama yaitu migrasi yang terjadi karena perbedaan agama sehingga sebagian penduduk merasa kurang bebas menjalankan ajaran agamanya.
h) Faktor sosial, yaitu migrasi yang terjadi karena adanya tekanan-tekanan sosial dari masyarakat terhadap seseorang sehingga ia berimigrasi.
i) Faktor kepentingan pembangunan yaitu migrasi yang terjadi karena suatu daerah permukiman penduduk terkena proyek pembangunan seperti pembuatan jalan tol Cipularang.

2. Dampak Positif dan Dampak Negatif Migrasi dan Usaha Penanggulangannya

Melalui pembahasan sebelumnya, kamu sudah mengetahui bahwa migrasi terdiri atas migrasi internasional dan migrasi nasional. Masing-masing migrasi ini memiliki dampak yang berbeda sehingga pembahasan tentang dampak migrasi akan diuraikan berdasarkan dua jenis migrasi tersebut.

a. Dampak positif migrasi internasional

1) Dampak positif imigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Migrasi mendorong terjadinya proses alih teknologi dari tenaga asing kepada tenaga kerja Indonesia.
   b) Kedatangan orang-orang asing ke Indonesia mempercepat proses pembangunan, dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar.
   c) Imigrasi dari negara-negara asing, terutama dari negara maju yang bertujuan untuk bekerja di Indonesia. Biasanya, tenaga ahli yang mempunyai keterampilan *(skill)* yang baik. Hal ini dapat membantu kekurangan tenaga ahli di Indonesia.
   d) Dapat menambah rasa persahabatan dan kebersamaan antarbangsa. Adanya orang-orang asing yang tinggal di Indonesia akan memudahkan kita untuk bergaul dan mengenal mereka secara langsung sehingga timbul suatu rasa kebersamaan dengan mereka.
2) Dampak positif emigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Meningkatkan persediaan devisa negara berupa mata uang asing yang diperoleh dari orang Indonesia yang kerja di luar negeri (TKI).
   b) Mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap tenaga-tenaga ahli dari luar negeri. Dengan banyaknya orang Indonesia yang belajar di luar negeri menjadikan investasi sumber daya manusia yang bermutu di kemudian hari.
   c) Dapat menjadi duta bangsa untuk memperkenalkan Indonesia di negara lain.

b. Dampak positif migrasi nasional

Terdapat beberapa dampak positif dari migrasi nasional, di antaranya sebagai berikut.

1) Dampak positif transmigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Lahan-lahan yang kosong dapat dimanfaatkan.
   b) Penduduk yang ditransmigrasikan kehidupannya dapat lebih baik secara ekonomi.
   c) Meningkatnya produksi, terutama di bidang pertanian.
   d) Dapat mempercepat pemerataan penduduk.
   e) Mengurangi jumlah pengangguran, terutama bagi mereka yang ditransmigrasikan.
2) Dampak positif urbanisasi adalah sebagai berikut.
   a) Dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja di kota.
   b) Banyak di antara penduduk desa yang telah berurbanisasi ke kota tergolong orang yang berhasil.
   c) Membawa dampak positif bagi pembangunan desa.
   d) Meningkatkan taraf hidup keluarga yang ditinggalkan di desa.
   e) Dinamika kehidupan kota bertambah ramai seperti kegiatan perdagangan.
   f) Kesempatan membuka usaha-usaha baru semakin luas.

3) Dampak positif ruralisasi adalah sebagai berikut.
   a) Menjadi pendorong pembaruan di desa, terlebih jika yang pindah adalah penduduk yang berpendidikan.
   b) Membantu kekurangan tenaga terampil di desa.
   c) Mendorong kemajuan perekonomian di desa.

c. Dampak negatif migrasi internasional

Selain memberikan banyak dampak positif bagi kehidupan masyarakat, migrasi juga dapat menimbulkan dampak negatif yang kurang baik. Dampak negatif yang ditimbulkan migrasi internasional berbeda dengan dampak negatif migrasi nasional.

1) Dampak negatif imigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Orang-orang yang melakukan imigrasi adakalanya di antara mereka terdapat orang-orang yang bertujuan tidak baik, seperti pengedar narkoba, bertujuan politik, memata-matai, dan sebagainya.
   b) Imigran asing yang datang untuk bekerja kadang-kadang dapat menimbulkan kecemburuan sosial antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja dalam negeri.
   c) Berkembangnya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya bangsa. Apabila filter dari masyarakat rendah, dapat merusak budaya kita.
2) Dampak negatif emigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Tenaga-tenaga terampil dalam negeri lebih memilih tinggal di luar negeri, apabila kehidupan di luar negeri lebih baik.
   b) Jika emigran-emigran dari Indonesia ke luar negeri merupakan tenaga-tenaga ahli/terampil, akan mengurangi tenaga ahli yang ada di dalam negeri.
   c) Oknum emigran-emigran dari Indonesia yang melakukan tindakan-tindakan yang dilarang di negara lain, dapat memperburuk citra Indonesia di luar negeri.

d. Dampak negatif migrasi nasional

Migrasi nasional yang banyak terjadi di Indonesia terutama transmigrasi dan urbanisasi.

1) Dampak negatif transmigrasi adalah sebagai berikut.
   a) Transmigrasi memerlukan dana yang cukup besar sehingga banyak menghabiskan keuangan negara.
   b) Terkadang mendorong kecemburuan sosial antara masyarakat setempat dan para transmigran.
   c) Adanya transmigran yang kurang sungguh-sungguh dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan transmigrasi sehingga dana yang dikeluarkan menjadi sia-sia.
   d) Beberapa orang dari transmigran tidak betah di tempat tinggal yang baru dan kembali lagi ke tempat asalnya. Hal ini menyebabkan citra transmigrasi menjadi kurang baik.

Dalam mengatasi dampak negatif dari transmigrasi, dapat dilakukan beberapa upaya, di antaranya sebagai berikut.

a) Dalam rangka mengurangi biaya yang dikeluarkan pemerintah, jenis proyek transmigrasi dapat lebih diutamakan transmigrasi spontan atau swakarsa.
b) Dilakukan proses seleksi yang lebih baik kepada calon-calon transmigran sehingga orang-orang yang ditransmigrasikan benar-benar telah siap mental maupun fisik.
c) Menyiapkan lahan yang baik dan siap untuk ditempati.
d) Dilakukan kerja sama dengan masyarakat setempat di daerah dekat transmigrasi, seperti diadakan pelatihan bersama dan bantuan berupa fasilitas yang hampir sama dengan yang diberikan kepada para transmigran.

2) Dampak negatif urbanisasi

Urbanisasi yang terus-menerus berlangsung dapat menyebabkan jumlah penduduk kota meningkat dengan cepat sehingga terjadilah ledakan penduduk di perkotaan dan sebaliknya persentase penduduk desa terus mengalami penurunan.

Pertumbuhan jumlah penduduk kota yang sebagian berasal dari urbanisasi, telah menimbulkan berbagai masalah yang merupakan dampak negatif dari urbanisasi antara lain sebagai berikut.

a) Terhadap desa:
   (1) Produktivitas desa menjadi rendah karena penduduk yang tinggal di desa kebanyakan orang-orang tua. Para pemudanya biasanya lebih senang tinggal di kota.
   (2) Tenaga terampil di desa berkurang dengan berpindahnya tenaga berpendidikan dan terampil ke kota.
   (3) Umumnya orang-orang desa yang berurbanisasi ke kota yang melanjutkan pendidikan enggan kembali sehingga desa kekurangan tenaga terdidik.
b) Terhadap kota:
   (1) Mendorong terjadinya kemacetan lalu lintas.
   (2) Mendorong meningkatnya harga lahan di kota sehingga sulit dijangkau oleh masyarakat kecil.
   (3) Banyaknya yang tinggal di kota menyebabkan persediaan tenaga kerja lebih besar daripada kesempatan kerja sehingga terjadilah pengangguran.
   (4) Banyaknya pengangguran dapat mendorong meningkatnya kriminalitas.
   (5) Padatnya penduduk di kota menyebabkan timbulnya permukiman-permukiman kumuh.

Beberapa dampak negatif di atas tentunya perlu diatasi dengan sebaik-baiknya sehingga tidak menimbulkan akibat yang lebih parah, baik bagi kehidupan di perkotaan maupun di pedesan. Di antara upaya yang dapat dilakukan di antaranya adalah:

a) Pemerataan pembangunan ke daerah-daerah sehingga penduduk tidak selalu terdorong untuk pindah ke kota.
b) Pengembangan perekonomian desa sehingga kesempatan kerja dan sumber-sumber keuangan tersedia pula di desa.
c) Pembangunan sarana dan prasarana umum seperti jalan raya, listrik, telepon dan sebagainya di pedesaan sehingga hubungan antara desa dan kota menjadi lancar.
d) Pembangunan sarana pendidikan yang memadai sehingga orang desa tidak harus selalu pergi ke kota untuk melanjutkan pendidikannya.
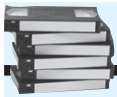
RANGKUMAN

1. Penduduk menurut UUD 1945 Bab X Pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
2. Perubahan jumlah penduduk di suatu daerah dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi.
3. Fertilitas (kelahiran) adalah tingkat kelahiran hidup dari seorang wanita selama masa reproduksinya. Maksudnya, masa seorang wanita siap untuk melahirkan keturunan.
4. Mortalitas (kematian) adalah meninggalnya seorang penduduk menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk.
5. Migrasi adalah berpindahnya seorang penduduk dari suatu tempat ke tempat lain yang menyebabkan berkurang atau bertambahnya jumlah penduduk.
6. Bentuk migrasi di antaranya, imigrasi (pindahnya penduduk ke negara lain), emigrasi (masuknya penduduk dari negara lain), transmigrasi (pindahnya penduduk ke pulau lain dalam suatu negara), dan urbanisasi (pindahnya penduduk dari desa ke kota).
7. Kepadatan penduduk adalah jumlah penduduk di suatu wilayah per satuan luas. Tingkat kepadatan penduduk dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepadatan penduduk aritmatik dan kepadatan penduduk agraris.
8. Piramida penduduk adalah diagram batang komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin dan umur yang disusun horizontal.
9. Komposisi penduduk adalah susunan atau tata susun penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu.
10. Usia harapan hidup dapat diartikan pula dengan banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai umur tertentu.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang menurut kamu paling benar!

1. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Definisi tersebut diungkapkan dalam UUD 1945 ....
   a. Pasal 26
   b. Pasal 27
   c. Pasal 28
   d. Pasal 19
2. Keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu disebut ....
   a. survei penduduk
   b. sensus penduduk
   c. pendataan penduduk
   d. statistik penduduk
3. Berikut ini *bukan* termasuk faktor utama yang secara langsung berpengaruh terhadap jumlah penduduk adalah ....
   a. migrasi
   b. kelahiran
   c. kematian
   d. sensus penduduk
4. Meninggalnya seorang penduduk menyebabkan berkurangnya jumlah penduduk disebut ....
   a. mortalitas
   b. natalitas
   c. fertilitas
   d. nuptialitas

5. Susunan atau tata susun penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu disebut ....
   a. piramida penduduk
   b. ledakan penduduk
   c. sensus penduduk
   d. komposisi penduduk
6. Kepadatan penduduk aritmatik ditentukan oleh perbandingan antara jumlah penduduk dan ....
   a. penyebaran penduduk
   b. luas wilayah
   c. pertumbuhan penduduk
   d. kelahiran dan kematian
7. Besarnya angka harapan hidup dipengaruhi oleh ....
   a. umur maksimum yang mungkin dicapai
   b. jumlah kematian bayi
   c. jumlah penduduk usia tua menurun
   d. pertumbuhan penduduk menurun
8. Pelaksanaan transmigrasi yang biayanya ditanggung bersama oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah tujuan transmigrasi disebut ....
   a. sektoral
   b. khusus
   c. swakarsa
   d. swakarya
9. Berikut yang *bukan* merupakan tujuan transmigrasi adalah ....
   b. meningkatkan produksi pangan
   c. menciptakan manusia Indonesia seutuhnya
   d. meningkatkan taraf hidup penduduk
   e. menciptakan lapangan kerja
10. Dampak positif dari urbanisasi antara lain ....
    a. membuat kota semakin ramai
    b. jumlah penduduk desa semakin berkurang
    c. mengurangi pengangguran di desa
    d. memperlancar hubungan desa dengan kota

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan penduduk!
2. Sebutkan faktor-faktor yang dapat menghambat kelahiran!
3. Jelaskan perbedaan kepadatan penduduk aritmatik dan agraris!
4. Jelaskan dampak positif dari adanya program transmigrasi!
5. Jelaskan pendapatmu tentang ungkapan "banyak anak banyak rejeki" !

TUGAS

Berkunjunglah ke kelurahan atau kantor kepala desa tempat kamu tinggal. Mintalah informasi tentang jumlah penduduk. Kemudian, kelompokan antara berdasarkan jenis kelamin, kategori penduduk asli atau pendatang, rata-rata usia dan tingkat pendidikan. Kemudian, buatlah grafik dari masing-masing pengelompokan tersebut dengan menggunakan komputer. Laporkan kepada gurumu yang mengajar mata pelajaran IPS!

Bab III

LINGKUNGAN HIDUP DAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

Standar Kompetensi

Memahami permasalahan sosial berkaitan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.

Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan permasalahan lingkungan hidup dan upaya penanggulangannya dalam pembangunan berkelanjutan.
2. Mendeskripsikan permasalahan kependudukan dan dampaknya terhadap pembangunan.

Kamu pasti pernah mendengar berita dari televisi tentang kasus pencurian kayu dari hutan Indonesia yang merugikan negara sangat besar, ataupun peristiwa kebakaran hutan di Kalimantan. Peristiwa-peristiwa tersebut berkaitan dengan kerusakan lingkungan hidup.

Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk mengetahui lebih jauh, dalam bab ini akan diuraikan tentang lingkungan hidup dan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kebakaran Hutan.
Sumber: www.google.com

PETA KONSEP
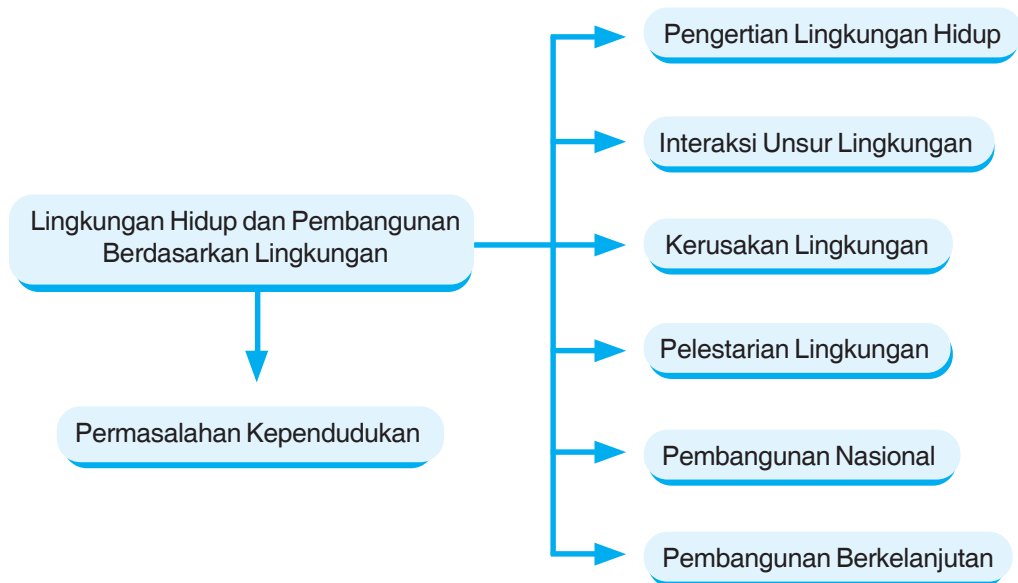
Kata Kunci

- Lingkungan hidup
- Kerusakan lingkungan
- Pelestarian lingkungan
- Pembangunan nasional
- Pembangunan berkelanjutan

A. PENGERTIAN LINGKUNGAN HIDUP

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, Bab 1 Pasal 1 merumuskan bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Dengan penjelasan itu bahwa lingkungan hidup merupakan satu kesatuan yang membentuk suatu wilayah yang disebut dengan *ekosistem*. Di dalamnya meliputi lingkungan alam hayati, nonhayati, dan lingkungan buatan serta lingkungan sosial. Ilmu yang mempelajari tentang lingkungan adalah *ekologi*.

Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan.

1. Lingkungan Hidup Alamiah

Lingkungan hidup alamiah adalah suatu sistem yang amat dinamis yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, keadaan, makhluk hidup, dan komponen-komponen abiotik lainnya, tanpa adanya dominasi campur tangan manusia. Interaksi yang terjadi di dalam lingkungan alamiah dan sekitarnya membentuk suatu ekosistem. Salah satu contoh lingkungan hidup alamiah, yaitu hutan primer.

Gambar 3.1 *Kebun teh.*
Sumber: Indonesia Indah 1

Dalam lingkungan alamiah ini terjadi interaksi antarkomponen lingkungan, pertukaran energi dan materi, dan pergantian komunitas tumbuhan dan hewan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan yang ditimbulkan oleh peristiwa alam, seperti gempa, kebakaran hutan, banjir, dan pergantian iklim. Pergantian alamiah dalam lingkunan hidup alamiah dapat terjadi berkali-kali, namun akhirnya selalu membentuk komunitas yang stabil. Sebaliknya, pergantian dalam hutan primer yang terjadi akibat kegiatan manusia, seperti penebangan hutan, perladangan berpindah, pertambangan, pembukaan hutan untuk pertanian, dan perkebunan menyebabkan lingkungan hidup alamiah menjadi lingkungan hidup binaan.

2. Lingkungan Hidup Buatan atau Binaan

Lingkungan hidup binaan adalah lingkungan hidup alamiah yang sudah didominasi oleh kehadiran manusia. Lingkungan hidup binaan ini dapat terbentuk karena kebutuhan hidup manusia dengan jumlah penduduk yang makin meningkat memaksa manusia mengubah lingkungan hidup alamiah. Dalam proses membentuk lingkungan hidup binaan ini, manusia menghasilkan limbah. Oleh karena itu, lingkungan hidup binaan selalu ditandai oleh timbulnya limbah yang membawa dampak bagi kehidupan manusia, baik dampak fisik, hayati, sosial maupun dampak yang terasa langsung oleh manusia itu sendiri.

B. INTERAKSI UNSUR-UNSUR LINGKUNGAN

Manusia hidup di muka bumi ini berkembang dan berinteraksi dengan lingkungan. Kehidupannya dimulai dari yang paling sederhana, yaitu merupakan bagian dari lingkungan, kemudian mulai manusia melepaskan diri dari lingkungan dengan jalan mengolah lingkungan, sampai berusaha membina lingkungan. Manusia bagian dari lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidupnya terutama bahan makanan, hanya terbatas pada segala sesuatu yang terdapat di dalam lingkungan, sehingga tidak ada usaha untuk memproduksi bahan makanan yang dibutuhkan. Sejalan dengan pertumbuhan manusia yang terus bertambah, lingkungan semakin terbatas dalam menyediakan bahan yang dibutuhkannya. Apalagi, di antara manusia di dalam lingkungan yang sama terjadi persaingan dalam memperebutkan ruang hidup dan sumber daya.

Secara garis besar, unsur lingkungan hidup dibagi menjadi tiga, yaitu biotik, abiotik dan sosial budaya.

1. Unsur biotik

   Unsur biotik adalah segala makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan binatang. Baik yang terdapat di atas tanah maupun yang terdapat di dalam tanah.

2. Unsur abiotik

   Unsur abiotik adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang berwujud benda-benda mati seperti tanah, air,udara, mineral, gas, energi dan sinar matahari.

3. Unsur-unsur sosial budaya

   Unsur-unsur sosial budaya adalah segala sesuatu yang berasal dari hasil pikiran dan akal budi manusia, unsur-unsur budaya termasuk di dalamnya semua ciptaan manusia seperti gudang-gudang, jalan-jalan, kendaraan bermotor, industri dan sebagainya termasuk pranata-pranata yang terbentuk melalui proses berpikir manusia.

Di dalam suatu komunitas, komponen-komponen lingkungan tersebut saling berhubungan, bahkan saling memengaruhi. Keadaan yang demikian, secara alamiah menjamin kelangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Dalam hubungan ini, suatu komponen lingkungan baik biotik maupun abiotik menjadi lingkungan bagi makhluk hidup. Apakah ia menjadi bahan makanan atau menyuplai energi.

Di dalam kehidupan manusia, senantiasa terjadi interaksi timbal balik sistem sosial yang dipengaruhi latar belakang budaya dan sistem biofisik atau ekosistem. Hubungan timbal balik yang erat antara dua subsistem itu dapat berjalan dengan baik dan teratur karena adanya arus energi. Energi, materi, dan informasi, misalnya energi yang diperlukan untuk melakukan kerja.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aspek latar belakang sosial ekonomi dan budaya manusia dapat memengaruhi perilaku manusia dalam memperlakukan alam lingkungan sekitarnya. Dengan perkatan lain, manusia dapat dianggap sebagai pengontrol program ekosistemnya. Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan biofisik sekitarnya, manusia harus melakukan penyesuaian diri terhadap sifat lingkungan sekitarnya untuk menjaga kelangsungan hidupnya.

Hubungan sistem sosial dan biofisik tersebut sangat dinamis setiap waktu. Karena itu, jika ada perubahan pada sistem sosial masyarakat secara otomatis akan mengakibatkan perubahan pula pada sistem biofisik.

C. BENTUK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DAN CARA MENGATASINYA

Masalah lingkunngan hidup telah menjadi perhatian dunia secara global. Hal tersebut dikarenakan oleh berbagai kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai negara yang semakin parah, baik di negara maju maupun di negara berkembang. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, di antaranya disebabkan oleh berbagai

kegiatan industri modern yang menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan serta disebabkan dampak negatif dari kemiskinan. Berbagai masalah kerusakan lingkungan yang banyak terjadi antara lain, kerusakan hutan, erosi tanah, kepunahan satwa liar, kepunahan tumbuh-tumbuhan, dan lain-lain.

Untuk lebih mendalami tentang bentuk-bentuk kerusakan lingkungan beserta faktor penyebabnya, perhatikan uraian berikut ini.

1. Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Faktor Alam

Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam, seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya. Letusan gunung api sering terjadi di berbagai belahan bumi yang merupakan jalur gunung api, seperti Indonesia. Peletusan gunung api ada yang lemah dan ada yang kuat. Makin kuat letusan gunung api, makin besar kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya.

Kejadian banjir sering pula disertai dengan tanah longsor telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan kehidupan. Banjir telah mengakibatkan daerah permukiman dan pertanian terendam sehingga banyak tanaman-tanaman mati, jalan-jalan longsor, jembatan hancur, dan sebagainya. Adapun kerusakan lingkungan hidup di tepi pantai disebabkan oleh adanya abrasi, yaitu pengikisan pantai oleh air laut yang terjadi secara alami. Peristiwa gempa bumi merupakan kekuatan alam yang berasal dari dalam bumi dan dapat menyebabkan getaran di permukaan bumi. Gempa bumi sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia sehingga menimbulkan kerusakan pada lingkungan.

2. Kerusakan Lingkungan Hidup yang Disebabkan oleh Kegiatan Manusia

Proporsi kerusakan lingkungan yang disebabkan kegiatan manusia sebetulnya jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Bentuk keruskan lingkungan yang disebabkan oleh manusia di antaranya pencemaran sungai oleh limbah industri, penebangan hutan secara massal dan ilegal, dan sebagainya.

Penebangan-penebangan hutan untuk keperluan industri, lahan pertanian, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Kerusakan lingkungan hidup yang terjadi menyebabkan timbulnya lahan kritis, ancaman terhadap kehidupan flora dan fauna, dan kekeringan.

Pencemaran lingkungan dapat terjadi terhadap air, tanah, dan udara. Pada umumnya, pencemaran air dan tanah terjadi karena pembuangan limbah-limbah industri dan biasanya terjadi di perkotaan. Adapun pencemaran terhadap udara terjadi karena hasil pembakaran bahan bakar.

Gambar 3.2 *Menebang pohon sembarangan merupakan suatu bukti bahwa sikap partriotisme dalam masyarakat telah mengalami penurunan*
Sumber: www.google.com

Kasus-kasus pencemaran perairan telah sering terjadi karena pembuangan limbah industri ke dalam tanah, sungai, danau, dan laut. Kebocoran-kebocoran pada kapal-kapal tanker dan pipa-pipa minyak yang menyebabkan tumpahan minyak ke dalam perairan menyebabkan kehidupan di tempat itu terganggu, banyak ikan-ikan yang mati, tumbuh-tumbuhan yang terkena genangan minyak pun akan musnah pula. Masyarakat yang mempunyai mata pencarian menangkap ikan seperti nelayan terimbas pula dampak negatifnya, yaitu berkurangnya jumlah tangkapan ikan yang mereka peroleh.

Masalah lain yang muncul adalah perladangan hutan secara liar oleh penduduk. Akibatnya keanekaan flora dan fauna hutan menurun drastik, serta manfaat hutan bagi manusia pun terganggu bahkan hilang sama sekali.

D. USAHA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

Kerusakan lingkungan hidup bila tidak segera diatasi, suatu saat akan menimbulkan malapetaka besar bagi manusia. Dewasa ini berbagai organisasi lingkungan hidup baik yang berskala internasional, nasional, dan daerah, tidak henti-hentinya menyuarakan penyelamatan lingkungan hidup untuk keselamatan manusia di masa kini maupun di masa akan datang. Di samping organisasi lingkungan hidup, pemerintah di masing-masing negara pun telah banyak melakukan berbagai usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, termasuk di antaranya Indonesia.

Beberapa usaha yang dilakukan untuk pelestarian lingkungan hidup, antara lain sebagai berikut.

a. Bidang kehutanan

Usaha yang dilakukan di bidang kehutanan adalah:

1) melakukan *reboisasi* (penanaman hutan kembali) pada kawasan-kawasan yang hutannya telah gundul;
2) penebangan pohon dan penanaman kembali agar dilakukan dengan seimbang sehingga hutan tetap lestari;
3) memperketat pengawasan terhadap penebangan-penebangan liar dan memberikan hukuman yang berat kepada pelanggar;
4) memperluas hutan lindung, taman nasional, dan sejenisnya sehingga fungsi hutan sebagai pengatur air, pencegah erosi, pengawetan tanah, tempat perlindungan flora dan fauna dapat tetap terpelihara dan lestari;
5) membuat undang-undang atau peraturan pemerintah tentang perlindungan dan pemeliharaan hutan serta menegakkannya secara konsisten.

Gambar 3.3 *Hutan di Kalimantan yang rapat oleh pohon-pohon besar.*
Sumber: Ensiklopedia Geografi

b. Bidang pertanian

Usaha yang dilakukan di bidang pertanian adalah:

1) melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola pertanian yang tidak menimbulkan kerusakan lingkungan;
2) mengubah sistem pertanian berladang (berpindah-pindah) menjadi pertanian menetap seperti sawah, perkebunan, tegalan, dan sebagainya;

3) pertanian yang dilakukan pada lahan tidak rata (curam), supaya dibuat teras-teras (sengkedan) sehingga bahaya erosi dapat diperkecil;
4) pemberantasan hama tanaman dengan cara memperbanyak predator (binatang pemakan) hama tanaman;
5) mengurangi pemakaian pestisida karena pestisida dapat mencemari air dan tanah;
6) menemukan jenis-jenis tanaman yang tahan hama;
7) mengoptimalkan peran serta Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI).

c. Bidang industri

Usaha yang dilakukan di bidang industri adalah:

1) melakukan daur ulang *(recycling)* terhadap barang-barang bekas yang tidak terpakai, seperti kertas, plastik, aluminium, besi, dan sebagainya;
2) mengembangkan teknologi yang hemat bahan bakar, dan ramah lingkungan;
3) mendirikan kawasan industri yang jauh dari permukiman penduduk;
4) melakukan netralisasi limbah industri yang akan dibuang ke dalam tanah maupun perairan;
5) untuk mengurangi pencemaran udara yang disebabkan oleh asap industri yang berasal dari pembakaran yang menghasilkan CO (*karbon monoksida*) dan CO_2 (*karbon dioksida*), diwajibkan melakukan penghijauan di lingkungan sekitarnya;
6) mengurangi pemakaian bahan bakar minyak bumi dengan sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti energi listrik yang dihasilkan PLTA, energi panas bumi, sinar matahani, dan sebagainya;
7) membuat undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pemetaan wilayah industri.

d. Bidang perairan

Usaha yang dilakukan di bidang perairan adalah:

1) melarang keras pembuangan limbah rumah tangga, sampah-sampah, dan benda-benda lainnya ke sungai maupun laut;
2) melarang pengambilan karang di laut yang menjadi tempat berkembang biak ikan-ikan;
3) membuat undang-undang atau peraturan pemerintah tentang penangkapan ikan di sungai atau laut seperti larangan penggunaan bom ikan, pemakaian pukat harimau di laut yang dapat menjaring ikan sampai sekecil-kecilnya.

E. PEMBANGUNAN NASIONAL

Tahukah kamu apa artinya pembangunan nasional? Untuk apa pemerintah melakukan pembangunan nasional? Dan apa hubungan pembangunan nasional dengan lingkungan hidup? Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu *melindungi segenap bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.*

Garis besar rencana pembangunan nasional yang dilakukan pemerintah dahulu dirumuskan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seiring dengan perkembangkan sistem pemerintahan, GBHN diganti dengan istilah Program Pembangunan Nasional (Propenas) beserta landasan operasionalnya yang dituangkan dalam Undang Undang No.25 Tahun 2000. Adapun landasan idiilnya adalah pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945.

Selanjutnya, apa tujuan dilaksanakannya pembangunan? Dalam program pembangunan nasional (Propenas) disebutkan bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju, dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki etos kerja yang tinggi, dan berdisiplin.

Dalam rangka untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional, ditetapkan prioritas sasaran pembangunan nasional dengan mempertimbangkan pengalaman membangun pada masa lalu, dan berbagai kemungkinan perkembangan keadaan pada masa depan. Prioritas sasaran pembangunan nasional secara umum adalah sebagai berikut:

1) membangun sistem politik yang demokratis serta mempertahankan persatuan dan kesatuan;
2) mewujudkan supremasi hukum dan pemerintahan yang baik;
3) mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat landasan pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan yang berdasarkan sistem ekonomi kerakyatan;
4) membangun kesejahteraan rakyat, meningkatkan kualitas kehidupan beragama, dan ketahanan budaya;
5) melakukan pemerataan pembangunan serta mendorong pembangunan di daerah-daerah. Adanya menteri yang membidangi lingkungan hidup serta pembangunan daerah tertinggal merupakan salah satu upaya untuk mewujudkannya.

F. HAKEKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN CIRI-CIRINYA

Pembangunan berkelanjutan erat kaitannya dengan pembangunan berwawasan lingkungan. Apakah yang dimaksud dengan pembangunan berwawasan lingkungan itu? Pembangunan berwawasan lingkungan pada hakikatnya merupakan pembangunan lestari. Pembangunan lestari yang didasarkan pada pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan masa datang.

Dari segi lingkungan, pembangunan berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai gabungan antara pembangunan dan kemajuan dengan usaha untuk memelihara lingkungan agar sumber-sumber daya alam di sekitar kita, seperti sumber air, hutan, tanah, udara, energi, mineral, dan lain-lain yang telah digunakan tidak hilang dan musnah sehingga dapat digunakan kembali.

Dalam proses pembangunan yang berwawasan lingkungan, penggunaan sumber-sumber daya alam yang tersedia senantiasa mempertimbangkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya alam itu sendiri. Penggunaan sumber daya alam secara semena--mena dan rakus oleh manusia, suatu ketika akan menimbulkan kesulitan besar bagi manusia, terutama generasi yang akan datang. Orang-orang tertentu yang hanya memikirkan keuntungan pribadi semata, dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang berdampak pada orang lain dan generasi di kemudian hari.

Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan merupakan proses pembangunan yang senantiasa memadukan proses pembangunan dengan potensi lingkungan. Pembangunan tidak akan dapat tercapai dan berkembang apabila kemampuan lingkungan terus mengalami kemerosotan. Demikian pula halnya lingkungan tidak akan dapat dilindungi dan dipelihara apabila pembangunan di suatu negara itu rendah kualitasnya sehingga tidak mempunyai cukup dana dan teknologi untuk menjaga, dan memelihara lingkungan. Antara pembangunan dengan pemeliharaan lingkungan merupakan dua hal yang harus berjalan seiring.

Pembangunan yang tidak memerhatikan lingkungan dan tidak berorientasi kepada masa depan harus dihindari. Karena, manusia sebagai makhluk sosial dan berakal tidak hanya memikirkan kepentingan sendiri dan sesaat, tetapi juga harus memikirkan kepentingan orang lain dan generasi mendatang.

Pembangunan berwawasan lingkungan memliki beberapa ciri-ciri, di antaranya sebagai berikut:

1) mengutamakan kualitas hidup dan berorientasi jangka panjang sehingga dapat dirasakan oleh semua generasi;
2) senantiasa memadukan antara pembangunan dan pemeliharaan lingkungan;
3) memanfaatkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui secara bijaksana. Adapun sumber daya alam yang dapat diperbarui, terjamin ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitasnya;
4) memerhatikan kemampuan ekologi alam sekitar serta potensi yang terkandung dalam lingkungan;
5) tidak mengorbankan unsur-unsur lingkungan untuk tujuan pembangunan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang.

G. PERMASALAHAN KEPENDUDUKAN DI INDONESIA

Permasalahan kependudukan yang sedang dialami Indonesia, di antaranya terkait jumlah penduduk yang besar disertai dengan tingkat pertumbuhan yang relatif tinggi dan persebaran penduduk yang tidak merata.

Jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 200 juta jiwa memang merupakan sebuah potensi sumber daya dan pangsa pasar strategis secara ekonomi. Namun hal tersebut juga dapat menjadi beban dalam pembangunan. Karena itu, pembangunan nasional senantiasa diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. Perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan bagi proses pembangunan.

Permasalahan kependudukan yang lainya adalah persebaran penduduk yang tidak merata. Hal ini berkaitan dengan daya dukung lingkungan (luas wilayah) yang tidak seimbang antara Jawa-Bali dengan luar Jawa-Bali. Pulau Jawa yang luas wilayahnya kurang dari 7 persen dihuni oleh 58,7 persen penduduk, sehingga kepadatan penduduk di Pulau Jawa mencapai 880 jiwa per km^2 pada tahun 1996.

Kepadatan penduduk di luar Pulau Jawa, jauh lebih rendah, yaitu baru didiami oleh kurang dari 100 jiwa setiap km^2 di Pulau Sumatra dan Sulawesi, dan kurang dari 20 jiwa setiap km^2 di Kalimantan serta khususnya di Irian Jaya yang baru dihuni oleh 5 Jiwa setiap km^2. Gambaran ini selain memberikan petunjuk tentang tidak meratanya persebaran penduduk, juga menunjukkan kurang seimbangnya proporsi luas wilayah.

Bila kepadatan penduduk setiap provinsi dibandingkan, maka luas wilayah di provinsi-provinsi Jawa dan Bali sudah tidak memadai, apalagi DKI Jakarta yang didiami oleh lebih dari 15.732 jiwa per km^2.

Masalah kependudukan lainya adalah terkait dengan kualitas. Hasil survei UNDP (*United Nations Development Programe*) tentang *Human Development Indeks 2003* terungkap bahwa dari 174 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas manusianya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-112. Sementara negara tetangga seperti Singapura sudah mencapai peringkat ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74 dan Filipina ke-85.
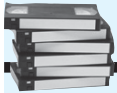
RANGKUMAN

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.
2. Lingkungan hidup dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu lingkungan hidup alamiah dan lingkungan hidup buatan.
3. Unsur lingkungan hidup dibagi menjadi tiga, yaitu biotik, abiotik dan sosial budaya.
4. Unsur biotik adalah segala makhluk hidup yang terdapat di sekitar kita, seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, dan binatang.
5. Unsur abiotik adalah segala sesuatu yang terdapat di sekitar kita yang berwujud benda-benda mati, seperti tanah, air, udara, mineral, gas, energi dan sinar matahari.
6. Unsur-unsur budaya adalah segala sesuatu yang berasal dari hasil pikiran dan akal budi manusia, unsur-unsur budaya termasuk di dalamnya semua ciptaan manusia, seperti gudang-gudang, jalan-jalan, kendaraan bermotor, industri dan sebagainya termasuk pranata-pranata yang terbentuk melalui proses berpikir manusia.
7. Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan faktor alam pada umumnya merupakan bencana alam, seperti letusan gunung api, banjir, abrasi, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, dan sebagainya.
8. Bentuk kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia, di antaranya pencemaran sungai oleh limbah industri, penebangan hutan secara massal dan ilegal, dan sebagainya.
9. Pembangunan berwawasan lingkungan dapat diartikan sebagai gabungan antara pembangunan dan kemajuan dengan usaha untuk memelihara lingkungan agar sumber-sumber daya alam di sekitar kita, seperti sumber air, hutan, tanah, udara, energi, mineral, dan lain-lain yang telah digunakan tidak hilang dan musnah sehingga dapat digunakan kembali.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia membahas tentang Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ....
   a. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982
   b. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1984
   c. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1985
   d. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1982
2. Unsur berikut yang *bukan* tergolong dalam lingkungan alam adalah ....
   a. biotik
   b. energi
   c. udara
   d. budaya
3. Pembangunan industri yang berkembang pesat telah menimbulkan kerusakan pada lingkungan karena ....
   a. kebutuhan semakin meningkat
   b. pengambilan sumber daya alam semakin besar
   c. jumlah penduduk semakin besar
   d. kemiskinan di beberapa negara meningkat
4. Salah satu usaha untuk mengurangi pencemaran akibat pestisida adalah ....
   a. menemukan jenis pestisida yang ramah lingkungan
   b. memperbanyak predator pemakan hama
   c. melakukan pertanian secara intensif
   d. mengganti tanaman semusim dengan tanaman keras

5. Cara terbaik untuk mengurangi pencemaran yang diakibatkan limbah padat dari industri ialah dengan melakukan ....
   a. pembakaran
   b. penimbunan
   c. daur ulang
   d. pemadatan
6. Hari lingkungan hidup sedunia diperingati setiap tanggal ....
   a. 5 Januari
   b. 5 Mei
   c. 5 Juni
   d. 5 Juli
7. Badan PBB yang dibentuk untuk menangani masalah lingkungan hidup ialah ....
   a. UNEP
   b. UNDP
   c. UNHCR
   d. UNIDO
8. Usaha-usaha yang bertujuan untuk menjadikan udara bersih dari polusi disebut program ....
   a. langit biru
   b. rumah kaca
   c. green house
   d. penghijauan
9. Salah satu cara mengurangi polusi udara di kota adalah dengan ....
   a. reboisasi
   b. penataan ruang
   c. pengendaliaan banjir
   d. penghijauan
10. Kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh faktor alam antara lain adalah ....
   a. kekurangannya sumber daya air
   b. perembesan air laut kedaratan
   c. tanah tandus
   d. flora dan fauna terancam punah

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan lingkungan hidup alami dengan lingkungan hidup buatan!
2. Jelaskan tiga unsur lingkungan hidup!
3. Berikan tiga contoh bentuk kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan faktor manusia!
4. Bagamana caranya agar kerusakan hutan yang diakibatkan oleh perbuatan manusia dapat teratasi!
5. Apa sikap yang akan kamu lakukan jika melihat seseorang menebang pohon sembarangan !

TUGAS

Berkunjunglah ke kantor kecamatan tempat kamu tinggal. Mintalah informasi tentang program-program yang sudah dan akan dilaksanakan selama lima tahun terakhir. Kemudian berdasarkan ciri-ciri pembangunan berkelanjutan yang telah kamu pelajari, analisislah apakah ciri-ciri tersebut terdapat dalam program yang dirumuskan oleh para pejabat di lingkungan kecamatanmu. Buatlah laporan tertulis dan diskusikanlah dengan teman sekelasmu!

Bab IV

KEBANGKITAN NASIONAL

Standar Kompetensi

Memahami proses kebangkitan nasional.

Kompetensi Dasar

1. Menjelaskan proses perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat serta pengaruhnya yang ditimbulkan di berbagai daerah.
2. Menguraikan proses terbentuknya kesadaran nasional, identitas Indonesia, dan perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia.

Tahukah kamu bagaimana nenek moyang kita dahulu melawan penjajah? Lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia tidak semudah membalikkan telapak tangan, akan tetapi dilakukan melalui perjuangan keras dari para pejuang bangsa di berbagai daerah di Indonesia.

Pada bab ini, kamu akan belajar tentang bagaimana pemerintah kolonial Belanda melakukan penjajahan kepada bangsa Indonesia serta reaksi rakyat di berbagai daerah terhadap penjajahan tersebut, termasuk bagaimana agama Nasrani sebagai salah satu misi yang dibawa dalam penjajahan tersebut menyebar di Indonesia.

Bung Tomo
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Kebangkitan
- Pemerintah kolonial
- Perlawanan rakyat
- Barat
- Islam
- Kongres

A. KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL DAN PENGARUHNYA

Menurut sejarah, jatuhnya bangsa Indonesia ke tangan kolonialisme Barat dimulai sejak bangsa-bangsa Barat menundukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kerajaan yang ada di Nusantara secara perlahan dikuasai oleh Spanyol, Portugis, Belanda, dan Inggris.

Ada beberapa faktor pendorong bagi bangsa Barat untuk datang dan menguasai Bangsa Indonesia, di antaranya karena kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah. Sejak ratusan tahun yang lalu, rempah-rempah Nusantara merupakan barang yang berharga di Eropa. Oleh karena itu, bagi bangsa Barat yang mampu mendatangkan rempah-rempah dari Nusantara dan memperdagangkannya di Barat dapat mendatangkan keuntungan yang besar bagi bangsa tersebut.

Bangsa Portugis merupakan bangsa Barat pertama yang menguasai kerajaan di Nusantara, yaitu sejak merebut Malaka pada 1511. Kekuasaannya berakhir setelah Belanda merebut Malaka pada 1640. Adapun banga Spanyol tidak sempat banyak menguasai bangsa Indonesia, karena kalah bersaing dengan bangsa Portugis dan hanya memusatkan daerah kolonialnya di Filipina. Sementara bangsa Belanda merupakan bangsa yang paling lama melakukan penjajahan di Nusantara.

Belanda sebagai bangsa yang paling lama menguasai bangsa Indonesia sudah melakukan banyak kebijakan-kebijakan yang sangat nerugikan rakyat Indonesia. Pada awalnya, tahun 1596 Belanda mulai datang ke Banten di bawah pimpinan Cornelis de Houtman. Kedatangan yang pertama ini diikuti oleh kedatangan rombongan Belanda yang selanjutnya menyebabkan persaingan perdagangan dan penguasaan rempah-rempah di antara para pengusaha Belanda. Untuk mengatasi persaingan dagang tersebut dan atas saran Johan Van Oldenbarnevelt, pada tahun 1602 didirikanlah kongsi dagang Belanda yang diberi nama *Vereenigde Oost-Indische Compagnie* (VOC). Adapun tujuan Belanda mendirikan VOC adalah:

1) menghindarkan persaingan antarpengusaha Belanda;
2) mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya;
3) agar mampu bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain, seperti Portugis dan Spanyol.

Untuk mencapai tujuan-tujuan VOC, maka pemerintah Belanda memberikan beberapa hak istimewa (Hak Octrooij), sebagai berikut:

1) monopoli kegiatan perdagangan;
2) membentuk kekuatan tentara sendiri untuk mempertahankan diri;
3) mengadakan perjanjian dengan raja-raja;
4) mendirikan benteng-benteng pertahanan;

5) mencetak dan mengedarkan uang sendiri;
6) menyatakan perang dan mengadakan perdamaian.

Dilihat dari tujuan pendiriannya, VOC bukan semata-mata badan perdagangan yang mencari keuntungan, tetapi juga merupakan badan pemerintahan yang dijadikan alat oleh Belanda sebagai alat untuk menjajah Nusantara. Gerakan penjajahan Belanda melalui VOC yang didirikanya di antaranya dengan menetapkan beberapa kebijakan yang sangat merugikan rakyat, seperti:

1) menarik upeti (*verplichte leverantie*) dari raja-raja yang telah ditaklukkan oleh Belanda;
2) menarik pajak (*contingenten*) dari rakyat dalam bentuk hasil-hasil bumi;
3) mengadakan pelayaran Hongi, yaitu kegiatan yang dilakukan oleh armada Belanda dengan menggunakan perahu-perahu kecil untuk menangkap, mengawasi para pedagang dan penduduk pribumi yang dianggap melanggar ketentuan Belanda seperti menjual hasil pertanian kepada orang lain;
4) melakukan ektirpasi, yaitu menebas, membinasakan, dan menghancurkan tanaman rempah-rempah yang menjadi komoditas ekspor agar tidak mengalami kelebihan produksi yang menyebabkan jatuhnya harga;
5) mengangkat seorang gubernur jenderal untuk mengawasi dan melaksanakan jalannya pemerintahan di daerah yang dikuasainya, seperti Jan Piterzoon Coen (1619-1629) yang dikenal sebagai pendiri Kota Batavia dan kebijakan kolonialisasi untuk mendatangkan keluarga orang Belanda ke Nusantara untuk kebutuhan tenaga kerja Belanda.

Penjajahan yang dilakukan oleh VOC sangat kejam yang mengakibatkan rakyat Indonesia mendapat kerugian, menderita secara fisik, serta kekurangan uang dan barang untuk keperluan hidupnya. VOC tidak segan-segan menangkap rakyat yang dianggapnya memberontak, menjadikan budak belian, bahkan membunuh rakyat yang tidak berdosa.

Setelah berkuasa cukup lama di Nusantara, dalam perkembangan selanjutnya VOC mengalami kemunduran. Hal itu disebabkan oleh berbagai faktor, di antaranya:

1) merebaknya tindakan korupsi di kalangan para pegawai VOC;
2) adanya persaingan dagang yang ketat di antara sesama kongsi dagang negara lain seperti *Compagnie des Indies* (CDI) dari Prancis, dan *East Indian Company* (EIC) dari Inggris;
3) membengkaknya biaya perang yang dikeluarkan oleh VOC untuk mengatasi pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan rakyat Indonesia di daerah-daerah;
4) akibat kekuasaan VOC yang cukup luas menyebabkan kebutuhan gaji pegawai semakin membengkak yang menyebabkan kebangkrutan.

Akibat dari kemunduran yang dialami VOC, akhirnya pada tahun 1795 dibentuklah panitia pembubaran VOC. Panitia ini membubarkan VOC pada tanggal 31 Desember 1799 dengan ketentuan semua utang dan kekayaannya diambil alih oleh pemerintah Belanda.

Berakhirnya kekuasaan VOC di Indonesia pada 31 Desember 1799 menyebabkan kekuasaan Belanda semakin memudar. Di sisi lain pada saat yang bersamaan kongsi dagang Inggris semakin mengalami perkembangan. Hal ini membuat pemerintah Hindia Belanda semakin gencar untuk mempertahankan wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Belanda mengangkat Herman Willem Daendels untuk mengatur pemerintahan di Indonesia sekaligus mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Untuk tugas-tugas ini, Daendels melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut: pemindahan pusat pemerintahan lebih ke pedalaman, menambah jumlah prajurit, membangun benteng-benteng pertahanan, membuat jalan dari Anyer ke Panarukan, mengadakan Preanger Stelsel, dan rakyat dipaksa untuk kerja rodi.

Dalam perkembangan selanjutnya, semakin buruknya perekonomian Belanda mengakibatkan gejolak tersendiri di kalangan mereka. Siasat yang dilancarkan Belanda dalam rangka memperbaiki keuangan mereka serta menguasai Indonesia akhirnya dirubah, semula menggunakan politik monopoli menjadi politik bebas. Melalui rekomendasi **Johannes Van de Bosch,** seorang ahli keuangan Belanda ditetapkanlah dan Sistem Tanam Paksa atau *Cultur Stelesel* tahun 1830.

Tujuan Sistem Tanam Paksa adalah untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Tujuannya untuk mengisi kekosongan kas Belanda yang pada saat itu terkuras habis akibat perang.

Terdapat beberapa peraturan yang ditetapkan Belanda dalam rangka melaksanakan Sistem Tanam Paksa:

1) rakyat harus menyediakan seperlima dari tanah miliknya untuk tanaman ekspor, seperti kopi, tebu, teh dan tembakau, serta tanah tersebut harus bebas pajak tanah;
2) waktu tanam dari setiap tanaman tersebut tidak boleh lebih dari waktu pemeliharaan padi;
3) kerusakan tanaman akibat bencana alam ditanggung oleh pemerintah Belanda;
4) hasil tanaman rakyat tersebut harus diserahkan kepada Belanda dengan harga yang yang telah ditentukan oleh pemerintah Belanda;
5) bagi petani yang tidak memiliki tanah dipekerjakan pada perkebunan atau pabrik milik pemerintah selama 66 hari.

Adanya Sistem Tanam Paksa sangat merugikan rakyat, karena selain pelaksanaannya yang tidak sesuai aturan diperparah lagi oleh banyaknya penyimpangan yang dilakukan para pengusaha pribumi. Mereka ingin menambah upah pengawasan dengan cara menekan rakyat seperti penyediaan tanah tidak seperlima lagi, tapi setengahnya; desa yang memiliki tanah subur semuanya digunakan untuk tanam paksa; semua kerusakan dan kegagalan panen akan ditanggung oleh petani dan rakyat.

Akibat dari kegiatan tanam paksa, rakyat Indonesia menderita kemiskinan yang berkepanjangan, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Sementara bagi Belanda merupakan ladang ekonomi yang banyak mendapatkan keuntungan. Kas Belanda yang asalnya kosong dapat dipenuhi kembali, kemudian secara berangsur-angsur utang Belanda dapat dilunasi dan menjadikan Belanda sebagai negara yang tidak mengalami kesulitan keuangan.

Praktik tanam paksa menimbulkan reaksi dan sikap prihatin dari beberapa kalangan di antaranya sebagai berikut.

1) Baron Van Hovel, seorang misionaris yang menyatakan bahwa tanam paksa adalah suatu tindakan yang tidak manusiawi, karena menyebabkan rakyat sangat menderita.
2) E.F.E Douwes Dekker, seorang pejabat Belanda yang merasa prihatin terhadap penderitaan rakyat Indonesia, menulis buku berjudul Max Havelaar yang isinya menceritakan tentang penderitaan rakyat Indonesia akibat Sistem Tanam Paksa.
3) Golongan pengusaha atau kaum liberalis yang menghendaki kebebasan dalam berusaha.

B. BENTUK-BENTUK PERLAWANAN RAKYAT

Menyikapi kedatangan serta dominasi bangsa-bangsa Barat di Indonesia, bangsa Indonesia melakukan reaksi dan perlawanan dalam bentuk yang berbeda-beda. Reaksi dilakukan dengan cara menunjukkan rasa tidak suka, menolak, atau tidak mau berhubungan dengan mereka, baik dalam bidang perdagangan, kebudayaan, ataupun bidang-bidang lainnya.

Perlawanan yang dilakukan umumnya melalui peperangan dan gerakan sosial. Peperangan dilakukan secara terorganisir, terutama oleh angkatan bersenjata milik kerajaan di suatu daerah atau pasukan yang dimiliki oleh kelompok bersenjata. Adapun melalui gerakan sosial, perlawanan dilakukan dengan cara protes, perusakan milik penjajah atau penguasa yang bekerja sama dengan penjajah, serta gerakan sosial berupa pemberontakan.

Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kedatangan dan dominasi bangsa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut.

1) Gerakan bangsa Barat yang cenderung menguasai dan menjajah sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
2) Hasrat untuk hidup tenang sesuai dengan adat istiadat setempat dari rakyat Indonesia, seperti halnya sebelum kedatangan bangsa-bangsa Barat.
3) Hasrat untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian serta tidak ingin dicampuri oleh bangsa asing.
4) Kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu masyarakat Indonesia.

Bentuk-bentuk perlawanan yang dilakukan oleh rakyat menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tidak menghendaki penjajahan. Hal tersebut telah merugikan pemerintah kolonial di Indonesia. Namun, perlawanan tersebut belum mampu mengusir Belanda dari wilayah Indonesia sampai negara tersebut mengalami kekalahan dalam Perang Dunia II dan menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rakyat Indonesia gagal mengusir penjajah, di antaranya:

1) kurangnya persatuan di antara rakyat dan kerajaan-kerajaan di Indonesia;
2) mentalitas sebagian orang Indonesia yang terpedaya oleh jabatan dan kekayaan yang ditawarkan oleh penjajah;
3) kualitas SDM Indonesia cenderung kalah dengan SDM penjajah;
4) kuatnya rasa cinta kedaerahan rakyat Indonesia sehingga menjadi peluang bagi penjajah untuk mengadu domba;
5) terdapatnya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Indonesia untuk menjadi kerajaan yang paling maju;
6) sarana dan prasarana militer serta alat komunikasi antar daerah di Indonesia yang sangat minim.

1. Perlawanan Terhadap Portugis

Perlawanan Bangsa Indonesia mengusir bangsa Barat dilakukan sejak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang mengalahkan Kerajaan Malaka tahun 1511. Perlawanan dilakukan oleh rakyat Aceh, Johor, dan rakyat dari kerajaan-kerajaan lain terhadap kedudukan bangsa Portugis di Pelabuhan Malaka.

Perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa Portugis dipimpin oleh Sultan Hairun dan Sultan Baabullah (1575). Rakyat Maluku tidak suka dengan kedatangan para pedagang Portugis yang ingin menguasai sumber rempah-rempah dari Maluku. Melihat tanda-tanda bahwa bangsa Portugis ingin memonopoli perdagangan, perlawanan dilakukan sejak 1512. Oleh karena peralatan perang bangsa Portugis lebih lengkap serta tidak adanya kerja sama di antara kerajaan-kerajaan di Maluku, perlawanan mengalami kegagalan. Kerajaan-kerajaan, seperti Ternate dan Tidore justru bersaing di antara mereka sehingga tidak ada kata sepakat tentang cara mengusir bangsa Portugis dari wilayah mereka.

Perlawanan yang tidak terorganisir pun terjadi di Demak, Jawa Tengah. Oleh karena tidak adanya dukungan dan kerajaan-kerajaan di kawasan Sumatra, Jawa, dan Kalimantan, serangan ini mengalami kegagalan. Serangan pasukan Dipati Unus terhadap kota Pelabuhan Malaka dilakukan dua kali (1512 dan 1513), tetapi tidak berhasil mengusir bangsa Portugis dari pelabuhan terbesar di Asia itu. Sebaliknya, untuk mempertahankan Malaka, bangsa Portugis berhasil menjalin kerja sama dengan penguasa Kerajaan Pajajaran. Kerajaan yang sedang bersaing dengan Kerajaan Cirebon dan Banten tersebut memanfaatkan bangsa Portugis yang sedang terancam. Keadaan ini menyebabkan gagalnya perlawanan Dipati Unus terhadap kedudukan Portugis di Malaka.

2. Perlawanan Terhadap VOC

Dengan kegagalan-kegagalan tersebut, bangsa Portugis tetap berkuasa di wilayah Nusantara sebelum bangsa ini akhimya kalah bersaing dengan para pedagang Belanda yang telah mendirikan VOC tahun 1602. Perlawanan terhadap bangsa penjajah juga dilakukan terhadap bangsa Belanda. Setelah Belanda mendirikan VOC dan menjadikan Jayakarta (kemudian diganti nama menjadi Batavia) sebagai pusat operasional VOC, timbul reaksi dari kerajaan-kerajaan yang merasa dirugikan akibat didirikannya VOC itu. Salah satu kerajaan yang merasa terancam, yaitu Mataram di bawah Sultan Agung.

Bagi Sultan Agung, VOC yang berambisi menguasai Jawa dianggap sebagai saingan bagi Kerajaan Mataram. Oleh karena itu, Sultan Agung berusaha melakukan penyerangan terhadap pusat VOC itu. Akan tetapi, lemahnya peralatan militer, kurangnya dukungan logistik, serta tidak adanya dukungan dari kerajaan-kerajaan lain, maka serangan ke Batavia (Jayakarta) mengalami kegagalan. Upaya penyerangan ini dilakukannya sebanyak dua kali, yaitu tahun 1628 dan 1629. Dengan gagalnya serangan tersebut, VOC tetap memiliki kedudukan kuat dalam melakukan perdagangan di kawasan Nusantara.

Sebaliknya, dengan kuatnya kedudukan tersebut serta terjadinya persaingan di antara kerajaan-kerajaan di Nusantara, VOC dengan leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Misalnya, ketika terjadi konflik internal pada Kesultanan Banten yang menyebabkan Banten jatuh ke tangan VOC. Ketika Sultan Ageng Tirtayasa mengangkat anaknya yang bergelar Sultan Haji sebagai Sultan Banten, Belanda segera ikut campur dalam urusan Banten dengan cara mendekati Sultan Haji. Sultan Ageng yang sangat anti terhadap VOC dan tidak suka dengan kedudukan VOC di Jayakarta segera menarik kembali tahta untuk anaknya. Tentu saja tindakan tersebut tidak disukai oleh Sultan Haji sehingga dia minta bantuan ke VOC di Batavia untuk membantu mengembalikan tahtanya. Berkat kerja sama dengan VOC, Sultan Haji akhirnya memperoleh tahta kembali. Sebagai imbalannya, diserahkan sebagian wilayah Banten kepada VOC. Persaingan dalam tubuh kerajaan tersebut sangat tidak menguntungkan bagi upaya untuk mengusir menjajah dari Indonesia. Sebaliknya, dengan adanya konflik dalam tubuh kerajaan, penjajah dengan leluasa dapat memperluas wilayah kekuasaannya. Walaupun begitu, Sultan Ageng Tirtayasa harus dihargai dalam sejarah Indonesia sebagai sultan yang berani menentang VOC.

Di Pulau Sulawesi, perlawanan rakyat untuk mengusir VOC dilakukan di Kerajaan Makassar. Kerajaan yang memusatkan kegiatan ekonominya pada sektor perdagangan sangat terganggu dengan kehadiran organisasi dagang Belanda, VOC. Banyak pedagang Makassar yang mengalami kemunduran karena kehadiran VOC. Oleh karena itu, rakyat Makassar berusaha mengusir VOC dari daerah mereka. Perlawanan rakyat Makassar terhadap VOC dipimpin oleh Sultan Makassar bernama Sultan Hasanuddin.

Walaupun melakukan perlawanan dengan gigih, Hasanuddin tidak berhasil mengusir VOC dari wilayah Makassar. Penyebabnya, kelihaian VOC memanfaatkan konflik dan persaingan antara Sultan Hasanuddin dari Kerajaan Makassar dan Raja Bone bernama Aru Palaka. Raja Aru Palaka selalu didekati oleh VOC untuk menghadapi pasukan Sultan

Hasanuddin. Melalui pertempuran bertahun-tahun, baik di darat maupun di laut, akhimya pasukan Kerajaan Makassar dapat dikalahkan pasukan VOC. Pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis Speelman dapat memaksa Sultan Hasanuddin menandatangani *Perjanjian Bongaya* pada 1667.

Perlawanan lain terhadap pemerintah kolonial terjadi di Maluku. Perlawanan ini berlangsung lama, dipimpin Sultan Nuku (1780-1805) serta Pattimura (1817). Sultan Nuku merupakan raja dari Kesultanan Tidore. Penyebabnya, Nuku tidak suka dengan ikut campurnya Belanda dalam urusan kerajaan-kerajaan di Maluku serta memaksa kerajaan-kerajaan untuk bekerja sama dengan Belanda. Sultan Nuku memiliki sikap tegas untuk menolak kehadiran pemerintah kolonial di Maluku.

3. Perlawanan Terhadap Pemerintah kolonial Belanda.

Dalam menghadapi Belanda, Nuku menggunakan cara diplomasi, yaitu dengan mendekati Inggris dan mengambil simpati rakyat dari kerajaan-kerajaan yang rajanya telah bergabung dengan Belanda, seperti Ternate. Dengan dukungan tersebut, Nuku dapat memanfaatkan kekuatan militernya untuk menghadapi Belanda. Kerja samanya dengan Inggris hanya merupakan taktik semata. Sultan juga menyadari bahwa kehadiran Inggris di Maluku atau Irian merupakan ancaman bagi pemerintahan pribumi di Maluku. Oleh karena itu, Nuku juga melakukan serangan terhadap Ternate yang mendukung Belanda. Dengan serangan-serangan tersebut, Nuku berhasil mengambil simpati kerajaan-kerajaan Maluku yang merasa telah memiliki kemerdekaan sejak lama.

Perlawanan terhadap pemerintah kolonial tidak hanya dilakukan oleh para sultan dan rakyatnya, tetapi juga oleh para pemuda. Para pemuda Maluku tidak suka dengan kehadiran pemerintah kolonial melakukan pemberontakan antara Juli sampai Desember 1817. Pemberontakan tersebut dipimpin oleh Pattimura yang juga dikenal dengan nama Thomas Matulesi. Mereka memberontak karena pemerintah Belanda memberlakukan kembali penyerahan wajib dan kerja wajib yang pernah dihapuskan pada masa pemerintahan Inggris.

Pada 3 Mei 1817, mereka berhasil menghancurkan Benteng Saparua dan membunuh semua penghuninya. Dengan serangan tersebut, rakyat Saparua memberikan dukungan kepada Pattimura dan mengangkatnya sebagai seorang kapiten (kapten). Serangan terus dilakukan, terutama ke kantor residen. Namun, kekuatan Belanda lebih kuat. Akhirnya, perlawanan Pattimura dapat dipatahkan pada 16 November 1817 dan ia kemudian dihukum mati.

Perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda juga dilandasi oleh semangat mempertahankan ajaran Islam, menghapus nilai-nilai setempat, serta nilai-nilai dari Barat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. *Perang Paderi* yang berlangsung dari 1821-1837 di Sumatra Barat dilatarbelakangi oleh semangat membumikan ajaran Islam sambil menentang adat yang kolot serta nilai-nilai dari Barat. Disebut Perang Paderi karena para pemimpinnya berasal dari kalangan *paderi* atau tokoh agama Islam yang berkeinginan memurnikan ajaran Islam dari nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam.

Perlawanan gigih terhadap penjajahan Belanda juga dilakukan oleh rakyat Aceh dalam Perang Aceh. Perang ini berlangsung pada 1873-1912. Perang Aceh terjadi karena keinginan pemerintah kolonial untuk menguasai seluruh wilayah Nusantara dilawan oleh rakyat Aceh. Rakyat Aceh tidak menginginkan daerah mereka diduduki oleh penjajah. Mereka memiliki kebanggaan atas kerajaan mereka yang telah berdiri sejak berabad-abad lalu. Terutama, pada zaman kejayaan Sultan Iskandar Muda (1607-1636) yang tetap berdiri pada abad ke-18 dan 19 sampai abad ke-20.

Penyebab terjadinya Perang Aceh, antara lain karena pemerintah kolonial ingin menguasai Aceh sebagai kerajaan yang kuat dan memiliki kemampuan diplomatik tinggi. Pemerintah kolonial melihat bahwa Traktat London tahun 1824 dan Traktat Sumatra tahun 1871 yang ditandatangani antara Belanda dan Inggris telah memberi kedudukan yang kuat pada Aceh. Oleh karena itu, dapat menjadi ancaman bagi kedudukan pemerintah Hindia Belanda. Kekhawatiran tersebut terbukti setelah Aceh mampu menjalin hubungan diplomatik dengan banyak negara. Hal itu mulai mencemaskan Belanda. Belanda merasa takut disaingi dan mulai menuntut Aceh untuk mengakui kedaulatan Belanda di Nusantara.

Penolakan rakyat Aceh terhadap tuntutan Belanda mendorong Belanda untuk mengirimkan pasukannya ke Kutaraja, ibu kota Kerajaan Aceh pada April 1873. Namun, usaha untuk menguasai Aceh mengalami kegagalan. Bahkan Mayor Jenderal Kohler, pemimpin pasukan Belanda tewas di depan Mesjid Raya Aceh. Demikian juga serangan pada Desember 1873 dapat dipatahkan oleh rakyat Aceh. Pasukan Belanda yang dipimpin oleh Letnan Jenderal van Swieten hanya berhasil merebut istana Kerajaan Aceh dan tidak dapat menguasai seluruh Aceh. Perlawanan rakyat Aceh terus berlangsung, walaupun istana kesultanan di Kutaraja direbut oleh Belanda.

Melihat gigihnya perlawanan rakyat Aceh, Belanda mengubah strategi perang dengan pendekatan sosial budaya. Caranya dengan mengirimkan Snouck Hurgronje, seorang ahli kajian Islam untuk menyelidiki masyarakat Aceh dan memberi masukan kepada pemerintah kolonial tentang strategi menguasai rakyat Aceh. Hurgronje menyarankan agar pemerintah kolonial memahami karakter masyarakat Aceh sambil melakukan serangan kepada para pemimpin Aceh.

Berdasarkan saran tersebut pemerintah kolonial menugaskan van der Heyden untuk memimpin pasukan dalam melakukan serangan ke Aceh Besar, salah satu kota pusat perjuangan rakyat Aceh. Melalui serangan tersebut, pada 1891, salah seorang pemimpin Aceh, Teuku Cik Ditiro gugur. Selanjutnya pada 1893, Teuku Umar ditawan dan kemudian ia berhasil meloloskan diri pada Maret 1896. Setelah bergabung kembali dengan sisa-sisa pasukannya, ia gugur di Meulaboh pada 11 Februari 1899. Pemimpin lainnya, seperti Sultan Daudsyah dan Panglima Polim terus melakukan perlawanan sampai akhimya mereka dipaksa menyerah oleh Belanda.

Ternyata, gugurnya para pemimpin perjuangan Aceh tidak menyurutkan rakyat Aceh dalam melakukan serangan. Pemimpin Aceh lainnya, seperti Tjut Nyak Dien, istri Teuku Umar terus berjuang dan melakukan perang gerilya. Bersama para pengikutnya, ia

melakukan perlawanan terhadap Belanda sampai akhirnya terpaksa menyerah pada 1905. Demikian juga pejuang wanita lainnya, seperti Tjut Nyak Meutia terus melakukan perlawanan gerilya sampai ia gugur pada 1910.

Perang Aceh terus berlangsung sampai tahun 1912 melalui serangan gerilya yang tidak terorganisir. Namun, Perang Aceh telah menunjukkan kepada Belanda bahwa rakyat Aceh tidak suka dengan penjajahan yang memaksakan nilai-nilai yang bertentangan dengan adat istiadat Aceh.

Di Bali, perlawanan rakyat untuk mengusir Belanda dari daerahnya dikenal dengan *Perang Puputan.* Perang itu ditandai dengan pengorbanan yang luar biasa dari seluruh rakyat yang cinta daerahnya, baik pengorbanan nyawa maupun materi. Perang Puputan dilakukan olah rakyat Bali demi mempertahankan daerah mereka dari pendudukan pemerintah kolonial Belanda. Rakyat Bali tidak ingin Kerajaan Klungkung yang telah berdiri sejak abad ke -9 dan telah mengadakan perjanjian dengan Belanda tahun 1841 di bawah pemerintahan Raja Dewa Agung Putra diduduki oleh Belanda. Sikap pantang menyerah rakyat Bali dijadikan alasan oleh pemerintah Belanda untuk menyerang Bali.

Pada 1844, perahu dagang milik Belanda terdampar di Prancak, wilayah Kerajaan Buleleng dan terkena *Hukum Tawan Karang*. Hukum tersebut memberi hak kepada penguasa kerajaan untuk menguasai kapal yang terdampar beserta isinya. Dengan kejadian itu, Belanda memiliki alasan kuat untuk melakukan serangan ke Kerajaan Buleleng pada 1848. Namun, rakyat Buleleng dapat menangkis serangan tersebut. Akan tetapi, pada serangan yang kedua pada 1849, pasukan Belanda yang dipimpin Jenderal Mayor A.V. Michies dan Van Swieeten berhasil merebut benteng pertahanan terakhir Kerajaan Buleleng di Jagaraga.

Dengan serangan besar-besaran, rakyat Bali membalasnya dengan perang habis-habisan guna mempertahankan harga diri sebagai orang Bali. Pertempuran untuk mempertahankan Buleleng itu dikenal dengan *Puputan Jagaraga.* Puputan lainnya, yaitu *Puputan Badung* (1906), *Puputan Kusamba* (1908), dan *Puputan Klungkung* (1908).

Selain perlawanan yang diuraikan tersebut, perlawanan terhadap pemerintah kolonial berlangsung di berbagai daerah dengan latar belakang dan penyebab yang berbeda-beda, seperti di Banjarmasin, Kalimantan Selatan menunjukkan perang berkecamuk di tengah-tengah persaingan anggota keluarga kerajaan untuk menduduki tahta kerajaan. Banyak anggota keluarga kerajaan yang ingin naik tahta bekerja sama dengan Belanda. Keadaan inilah yang sangat ditentang oleh Pangeran Antasari, salah seorang pangeran dari Banjarmasin. *Perang Banjarmasin* pada 1859 dipimpin oleh Antasari yang menentang kehadiran Belanda dalam keluarga kerajaan di Banjarmasin. la putra dari Sultan Muhammad yang sangat anti-Belanda. Pangeran Antasari melakukan pertempuran sengit sampai ia gugur pada 1862.

C PERKEMBANGAN PENDIDIKAN BARAT DAN PENDIDIKAN ISLAM

Dalam bidang politik, pemerintah kolonial Belanda pernah menerapkan politik etis yang mulai dilaksanakan lebih intensif pada saat Hindia Belanda (Indonesia) berada di bawah Gubernur Jenderal Idenburg tahun 1899-1906. Politik ini difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau kependudukan, dan irigasi atau pengairan.

Edukasi dimaksudkan untuk mendidik warga pribumi agar memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mendukung birokrasi dan administrasi kolonial Belanda. Pemerintah kolonial mendirikan sekolah bagi para *pamongpraja* (para pegawai) yang kelak lulusannya dapat dipekerjakan di kantor pemerintah. Adapun irigasi dimaksudkan untuk meningkatkan produksi pertanian dan perkebunan rakyat. Sementara migrasi merupakan program pemindahan penduduk dari daerah padat di Jawa ke daerah yang masih jarang penduduknya di luar Jawa.

Prinsip edukasi dalam pelaksanaanya dikembangkan lebih baik dari yang lainya, penduduk pribumi diberi kesempatan yang secara terbuka untuk masuk ke sekolah-sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial. Namun demikian terdapat perbedaan pendekatan pelaksanaanya. Pendekatan pertama dikemukakan oleh Snouck Hurgronje. Dia berpendapat bahwa pendidikan model Barat ialah yang paling tepat diterapkan bagi penduduk pribumi sehingga kesempatan harus dibuka terutama bagi warga pribumi dari kalangan yang mampu dan memiliki kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Warga pribumi harus dididik dengan cara Barat dan menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Pendekatan ini bertujuan untuk mendidik warga pribumi sehingga memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk memperkuat pemerintahan jajahan di Indonesia.

Pendekatan kedua dikemukakan oleh Idenburg dan van Heutsz yang menjadi gubemur jenderal pada 1904–1909. Pendekatan ini menginginkan bahwa edukasi yang diterapkan menekankan kepada pendekatan praktis dan sifatnya mendasar bagi masyarakat pribumi. Pada akhirnya, konsep Idenburg dan van Heutsz lebih diterima dan dikembangkan. Karena, konsep ini lebih mengarah kepada budaya lokal dan lebih menekankan kepada peningkatan kesejahteraan pribumi.

Dalam rangka melaksanakan politik etis, pemerintah kolonial melakukan penataan sistem pendidikan yang sudah ada. Tiga sekolah praja *Qwofdenschool* di Bandung, Magelang, dan Probolinggo yang didirikan pada akhir abad ke-19 melakukan upaya penataan ulang. Sekolah tersebut bertujuan untuk melahirkan para birokrat yang dapat bekerja pada pemerintah kolonial. Di sekolah tersebut diajarkan pendidikan umum dan berbagai pengetahuan dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa Belanda pemerintah kolonial Belanda.

Selain sekolah pamongpraja, terdapat sekolah lain yaitu sekolah dokter Jawa atau *School tot Opieiding van Inlandische Arisen* (STOVIA) yang diperuntukkan bagi pribumi untuk menjadi dokter. Kemudian pemerintah kolonial juga mendirikan sekolah guru atau *kweekschool* yang bertujuan mendidik kaum pribumi untuk menjadi guru yang berpendidikan Belanda.

Pemerintah kolonial juga melakukan penataan ulang sekolah untuk tingkat dasar dan menengah yang mulai di buka sejak 1892-1893. Sekolah tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

1) sekolah kelas satu *(eerste klasse)* dibuka untuk anak-anak priyayi atau keturunan bangsawan pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda;
2) sekolah kelas dua atau *(tweede klasse)* adalah sekolah untuk rakyat biasa dengan menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah atau bahasa Melayu dan tanpa pelajaran bahasa Belanda.

Sekolah kelas satu diubah pada 1914 menjadi *Holandsch-Indische Scholen* (HIS). Sekolah ini merupakan sekolah Belanda-pribumi yang setingkat Sekolah Dasar dengan sistem pendidikan model Eropa. Lulusan dari sekolah itu dapat meneruskan ke jenjang SLTP yang disebut *Meer Uitgebreid Lager Onderwijs* (MULO) yang sudah didirikan pada 1914. Sekolah ini didirikan hanya untuk kalangan priyayi atau bangsawan. Lulusan dari MULO dapat meneruskan ke *Algemeene Middlebare School* (AMS) setingkat SMU yang sudah didirikan pada 1919. Sekolah ini menyiapkan para siswa untuk memasuki perguruan tinggi di Negeri Belanda.

Jumlah penduduk pribumi yang memasuki sekolah Belanda atau sekolah priyayi hanya sedikit sekali. Hal ini disebabkan pemerintah kolonial membatasi kesempatan tersebut yang didasarkan atas kedudukan ekonomi keluarga serta asal-usul keturunan. Hanya anak kaum priyayi atau bangsawan yang diberi kesempatan untuk masuk ke sekolah HIS, MULO, atau AMS. Oleh karena itu, pada 1905 hanya terdapat 36 orang Indonesia yang dapat meneruskan sekolah ke universitas di Negeri Belanda. Salah seorang Indonesia yang memperoleh gelar doktor (S-3) dari universitas di negeri Belanda adalah Husein Djajadiningrat**,** seorang keluarga Bupati di Jawa Barat. la menulis disertasi berjudul *Tinjauan Kritis tentang Sejarah Banten (Cristische Beschouwing van de Sedjarah Banten)* dan menyelesaikan doktornya dari Universitas Leiden pada 1913.

Dalam perkembanganya, tepatnya pada 1920, pemerintah kolonial Belanda mulai menghapuskan diskriminasi dalam sistem pendidikan. Semua penduduk pribumi diperbolehkan memasuki sekolah apa saja, asal memiliki uang untuk membayar biayanya. Pada 1920, dibuka *Technische Hooge School* (Sekolah Tinggi Teknik) yang kelak menjadi ITB di Bandung. Pada l924, dibuka *Rechtskundige Hooge School* (Sekolah Hakim Tinggi) di Batavia (Jakarta) dan tahun 1927, STOVIA diubah menjadi *Geneeskundige Hoogeschool* (Sekolah Tinggi Kedokteran). Semua sekolah tersebut terbuka untuk semua golongan.

Penghapusan perbedaan ras atau asal-usul keturunan terlihat dalam pembukaan sekolah-sekolah di desa *(desascholen* atau *volksscholen).* Sekolah-sekolah yang menggunakan bahasa pengantar bahasa daerah tersebut dibiayai oleh penduduk dengan bantuan pemerintah kolonial. Jumlah peminatnya cukup tinggi dan tersebar di berbagai desa. Pada 1912, telah berdiri sejumlah 2500 sekolah desa dan pada 1930 meningkat menjadi 9600 sekolah. Lebih dari 40 persen anak-anak pribumi usia SD memasuki sekolah desa dan sebagian di antaranya masuk ke sekolah sambungan *(Schakelschool)* sebelum memasuki HIS atau MULO.

Di samping pendidikan umum, politik etis juga mendorong lahirnya pendidikan keterampilan. Pendidikan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja bagi keperluan kedinasan yang semakin bertambah. Sekolah-sekolah kejuruan yang didirikan meliputi sekolah teknik, pertanian, perternakan, kehutanan, perdagangan, hukum, dan guru.

Kebijakan politik etis berpengaruh luas terhadap peningkatan pendidikan bangsa Indonesia. Hal ini tampak dari lahirnya banyak sekolah, baik yang didirikan oleh pemerintah kolonial, sekolah-sekolah Islam yang dikelola pesantren, misi-misi Kristen, serta pendidikan perempuan, seperti R.A. Kartini di Jawa Tengah dan Raden Dewi Sartika di Jawa Barat, serta sekolah-sekolah perempuan lainnya di berbagai daerah.

Perkembangan sampai 1900, jumlah orang Indonesia yang memasuki sekolah formal berjumlah 265.940 siswa dan tiga puluh tahun kemudian jumlah itu meningkat lagi menjadi 1,7 juta penduduk. Adapun yang dapat bersekolah di sekolah Belanda mulai dari HIS, MULO, AMS, yaitu 84.609. Sebagian kecil dari lulusan AMS atau sejumlah 178 orang menjadi mahasiswa di berbagai perguruan tinggi. Jumlah kelompok terdidik itulah yang kelak menjadi kelompok masyarakat yang pertama menyadari bahwa penjajahan Belanda harus diakhiri. Mereka juga menginginkan agar mendirikan negara merdeka dengan pemerintahan sendiri. Hal ini menjadi tujuan utama perjuangan mereka.

Selain pendidikan yang dimotori oleh pemerintah kolonial, peran pendidikan Islam dalam melahirkan nasionalisme juga sangat penting. Golongan terpelajar Islam lahir karena pendidikan pesantren. Pendidikan ini memiliki tradisi yang panjang dan bahkan lahir sebelum pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan pendidikan Barat. Sebagian penduduk Indonesia yang mulai menyadari bahwa pendidikan itu adalah penting mulai menyekolahkan anak- anaknya ke pesantren. Dengan bekal pendidikan agama serta pendidikan umum, banyak di antara alumni pesantren yang menjadi tokoh masyarakat.

Banyak di antara lulusan pesantren yang mampu melaksanakan ibadah haji ke Mekkah. Setelah melalui perjalanan panjang dari tempat asal mereka ke Mekkah dan lamanya tinggal di negeri Arab, banyak jemaah haji Indonesia yang bergaul dengan umat Islam dari seluruh dunia. Melalui pergaulan dan pertukaran pengetahuan dan pengalaman itu, pandangan jemaah haji Indonesia tentang dirinya, agama yang dianut serta keadaan negaranya semakin terbuka. Mereka juga mulai menyadari bahwa penjajahan Belanda sangat merugikan mereka dan kepentingan umat Islam. Kesadaran tersebut kemudian disebarkan ke lingkungan pesantren mereka setelah tiba di tanah air.

Adanya pendidikan Islam serta banyaknya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, lahir pula kelompok umat Islam Indonesia yang berpandangan modern. Mereka disebut sebagai golongan Islam modernis. Kelompok ini menyadari bahwa sebagian besar orang Indonesia adalah sangat miskin dan terbelakang. Mereka menghendaki bahwa untuk mengatasi hal itu diperlukan perjuangan di berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan politik.

Dalam bidang pendidikan, sebagian kaum Islam modernis juga menghendaki didirikannya pendidikan Islam yang modern, baik berbentuk pesantren maupun pendidikan umum. Organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan lainnya merupakan organisasi yang menyadari betapa pentingnya aspek pendidikan untuk meningkatkan harkat dan derajat warga pribumi yang masih dijajah.

D. POLITIK ETIS

Politik etis (politik balas budi) muncul pada tahun 1890 atas desakan golongan liberal dalam parlemen Belanda. Mereka yang berhaluan progresif tersebut memberikan usulan agar pemerintah Belanda memberikan perhatian kepada masyarakat Indonesia yang telah bersusah payah mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa. Desakan ini muncul dari pemikiran bahwa negeri Belanda telah berutang banyak atas kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh masyarakat Belanda.

Gagasan politik etis muncul dari Conraad Theodore van Deventer melalui tulisannya di majalah De Gids pada tahun 1899, dengan judul Een Eereschuld (Suatu Utang Budi). Dalam tulisan tersebut, van Deventer memberikan usulan agar pemerintah Belanda melaksanakan program yang bertujuan untuk membalas budi bangsa Indonesia. Program tersebut dikenal dengan istilah trilogi van Deventer, yang berisi :Penyebaran Berita Proklamasi

1. Edukasi (Pendidikan)
2. Irigasi (Pengairan)
3. Imigrasi (Perpindahan penduduk)

Meskipun pemerintah Belanda telah menjalankan politik etis, tetap saja bangsa Indonesia belum mengalami perubahan yang berarti. Politik etis hanya menguntungkan Belanda, karena program pendidikan, pengairan dan perpindahan penduduk yang dicanangkan melalui politik etis dilaksanakan seluruhnya untuk memberikan keuntungan bagi pemerintah Belanda. Namun di sisi lain, tanpa di sadari oleh Belanda, politik etis ternyata telah melahirkan golongan terpelajar dari kalangan bangsa Indonesia, mereka inilah yang nantinya akan menggerakkan masyarakat untuk melawan Belanda melalui organisasi pergerakan nasional. Golongan terpelajar ini menyadari bahwa hanya dengan kemerdekaanlah bangsa Indonesia akan maju, sejahtera dan sejajar dengan bangsa lainnya di dunia.

E. PERAN GOLONGAN TERPELAJAR, PROFESIONAL DAN PERS DALAM MENUMBUHKAN KEBANGKITAN NASIONAL

Adanya perkembangan pendidikan Barat dan pendidikan Islam mendorong kaum bumiputera mendapatkan peluang untuk mendapatkan pendidikan formal. Sehubungan dengan itu, lahir golongan terpelajar Indonesia. Kelompok tersebut memiliki kedudukan yang terhormat pada awal abad ke-20. Mereka lebih pintar dari kebanyakan orang Indonesia. Adapun dilihat dari kedudukan ekonominya, mereka lebih baik dari orang-orang Indonesia lainnya.

Kelompok terpelajar Indonesia juga disebut sebagai kelompok masyarakat. Mereka terdiri atas para profesional atau yang memiliki keahlian tertentu karena pendidikan yang mereka sandang, seperti dosen, guru, dokter, dan ahli ekonomi. Mereka disebut profesional karena merupakan kelompok masyarakat yang memiliki keahlian yang terbentuk berkat pendidikan. Sekolah yang dimasukinya ternyata dapat mengubah kedudukan mereka yang terpandang dan dapat berperan dalam masyarakat Indonesia.

Kelompok terpelajar merupakan kelompok pertama yang menyadari bahwa penjajahan telah merugikan kepentingan bangsa Indonesia. Penjajahan yang melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan antara orang Belanda dan pribumi harus dilawan. Mereka menjadi kelompok yang dapat menyampaikan ide-idenya tentang kebangsaan.

Kaum terpelajar berpendapatan bahwa penjajahan Belanda memiliki beberapa keburukan, di antaranya sebagai berikut.

1) Adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap penduduk pribumi di segala bidang.
2) Belanda menguras sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk kepentingan kolonial dan negeri Belanda.
3) Belanda sangat takut jika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pintar dan maju.

Peranan kelompok terpelajar dalam membangkitkan kesadaran nasional tampak dalam kegiatan diskusi sosial atau politik yang sering mereka selenggarakan dalam proses belajar mereka. Peranan mereka dilakukan di antaranya melalui hal-hal berikut.

1) Organisasi politik yang berperan sebagai sarana perjuangan mereka untuk mewujudkan cita-citanya.
2) Melalui kegiatan-kegiatan tersebut, timbullah suatu kekuatan sosial baru dalam pentas politik nasional yang menyadari nasib buruk yang dialami bangsanya. Kelompok inilah yang kelak menjadi pemicu pergerakan nasional.
3) Menyapaikan kritik kepada kebijakan politik kolonial di Indonesia bahwa pemerintah kolonial telah melakukan praktik diskriminasi terhadap masyarakat pribumi.
4) Menyebarkan gagasan nasionalisme dan semangat kebangsaan dari hasil bacaan terhadap karya filsuf-filsuf dunia.

Sesungguhnya semangat kebangsaan bukan hanya ditumbuhkembangkan oleh golongan terpelajar di Indonesia, melainkan juga oleh pelajar Indonesia yang sekolah di negeri Belanda. Mereka juga banyak mempelajari pemikiran-pemikiran nasionalis, semangat demokrasi, dan hak-hak asasi manusia. Setelah belajar dan bergaul dengan berbagai bangsa, mereka dapat menyaksikan secara lebih nyata bahwa pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia juga ditentang oleh golongan terpelajar Belanda di negerinya sendiri.

Kaum terpelajar Indonesia yang berada di Belanda menemukan ide-ide politik mengenai kebebasan sipil dan pemerintah demokratis. Pemikiran-pemikiran dan kelompok sosialis yang antikapitalisme juga dicerna dengan baik oleh mereka dan dijadikan sebagai salah satu semangat perjuangan untuk melawan kolonialisme di Indonesia, serta mendorong kemerdekaan ekonomi dan politik.

Selain kaum terpelajar, pers juga memiliki peranan penting dalam menumbuhkembangkan semangat kebangsaan atau nasionalisme. *Pers* adalah kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan penerbitan berita atau informasi, baik melalui media cetak maupun elektronik. Penerbitan pers didukung oleh para golongan terpelajar yang berprofesi sebagai penulis, wartawan, atau penyiar berita. Bahasa cetak menjadi sarana penting dalam menumbuhkan semangat dan kesadaran nasional. Melalui pers, komunikasi dan penyebaran infomiasi lebih bebas, terbuka, dan dapat diakses oleh siapapun tanpa membedakan golongan dan kedudukan sosial ekonomi.

F. PERKEMBANGAN BEBERAPA ORGANISASI PERGERAKAN NASIONAL

Dalam sub bab sebelumnya telah dibahas mengenai dampak munculnya politik etis bagi bangsa Indonesia, yaitu munculnya golongan terpelajar yang kemudian mendirikan organisasi-organisasi pergerakan nasional, berikut adalah profil beberapa organisasi tersebut:

1. Budi Utomo

Budi Utomo didirikan tanggal 20 Mei 1908 oleh dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo, seorang pelajar STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) di Jakarta. Pada awal perkembangannya, Budi utomo merupakan organisasi pelajar dengan pelajar STOVIA sebagai intinya. Namun, setelah kongresnya yang pertama pada Bulan Oktober 1908, Budi Utomo berubah haluan menjadi organisasi yang keanggotaannya terdiri dari para pegawai negeri dan priyayi yang berasal dari suku Jawa dan Madura. Ditegaskan pula dalam kongres tersebut bahwa Budi Utomo hanya bergerak dalam bidang pendidikan, pengajaran dan kebudayaan.

Dalam anggaran dasarnya yang disetujui pemerintah pada tanggal 28 Desember 1908, Budi utomo bertekad untuk memajukan bangsa dan nusa Jawa dan Madura serta memberikan bantuan kepada orang-orang yang yang mempeunyai tujuan yang sama.

2. Sarekat Islam

Pada awalnya, Sarekat Islam bernama Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911 untuk membendung monopoli perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Cina. Pada tahun 1912, Sarekat Dagang Islam berubah menjadi Sarekat Islam dengan HOS Cokroaminoto sebagai ketuanya.

Keanggotaan SI terbuka untuk semua golongan dan suku yang beragama Islam. Tujuan pergerakannya adalah memajukan perdagangan, membantu anggotanya yang mengalami kesulitan dan memajukan kepentingan Islam serta kepentingan jasmani dan rohani.

3. Indische Partij

Indische Partij didirikan di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912 oleh E.F.E Douwes Dekker (Danudirdja Setiabudi), dr. Tjipto Mangunkusumo dan R.M. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara). Indische Partij secara tegas menyatakan tujuannya yaitu melepaskan diri dari penjajahan Belanda dengan semboyan "Indie los van Holland" (Hindia bebas dari Holland) dan "Indie voor Inders" (Hindia untuk orang Hindia).

Indische Partij merupakan organisasi yang menerapkan prinsip nasionalisme hindia sehingga organisasi ini terbuka luas bagi seluruh golongan, baik suku bangsa maupun agama. Dengan demikian, partai ini berusaha untuk menghilangkan diskriminasi dikalnagan masyarakat.

4. Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan organisasi yang bergerak dalam bidang sosial keagamaan. Didirikan di Yogyakarta oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Nopember 1918. Tujuan Muhammadiyah adalah mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Alqur'an dan Sunnah, serta memberantas kebiasaan kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan Muhammadiyah tersebut direalisasikan dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, pusat-pusat pelayanan kesehatan, serta masjid masjid dan lembaga da'wah.

Selain di Yogyakarta, Muhammadiyah juga segera menyebar ke kota-kota lain baik yang ada di Jawa maupun di Pulau Jawa. Sampai saat ini, Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi yang masih tetap berdiri dan konsisten dalam melaksakan programnya yaitu memajukan pendidikan Islam.

5. Taman Siswa

Taman Siswa didirikan oleh Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantar) pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta dan bergerak dalam bidang pendidikan.

Pendidikan Taman Siswa didasarkan pada sistem among, dimana guru bertindak sebagai pemimpin yang berada di belakang dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk maju dan berkembang di depan dengan arahan sang guru. Selain itu, Taman Siswa da menggunakan sistem pondok, dimana guru dan siswa tinggal bersama dalam satu asrama. Melalui sitem pendidikan kebangsaannya, Taman Siswa semakin berkembang dan memiliki beberapa cabang di luar Kota Yogyakarta.

6. Partai Nasional Indonesia

Organisasi ini didirikan oleh Ir. Sukarno di Bandung pada tanggal 4 Juli 1927 sebagai kelanjutan dari organisasi pelajar bernama Algemeene Studie Club. Tujuan utama PNI adalah mencapai kemerdekaan, karena dengan merdeka bangsa Indonesia dapat memperbaiki struktur masyarakat, sosial, ekonomi dan politik secara mapan.

PNI adalah salah satu partai yang keras dan radikal terhadap pemerintah Belanda, mereka menolak mentah-mentah mendudukkan wakilnya didalam volksraad (semacam Dewan perwakilan bangsa Indonesia yang dibentuk oleh Belanda). Karena sifatnya yang radikal inilah, pemerintah Belanda kemudian menangkap para peminpin PNI, bahkan beberapa tokoh PNI seperti Sukarno harus di hukum buang ke beberapa daerah. Hukuman yang dijatuhkan kepada para tokoh PNI ini berpengaruh besar terhadap perkembangan partai, sehingga partai ini kemudian membubarkan diri dan terpecah menjadi dua, yaitu PNI Baru dan Partindo.

7. Gerakan Wanita

Gerakan wanita pada awalnya diprakarsai oleh R.A. Kartini, diteruskan oleh Dewi Sartika dan Maria Walanda Maramis. Gerakan wanita kemudian berkembang melalui organisasi-organisasi kewanitaan seperti Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1922 sebagai bagian dari Budi utomo yang memiliki program bimbingan pengajaran untuk para gadis, pemberian beasiswa dan menerbitkan majalah sendiri yang dinamakan “Putri Mardika”.

Di Tasikmalaya berdiri organisasi Kautamaan Istri yang menaungi sekolah-sekolah yang didirikan Dewi Sartika. Selain Putri Mardika, berdiri pula organisasi-organisasi bagian dari organisasi yang sudah ada, seperti Aisyiyah sebagai bagian dari Muhammadiyah, dan Sarekat Puteri Islam sebagai bagian dari Sarekat Islam.

Pada tanggal 22-25 Desember tahun 1928 diadakan Kongres Perempuan pertama yang memicarakan masalah persatuan di kalangan wanita, masalah wanita dalam keluarga, poligami dan perceraian. Hasil terpenting dari kongres ini adalah terbentuknya Perserikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI). PPPI inilah yang kemudian menyelenggarakan Kongres Perempuan yang kedua pada tahun 1935 dengan pokok bahasan masalah buruh

wanita, pemberantasan buta huruf dan semangat kebangsaan. Sangat terlihat dalam kongres yang kedua ini para wanita Indonesia mampu memposisikan dirinya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perjuangan nasional demi merebut kemerdekaan dari tangan penjajah.

G. KONGRES PEMUDA DAN KONGRES PEREMPUAN

1. Kongres Pemuda

a. Jong Java

Para pemuda pada 1920 mengadakan kongres yang ketiga di Solo dan pertengahan 1921 kongres yang keempat di Bandung. Dalam kongres-kongres tersebut, seperti juga dalam kongres kedua, dibicarakan soal semi-politik. Pada kongres di Bandung dalam anggaran dasar ditetapkan sebagai tujuan membangun cita-cita Jawa Raya dengan jalan mengembangkan rasa bersatu di antara golongan orang Indonesia di Jawa, Madura, dan Bali untuk mencapai kemakmuran dan kekayaan batin. Jadi, bukan untuk tujuan politik. Selain itu, disebutkan bahwa perkumpulan tidak akan ikut dalam aksi politik. Kongres kelima (Mei 1922 di Solo) dan kongres luar biasa (Desember 1922) memberikan ketentuan tentang hal ini dengan semata-mata menetapkan bahwa Jong Java tidak akan mencampuri aksi atau propaganda politik. Tujuan yang akan dicapai dengan jalan:

1) mengadakan hubungan antara murid-murid sekolah menengah;
2) mempertinggi pengetahuan untuk kebudayaan sendiri;
3) menambah pengetahuan umum dari para anggota;
4) melakukan olahraga.

Jong Java berkewajiban membentuk calon-calon pemimpin (laki-laki dan perempuan) di semua lapangan pergerakan. Membicarakan acara-acara sosial dan politik (yang tetap dianggap perlu) hanya dijalankan untuk menambah pengetahuan anggota. Anggota baru akan ikut dalam politik kalau sudah tamat belajar. Tentang kedudukan wanita dalam masyarakat, perempuan tidak saja harus diberi hormat sepantasnya, akan tetapi harus terlepas dari adat yang mengikat dan merendahkannya. Tidak saja anak laki-laki, tetapi juga anak-anak perempuan harus dapat didikan persiapan untuk kewajiban kebangsaan. Persiapan untuk anak perempuan harus tambah dipentingkan karena kaum wanita berkewajiban pula mendidik anak-anak.

Dalam Kongres Jong Java 27-31 Desember 1926 di Solo, suara bulat tujuan perkumpulan diubah menjadi akan berusaha memajukan rasa persatuan para anggota dengan semua golongan bangsa Indonesia dan bekerja sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda Indonesia lainnya dalam menyebarkan dan memperkuat paham Indonesia bersatu. Sebelumnya oleh ketua (RT. Djaksodipuro, kemudian bernama RT Wongsonegoro) yang menjadi anggota perkumpulan para mahasiswa PPPI dijelaskan bahwa tujuannya tidak

pernah membangun Jawa Raya saja, tetapi untuk Indonesia Merdeka. Selanjutnya dalam kongres diputuskan membagi anggotanya dalam anggota biasa (umur 18 tahun atau lebih) dan calon anggota (umur 18 tahun). Calon anggota tidak diperbolehkan mengunjungi rapat anggota, tetapi boleh ikut dalam bagian olahraga, kesenian dan kepanduan. Dengan jalan ini, Jong Java dapat ikut dalam lapangan politik.

b. Pemuda Indonesia

Pemuda-pemuda di Bandung yang merasa dirinya semata-mata orang Indonesia dan merasa tidak sanggup lagi duduk dalam perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berdasarkan kedaerahan, pada permulaan 1927 (sebelum PNI berdiri) mendirikan perkumpulan Jong Indonesia. Nama itu dalam kongres pertama Desember 1927 diubah menjadi *Pemuda Indonesia.*

Dalam kongres itu anggaran dasar ditetapkan dan sebagai tujuannya disebutkan, menyebarkan dan memperkuat cita-cita kebangsaan Indonesia bersatu. Usahanya antara lain dengan jalan bekerja bersama-sama dengan perkumpulan-perkumpulan pemuda lain, memajukan kepanduan kebangsaan Indonesia, dan berolahraga bersama.

Meskipun tidak ikut dalam praktik politik, jiwa pemuda Indonesia penuh dengan cita-cita politik. Persatuan batin dengan PNI tidak disembunyikan dan dikatakan dengan terus terang. Dalam Kongres Pemuda Indonesia ke-2 pada 24–28 Desember 1923 di Jakarta dengan suara 5 lawan 2 diputuskan untuk menyetujui usul fusi dari PPPI.

c. Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI)

Perkumpulan ini dimulai pada 1925, tetapi baru dalam 1926 didirikan dengan resmi. Anggotanya ialah mahasiswa sekolah-sekolah tinggi di Jakarta dan Bandung. Asasnya didasarkan pada pertentangan (antithese) kolonial dan bercita-cita mendidik anggota untuk kewajibannya, kemerdekaan bangsa yang diidamkan ialah Indonesia Raya Merdeka.

Jasa PPPI dalam kalangan perkumpulan-perkumpulan pemuda berpengaruh besar. Anggota-anggotanya, yaitu mahasiswa, buat pelajar-pelajar menengah adalah menjadi saudara tua. Anggota PPPI juga banyak yang merangkap menjadi pemimpin perkumpulan-perkumpulan.

d. Jong Islamieten Bond (JIB)

Suatu perkumpulan baru didirikan oleh orang-orang yang keluar dari Jong Java setelah gagal usahanya:

1) supaya Jong Java dalam programnya menetapkan kemajuan agama Islam dan dengan ini Jong Java meninggalkan sikapnya yang nasionalistis netral;
2) supaya Jong Java mencabut larangan terhadap anggotanya untuk ikut dalam gerakan politik.

Ketua JIB adalah R. Sam, bekas ketua Jong Java dan Haji Agus Salim diangkat sebagai penasihat. Berbeda dengan Jong Java, perkumpulan ini berdasarkan agama Islam dan persatuan dalam Islam. JIB terbuka untuk semua orang Islam Indonesia, tidak saja pelajar-pelajar, tetapi orang yang tamat belajar boleh menjadi anggota asal umurnya tidak

lebih dari 30 tahun. Dengan ini tujuannya memperkuat ke-Islaman antara kaum terpelajar Indonesia. Seperti juga Jong Java, perkumpulan ini tidak mencampuri praktik politik, tetapi anggota-anggotanya sendiri dibolehkan ikut dalam gerakan politik. JIB sendiri sebagai perkumpulan akan berusaha (seperti Jong Java) dengan sungguh-sungguh untuk melebarkan dan menjernihkan kepahaman politik anggotanya. Ia akan menjadi edisi baru dari Sarekat Islam untuk pemuda terpelajar, seperti Jong Java dalam banyak hal merupakan gambaran dari Budi Utomo.

Perlu dicatat adalah keterangan pengertian nasionalisme yang buat orang Islam yang baik harus berarti mencintai tanah air dan bangsa. Selain itu juga mencintai orang-orang seagama di luar negeri dan semua manusia.

2. Kongres Perempuan Pertama

Tokoh yang dianggap pelopor perjuangan wanita untuk menjunjung derajat kaum wanita adalah Ibu Kartini, putri Bupati Jepara. Ia lahir pada 21 April 1897 dan wafat pada 13 September 1901. Pada awalnya, gerakan wanita itu tidak mencapai urusan politik. Tujuan umumnya ialah menjunjung tinggi derajat kaum wanita dengan usaha memperluas pendidikan dan pengajaran bagi kaumnya, serta melepaskan ikatan adat istiadat yang menghambat kaum wanita (emansipasi).

Gambar 4.1 *R.A Kartini*
Sumber: Lukisan sejarah

Hasrat untuk bersatu itu tumbuh dalam kalangan wanita, sehingga antara 22-25 Desember 1928 organisasi-organisasi wanita mengadakan kongres di Yogyakarta. Kemudian mereka menamakan diri Perserikatan Perempuan Indonesia. Pada kongresnya yang pertama di Jakarta akhir 1929 berganti nama menjadi Perserikatan Perkumpulan Istri Indonesia (PPII). Pada kongres III di Bandung dalam bulan Juli 1938 (Kongres Perempuan Indonesia III) memutuskan bahwa 22 Desember sebagai hari Ibu.

RANGKUMAN

1. Perlawanan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia terhadap kedatangan dan dominasi bangsa Barat disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya sebagai berikut.
   a) Gerakan bangsa Barat yang cenderung menguasai dan menjajah sumber daya alam serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia.
   b) Hasrat untuk hidup tenang sesuai dengan adat-istiadat setempat dari rakyat Indonesia.
   c) Hasrat untuk menegakkan kedaulatan dan kemandirian serta tidak ingin dicampuri oleh bangsa asing.
   d) Kolonialisme dan imperialisme sangat membelenggu masyarakat Indonesia.

2. Agama Kristen yang menyebar di Indonesia berasal dari berbagai aliran agama Katolik yang mengakui kekuasaan Paus di Roma.
3. Menurut catatan sejarawan, masuk dan berkembangnya agama Kristen bersamaan dengan masuk dan berkembangnya penjelajahan dan pelayaran dunia yang dilakukan oleh bangsa Portugis, Spanyol, dan Belanda di Indonesia.
4. Politik etis yang dipraktikkan oleh Belanda difokuskan pada pengembangan edukasi atau pendidikan, migrasi atau kependudukan, dan irigasi atau pengairan.
5. Selain pendidikan yang dimotori oleh pemerintah kolonial, peran pendidikan Islam dalam melahirkan nasionalisme juga sangat penting. Golongan terpelajar Islam lahir karena pendidikan pesantren.
6. Kaum terpelajar berpendapat bahwa penjajahan Belanda memiliki beberapa keburukan, di antaranya sebagai berikut.
   a) Adanya diskriminasi dan pembatasan terhadap penduduk pribumi di segala bidang.
   b) Belanda menguras sumber daya alam dan manusia Indonesia untuk kepentingan kolonial dan negeri Belanda.
   c) Belanda sangat takut jika bangsa Indonesia menjadi bangsa yang pintar dan maju.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Bangsa Barat yang pertama kali menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara adalah ....

   a. Belanda
   b. Spanyol
   c. Inggris
   d. Portugis

2. Berikut ini yang *bukan* merupakan tujuan Belanda mendirikan VOC adalah ...
   a. menghindarkan persaingan antarpengusaha Belanda
   b. mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
   c. agar mampu bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain seperti Portugis dan Spanyol
   d. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

3. Perlawanan Bangsa Indonesia mengusir bangsa Barat dilakukan sejak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia yang mengalahkan Kerajaan Malaka pada tahun ....
   a. 1511
   b. 1115
   c. 1512
   d. 1215

4. Sebelum menyebar ke Indonesia, agama Kristen menyebar dari tanah kelahirannya, yaitu ....
   a. Palestina
   b. Israil
   c. Mesir
   d. Iran

5. Kongres Perempuan Pertama pada tahun 1929 diadakan di Kota ....
   a. Bandung
   b. Jakarta
   c. Surabaya
   d. Medan

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan faktor pendorong bangsa Barat datang ke wilayah Indonesia!
2. Jelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang ditetapkan VOC dalam rangka menguasai wilayah Indonesia!
3. Jelaskan daerah-daerah persebaran agama Nasrani di Indonesia!
4. Jelaskan yang kamu ketahui tentang Jong Java dan Jong Islamieten Bon (JIB)!
5. Apakah manfaat yang bisa kalian ambil dari peringatan Hari Kebangkitan Nasional ?

TUGAS

Carilah tokoh sejarah atau seorang tokoh masyarakat di daerah tempat tinggalmu, kemudian wawancarai tentang:

1. Awal mula dan proses persebaran agama mayoritas di sekitar tempat tinggalmu.
2. Bentuk perlawanan di daerahmu terhadap penjajah pada zaman VOC.
3. Peran pelajar dalam rangka memelihara semangat kebangkitan nasional.

Bab V

PENYIMPANGAN SOSIAL

Standar Kompetensi

Memahami masalah penyimpangan sosial.

Kompetensi Dasar

1. Mengidentifikasi berbagai penyakit sosial (miras, judi, narkoba, HIV/AIDS, PSK, dan sebagainya) sebagai akibat penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.
2. Mengidentifikasi berbagai usaha pencegahan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat.

Pernahkah kamu mendengar seorang artis meninggal dunia di kamar hotel berbintang dengan tubuh penuh suntikan heroin? Atau pelajar ditangkap polisi karena menjual ganja? Mungkin pernah mendengar pula, ratusan pelajar tawuran antarsekolah? Peristiwa yang pernah kamu dengar itu merupakan salah satu identifikasi (tanda bukti, ciri-ciri) penyimpangan sosial.

Pada bab ini kamu akan belajar tentang penyimpangan sosial, bentuk penyimpangan sosial, contoh penyimpangan sosial, akibat penyimpangan sosial, faktor penyebab terjadinya penyimpangan sosial, dan upaya-upaya pencegahan, serta mengetahui pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam menangani penyimpangan sosial.
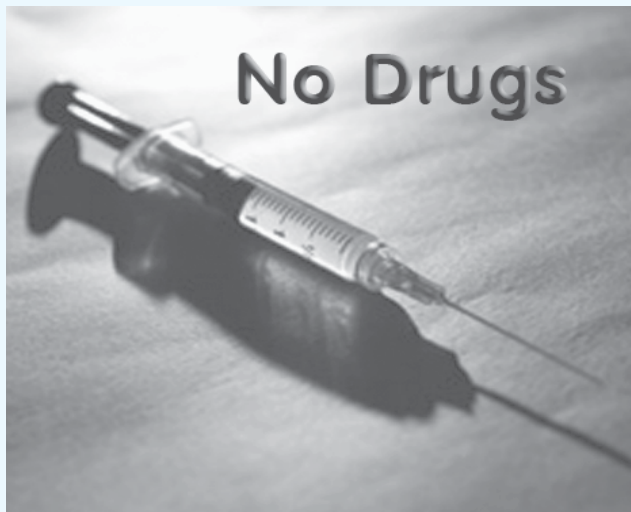
Jarum suntik
Sumber: CD ClipArt Volume 3

PETA KONSEP
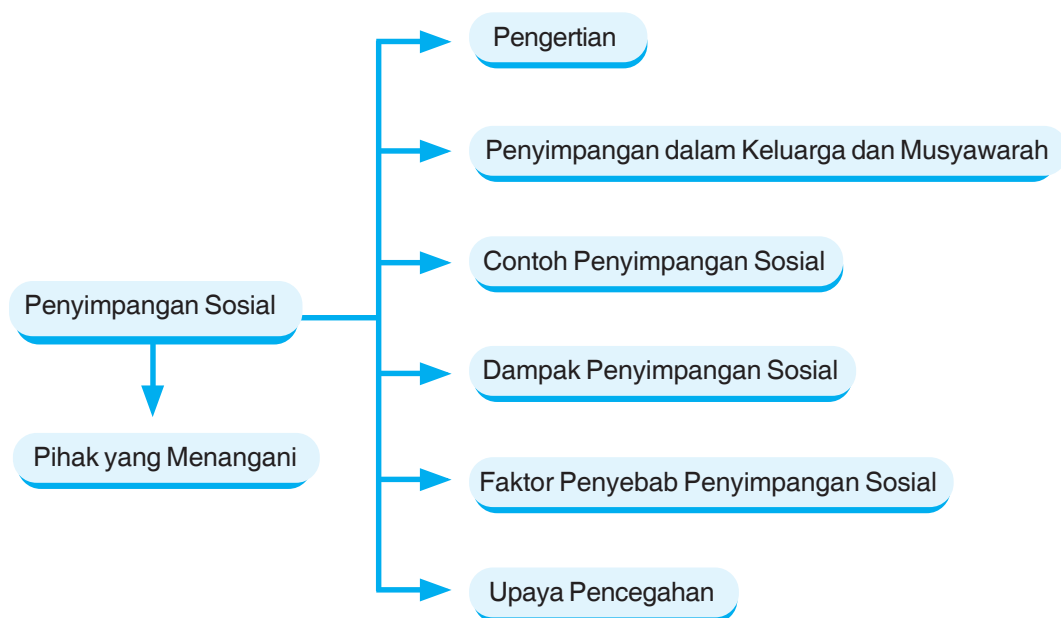
Kata Kunci

- Penyimpangan
- Keluarga
- Masyarakat
- Pencegahan
- Dampak penyimpangan

A. PENGERTIAN PENYIMPANGAN SOSIAL

Manusia merupakan makhluk sosial. Oleh karenanya, manusia hidup berkelompok. Hidup berkelompok dimaksudkan sebagai upaya mempertahankan kelangsungan hidup, seperti bekerja, mengatasi ancaman, mencari nafkah, gangguan, dan melanjutkan keturunan.

Dalam mempertahankan hidup, kelompok manusia tinggal menetap pada suatu tempat tertentu. Kumpulan kelompok-kelompok manusia itu kemudian dikenal dengan istilah masyarakat.

Dalam praktiknya, kumpulan kelompok-kelompok masyarakat tersebut menyepakati bersama tentang aturan, norma, budaya, dan kesusilaan. Aturan yang dibuat itu dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tenteram.

Meskipun demikian, di antara anggota masyarakat ada yang tidak mengindahkan aturan, norma, budaya, dan kesusilaan sehingga menimbulkan keresahan. Melanggar aturan, norma, atau budaya yang telah disepakati bersama merupakan penyimpangan sosial.

B. PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Penyimpangan sosial sering dikenal dengan istilah **penyakit masyarakat**. Dikatakan demikian karena perilaku menyimpang itu sangat meresahkan masyarakat. Jika kamu menelusuri sebab-sebab munculnya penyimpangan sosial, cenderung berawal dari kondisi keluarga seperti berikut ini.

1. Kekerasan dalam Keluarga

Kekerasan yang diterima anak dalam keluarga akan menimbulkan goncangan dan tekanan jiwa. Kondisi ini akan menyebabkan penyimpangan pada jiwa anak. Misalnya, anak menjadi pendiam, pemberontak, tidak mau diatur, dan sebagainya.

2. Perceraian dan Perselisihan Keluarga

Perceraian keluarga menyebabkan anak menjadi frustasi. Dampaknya anak menjadi antipati. Menurut sumber penelitian, pada umumnya banyak anak-anak nakal berasal dari keluarga yang mengalami perceraian dan perselisihan.

3. Pemanjaan Anak

Mendidik anak dengan pola pemanjaan sangatlah tidak baik. Kondisi itu akan menyebabkan anak menjadi ketergantungan dan tidak mandiri.

4. Rendahnya Wawasan Keluarga

Tingkat pendidikan dan pengaruh orang tua sangat berperan dalam membentuk pribadi anak. Itulah sebabnya, potensi anak bisa berkembang atau sebaliknya tergantung pada pola didik yang dilakukan orang tua kepada anaknya.

5. Menelantarkan Anak

Membangun jiwa dan kepribadian anak secara positif, tidak terlepas dari kasih sayang orang tua. Menelantarkan anak, baik secara fisik, materi, maupun psikis akan berdampak buruk bagi perkembangan anak.

6. Percekcokan atau Ketidakharmonisan Ayah Ibu

Terjadinya percekcokan antara ayah dan ibu di depan anak akan menyebabkan gangguan pada cara berpikir anak. Jika hal tersebut sering terjadi akan mendorong penyimpangan tingkah laku pada diri anak.

C. BENTUK PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Berdasarkan penjelasan di atas, kamu dapat memahami bahwa penyebab awal penyimpangan sosial pada umumnya bermuara dari keluarga. Selain faktor keluarga ada juga faktor lain yang mendorong terjadinya penyimpangan sosial di masyarakat. Faktor yang dimaksud adalah faktor intrinsik dan ekstrinsik.

Faktor intrinsik maksudnya faktor yang memengaruhi pribadi seseorang yang berasal dari dalam dirinya. Misalnya, rendahnya mentalitas, karakter pribadi yang lemah, dan tingkat wawasan yang sempit.

Adapun faktor ekstrinsik maksudnya faktor yang memengaruhi pribadi seseorang dari luar dirinya. Misalnya, pengaruh transformasi budaya global yang tidak bisa dibendung. Seperti, peredaran VCD-VCD porno, film-film picisan yang mengumbar kekerasan, dan tayangan televisi yang tidak mendidik.

Merujuk pada faktor intrinsik dan ekstrinsik di atas, bentuk penyimpangan sosial pun akhirnya merebak di kalangan masyarakat. Setidaknya ada dua bentuk penyimpangan sosial, yaitu berikut ini.

1. Bentuk Penyimpangan Sosial yang Dilegalkan

Bentuk penyimpangan yang dilegalkan ini, misalnya izin resmi lokalisasi untuk PSK (Pekerja Seks Komersil) di kota-kota besar seperti Bandung, Bali, Semarang, dan Jakarta;

panji pijat plus; adanya kupon SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah) pada zaman Orde Baru, kondomnisasi untuk seks bebas; dan sebagainya.

2. Bentuk Penyimpangan Sosial yang Sembunyi-Sembunyi

Bentuk penyimpangan sosial yang sembunyi-sembunyi cenderung dilakukan oleh individu. Dalam praktiknya, mereka umumnya melakukan secara diam-diam dan menghindari aparat kepolisian. Seperti, menegak minuman keras, penyelundupan barang ilegal, menjual ganja, memakai narkoba, dan sebagainya.

D. CONTOH PENYIMPANGAN SOSIAL DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Sebagaimana dijelaskan di muka, penyimpangan sosial sering dikenal dengan istilah penyakit masyarakat. Dikatakan demikian, sebab perilaku menyimpang tersebut sangat meresahkan. Berikut ini beberapa contoh perilaku yang meresahkan masyarakat yang dapat kamu amati di masyarakat.

1. Masalah Narkoba

Masalah narkoba merupakan masalah nasional dan internasional. Perkembangannya dari hari ke hari sulit untuk diberantas. Menurut hasil penelitian Dadang Hawari, Irawati Hawari dan Asmarohadi tahun 1998 terhadap 100 penderita atau pasien, hasilnya setiap penderita ketergantungan narkotika jenis opiat (heroin) yang diperiksa, ada 9 hingga 10 penderita lainnya (9,72%).

Kematian pada penderita ketergantungan narkotika jenis opiat (heroin) mencapai 17,16%. Dengan demikian, jika ditemukan satu orang korban narkotika, maka jumlah korban narkotika yang ada di sekitarnya diperkirakan adalah 9 atau 10 kalinya. Angka ini pun didukung oleh ketentuan WHO. Risiko kematian, baik akibat *over dosis* (OD) atau lainnya juga relatif tinggi mencapai 17,16%.

2. Masalah HIV/AIDS

Merebaknya VCD-VCD porno, tabloid *esek-esek*, dan tayangan yang mengumbar syahwat akhir-akhir ini mendorong perilaku seks bebas dari berbagai kalangan. Kondisi memprihatinkan ini sekaligus melahirkan fenomena seperti hamil di luar nikah, aborsi, hingga terjangkitnya penyakit mematikan HIV/AIDS.

3. Masalah Miras

Miras atau minuman keras merupakan penyakit masyarakat yang sulit diberantas. Beberapa kali pihak berwajib bekerja sama dengan Satpol PP dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) melakukan operasi terhadap toko, kios, dan penjual miras. Namun, hasilnya belum optimal.

Minuman keras disinyalir bisa mendorong seseorang nekad untuk berbuat jahat. Misalnya, menodong, merampok, membunuh, memerkosa, dan kejahatan lain di luar kesadaran dirinya.

4. Masalah Pekerja Seks Komersil (PSK)

Penyakit masyarakat yang satu ini pun sulit diberantas. Kehadirannya ibarat benalu pada sebatang pohon. PSK merupakan cikal bakal penyebaran penyakit HIV/AIDS. Menurut penelitian menularnya penyakit HIV/AIDS cenderung disebabkan oleh hubungan seks bebas dan narkoba.

4. Masalah Judi

Keterpurukan negeri seribu pulau dalam bidang ekonomi telah membuat sebagian orang mimpi dengan angan-angan. Mimpi dengan angan-angan itu diwujudkan dalam bentuk judi. Bentuk-bentuk judi kerap dikemas dan bervariasi. Seperti, SDSB (Sumbangan Dana Sosial Berhadiah), Porkas, Togel, Kupon Jaya, dan sebagainya.

E. DAMPAK PENYIMPANGAN SOSIAL

Pada hakikatnya, setiap individu maupun masyarakat membutuhkan keadaan sosial yang serba teratur sehingga terjalin komunikasi, rasa aman dan damai, serta terjalinnya kerukunan sosial yang kuat. Dengan kata lain, tak ada seorang pun yang menghendaki timbulnya kekacauan dan kesemerawutan di dalam masyarakat. Meskipun dalam kenyataannya, tak bisa dipungkiri bahwa penyimpangan sosial yang dilakukan oleh segelintir anggota masyarakat telah menodai harapan itu.

Sebut saja misalnya pengguna narkoba, PSK, miras, dan bentuk penyimpangan sosial lainnya, bukan saja akan berakibat pada dirinya sendiri, melainkan pula berdampak pada ketenteraman dan kenyamaan masyarakat pada umumnya. Dengan ungkapan lain, akibat penyimpangan sosial ini bukan saja merugikan dirinya sendiri, tetapi juga dapat meresahkan

F. FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENYIMPANGAN SOSIAL

Secara faktual manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan Allah Swt yang paling sempurna. Oleh karena itu, dalam melaksanakan interaktifnya, manusia membutuhkan kehadiran orang lain.

Sejalan dengan kehadiran orang lain, manusia kemudian saling memengaruhi antara satu dengan yang lainnya. Pengaruh tersebut bermula dari lingkungan keluarga, selanjutnya merebak pada pergaulan di masyarakat.

Adapun penyebab munculnya penyimpangan sosial yang berasal dari lingkungan keluarga di antaranya sebagai berikut.

1. Ketidakharmonisan Rumah Tangga

Salah satu penyebab retaknya keharmonisan rumah tangga adalah pergaulan antara lelaki dan perempuan di kantor-kantor tidak terjaga. Dengan paras yang menggoda, ruangan yang tanpa batas, serta pertemuan yang intensif setiap hari akan menciptakan hubungan teman tapi mesra (TTM). Dampaknya, yang bersangkutan bisa selingkuh, zinah, dan penyimpangan sosial lainnya yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Kondisi ini, disadari atau tidak akan melemahkan keharmonisan rumah tangga, bahkan menimbulkan perceraian.

2. Kejahatan Seksual

Fenomena kejahatan seksual akhir-akhir ini sangat memprihatinkan. Misalnya, seorang bapak yang tega memerkosa anak tirinya hingga hamil; anak di bawah umur disodomi; dan pelecehan seks. Kejahatan seksual melahirkan rasa rendah diri pihak korban, selain dirinya menjadi frustasi dan menanggung malu sepanjang hayat.

3. Terbawa Lingkungan dan Pergaulan

Trend dan model pergaulan yang disodorkan media elektronik dewasa ini sering kali menjadi rujukan para remaja di perkotaan dan pedesaan. Mulai dari asesoris, pakaian, rambut, hingga gaya hidup. Sayangnya, peniruan yang dilakukan kaum muda itu tidak disaring dengan baik sehingga melahirkan penyimpangan sosial. Misalnya, aborsi, pergaulan bebas, penggunaan pakaian yang serba terbatas, atau terjerumus pada pemakaian obat-obat terlarang.

4. Lemahnya Kualitas Iman dan Takwa (IMTAQ)

Derasnya informasi melalui media cetak dan elektronik, bukan saja menimbulkan pengaruh positif, tetapi juga pengaruh negatif. Sebagai contoh, jam tayang sinetron televisi

yang disukai para penonton, bertepatan dengan waktu shalat, sangat mengganggu kekhusyuan dalam melaksanakan ibadah. Selain itu, banyak anak-anak dan remaja yang enggan berangkat mengaji karena penasaran oleh cerita sinetron.

Kondisi tersebut disadari atau tidak merupakan cikal bakal melemahnya kualitas iman dan takwa (IMTAK) yang akhirnya berdampak pada perilaku menyimpang dalam pergaulan di masyarakat.

G. UPAYA PENCEGAHAN PENYIMPANGAN SOSIAL

Agar penyimpangan sosial bisa dicegah, hal yang pertama dan utama adalah membenahi lingkungan keluarga terlebih dahulu. Adapun upaya pencegahan yang bermuara dari keluarga adalah sebagai berikut.

1. Wujudkan Lingkungan Keluarga yang Harmonis

Tatanan keluarga yang harmonis merupakan sarana lahirnya kehangatan dan kasih sayang. Dengan demikian, jiwa mereka tidak akan tertekan. Dengan ketenteraman yang dimiliki dari keluarga tidak akan terjadi penyimpangan sosial di masyarakatnya.

2. Meningkatkan Nilai Keimanan

Keluarga merupakan unit masyarakat yang paling mendasar. Oleh karena itu, peningkatan nilai keimanan yang diajarkan keluarga sangatlah penting. Pengajaran keimanan yang berasal dari keluarga bisa memperkokoh dan menjadi benteng pada saat mereka berinteraksi dengan lingkungannya.

3. Komunikasi yang Efektif

Komunikasi yang efektif maksudnya terjalinnya keakraban antara orang tua dan anak. Dengan adanya keterbukaan antara anak dan orang tua diharapkan segala persoalan akan mudah dipecahkan. Dengan demikian, anak terhindar dari perbuatan yang menyimpang di tengah masyarakatnya.

4. Memenuhi Hak-Hak Anak

Salah satu tanggung jawab terberat orang tua adalah mendidik anak-anak menjadi manusia takwa. Untuk mencapai harapan tersebut, orang tua memiliki tugas, yakni memenuhi hak-hak anak, seperti mendidik, menjaga kesehatan, kebersihan, dan menanamkan moral serta akhlak kepada anak.

Upaya mengatasi penyimpangan sosial dapat dilakukan pula dengan mengoptimalkan fungsi lembaga pendidikan, baik sekolah maupun perguruan tinggi. Untuk sekolah dilakukan

dengan cara memasukan materi pelajar yang berkaitan dengan akhlak atau budi pekerti ke dalam kurikulum, serta menggalakan program-program ekstrakulikuler yang berlandaskan nilai-nilai moral.

Lingkungan masyarakat juga dapat membantu mencegah penyimpangan sosial. Caranya dengan menciptakan kontrol sosial di lingkungan masyarakat berupa tata tertib yang di buat bersama, seperti dengan mengadakan program siskamling; penyuluhan narkoba kepada remaja; layanan konsultasi kesehatan; dan sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik benang merahnya bahwa terdapat tiga lingkungan utama yang bisa diberdayakan dalam rangka mencegah penyimpangan sosial. Ketiga lingkungan tersebut disebutkan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai *Tri Pusat Pendidikan,* yaitu pendidikan di keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat. Ketiganya harus bekerja sama secara terpadu. Pendidikan di lingkungan keluarga merupakan pondasi dari tiga pusat pendidikan tersebut.

H. PIHAK-PIHAK YANG MENANGANI PENYIMPANGAN SOSIAL

Manusia tidak mungkin bisa hidup sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan manusia lainnya. Mereka membutuhkan kelompok dalam satu kesatuan yang disebut dengan masyarakat. Masyarakat kemudian menugaskan seseorang atau organisasi untuk mengatur dan memimpin mereka.

Jika terjadi perselisihan, pertikaian, konflik, dan perilaku yang tidak sesuai dengan adat istiadat, norma, dan budaya, pemimpin masyarakat kemudian akan menangani persoalan tersebut. Demikin halnya dengan penanganan penyimpangan sosial. Pihak-pihak yang ikut terlibat, di antaranya pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Berbagai upaya kerap dilakukan pemerintah mulai dari upaya preventif, edukasi, rehabilitatif, advokasi, rujukan, dan kontrol sosial.

Masyarakat membentuk lembaga swadaya di tingkat lokal, seperti G-Santun (Gerakan Sosial Anti Narkoba Medan Tuntungan), Gibas, Granat, FPI (Front Pembela Islam), dan sebagainya. Eksistensi lembaga swadaya masyarakat ini sebagai upaya memutus mata rantai penyimpangan sosial yang sedang marak.

RANGKUMAN

1. Penyimpangan sosial adalah sikap dan tindakan yang tidak sesuai dengan norma, aturan, dan budaya yang berlaku di suatu tempat sehingga menimbulkan keresahan.
2. Sebab-sebab munculnya penyimpangan sosial yang berasal dari lingkungan keluarga yaitu:

a) kekerasan dalam keluarga,
b) perceraian dan perselisihan keluarga,
c) pemanjaan anak,
d) rendahnya wawasan keluarga,
e) menelantarkan anak,
f) percekcokan atau ketidakharmonisan ayah ibu.

3. Bentuk penyimpangan sosial terdiri atas:
   a) bentuk penyimpangan sosial yang "dilindungi" oleh pemerintah;
   b) bentuk penyimpangan sosial yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.
4. Contoh penyimpangan sosial:
   a) masalah narkoba,
   b) masalah HIV/AIDS,
   c) masalah minuman keras,
   d) masalah pekerja seks komersil,
   e) masalah judi.
5. Akibat penyimpangan sosial antara lain:
   a) dapat merugikan diri sendiri,
   b) dapat meresahkan masyarakat.
6. Faktor penyebab penyimpanagn sosial
   a) ketidakstabilan rumah tangga;
   b) kejahatan seksual;
   c) terbawa lingkungan dan pergaulan;
   d) lemahnya akidah.
7. Upaya pencegahan penyimpangan sosial:
   a) wujudkan lingkungan kelurga yang harmonis,
   b) meningkatkan kebiasaan spiritual,
   c) komunikasi yang efektif,
   d) memenuhi hak-hak anak.
8. Pihak yang menangani penyimpangan sosial:
   a) pemerintah,
   b) masyarakat,
   c) keluarga.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Di daerah Samin terdapat lokalisasi PSK. Setiap malam minggu rumah-rumah bordil tersebut penuh oleh pengunjung. Lokalisasi PSK dan rumah bordil termasuk contoh ....
   a. gaya hidup di perkotaan
   b. mata pencarian
   c. penyimpangan norma
   d. penyimpangan keluarga
2. Berikut ini merupakan penyebab munculnya penyimpangan sosial, *kecuali* ....
   a. perceraian
   b. kekerasan
   c. konflik
   d. rasa aman
3. Sepulang sekolah Andi menjual ganja. Tindakan Andi termasuk ....
   a. mencari tambahan uang saku
   b. melanggar tata tertib sekolah
   c. melanggar hukum
   d. melanggar etika
4. Aborsi yang dilakukan para remaja merupakan akibat perilaku ....
   a. seks bebas
   b. menonton VCD porno
   c. pacaran
   d. membaca tabloid esek-esek
5. Tatanan keluarga yang rapuh dan tidak harmonis akan menyebabkan anak menjadi ....
   a. lemah
   b. tidak percaya diri
   c. tidak bergairah
   d. antipati
6. Berikut yang *bukan* merupakan usaha pencegahan terjadinya penyimpangan sosial adalah ....
   a. ikut pesantren kilat
   b. ikut mengaji
   c. mengurung diri
   d. ayah dan ibu rukun
7. Penyimpangan sosial di kalangan remaja disebabkan ....
   a. peredaran film-film cabul
   b. tayangan sinetron
   c. depresi
   d. mencari identitas diri
8. Aparat kepolisian dan lembaga swadaya masyarakat menghancurkan warung remang-remang di sepanjang Pantura. Tindakan mereka termasuk ....
   a. tidak beradab
   b. responsif
   c. kejahatan
   d. melanggar hak asasi manusia
9. Miras, judi, dan memakai narkoba termasuk tindakan ....
   a. penyimpangan akidah
   b. penyimpangan sosial
   c. penyimpangan akhlak
   d. penyimpangan ekonomi

10. Salah satu ciri penyimpangan sosial adalah ....
    a. melanggar kesepakatan masyarakat
    b. bebas tapi bertanggung jawab
    c. melanggar disiplin
    d. tidak mau membantu orang lain
11. Berikut ini termasuk perilaku yang meresahkan masyarakat, *kecuali* ....
    a. masalah narkoba
    b. gotong royong
    c. menelantarkan anak
    d. percekokan keluarga
12. Akibat mendidik anak dengan pola pemanjaan adalah ....
    a. mandiri
    b. ketergantungan
    c. tidak sombong
    d. percaya diri
13. Badan dunia yang mengurusi masalah kesehatan adalah ....
    a. WWF
    b. WHO
    c. UNICEF
    d. FAO
14. Penyebab awal penyimpangan sosial pada umumnya bermuara dari ....
    a. lingkungan sekolah
    b. keluarga
    c. jalanan
    d. teman bermain
15. Tindakanmu apabila melihat temanmu ada yang membawa VCD porno di sekolah adalah ....
    a. ikut meminjam
    b. melaporkan pada pihak sekolah
    c. membiarkan saja
    d. membuang VCD itu

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan penyimpangan sosial!
2. Berikan 3 penyebab terjadinya penyimpangan sosial dalam keluarga!
3. Berikan 3 contoh penyimpangan sosial yang terjadi dalam keluarga!
4. Kemukakan 2 akibat yang akan terjadi dengan melakukan penyimpangan sosial dalam keluarga dan masyarakat!
5. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan sosial?

TUGAS

Berkunjunglah ke kantor BP atau BK di sekolahmu. Carilah informasi tentang bentuk-bentuk penyimpangan sosial yang pernah dilakukan oleh siswa di sekolahmu selama 2 tahun terakhir. Diskusikan dengan teman sekelas dan berikan komentar atau rekomendasi tentang solusi agar penyimpangan tersebut tidak terjadi lagi!

Bab VI

KEGIATAN PELAKU EKONOMI DI MASYARAKAT

Standar Kompetensi

Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat.

Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan hubungan antara kelangkaan sumber daya dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas.
2. Mendeskripsikan pelaku ekonomi: rumah tangga, masyarakat, perusahaan, koperasi dan negara.

Apakah sebelum pergi ke sekolah kamu sarapan terlebih dahulu? Makan dan minum merupakan kebutuhan dasar manusia. Apabila dicermati dari kehidupan sehari-hari ternyata kebutuhan kita sebagai manusia sangat banyak dan terkadang tidak diikuti oleh ketersediaan alat pemenuhan kebutuhan tersebut.

Pada bab ini, kamu akan belajar tentang inti masalah ekonomi atau yang biasa disebut dengan kelangkaan, jenis-jenis kebutuhan manusia, alat pemuasnya, serta segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

Berbagai macam barang kebutuhan manusia
Sumber: www.flickr.com

PETA KONSEP
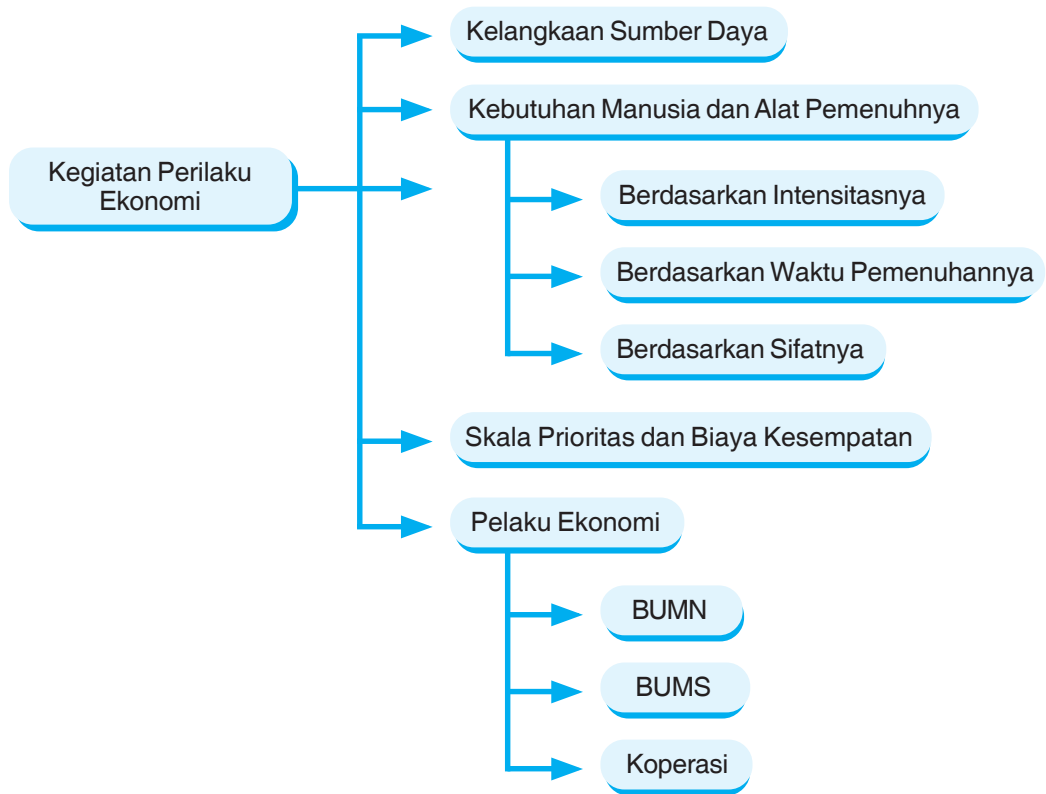
Kata Kunci

- Pelaku ekonomi
- Kelangkaan
- Kebutuhan
- Alat pemenuhan
- Skala prioritas
- Biaya kesempatan
- BUMN
- BUMS
- Koperasi

A. KELANGKAAN SUMBER DAYA

Ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang langka. Oleh karena itu, inti masalah dalam ilmu ekonomi adalah adanya kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Konsep kelangkaan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan saat manusia ingin mengonsumsi suatu barang atau jasa lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Dengan demikian, kelangkaan bukan berarti barang tersebut tidak ada, melainkan adanya kesenjangan antara kebutuhan dan jumlah barang yang tersedia.

Kelangkaan dalam ilmu ekonomi dapat diartikan juga ketersediannya tidak memenuhi kebutuhan yang ada sehingga untuk memperoleh barang dan jasa tersebut dibutuhkan pengorbanan.

Adanya keterbatasan alat pemuas kebutuhan manusia disebabkan oleh adanya keterbatasan pula dalam sumber daya ekonomi. Sumber daya ekonomi yang lebih dikenal juga dengan sebutan faktor-faktor produksi ini jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan.

Sumber daya alam sebagai salah satu sumber daya ekonomi keberadaannya memang sudah ada di alam. Namun untuk dapat digunakan, harus melalui proses produksi terlebih dahulu. Secara kasat mata, sumber daya alam sepertinya berjumlah banyak dan dapat dimanfaatkan secara optimal. Namun pada kenyataannya, sumber daya alam yang tersedia kian hari kian berkurang jumlahnya karena terus-menerus digunakan. Contohnya, sumber daya alam berupa minyak bumi. Penggunaan minyak bumi secara terus-menerus mengakibatkan jumlah persediaannya semakin menipis. Hal ini berdampak pada adanya kelangkaan bahan bakar minyak. Kalangkaan bahan bakar minyak ini sekarang sangat dirasakan oleh kita semua. Oleh karena itu, sekarang digalakan gerakan hemat bahan bakar minyak.

Sumber daya ekonomi lainnya adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang mendatangkan manfaat besar bagi masyarakat jika penggunaan kemampuannya dimanfaatkan secara optimal. Sumber daya manusia yang dianggap langka adalah sumber daya manusia yang berkualitas.

Jika dilihat berdasarkan jumlahnya, Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak. Akan tetapi, yang benar-benar berkualitas jumlahnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan di pasar tenaga kerja. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang menggunakan jasa ahli dari luar negeri.

Sumber daya modal merupakan salah satu contoh sumber daya ekonomi. Sumber daya modal ini dapat berupa uang, teknologi, mesin-mesin, dan lain sebagainya. Adanya kelangkaan sumber daya modal tentu saja membuat Negara kita harus mendatangkan sumber daya tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Akan tetapi, karena ketersediaan teknologi pengolahannya

terbatas, terpaksa Indonesia harus bekerja sama dengan pihak luar negeri untuk mengolah sumber daya alam tersebut. Contohnya pengolahan tambang emas di Irian Jaya oleh PT Free Port.

Adanya berbagai kelangkaan pada sumber daya ekonomi, terutama sumber daya alam, mendorong manusia baik individu maupun masyarakat melakukan efisiensi sehingga apa yang dilakukan dalam kegiatan produksi mendatangkan keuntungan. Dengan demkian, dapat disimpulkan bahwa kelangkaan muncul karena adanya keterbatasan sumber daya ekonomi, sedangkan kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas.

B. KEBUTUHAN MANUSIA DAN ALAT PEMENUHANNYA

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidupnya, manusia memerlukan berbagai macam barang dan jasa sebagai alat untuk memenuhi semua kebutuhannya.

Kebutuhan manusia beraneka ragam macam dan jenisnya, serta jumlahnya tidak terbatas. Contohnya, sebagai pelajar tentu kamu membutuhkan seragam, alat tulis, buku pelajaran, sepatu, dan sebagainya. Semua barang yang kamu butuhkan tersebut harus melalui proses produksi terlebih dahulu dengan bahan dasar yang beraneka ragam pula. Selain peralatan untuk sekolah, tentu kamu membutuhkan berbagai macam barang lainnya, bukan? apakah yang dimaksud dengan kebutuhan? Kebutuhan merupakan semua keinginan manusia yang menuntut untuk dipenuhi, jika tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan masalah.

Seperti yang telah diuraikan di atas bahwa kebutuhan manusia sangat banyak dan beragam, bahkan tidak terbatas. Tidak terbatasnya kebutuhan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya yaitu:

1) jumlah manusia yang semakin bertambah,
2) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
3) tingkat pendidikan,
4) tingkat pendapatan,
5) sifat manusia yang tidak pernah puas.

Kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kelompok sebagai berikut.

1. Kebutuhan Berdasarkan Intensitasnya

Berdasarkan intensitasnya, kebutuhan manusia dapat dikelompokkan lagi menjadi kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

a) *Kebutuhan primer* adalah kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi oleh manusia untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Contoh kebutuhan primer, yaitu kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, dan pakaian.

b) *Kebutuhan sekunder* merupakan kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contoh kebutuhan sekunder, yaitu barang-barang elektronik.

c) *Kebutuhan tersier* merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan setelah kebutuhan primer dan sekunder dipenuhi. Contoh kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan akan barang-barang mewah, seperti mobil mewah dan perhiasan yang mahal.

2. Kebutuhan Berdasarkan Waktu Pemenuhannya

Berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan dibedakan menjadi kebutuhan sekarang dan kebutuhan masa datang.

a) *Kebutuhan sekarang* merupakan kebutuhan yang harus segera dipenuhi dan tidak dapat ditunda. Contohnya, minum bagi orang yang haus dan makan bagi orang yang lapar.

b) *Kebutuhan masa datang* merupakan kebutuhan yang pemenuhannya dilakukan pada masa yang akan datang. Contohnya, kabutuhan tempat tinggal sendiri untuk anak remaja.

3. Kebutuhan Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani.

a) *Kebutuhan jasmani* merupakan kebutuhan yang bersifat fisik dan materi. Contohnya, kebutuhan akan makanan, minum, dan olahraga.

b) *Kebutuhan rohani* merupakan kebutuhan yang erat hubungannya dengan rohani dan hanya dapat dirasakan oleh jiwa manusia. Contohnya, kebutuhan akan keagamaan, rekreasi, pendidikan, dan hiburan.

Apabila kita perhatikan lebih jauh, setiap orang memiliki tingkat kebutuhan yang berbeda-beda, perbedaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi seseorang sangat memengaruhi kebutuhannya. Semakin tinggi tingkat ekonomi seseorang maka tingkat kebutuhannya akan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah tingkat ekonomi seseorang maka kebutuhannya pun cenderung sedikit. Contohnya, orang dengan golongan ekonomi lemah pemenuhan kebutuhannya akan lebih terfokus pada kebutuhan yang sifatnya primer seperti kebutuhan akan makanan. Sebaliknya, orang yang tingkat ekonominya sudah tinggi maka fokus kebutuhannya biasanya sudah

bukan kebutuhan primer lagi, tetapi mereka sudah terfokus pada kebutuhan yang sifatnya tersier seperti perhiasan atau barang mewah lainnya.

2. Lingkungan Sosial Budaya

Lingkungan sosial budaya akan sangat berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Dalam suatu masyarakat tertentu, semakin tinggi status sosial seseorang maka akan semakin banyak kebutuhannya. Perbedaan budaya juga akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang. Contohnya, bagi masyarakat perkotaan yang sibuk dengan profesinya, layanan usaha bidang laundry sudah menjadi kebutuhan tersendiri, terlebih bagi mereka yang sibuk dengan pekerjaannya dan tidak memiliki pembantu di rumahnya. Hal tersebut akan berbeda dengan masyarakat di pedesaan.

3. Keadaan Fisik

Kedaan fisik akan berpengaruh terhadap tingkat kebutuhan seseorang. Perbedaan fisik dan jenis kelamin akan menentukan kebutuhan setiap orang. Contohnya, orang yang tubuhnya besar biasanya akan membutuhkan makanan lebih banyak dibandingkan orang yang tubuhnya kurus. Perempuan membutuhkan kosmetik, sedangkan laki-laki tidak.

4. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan akan berpengaruh terhadap kebutuhan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang biasanya kebutuhannya pun semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah kebutuhan seseorang maka kebutuhannya pun tidak sebanyak orang dengan tingkat pendidikan yang tinggi. Misalnya, seseorang yang pendidikannya sampai perguruan tinggi maka akan lebih banyak membutuhkan biaya dan alat pendidikan dibandingkan dengan orang yang pendidikannya sampai SMP.

5. Intensitas Kebutuhan

Intensistas (mendesak atau tidak mendesak) kebutuhan akan sangat menentukan jumlah kebutuhan seseorang. Semakin mendesak kebutuhan maka biasanya tingkat kebutuhan akan semakin meningkat. Sebaliknya, semakin tidak mendesak kebutuhan maka tingkat kebutuhan akan semakin menurun. Contohnya, pada musim hujan orang membutuhkan payung, sehingga permintaan terhadap payung akan meningkat.

6. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek)

Kemajuan Iptek akan sangat memengaruhi kebutuhan seseorang. Seperti berkembangnya teknologi di bidang ponsel (telepon seluler) mendorong seseorang mengalokasikan sebagian dari pendapatannya untuk mendapatkan ponsel dalam rangka lebih melancarkan komunikasi dengan sahabat atau rekan kerjanya. Terlebih bagi mereka

yang tinggal di perkotaan atau yang memiliki intensitas kesibukan yang tinggi, biasanya intensitas kebutuhan akan hasil teknologi semakin tinggi pula.

7. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan yang ditetapkan pemerintah dapat memengaruhi kebutuhan seseorang terhadap suatu barang. Contohnya, ketika harga beras tinggi dan pemerintah menetapkan adanya operasi pasar besar murah, maka hal tersebut dapat mendorong seseorang untuk berbelanja lebih banyak beras.

Kebutuhan manusia jumlahnya sangat tidak terbatas dan beraneka ragam jenisnya. Oleh karena itu, alat pemuas kebutuhan manusia pun beraneka ragam jenisnya. Adapun alat pemuas kebutuhan manusia ini dapat berupa barang dan jasa. Barang merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang berbentuk benda berwujud, sedangkan jasa merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang tidak berwujud namun dapat dirasakan manfaatnya.

Barang sebagai salah satu alat pemuas kebutuhan manusia dapat dibedakan berdasarkan cara memperolehnya, sifat hubungannya, tujuan penggunaannya, kegunaannya untuk jaminan kredit, dan berdasarkan tingkat kesiapannya dalam proses produksi.

1. Barang Berdasarkan Cara Memperolehnya

Berdasarkan cara memperolehnya, barang dibedakan menjadi barang ekonomi, dan barang bebas.

a) *Barang ekonomi* merupakan alat pemuas kebutuhan manusia yang jumlahnya terbatas sehingga untuk memperolehnya diperlukan pengorbanan. Contohnya, pakaian, alat sekolah, dan sebagainya.
b) *Barang beba*s merupakan alat kebutuhan manusia yang jumlahnya tidak terbatas. Untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan karena jumlahnya banyak jika dibandingkan kebutuhan manusia. Contohnya, udara di alam terbuka dan pasir di padang pasir.

2. Barang Berdasarkan Sifat Hubungannya

Berdasarkan sifat hubungannya dengan barang lain, barang dapat dibedakan menjadi barang subtitusi dan barang komplementer.

a) *Barang subtitusi* merupakan barang yang penggunaannya dapat saling menggantikan dengan barang lain. Contohnya, tikar dapat menggantikan karpet.
b) *Barang komplementer* merupakan barang yang pemanfaatannya harus diikuti dengan pemanfaatan barang lain. Contohnya, motor dapat dimanfaatkan jika menggunakan bensin dan balpoin dapat digunakan jika ada tintanya.

3. Barang Berdasarkan Tujuan Penggunaannya

Dilihat berdasarkan tujuan penggunaannya, barang dapat digolongkan menjadi barang konsumsi dan barang produksi.

a) *Barang konsumsi* adalah barang yang dapat langsung digunakan untuk keperluan konsumsi. Contohnya, nasi, pakaian jadi, dan buah-buahan.

b) *Barang produksi* merupakan barang yang memerlukan proses produksi sebelum dapat digunakan. Contohnya, kayu dan benang.

4. Barang Berdasarkan Kegunaannya untuk Jaminan Kredit

Dilihat berdasarkan kegunaannya untuk jaminan kredit, barang digolongkan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak.

a) *Barang bergerak* merupakan barang yang dapat digunakan untuk mendapatkan kredit dalam jangka pendek. Contohnya, Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), perhiasan dan sebagainya.

b) *Barang tidak bergerak* merupakan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan kredit dalam jangka panjang. Contohnya rumah, tanah, dan gedung.

5. Barang Berdasarkan Tingkat Kesiapannya dalam Proses Produksi

Berdasarkan tingkat kesiapannya dalam proses produksi, barang dapat digolongkan menjadi barang mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi.

a) *Barang mentah* adalah barang yang perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan. Contohnya, tebu untuk membuat gula, kapas untuk membuat kain, dan sebagainya.

b) *Barang setengah jadi* merupakan barang yang sudah melalui proses produksi, namun untuk menggunakannya diperlukan proses produksi lebih lanjut. Contohnya, kain untuk pakaian, tepung untuk membuat kue, dan sebagainya.

c) *Barang jadi* merupakan barang yang siap pakai, contohnya baju, sepatu, dan sebagainya.

C. PENENTUAN SKALA PRIORITAS DAN BIAYA KESEMPATAN

Seperti telah kamu ketahui, kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, diperlukan keterampilan untuk memilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dari barang atau jasa yang bersangkutan atau memprioritaskan yang penting dan mendesak untuk dipenuhi. Penentuan skala prioritas dalam memilih kebutuhan sangat diperlukan agar kebutuhan yang sifatnya mendasar dan dapat menimbulkan masalah apabila tidak terpenuhi tidak terkalahkan oleh kebutuhan yang dapat ditunda.

Adanya keterbatasan sumber daya pemuas kebutuhan manusia mendorong manusia untuk melakukan berbagai pilihan dari segala sesuatu yang tersedia dan dapat dipilih. Pilihan merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan mengenai barang apa yang akan

dipilih sehingga kepuasan individu tetap dapat tercapai. Untuk itulah ilmu ekonomi lahir, yaitu untuk membantu bagaimana seseorang, individu, atau masyarakat melakukan pilihan terhadap sumber daya yang langka dalam memenuhi kebutuhan.

Setiap pilihan yang dilakukan oleh konsumen dan produsen terhadap suatu barang dan jasa, tentu saja melahirkan suatu pengorbanan berupa barang-barang atau jasa yang tidak dipilih. Misalnya, karena keterbatasan uang yang kamu miliki, kamu lebih memilih membeli buku daripada membeli sepatu. Dengan demikian, kamu sudah mengorbankan kesempatan kamu untuk membeli sepatu. Contoh lainnya, yaitu sebuah perusahaan lebih memilih memproduksi pakaian perempuan daripada memproduksi pakaian anak sekolah maka perusahaan tersebut telah mengorbankan kesempatannya untuk memproduksi pakaian anak sekolah. Pengorbanan kamu membeli sepatu dan pengorbanan perusahaan memproduksi pakaian anak sekolah merupakan pengorbanan berupa kesempatan. Dalam ilmu ekonomi, pengorbanan berupa kesempatan tersebut disebut sebagai *biaya kesempatan yang hilang* atau *opportunity cost*.

D. PELAKU-PELAKU EKONOMI

Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kerakyatan terdiri atas BUMN, BUMS dan Koperasi.

1. Badan Usaha Miliki Negara (BUMN)

BUMN adalah suatu perusahaan yang seluruh modalnya atau sebagian dimiliki oleh Negara, adapun tujuan pemerintah mendirikan BUMN adalah sebagai berikut:

- Melayani kepentingan masyarakat umum
- Mencegah praktek monopoli swasta
- Sumber pendapatan Negara

Bentuk-bentuk badan usaha menurut UU No. 9 Th 1969, terdiri atas Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum), dan Persero (PT).

a. Perusahaan Jawatan (Perjan)

Perjan yaitu BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (BUMN) dan menjadi hak dari departemen bersangkutan. Perjan biasanya merupakan perusahaan yang bergerak dalam produksi atau jasa untuk kepentingan umum.

- Karyawannya berstatus pegawai negeri
- Keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab pemerintah

- Tujuan utamanya adalah melayani kepentingan masyarakat umum
- Berada dibawah Departemen, Dirjen atau pemerintah daerah terkait.
- Permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam APBN dan menjadi hak dari departemen terkait.
- Bagi Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan ini dituntut, maka yang bertanggung jawab adalah pemerintah.
- Dipimpin oleh seorang kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen
- Perjan memiliki dan memperoleh fasilitas dari negara

Merujuk kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, khususnya dalam Bab X tentang Ketentuan Peralihan Pasal 93 dinyatakan bahwa dalam waktu dua tahun terhitung sejak undang-undang ini mulai berlaku, semua BUMN yang berbentuk Perjan harus sudah dirubah bentuknya menjadi Perum atau Persero.

Gambar 6.1
Sofyan Jalil Menteri BUMN Kabinet Indonesia Bersatu
Sumber: www.detik.com

Contoh BUMN yang dahulunya Perjan diantaranya adalah Perusahaan Jasa Kerata Api (PJKA) yang berada di bawah Depertemen Perhubungan, Th 1991 berubah menjadi perusahaan umum kereta Api (Perumka) kemudian menjadi perusahaan negara kereta Api (Penka), terakhir berubah menjadi PT Kereta Api Indonesia (PT.KAI). serta Perjan Pegadaian yang berada di bawah departemen keuangan berubah menjadi Perum Pegadaian. Dengan demikian, sejak tahun 2003 tidak ada lagi BUMN yang berbentuk Perjan.

b. Perusahaan Umum (Perum)

Perusahaan umum yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham. Perum pada umumnya merupakan perusahaan milik negara yang bergerak dalam bidang produksi, jasa atau bidang ekonomi lainnya yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum sekaligus mencari keuntungan.

Perum memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Karyawannya berstatus pegawai perusahaan Negara
- Permodalan berasal dari pemerintah yang terpisah dari kekayaan negara
- Melayani kepentingan masyarakat umum sekaligus mencari keuntungan
- Kepengurusan atau alat kelengkapan Perum terdiri atas menteri, direksi, dan dewan pengawas

- Menteri yang ditunjuk diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemilik modal dan memiliki kewenangan dalam mengatur kebijakan melalui mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Direksi bertugas sebagai pemimpin Perum yang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan oleh menteri.
- Dewan pengawas bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi.
- Berstatus badan hukum, sebagian besar kegiatannya bergerak dibidang jasa layanan umum
- Pendirianya diusulkan oleh menteri kepada presiden.
- Perum dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain, dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi.
- Laporan tahunan disampaikan kepada menteri atas nama pemerintah untuk mendapatkan pengesahan.

Contohnya perusahaan umum diantaranya adalah Dinas Angkutan Motor RI (Perum DAMRI), dan Perusahaan Umum Pegadaian (Perum PEGADAIAN).

Gambar 6.2 *Perum Pegadaian sebagai BUMN berbentuk Perum*
Sumber:www.ramadhan.detik.com

c. Perusahaan Perseroan (Persero)

Perusahaan Perseroan (Persero) yaitu BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham dan seluruh atau paling sedikit 51 % sahamnya dimiliki negara. Contohnya PT Telkom (Telekomunikasi), PT Pos Indonesia, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), PT KAI (Kereta Api Indonesia). Persero memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

PT Telkom (telekomunikasi), PT Pos Indonesia, dan PT PLN (Perusahaan Listrik Negara), dan PT KAI (Kereta Api Indonesia). Perseroan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- Berstatus badan hukum perseroan terbatas
- Dipimpin oleh seorang Direksi
- Tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba
- Permodalan sebagian besar berasal dari pemerintah dalam bentuk saham-saham
- Karyawannya berstatus pegawai perusahaan swasta biasa.
- Biasanya berbentuk PT

Gambar 6.3 *PT.KAI sebagai BUMN berstatus Persero*
Sumber: www.qbheadllines.com

d. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Selain pemerintah pusat yang memiliki BUMN, pemerintah daerah juga biasanya memiliki badan usaha, baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun dalam rangka mencari sumber keuangan bagi pembangunan di daerah tersebut.

Badan usaha yang dimiliki pemerintah daerah biasa disebut Badan Usaha Miliki Daerah (BUMD), kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat daerah yang bersangkutan.

Permodalan BUMD sebagian besar dari Pemerintah Daerah dan sebagian lainnya dapat berasal dari pihak swasta dalam bentuk saham-saham. Contohnya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Perusahaan Pengelola Pasar Tradisional, dan Perusahaan Daerah Kebersihan.

BUMD memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:

1. BUMD didirikan oleh pemerintah daerah
2. Permodalan selurunya atau sebagian besar berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. BUMD dipimpin oleh satu direksi yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah, baik gubernur, walikota atau bupati.

Gambar 6.4 *Bus DAMRI dikelola oleh BUMD*
Sumber: www.ginanjar.com

2. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS)

Badan Usaha Milik Swasta, yaitu badan usaha yang seluruh permodalannya berasal dari pihak swasta, badan usaha milik swasta ini dapat dimiliki oleh seorang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama penanaman modal. Tujuan dari badan usaha milik swasta ini adalah untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya. Perusahaan swasta terdiri atas berikut ini.

a) *Perusahaan swasta nasional* adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta dalam negeri, contohnya Astra Internasional.
b) *Perusahaan swasta asing* adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari pihak swasta luar negeri, contohnya Hongkong Sanghai Bank Corporation (HSBC) di dunia perbankan.
c) *Perusahaan swasta campuran* adalah perusahaan swasta yang permodalannya berasal dari patungan antara beberapa pihak swasta, baik swasta nasional dengan swasta nasional, maupun swasta nasional dengan swasta asing dalam bentuk kerja sama, contohnya Lippo Bank kerja sama, swasta Indonesia dengan swasta Malaysia.

Badan Usaha Milik Swasta memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

a) tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba;
b) permodalan berasal dari pihak swasta yang dapat berasal dari satu orang atau beberapa orang dalam bentuk kerja sama;
c) mempunyai status hukum yang bertanggung jawab sesuai kitab undang-undang hukum dagang;
d) karyawannya berstatus pegawai swasta yang diatur oleh masing-masing perusahaan.

Menurut UUD 1945 Pasal 33 Ayat 2 dan 3, dalam penerapannya walaupun pemerintah sebagai penyelenggara dari cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dalam bentuk perusahaan negara, tetapi pemerintah memberikan keleluasaan kepada pihak swasta baik swasta nasional maupun swasta asing untuk melaksanakan produksi berbagai macam alat pemenuhan kebutuhan hidup, baik skala kecil maupun besar yang secara langsung diawasi oleh pemerintah.

Adapun peranan badan usaha milik swasta dalam demokrasi ekonomi di antaranya:

a) membantu pemerintah mengurangi pengangguran dengan membuka lapangan usaha baru;
b) membantu pemerintah dalam mengelola dan mengusahakan kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi;
c) membantu pemerintah dalam menambah pendapatan negara;
d) dapat mempertinggi pertumbuhan ekonomi nasional;
e) membatu meningkatkan kinerja kegiatan ekonomi nasional di berbagai sektor.

Bentuk badan usaha milik swasta terdiri atas perusahaan perseorangan, firma (Fa), perusahaan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT).

a. Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan, yaitu suatu badan usaha yang permodalannya berasal dari satu orang sehingga dimiliki dan dikelola oleh seorang yang bersangkutan. Tanggung jawab dalam perusahaan perseorangan bersifat tidak terbatas sehingga semua keuntungan dan risiko kerugian akan ditanggung sendiri. Kebaikan dari perusahaan perseorangan:

1) organisasi relatif mudah;
2) pengambilan keputusan mudah dan cepat karena perusahaan dimiliki oleh sendiri;
3) keuntungan menjadi hak milik perusahaan seorang tanpa dibagi dengan pihak lain;
4) biaya organisasi dan pajak yang ditanggung lebih murah.

Adapun kelemahan perusahaan perseorangan adalah:

1) sumber permodalan perusahaan sangat terbatas;
2) tanggung jawab organisasi tidak terbatas sehingga sulit mengontrolnya;
3) pengelolaan kurang baik dan sederhana sesuai kemampuan pemilik seorang;
4) risiko kerugian dan permasalahan perusahaan ditanggung sendiri.

b. Firma (Fa)

Firma, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Tujuannya untuk membagi hasil yang diperoleh dari persekutuan tersebut.

Kebaikan dari firma adalah:

1) pemimpin perusahaan dapat dipilih sesuai dengan keahlian yang dimiliki;
2) permodalan lebih besar karena hasil penggabungan dari dua orang atau lebih;
3) keuntungan dan risiko perusahaan dibagi beberapa orang sesuai perjanjian.

Kelemahan firma adalah:

1) sering terjadi perselisihan dalam pengambilan keputusan perusahaan;
2) kesalahan yang dilakukan seorang harus menjadi tanggung jawab bersama;
3) sifat tanggung jawab tidak terbatas sehingga pengelolaan manajemen kadang tidak profesional.

c. Perusahaan Komanditer (Commanditaire Venotschapi/ CV)

Perusahaan komanditer, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupakan persekutuan atas beberapa orang yang berusaha (sekutu komplementer) dan beberapa orang yang hanya menyerahkan modal saja (sekutu komanditer). Pembagian laba yang diperoleh disesuaikan dengan perjanjian yang tercantum dalam akta pendirian.

Kebaikan dari perusahaan komanditer adalah:

1) permodalan lebih besar karena berasal dari seorang atau beberapa orang yang memiliki modal cukup;
2) proses pendiriannya lebih mudah;
3) pengelolaan lebih baik dan jelas karena ada orang yang khusus menjalankan usaha dari perusahaan komanditer yang bersangkutan.

Kelemahan perusahaan komanditer adalah:

1) para pemilik modal biasanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas;
2) kemungkinan campur tangan pemilik modal akan menyebabkan permasalahan dalam menjalankan usaha;
3) jika tidak cocok, pemilik modal kemungkinan sulit menarik kembali modal yang telah disetorkannya.

d. Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan terbatas, yaitu suatu bentuk perusahaan swasta yang merupkan perseroan dua orang atau lebih dengan perolehan modal berusal dari pengeluaran saham. Pemilik modal disebut pemegang saham yang mempunyai tanggung jawab sebesar saham yang

dimilikinya. Pemegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan terbatas berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Kebaikan dari perseroan terbatas adalah:

1) permodalan lebih besar dan pengumpulan lebih mudah dengan cara mengeluarkan saham;
2) kepemimpinan perusahaan mudah diganti, jika dianggap sudah tidak layak;
3) kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dengan banyaknya modal yang dimiliki.

Kelemahan perseroan terbatas adalah:

1) proses pendiriannya relatif sulit dengan biaya perizinan yang cukup besar;
2) menimbulkan spekulasi dari penjualan saham;
3) pemegang kekuasaan terletak pada pemegang saham terbesar sehingga kemungkinan menyebabkan intervensi yang berlebihan terhadap anggota manajemen.

3. Koperasi

a. Sejarah Singkat Koperasi di Indonesia

Koperasi di Indonesia lahir sebagai akibat adanya sistem kapitalisme dan imperialisme yang menyengsarakan dan membodohkan rakyat Indonesia. Hal ini menjadi dorongan bagi para pejuang untuk mendirikan koperasi.

Gambar 6.5
Mohammad Hatta
(Bapak Koperasi Indonesia)
Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

1) Zaman Belanda

Tokoh yang pertama mempunyai ide untuk mendirikan koperasi, adalah Patih Purwokerto, **Raden Arya Wiriaatmaja**. Koperasi yang didirikannya adalah *Hulf Sparbank* (Bank Tabungan Penolong) yang ditujukan untuk membantu kaum ningrat yang jatuh ke tangan lintah darat. Kemudian pada tahun 1896 berubah menjadi Bank Priyayi lalu berubah lagi menjadi Bank Rakyat Indonesia (BRI). Selain itu juga ada Koperasi SDI (Serikat Dagang Islam) dan koperasi lain yang didirikan oleh organisasi-organisasi waktu itu. Akan tetapi tidak begitu berkembang karena adanya kecurigaan terhadap koperasi-koperasi itu dari pemerintah Belanda.

2) Zaman Jepang

Jepang mendirikan koperasi ala Jepang yang disebut *Kumiai* yang bertujuan untuk mengeruk hasil kekayaan Indonesia untuk membiayai bala tentara Jepang. Pada masa ini, koperasi kondisinya masih sulit berkembang. Hal itu terlihat dari sulitnya untuk mendapatkan izin pendirian.

3) Zaman Kemerdekaan

Pada bulan 12 Juli 1947, diadakan Kongres Koperasi Se-Indonesia di Tasikmalaya yang melahirkan salah satu keputusannya bahwa tanggal 12 Juli ditetapkan sebagai hari Koperasi Indonesia. Dalam perkembangannya sampai saat ini, koperasi Indonesia telah beberapa kali berganti undang-undang. Hal ini dikarenakan selalu ada saja kepentingan yang ingin masuk ke dalam koperasi. Untuk saat ini yang berlaku adalah UU No. 25 Tahun 1992 yang mungkin beberapa saat lagi akan diganti dengan Undang-Undang Koperasi yang baru. Saat ini dalam sistem pemerintahan kita, koperasi di bawah binaan Kementrian Koperasi dan UKM yang pada era Kabinet Indonesia Bersatu ini dipimpin oleh Bapak Suryadarma Ali, sedangkan gerakan koperasinya tergabung dalam Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin).

b. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau Badan Hukum Koperasi dengan melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan (UU No. 25 Tahun 1992).

c. Prinsip-Prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah:

1) keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2) pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3) pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha anggota;
4) pemberian balas jasa yang terbatas atas modal;
5) kemandirian;
6) pendidikan perkoperasian;
7) kerja sama antarkoperasi.

d. Bentuk dan Jenis Koperasi

Koperasi yang ada di negara kita jika dilihat dari bentuknya dibagi menjadi dua bentuk, yakni sebagai berikut.

1) **Koperasi sekunder**, yakni koperasi yang beranggotakan badan hukum koperasi. Untuk membentuknya minimal tiga koperasi yang sudah berbadan hukum berkumpul dan bersepakat untuk bergabung mendirikan koperasi sekundernya.
2) **Koperasi primer**, yakni koperasi yang beranggotakan orang perorang. Untuk membentuknya minimal 20 orang yang memiliki kebutuhan ekonomi yang sama bersepakat untuk mendirikan koperasi.

Adapun jika dilihat dari jenisnya, koperasi yang ada di negara kita dikelompokkan menjadi:

1) koperasi simpan pinjam,
2) koperasi konsumen,
3) koperasi produsen,
4) koperasi jasa,
5) koperasi pemasaran.

Penjelasan koperasi tersebut sesuai dengan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai berikut.

1) Koperasi Simpan Pinjam (KSP) atau Koperasi Kredit

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1992 Pasal 1, bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Keanggotaan koperasi simpan pinjam pada prinsipnya bebas bagi semua orang yang memenuhi untuk menjadi anggota koperasi. Orang-orang yang dimaksud adalah mempunyai kegiatan usaha atau mempunyai kepentingan ekonomi yang sama, misalnya KSP dengan anggota petani, KSP dengan anggota nelayan, dan KSP dengan anggota karyawan.

Gambar 6.6 *Pusat Koperasi Unit Desa*
Sumber: Majalah PIP 2004

2) Koperasi Konsumen

Keanggotaan koperasi konsumen atau pendiri koperasi konsumen adalah kelompok masyarakat. Misalnya, kelompok PKK, Karang Taruna, pondok pesantren, pemuda dan lain-lain yang membeli barang-barang untuk kebutuhan hidup sehari-hari, seperti sabun, gula pasir, dan minyak tanah. Di samping itu, koperasi konsumen membeli barang-barang konsumen dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan anggota.

3) Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang anggotanya orang-orang yang mampu menghasilkan barang, misalnya:

a) koperasi kerajinan industri kecil, anggotanya para pengrajin;
b) koperasi perkebunan, anggotanya produsen perkebunan rakyat;
c) koperasi produksi peternakan, anggotanya para peternak.

4) Koperasi Pemasaran

Koperasi pemasaran adalah koperasi yang beranggotakan orang-orang yang mempunyai kegiatan di bidang pemasaran barang-barang dagang, misalnya :

a) koperasi pemasaran ternak sapi, anggotanya adalah pedagang sapi;
b) koperasi pemasaran elektronik, anggotanya adalah pedagang barang-barang elektronik;
c) koperasi pemasaran alat-alat tulis kantor, anggotanya adalah pedagang barang-barang alat tulis kantor.

5) Koperasi Jasa

Koperasi jasa didirikan untuk memberikan pelayanan (jasa) kepada para anggotanya. Ada beberapa koperasi jasa antara lain sebagai berikut.

a) Koperasi angkutan memberikan jasa angkutan barang atau orang . Koperasi angkutan didirikan oleh orang lain yang mempunyai kegiatan di bidang jasa angkutan barang atau orang.
b) Koperasi perumahan memberi jasa penyewaan rumah sehat dengan sewa yang cukup murah atau menjual rumah dengan harga murah.
c) Koperasi asuransi memberi jasa jaminan kepada para anggotanya, seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran. Anggota koperasi asuransi adalah orang-orang yang bergerak di bidang jasa asuransi.

e. Tata Cara Pendirian Koperasi

1) Persyaratan Pembentukan Koperasi

Dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu dalam Pasal 6 sampai dengan 8 disebutkan bahwa persyaratan untuk pembentukan koperasi adalah sebagai berikut.

a) Persyaratan pembentukan koperasi didasarkan atas bentuk koperasi yang akan dibentuk, yaitu apakah koperasi primer atau koperasi sekunder.
b) Untuk persyaratan pembentukan koperasi primer memerlukan minimal 20 orang anggota. Untuk persyaratan pembentukan koperasi sekunder memerlukan minimal 3 koperasi yang telah berbadan hukum.
c) Koperasi yang dibentuk harus berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia.
d) Untuk pembentukan koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar.

e) Anggaran dasar koperasi harus memuat sekurang-kurangnya:
   (1) daftar nama pendiri;
   (2) nama dan tempat kedudukan;
   (3) maksud dan tujuan serta di bidang usaha;
   (4) ketentuan mengenai keanggotaan;
   (5) ketentuan mengenai rapat anggota;
   (6) ketentuan mengenai pengolahan;
   (7) ketentuan mengenai permodalan;
   (8) ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya;
   (9) ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha;
   (10) ketentuan mengenai sanksi.

2) Dasar Pembentukan

Orang atau masyarakat yang mendirikan koperasi mengerti maksud dan tujuan koperasi serta kegiatan usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi untuk meningkatkan pendapatan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi mereka.Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan koperasi:

(1) Orang-orang yang mendirikan dan yang nantinya menjadi anggota koperasi harus mempunyai kegiatan dan atau kepentingan ekonomi yang sama. Hal itu mengandung arti bahwa tidak semua orang dapat mendirikan dan atau menjadi anggota koperasi tanpa adanya kejelasan kegiatan atau kepentingan ekonominya. kegiatan ekonomi yang sama diartikan memiliki kebutuhan ekonomi yang sama.Orang-orang yang mendirikan koperasi tersebut tidak dalam keadaan cacat hukum, yaitu tidak sedang menjalani atau terlibat masalah atau sengketa hukum, juga orang-orang diindikasikan sebagai orang yang suka menghasut atau kena hasutan pihak lain yang merusak atau memecah belah persatuan gerakan koperasi.

(2) Usaha yang akan dilaksanakan oleh koperasi harus layak secara ekonomi.Layak secara ekonomi diartikan bahwa usaha tersebut akan dikelola secara efesien dan mampu menghasilkan keuntungan usaha dengan memperhatikan faktor-faktor tenaga kerja, modal dan teknologi.

(3) Modal sendiri harus cukup tersedia untuk mendukung kegiatan usaha yang akan dilaksanakan tanpa menutup kemungkinan memperoleh bantuan, fasilitas dan pinjaman dari pihak luar.

(4) Kepengurusan dan manajemen harus disesuaikan dengan kegiatan usaha yang akan dilaksanakan agar tercapai efesien dalam pengolahan koperasi. Perlu diperhatikan bahwa mereka yang nantinya ditunjuk/dipilih menjadi pengurus haruslah orang yang memiliki kejujuran, kemampuan dan kepeminpinan, agar koperasi yang didirikan tersebut sejak dini telah memiliki kepengurusan yang andal.

3) Persiapan Pembentukan Koperasi

Adapun persiapan-persiapan yang perlu dilakukan dalam upaya mendirikan koperasi adalah sebagai berikut:

(1) Pembentukan koperasi harus dipersiapkan dengan matang oleh para pendiri. Persiapan tersebut antara lain meliputi kegiatan penyuluhan, penerangan maupun pelatihan bagi para pendiri dan calon anggota untuk memperoleh pengertian dan kejelasan mengenai perkoperasian.

(2) Yang dimaksud pendiri adalah mereka yang hadir dalam rapat pembentukan koperasi dan yang telah memenuhi persyaratan keanggotaan serta menyatakan diri menjadi anggota.

(3) Para pendiri mempersiapkan rapat pembentukan dengan cara antara lain penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

4) Rapat Pembentukan

Setelah semua upaya persiapan pembentukan koperasi dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rapat pembentukan dengan memerhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

a) Rapat anggota koperasi dihadiri oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang untuk koperasi primer dan sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi untuk koperasi sekunder.
b) Rapat pembentukan dipimpin oleh seseorang atau beberapa pendiri atau kuasa pendiri.
c) Yang disebut *kuasa pendiri* adalah beberapa orang dari pendiri yang diberi kuasa dan sekaligus ditunjuk oleh untuk pertama kalinya sebagai pengurus koperasi untuk memproses pengajuan permintaan pengesahan akta pendirian koperasi dan menandatangani anggaran dasar koperasi.
d) Apabila diperlukan dan atas permohonan para pendiri, penjabat dinas koperasi dapat hadir dalam rapat pembentukan untuk membantu kelancaran jalannya rapat dan memberikan petunjuk-petunjuk seperlunya.
e) Dalam rapat pembentukan tersebut perlu dibahas, antara lain mengenai keanggotaan, usaha yang akan dijalankan, modal sendiri, kepengurusan dan pengelolaan usaha pengurusan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga
f) Anggaran dasar harus memuat sekurang-kurangnya daftar nama hadir, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan, bidang usahanya, ketentuan mengenai keanggotaan, rapat anggota, pengelolaan, jangka waktu berdiri, pembagian sisa hasil usaha (SHU), dan ketentuan mengenai sanksi.
g) Rapat harus mengambil kesepakatan dan keputusan terhadap hal-hal sebagaimana dimaksud pada butir c) dan e) dan wajib membuat berita acara rapat pembentukan koperasi.

5) Pengesahan Akta Pendirian Koperasi atau Badan Hukum Koperasi

Para pendiri atau kuasanya mengajukan permintaan pengesahan secara tertulis kepada pemerintah dengan bantuan notaris. Permintaan pengesahan tersebut hendaknya diajukan dengan melampirkan:

a) berita acara pembentukan koperasi termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permintaan pengesahan akta;
b) surat bukti penyetoran modal dari setiap pendiri kepada koperasinya dengan jumlah sekurang-kurangnya sebesar simpanan pokok;
c) rencana awal kegiatan koperasi atau program kerja;
d) daftar hadir rapat pembentukan koperasi;
e) data pendiri koperasi;
f) daftar susunan pengurus dan pengawas koperasi;
g) fotokopi KTP dari masing-masing anggota pendiri (untuk koperasi primer);
h) rekomendasi dari kelurahan yang diketahui oleh kecamatan domisili koperasi itu berada;
i) pas foto pengurus koperasi.

6) Pertanggungjawaban Kuasa Pendiri

Selama permintaan pengesahan akta pendiri koperasi masih dalam penyelesaian, kuasa pendiri dapat melakukan kegiatan usaha atau tindakan hukum untuk kepentingan calon anggota atau calon koperasi. Setelah akta pendirian koperasi disahkan maka pendiri harus segera mengadakan rapat anggota, baik rapat anggota biasa maupun rapat anggota tahunan (RAT) untuk memutuskan menerima atau menolak tanggung jawab kuasa pendiri atas kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan.

Gambar 6.7 *Menegkop dan UKM Suryadharma Ali memberikan penghargaan kepada pengurus koperasi berprestasi*
Sumber: Majalah PIP 2004

Apabila rapat anggota menerima maka kegiatan usaha atau tindakan hukum yang telah dilaksanakan kuasa pendiri menjadi beban atau keuntungan koperasi. Jika ditolak maka segala akibat yang timbul dari kegiatan usaha atau tindakan hukum tersebut menjadi tanggung jawab pribadi kuasa pendiri. Pada saat RAT pertama ini dirumuskan perangkat lunak dan perangkat keras dari organisasi koperasi yang dibentuk, seperti tata kerja dan struktur organisasi, jenis usaha, kepengurusan (pengurus dan pengawas) pertama dalam koperasi yang dibentuk dan hal-hal strategis lainya untuk keperluan pengembangan koperasi, pengurus terpilih bertanggung jawab atas keberlangsungan aktivitas usaha dan organisasi koperasi sampai RAT tahun selanjutnya.

Dalam perjalanannya, organisasi yang dibentuk dapat mengembangkan jaringan dengan cara masuk ke dalam keanggotaan Organisasi Gerakan Koperasi. Seperti, Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) untuk tingkat pusat, Dekopinwil untuk tingkat provinsi dan DEKOPINDA untuk tingkat kabupaten atau kota, Badan Komunikasi Pemuda Koperasi (BKPK), Asbikom Jabar (Asosiasi Bisnis Koperasi Mahasiswa Jawa Barat), atau sekunder-nya seperti Koperasi Pemuda Indonesia (KOPINDO), GKPRI, GKBI, dan GKSI. Bisa juga organisasi lainya, seperti Kadin.

RANGKUMAN

1. Konsep kelangkaan dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu keadaan saat manusia ingin mengonsumsi suatu barang atau jasa lebih banyak daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia.
2. Tidak terbatasnya kebutuhan manusia dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya, yaitu:
   a) jumlah manusia yang semakin bertambah,
   b) kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi,
   c) tingkat pendidikan,
   d) tingkat pendapatan, dan
   e) sifat manusia yang tidak pernah puas.
3. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya dibagi menjadi sebagai berikut:
   a) kebutuhan primer,
   b) kebutuhan sekunder,
   c) kebutuhan tersier.
4. Kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya dibagi menjadi sebagai berikut:
   a) kebutuhan sekarang,
   b) kebutuhan masa datang.
6. Kebutuhan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi sebagai berikut:
   a) kebutuhan jasmani,
   b) kebutuhan rohani.

7. Pilihan merupakan suatu tindakan untuk mengambil keputusan mengenai barang apa yang akan dipilih sehingga kepuasan individu tetap dapat tercapai.
8. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi atau dikenal juga dengan sistem ekonomi kerakyatan terdiri atas BUMN, BUMS dan Koperasi.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Kebutuhan manusia yang tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas disebut ….
   a. kelangkaan
   b. inti masalah ekonomi
   c. kesenjangan ekonomi
   d. kebutuhan manusia
2. Semakin berkembangnya kebutuhan manusia disebabkan oleh faktor ….
   a. terbatasnya faktor produksi
   b. berkembangnya kebutuhan manusia
   c. berkembangnya kebutuhan jasmani
   d. berkembangnya kebutuhan rohani

3. Pasangan berikut yang *bukan* merupakan barang komplementer ….
   a. kompor dan sumbu kompor
   b. bensin dan minyak tanah
   c. sepeda motor dan sepeda
   d. mobil dan bensin
4. Barang yang berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dalam jangka pendek disebut ….
   a. barang tidak bergerak
   b. barang komplementer
   c. barang bergerak
   d. barang jaminan
5. Berikut yang *bukan* termasuk kebutuhan berdasarkan intensitasnya adalah ....
   a. kebutuhan primer
   b. kebutuhn sekunder
   c. kebutuhan tersier
   d. kebutuhan pokok
6. Berikut yang *bukan* termasuk pelaku utama ekonomi berdasarkan UUD 1945 Pasal 33 adalah ....
   a. BUMN
   b. BUMS
   c. Koperasi
   d. BUMD
7. Koperasi yang beranggotakan orang perorang disebut ....
   a. koperasi sekunder
   b. koperasi primer
   c. koperasi tersier
   d. koperasi Unit Desa
8. Undang-undang yang membahas tentang perkoperasian adalah ....
   a. UU No. 25 Tahun 1992
   b. UU No. 52 Tahun 1992
   c. UU No. 25 Tahun 1995
   d. UU No. 52 Tahun 1995
9. Bank yang memiliki status Badan Hukum Milik Negara (BUMN) adalah ....
   a. Bank Mandiri
   b. Bank Central Asia
   c. Bank BUKOPIN
   d. Bank Danamon

10. Jumlah anggota yang disyaratkan untuk mendirikan koperasi primer, yaitu sebanyak ....
    a. 10 orang
    b. 20 orang
    c. 30 orang
    d. 40 orang

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan kelangkaan!
2. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan, berikan contohnya!
3. Sebutkan macam-macam kebutuhan berdasarkan intensitasnya!
4. Jelaskan perbedaan antara barang substitusi dan barang komplementer!
5. Jelaskan pendapatmu, apakah koperasi masih efektif bagi pemberdayaan ekonomi di negara kita ?

TUGAS

Ikutilah langkah-langkah berikut ini.

1. Berkunjunglah ke kantor Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) di kabupaten atau kota tempat tinggalmu, mintalah data tentang sekolah-sekolah yang memiliki Koperasi Siswa (Kopsis) beserta profile masing-masing Kopsis.
2. Pilihlah salah satu Kopsis yang paling berprestasi dan kunjungilah bersama teman-teman sekelasmu.
3. Diskusilah dengan pengurus Kopsis tersebut tentang bagaimana membangun Kopsis yang sukses dan apa manfaat Kopsis bagi siswa.
4. Buatlah laporan kunjungan tersebut!

Bab VII

PASAR DALAM KEGIATAN EKONOMI

Standar Kompetensi

Memahami kegiatan pelaku ekonomi di masyarakat.

Kompetensi Dasar

Mengidentifikasi bentuk pasar dalam kegiatan ekonomi masyarakat.

Sudahkan Kamu berkunjung ke Bursa Efek Indoensia (BEI)? BEI merupakan hasil gabungan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang mulai diaktifkan sejak 1 Desember 2007. Di tempat tersebut perusahaan-perusahaan yang sudah "go public" menjual sebahagian modalnya yang biasa disebut saham ke masyarakat umum, Kamu pun dapat bertindak sebagai pembeli modal dari perusahaan-perusahan yang telah terdaftar di Bursa Efek. Seperti Telkom, Pertamina, Indosat, dan lain-lain.

Kegiatan di Bursa Efek Indonesia
Sumber: www.idx.co.id

Bursa Efek merupakan salah satu contoh pasar, selain pasar modal terdapat pula pasar uang, pasar valuta asing dan sebagainya, pada bab ini kamu akan mempelajari tentang pengertian pasar dan macam-macamnya.

PETA KONSEP
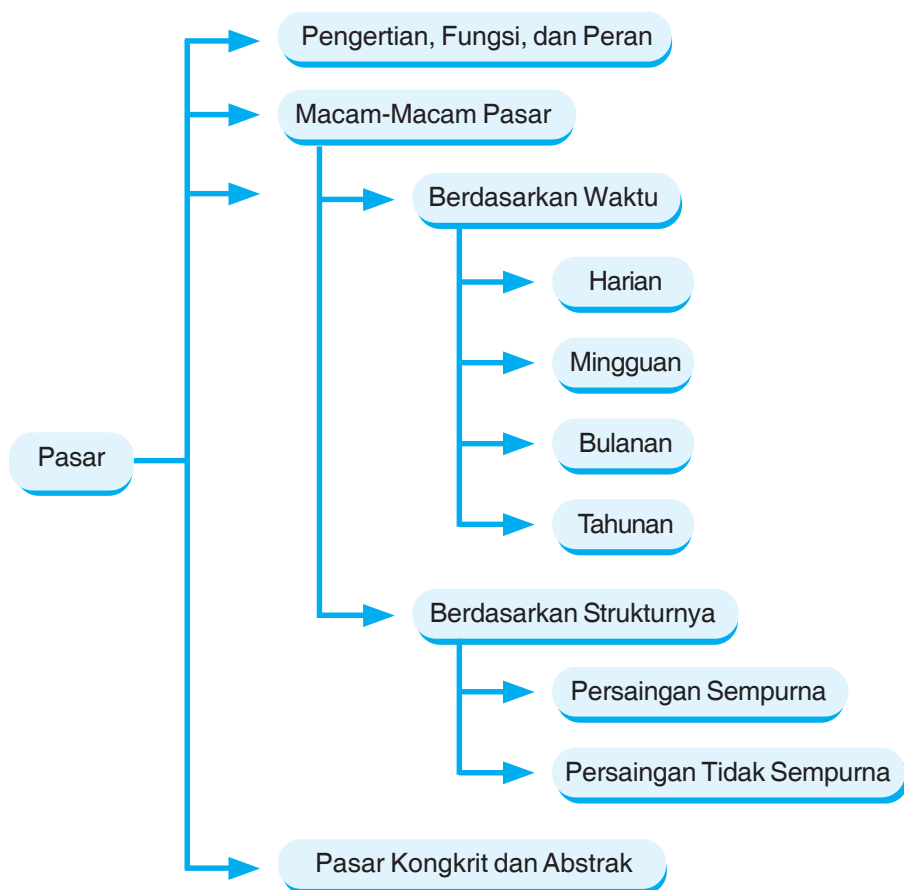
Kata Kunci

- Pasar
- Pasar kongkrit
- Pasar abstrak
- Persaingan sempurna
- Persaingan tidak sempurna

A. PENGERTIAN, FUNGSI, DAN PERAN PASAR

Dalam kehidupan sehari-hari, pasar diartikan sebagai suatu tempat bertemunya antara penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang membutuhkan barang. Pasar merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan adanya pasar, produsen atau penjual dapat menyalurkan dan menjual barang yang diproduksi tanpa harus kebingungan memikirkan kemana barang hasil produksinya harus dijual. Bagi konsumen atau pembeli, pasar memudahkan mereka mencari berbagai macam kebutuhan pokok.

Gambar 7.1
Sogo Plaza sebagai Pasar Modern di Surabaya. Pasar Modern banyak berdiri menggantikan pasar tradisional.
Sumber:www.surabaya.go.id

Kita tentu tidak bisa membayangkan bila dalam hidup kita tidak terdapat pasar. Kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi semua kebutuhan hidup kita. Contohnya hasil panen sayuran para petani akan menjadi sia-sia apabila tidak ada yang membeli padi tersebut. Petani tidak mungkin bisa memenuhi semua kebutuhan hidupnya hanya dengan padi hasil panennya. Dia pasti memerlukan kebutuhan hidup yang lain. Sebaliknya, konsumen yang memiliki uang sebanyak apa pun tidak akan ada nilainya, apabila tidak ada orang yang menjual kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, pasar memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan setiap manusia.

Mengingat kedudukannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia, pasar memiliki beberapa fungsi utama. Adapun fungsi pasar itu antara lain sebagai berikut.

1. Menetapkan Nilai

Pada saat terjadi transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli menetapkan harga masing-masing terhadap satu jenis barang. Setelah melakukan tawar-menawar maka akan diperoleh harga yang disepakati oleh kedua belah pihak dan disebut harga kesepakatan atau harga keseimbangan. Contohnya, Pak Joni seorang tukang sayur menawarkan seikat bayam Rp1.500,00, kemudian Bu Ratna meminta dengan harga Rp1.000,00. Setelah tawar-menawar maka disepakati harga seikat bayam Rp1.250,00. Jadi, nilai seikat bayam adalah Rp. 1.250,00.

2. Mendistribusikan Barang dan Jasa

Pasar dapat membantu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Dengan adanya pasar, konsumen tidak akan disusahkan dalam mencari semua kebutuhan hidupnya, karena pasar bisa menyediakan seluruh barang kebutuhan hidup. Contohnya, apabila kita membutuhkan pakaian maka kita tinggal pergi ke pasar. Bila kita membutuhkan beras maka kita tinggal pergi ke pasar beras.

3. Mengorganisasikan Produksi

Barang dan jasa yang dijual di pasar akan terjual kalau harganya dianggap murah oleh konsumen. Oleh karena itu, produsen selalu menerapkan metoda produksi yang dapat menekan biaya produksi untuk menghasilkan produk yang harganya murah. Contohnya, untuk menghasilkan barang yang murah produsen mengatur bahan baku, upah pegawai, biaya penjualan, dan lain lain.

4. Menyediakan Barang dan Jasa untuk Keperluan Masa Depan

Pasar biasanya menjadi salah satu tempat menyimpan stok barang untuk keperluan di kemudian hari. Kita dapat memperolehnya untuk keperluan di masa depan.

B. MACAM-MACAM PASAR

Dalam kehidupan sehari-hari kita dapat melihat jenis pasar yang beraneka ragam. Berdasarkan waktu kegiatannya, pasar dibedakan menjadi empat macam sebagai berikut.

1. Pasar Harian

Pasar harian, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung setiap hari. Transaksi jual beli barang kebutuhan pokok terjadi setiap hari. Contoh pasar harian adalah pasar tradisional, supermarket, hypermarket, supermall, toserba, dan sebagainya.

Gambar 7.2 *Pasar Tradisional.*
Sumber: www.pasarindonesia.com

2. Pasar Mingguan

Pasar mingguan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung satu minggu sekali, pada hari-hari tertentu. Contoh, pasar minggu, pasar senen, pasar rabu, dan sebagainya.

3. Pasar Bulanan

Pasar bulanan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung setiap satu bulan sekali, contohnya pasar yang diadakan di seputar sebuah pabrik setiap awal bulan. Pada saat itu, biasanya para karyawan mendapatkan gaji dari perusahaan sehingga dijadikan peluang oleh para pedagang untuk mengadakan pasar sederhana.

4. Pasar Tahunan

Pasar tahunan, yaitu pasar yang kegiatannya berlangsung setiap satu tahun sekali. Pasar ini biasanya digelar untuk memperingati peristiwa tertentu yang dianggap penting. Contoh, Pekan Raya Jakarta yang diselenggarakan untuk memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta sekaligus untuk mempromosikan berbagai jenis barang kepada konsumen.

Berdasarkan strukturnya, pasar dibagi menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar bukan persaingan sempurna.

1. Pasar Persaingan Sempurna

Pasar persaingan sempurna, yaitu pasar tempat interaksi antara permintaan dan penawaran terjadi dengan jumlah yang tidak terbatas. Harga yang terbentuk merupakan harga yang benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna sebagai berikut.

a) Jumlah pembeli dan penjual sangat banyak. Oleh karena itu, produsen atau konsumen tidak bisa memengaruhi harga pasar. Harga pasar terbentuk murni hasil interaksi permintaan dan penawaran. Produsen hanya bisa menerima harga pasar.
b) Barang yang dijual bersifat homogen. Barang yang dihasilkan benar-benar sama dalam segala hal. Tidak terdapat perbedaan yang nyata di antara barang yang dijual.
c) Pembeli maupun penjual bebas untuk keluar masuk pasar.
   Selama memungkinkan masih bisa mendapat keuntungan, baik penjual maupun pembeli boleh masuk ke dalam pasar.
d) Informasi tentang pasar diketahui dengan sempurna. Penjual dan pembeli mengetahui dengan sempurna informasi mengenai harga jual, biaya produksi, kualitas barang, dan lain-lain.
e) Bebas dari campur tangan pemerintah. Pemerintah tidak memiliki wewenang dalam menetukan harga di pasar karena harga ditentukan oleh permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

Dalam kenyataannya saat ini, pasar persaingan sempurna tidak pernah ada. Hal ini disebabkan asumsi-asumsi yang menjadi syaratnya sangat sulit untuk dipenuhi dalam kondisi saat ini. Namun, ada pasar yang mendekati pasar persaingan sempurna, di antaranya pasar ikan, pasar beras, pasar sayur-sayuran.

2. Pasar Bukan Persaingan Sempurna

Pasar bukan persaingan sempurna, yaitu pasar yang tidak memenuhi ciri-ciri pasar persaingan sempurna. Jika seorang penjual dapat memengaruhi harga pasar, maka tempat penjual tersebut adalah pasar bukan persaingan sempurna. Bentuk pasar bukan persaingan sempurna terdiri atas berikut ini.

a. Pasar Monopoli

Pasar monopoli, yaitu suatu pasar dengan hanya ada satu penjual yang menguasai pasar. Penjual ini menghasilkan barang yang tidak diproduksi penjual lain, sehingga bebas menentukan harga. Sekarang ini perusahaan atau penjual yang murni bersifat monopoli sangat jarang ditemui, karena di dalam pasar selalu ada persaingan. Contoh dari perusahaan yang memegang monopoli adalah Pertamina yang memegang monopoli pasar bahan bakar minyak di Indonesia.

Monopoli bisa dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.

1) Monopoli alamiah

Monopoli ini timbul karena faktor alam yang khas, maka daerah tersebut menguasai pasar penjualan barang-barang yang dihasilkan dari daerah tersebut. Contohnya, apel dimonopoli oleh Malang, karena buah apel banyak tumbuh di daerah Malang, Jawa Timur.

2) Monopoli masyarakat

Monopoli ini timbul karena kepercayaan masyarakat terhadap produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, sehingga perusahaan tersebut mampu menguasai pasar.

3) Monopoli undang-undang

Monopoli ini timbul karena adanya kebijakan atau peraturan pemerintah, misalnya hak paten, hak cipta, dan lain-lain.

b. Pasar Oligopoli

Pasar oligopoli, yaitu bentuk pasar bukan persaingan sempurna tempat terdapatnya beberapa penjual yang menguasai pasar. Jadi, pasar oligopoli hanya terdiri dari sekelompok kecil perusahaan atau penjual. Dalam pasar oligopoli biasanya satu perusahaan atau penjual yang menguasai sebagian besar pasar dan sebagian lagi beberapa perusahaan kecil.

Contoh pasar oligopoli adalah pasar jasa operator telepon seluler yang dikuasai oleh Telkomsel, Satelindo, dan Indosat. Contoh lainnya adalah pasar kendaraan bermotor yang dikuasai Honda, Suzuki, dan Yamaha.

Ciri-ciri pasar oligopoli, yaitu:

1) terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar;
2) barang yang diperjualbelikan hampir sama, namun memiliki perbedaan dalam hal corak dan merek;
3) terdapat hambatan bagi penjual baru yang masuk ke pasar untuk ikut bersaing;
4) di antara para oligopolis terdapat satu penjual yang berperan sebagai pemimpin harga (*price leader*). Contohnya, Aqua adalah *price leader* dalam pasar minuman mineral dengan menguasai pangsa pasar minuman mineral yang lebih besar.

c. Pasar Monopsoni

Pasar monopsoni, yaitu bentuk pasar bukan persaingan sempurna dengan pasar dikuasai oleh satu pembeli. Contohnya adalah sebuah perusahaan membeli teh yang berkualitas kepada para petani secara langsung, kemudian perusahaan ini membujuk para petani agar menjual tehnya hanya kepada perusahaan tersebut dengan harga ditentukan oleh perusahaan sebagai pembeli. Walaupun perusahaan ini menentukan harga teh, namun tidak bisa menentukan harga jual karena terdapat perusahaan lain yang juga memproduksi barang yang sama.

d. Pasar Oligopsoni

Pasar oligopsoni, yaitu bentuk pasar bukan persaingan sempurna dengan pasar dikuasai oleh beberapa pembeli. Masing-masing pembeli saling memengaruhi dalam menetapkan harga barang yang dibelinya.

e. Pasar Persaingan Monopolistis

Pasar persaingan monopolistis, yaitu bentuk pasar bukan persaingan sempurna tempat terdapatnya banyak penjual yang menawarkan barang yang sama, namun memiliki ciri khas masing-masing. Jadi, dalam pasar persaingan monopolistis barang yang diperjualbelikan sama, namun memiliki perbedaan dalam hal merek, model desain produk, aksesoris, dan lain-lain. Contohnya adalah pasar *hand phone* yang terdiri atas berbagai macam merek, model, ukuran, dan aksesorisnya, namun tetap memiliki kesamaan sebagai alat komunikasi.

Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya merupakan pasar yang berada di antara pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Unsur pasar monopoli terlihat dari adanya hak paten dari setiap produk yang dijual sehingga merek dagang mereka tidak boleh ditiru oleh perusahaan yang lain. Kemudian unsur persaingannya terlihat dari adanya persaingan dari barang yang dijual seperti dalam merek, kemasan, desain barang, ukuran, bahkan harga barang. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistis:

1) jumlah penjual dan pembeli sangat banyak;
2) barang yang dijual bersifat *differentiated product*;
3) promosi menjadi media ampuh dalam memenangkan persaingan;
4) penjual lebih mudah masuk pasar dibanding pasar monopoli dan oligopoli;
5) setiap penjual memiliki kekuatan monopoli atas barang yang dijualnya.

C. PASAR KONKRIT DAN PASAR ABSTRAK

Selain macam-macam pasar yang sudah dijelaskan di atas, terdapat jenis pasar lainnya, yaitu pasar konkret dan pasar abstrak. Pengelompokan ini berdasarkan ada tidaknya atau tampak tidaknya barang yang diperjualbelikan pada saat terjadi proses transaksi.

1. Pasar Konkret

Pasar konkret, yaitu pasar dengan barang yang dijual ada di tempat dan bisa langsung dibawa pembeli. Pada umumnya, pasar yang kita temui sehari-hari adalah bentuk pasar konkret dengan barang yang diperjualbelikan ada di tempat.

Ciri-ciri pasar konkret, di antaranya:

a) barang yang diperjualbelikan ada di tempat;
b) penjual dan pembeli bertemu secara langsung;

c) membutuhkan tempat untuk menyimpan barang;
d) barang yang dibeli dapat langsung dibawa pulang;
e) barang yang dijual biasanya berupa barang kebutuhan pokok.

Contoh pasar konkret di antaranya adalah pasar tradisional, pasar ikan, pasar elektronik, pasar swalayan, supermarket, hypermarket, mall, dan supermall.

2. Pasar Abstrak

Pasar abstrak, yaitu pasar dengan barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat secara langsung. Proses jual beli dalam pasar abstrak tidak mesti berhadapan langsung, namun bisa melalui telepon, surat, dan internet. Contoh pasar abstrak adalah sebagai berikut.

a. Pasar uang

Pasar uang, yaitu tempat diperjualbelikannya surat berharga atau dana yang memiliki masa jatuh tempo kurang dari satu tahun. Pasar uang merupakan pilihan alternatif bagi pihak yang membutuhkan dana jangka pendek. Di pasar uang bertemu antara pihak yang kekurangan dana dengan pihak yang kelebihan dana. Harga terbentuk melalui interaksi permintaan dan penawaran. Surat berharga yang diperjualbelikan di pasar uang adalah sebagai berikut.

1) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

SBI adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia dengan nilai nominal tertentu. SBI diterbitkan Bank Indonesia agar bank umum yang kelebihan dana (likuiditas) dapat menyalurkan dananya itu dengan membeli SBI. Apabila dana tersebut dibiarkan mengalir ke masyarakat, maka akan terjadi inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah.

2) Sertifikat deposito

Sertifikat deposito adalah surat berharga yang diterbitkan bank umum dengan nilai nominal tertentu dengan masa jatuh tempo tertentu. Sertifikat deposito tidak dapat dicairkan sebelum masa jatuh tempo. Apabila nasabah meminta dana deposito sebelum masa tempo, maka akan dikenakan denda.

3) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

SBPU adalah surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dengan nilai nominal tertentu. SBPU diterbitkan Bank Indonesia untuk membantu bank umum yang mengalami kekurangan dana sehingga kebutuhan dananya terpenuhi.

Terdapat beberapa manfaat pasar uang di antaranya:
1) menjadi sarana penyaluran dana yang tidak produktif;
2) sarana alternatif mencari sumber dana jangka pendek;

3) memudahkan pengusaha mencari dana untuk pengembangan usaha;
4) alat Bank Sentral untuk mengatur jumlah uang beredar.

b. Pasar modal

Pasar modal, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli modal. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan mendapatkan dana jangka panjang, artinya lebih dari satu tahun. Pasar modal juga dikenal dengan nama *bursa efek.*

Gambar: 7.3 *Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI)*
Sumber: www.idx.co.id

Lahirnya pasar modal di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran serta pemerintah Belanda pada zaman penjajahan. Pada tahun 1912, bursa efek pertama kali dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda yang kedudukannya di Batavia (sekarang Jakarta). Selanjutnya, pada tahun 1914 dikarenakan terjadi Perang Dunia ke-1, bursa efek yang telah dua tahun beroperasi ditutup.

Dalam perkembangan selanjutnya yaitu pada tahun 1925, dibuka kembali Bursa Efek Jakarta yang disertai dengan dibukanya bursa efek di Semarang dan Surabaya. Pada tahun 1942, terjadi Perang Dunia ke-2 dan Bursa Efek Jakarta ditutup kembali. BEJ baru dibuka kembali pada tahun 1952, walaupun pada tahun 1956 sempat tidak aktif.

Pada tahun 1976, pasar modal kembali dihidupkan dan dibentuknya Bapepam. Pada awalnya, kata Bapepam merupakan singkatan dari Badan Pelaksana Pasar Modal. Setelah tugas sebagai penyelenggara pasar modal dihapuskan melalui Keppres pada tahun 1990, Bapepam pun berganti nama menjadi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Menurut situs web resminya, tujuan dari Bapepam adalah mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat di Indonesia.

Bapepam mempunyai kewenangan untuk memberikan izin, persetujuan, dan pendaftaran kepada para pelaku pasar modal; memproses pendaftaran dalam rangka

penawaran umum; menerbitkan peraturan pelaksanaan dari perundang-undangan di bidang pasar modal; dan melakukan penegakan hukum atas setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Sejak berdirinya sampai dengan sekarang, Bapepam telah mengalami 11 kali pergantian kepemimpinan. Adapun nama-nama ketuanya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1 Ketua-Ketua Bapepam

No	Nama	Periode
1	Josef A Turangan	1977 – 1981
2	Sutadi Sukarya	1981 – 1984
3	Barli Halim	1984 – 1988
4	Marzuki Usma	1988 – 1992
5	Sukanto Reksohadiprodjo	1992 – 1993
6	Barcelius Ruru	1993 – 1995
7	I Putu Gede Ary Suta	1995 – 1998
8	Jusuf Anwar	1998 – 2000
9	Herwidayatmo	2000 – 2006
10	Darmin Nasution	2005 – 2006
11	Ahmad Fuad Rahmany	2006 – ….

Seperti yang diungkapkan di atas bahwa di Indonesia Busa Efek diawasi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) di bawah naungan Departemen Keuangan. Sejak 1 Desember 2007, pasar modal di Indonesia hanya ada satu yakni Bursa Efek Indonesia (BEI). BEI merupakan hasil gabungan antara Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan Busa Efek Surabaya (BES). Adapun jenis surat berharga yang diperjualbelikan di BEI, diantaranya adalah:

1) Saham

Saham adalah bukti kepemilikan atau tanda penyertaan seseorang atau badan atas suatu perusahaan tertentu. Jadi, pemilik suatu saham mempunyai hak dalam kepemilikan perusahaan tersebut sebesar persentase kepemilikan sahamnya. Secara umum, saham dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu saham biasa dan saham preferen. Terkait dengan saham biasa terdapat istilah *emiten,* yaitu perusahaan yang mengeluarkan atau menerbitkan saham atau biasanya juga disebut pihak yang melakukan penawaran umum. Selanjutnya saham tersebut akan diperjualbelikan melalui bursa efek.

2) Obligasi

Obligasi merupakan kontrak tertulis berjangka panjang yang dapat dipindah tangankan tentang transaksi pengakuan utang disertai ketetapan sejumlah bunga yang akan dibayar

secara periodik. Dengan kata lain, obligasi adalah surat hutang suatu perusahaan terhadap pemilik obligasi.

3) Perdagangan tanpa warkat (*scriptless trading*)

Scriptless trading adalah perdagangan efek di pasar modal yang tidak menggunakan warkat. Penyelesaian transaksi dilakukan dengan sistem pemindahbukuan (*book entry settlement*). Dalam sistem ini, saham yang diperdagangkan tidak dalam bentuk sertifikat fisik, akan tetapi secara elektronik seperti halnya rekening di bank.

4) *Warrant*

Warrant dapat diartikan sebagai hak kepada pemegang *warrant* untuk mengkonversikan warrant-nya menjadi saham biasa dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sama seperti saham biasa bahwa *warrant* juga dapat diperdagangkan, tetapi ada perbedaan yaitu pemegang *warrant* tidak memiliki hak suara dalam RUPS dan tidak menerima deviden seperti layaknya pemegang saham biasa. Pemegang *warrant* mempunyai masa berlaku tertentu untuk mengkonversikan *warrant*-nya menjadi saham biasa, biasanya mempunyai masa berlaku 3 tahun.

5) *Rights*

Rights seperti halnya *warrant,* yaitu hak memesan efek terlebih dahulu dengan harga tertentu. *Rights* dapat membeli saham tambahan dengan cara memesan terlebih dahulu kepada perusahaan dengan harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal tertentu.

6) Reksadana

Reksadana merupakan wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Sebetulnya, reksadana ditujukan untuk investor pemula yang ingin berinvestasi di pasar modal. Karena syarat untuk berinvestasi di reksadana sangatlah mudah, dengan modal Rp200.000 sampai dengan Rp500.000 kita dapat membeli reksadana.

7) Indek berjangka (*index future*)

Indek berjangka merupakan salah satu surat berharga yang baru diluncurkan oleh Bursa Efek Surabaya (BES). Indek berjangka merupakan salah satu bagian dari pedagangan berjangka (*future trading*) yang bertujuan sebagai sarana melindungi nilai terhadap investasinya. Dalam *future trading,* seorang investor dapat melindungi nilai investasinya dengan memesan kontrak beli atau jual terlebih dahulu terhadap suatu produk efek dengan harga saat ini. Akan tetapi, keputusan transaksinya dapat dilakukan di kemudian hari.

Berdasarkan aktivitasnya, terdapat dua jenis pasar modal yaitu sebagai berikut.

1) **Pasar perdana** (*primary market* atau penawaran umum) merupakan pasar tempat perusahaan atau *emiten* pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya untuk masyarakat umum (*publik*), yang biasa dikenal dengan istilah *Initial Publik Offering* (IPO). Informasi mengenai suatu perusahaan yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat, dapat diketahui melalui ringkasan yang diiklankan minimal di dua harian nasional.
2) **Pasar sekunder** *(secondary market),* yaitu pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO. Perdagangan hanya terjadi antar-investor yang satu dengan investor lainnya. Transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini hanya pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan yang telah ditetapkan pasar.

Jika ditarik benang merahnya, terdapat beberapa perbedaan antara pasar primer dengan pasar sekunder sebagai berikut.

1) Pasar primer atau pasar perdana:
   a) harga saham tetap,
   b) tidak dikenakan komisi,
   c) hanya untuk pembelian saham,
   d) pemesanan dilakukan melalui agen penjual,
   e) jangka waktu terbatas.
2) Pasar sekunder:
   a) harga berfluktuasi sesuai kekuatan pasar,
   b) dibebankan komisi untuk pembelian maupun penjualan,
   c) pemesanan dilakukan melalui anggota bursa,
   d) jangka waktu tidak terbatas.

Dengan adanya padar modal, maka terdapat beberapa manfaat di antaranya sebagai berikut:

1) menyediakan sumber pendanaan jangka panjang bagi dunia usaha sekaligus memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal;
2) memberikan wahana investasi bagi investor sekaligus memungkinkan upaya diversifikasi atau penjualan saham;
3) berperan sebagai salah satu indikator penting dalam melihat kecenderungan ekonomi negara;
4) penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah;
5) penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme menciptakan iklim berusaha yang sehat;
6) menciptakan lapangan kerja yang menarik;
7) memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek;

8) alternatif investasi yang memberikan potensi keuntungan dengan risiko yang bisa diperhitungkan melalui keterbukaan dan likuiditas;
9) membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha.

Tahukah kamu apa perbedaan pasar modal dengan pasar uang? terdapat beberapa hal yang membedakan antara pasar uang dengan pasar modal sebagai berikut:
1) dilihat dari objek yang diperdagangkan, pasar uang memperdagangkan surat berharga jangka pendek, sedangkan di pasar modal surat berharga jangka panjang;
2) dilihat dari tingkat risikonya, pasar uang risikonya lebih tinggi daripada pasar modal;
3) dilihat dari tingkat bunga, sebagai konsekuensi jangka waktu yang lebih pendek, maka tingkat bunga di pasar uang lebih tinggi daripada pasar modal;
4) dilihat dari sistem pengawasannya, kalau pasar uang langsung diawasi oleh pemerintah melalui Bank Central, sedangkan pasar modal diawasi oleh badan tersendiri yang disebut Bapepam.

c. Pasar Valuta Asing

Pasar valuta asing, yaitu tempat diperjualbelikannya mata uang asing yang dihitung menurut nilai tukar atau kurs valuta. Nilai atau harga valuta asing ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar valuta asing. Oleh karena itu, nilai atau harga valuta asing sering berubah-ubah setiap saat. Tempat jual beli valuta asing biasa disebut *Money Changer.*

Pasar valuta asing hadir sebagai efek terjadinya perdagangan antarnegara. Ketika suatu negara melaksanakan perdagangan maka harus disepakati mata uang apa yang akan dijadikan alat pembayaran. Alat pembayaran yang telah diterima sebagai alat pembayaran internasional adalah Dollar Amerika Serikat ($ US). Contohnya, orang Indonesia yang membeli barang dari Amerika Serikat harus menggunakan Dollar Amerika Serikat. Mata uang Dollar Amerika Serikat dapat diperoleh di pasar valuta asing.

Terdapat beberapa manfaat pasar valuta asing di antaranya sebagai berikut:
1) memudahkan arus pembayaran ke luar negeri;
2) memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan mata uang asing;
3) meningkatkan kegiatan perdagangan internasional.

d. Pasar tenaga kerja

Pasar tenaga kerja, yaitu tempat bertemunya pihak pencari kerja dan pihak yang membutuhkan tenaga kerja. Di Indonesia pasar tenaga kerja dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta lembaga swasta yang mendapat izin pemerintah. Melalui pasar tenaga kerja pihak yang membutuhkan tenaga kerja dapat memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Bagi pencari kerja melalui

pasar tenaga kerja dapat memilih perusahaan, lembaga yang sesuai dengan pendidikan, dan keahlian yang dimiliki.

Beberapa manfaat pasar tenaga kerja di antaranya sebagai berikut:

1) memudahkan pencari kerja memilih pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan keahlian yang dimiliki;
2) bagi pencari tenaga kerja memudahkan mencari tenaga kerja sesuai dengan yang diinginkan perusahaan;
3) membantu pemerintah mengurangi tingkat pengangguran.

e. Bursa komoditi

Bursa komoditi, yaitu tempat diperjualbelikannya barang komoditi dengan menyertakan contoh saja. Jadi dalam bursa komoditi penjual cukup membawa contoh komoditas yang disertai dengan spesifikasi lengkap dari komoditas yang dijual. Contoh barang yang diperjualbelikan di bursa komoditi adalah beras, kopi, tembakau, gula, minyak kelapa sawit, dan lain lain. Di Indonesia, bursa komoditi dilaksanakan dan diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bapebti).

Terdapat beberapa manfaat yang diperoleh dari bursa komoditi di antaranya sebagai berikut:

1) menghindari fluktuasi harga dari para tengkulak;
2) mempercepat arus peredaran barang kebutuhan masyarakat;
3) sumber penerimaan negara melalui kegiatan ekspor.

RANGKUMAN

1. Pasar adalah tempat bertemunya penjual yang menawarkan barang dan pembeli yang meminta barang.
2. Pasar memiliki fungsi penting dalam kehidupan ekonomi, yaitu menetapkan nilai, mengorganisasikan barang, mendistribusikan barang, dan memenuhi kebutuhan masa depan.
3. Berdasarkan waktu pelaksanaannya pasar dibedakan atas pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar tahunan. Adapun berdasarkan strukturnya pasar dibedakan atas pasar persaingan sempurna dan pasar bukan persaingan sempurna.
4. Pasar bukan pesaingan sempurna terdiri atas pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar persaingan monopolistis, pasar monopsoni, dan pasar oligopsoni.

5. Berdasarkan ada tidaknya barang yang tersedia untuk dijual, pasar dibedakan atas pasar konkret dan pasar abstrak.
6. Pasar konkret adalah pasar tempat barang dijual ada di tempat dan bisa langsung dibawa pulang pembeli. Adapun pasar abstrak adalah pasar tempat barang yang dijual tidak mesti ada di tempat dan transaksi tidak mesti bertatap muka langsung.
7. Pasar abstrak terdiri atas pasar uang, pasar modal, pasar valuta asing, pasar tenaga kerja, dan pasar komoditi.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Pasar adalah ....
   a. tempat bertemunya orang-orang
   b. tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk transaksi jual beli
   c. tempat orang bertegur sapa
   d. tempat bertemunya kepentingan orang
2. Berikut yang *bukan* termasuk fungsi pasar adalah ....
   a. menetapkan nilai
   b. mendistribusikan barang
   c. mengorganisasikan barang
   d. memproduksi barang

3. Berikut yang *bukan* termasuk ciri pasar persaingan sempurna ....
    a. jumlah penjual dan pembeli banyak
    b. harga ditentukan oleh penjual
    c. barang yang dijual bersifat homogen
    d. bebas campur tangan pemerintah
4. Berikut yang *bukan* contoh pasar berdasarkan waktu pelaksanaannya ....
    a. pasar harian
    b. pasar bulanan
    c. pasar mingguan
    d. pasar minggu
5. Berikut ini yang *bukan* bentuk pasar bukan persaingan sempurna adalah ....
    a. pasar monopoli
    b. pasar valuta asing
    c. pasar oligopoli
    d. pasar persaingan monopolistis
6. Pasar persaingan sempurna merupakan perpaduan dua jenis pasar ekstrim, yaitu pasar ….
    a. monopoli dan oligopoli
    b. monopoli dan monopsoni
    c. monopoli dan persaingan sempurna
    d. persaingan sempurna dan monopsoni
7. Berikut ini yang *bukan* termasuk jenis jenis pasar abstrak adalah ....
    a. pasar uang
    b. pasar konkret
    c. pasar valuta asing
    d. pasar tenaga kerja
8. Surat berharga yang dijual di pasar uang adalah ....
    a. SBI dan saham
    b. SBI dan SBPU
    c. saham dan obligasi
    d. SBPU dan saham
9. Surat berharga bukti penyertaan modal suatu perusahaan disebut ....
    a. obligasi
    b. saham
    c. deposito
    d. sertifikat Bank Indonesia
10. Lembaga pengawas kegiatan pasar modal di Indonesia adalah ....
    a. Bapepam
    b. Bank Indonesia
    c. BPPN
    d. Badan Pengawas Keuangan

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan yang dimaksud dengan pasar? Sebutkan ciri-cirinya!
2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam pasar berdasarkan ada tidaknya barang yang diperjualbelikan ketika terjadi transaksi, berikan contohnya!
3. Jelaskan perbedaan oligopoli dan monopoli!
4. Jelaskan perbedaan pasar uang dan pasar modal!
5. Setujukah kamu dengan praktek monopoli perdagangan ? jelaskan alasan anda !

TUGAS

Buatlah profil lengkap tentang salah satu pasar yang terdapat di sekitar tempat tinggalmu. Berdasarkan materi yang sudah kamu pelajari di atas, lengkapi profil tersebut dengan hal-hal sebagai berikut:

1. tahun berdiri pasar tersebut;
2. luas pasar tersebut;
3. alamat lengkap lokasi pasar;
4. jumlah pedangan di pasar tersebut;
5. jenis barang yang diperjualbelikan di pasar tersebut;
6. termasuk jenis pasar apakah pasar tersebut;
7. buatlah taksiran perputaran uang di pasar tersebut setiap minggunya;
8. manfaat apa yang diberikan pasar tersebut kepada penduduk sekitar;
9. upaya apa yang dapat di lakukan untuk mengembangkan pasar tersebut.

SOAL LATIHAN SEMESTER 1

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yatu ...
   a. Benua Asia dan Benua Australia
   b. Benua Asia dan Benua Amerika
   c. Benua Australia dan Erpa
   d. Samudera Pasifik dan Samudera Hindia
2. Akibat letak geografisnya, Indonesia memiliki dua musim yaitu ...
   a. Hujan dan tropis
   b. Hujan dan Semi
   c. Kemarau dan Hujan
   d. Semi dan Salju
3. Musim kemarau di Indonesia pada umumnya berlangsung pada bulan ...
   a. April-Oktober
   b. Oktober-April
   c. September-Januari
   d. Februari-Maret
4. Wilayah Indonesia yang masuk ke dalam WITA adalah ...
   a. Kalimantan Barat
   b. Kalimantan Tengah
   c. Bali
   d. Jawa Barat
5. Pada tahun 2002, Pulau Sipadan dan Ligitan diputuskan oleh Mahkamah Internasional termasuk wilayah ...
   a. Indonesia
   b. Malaysia
   c. Singapura
   d. Piliphina
6. Keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan dan publikasi data demografis di suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu disebut ...
   a. Survei Penduduk
   b. Sensus Penduduk
   c. Pendataan Penduduk
   d. Statistik Penduduk
7. Susunan atau susun penduduk suatu negara atau suatu wilayah berdasarkan kriteria tertentu disebut ...
   a. Piramida Penduduk
   b. Ledakan Penduduk
   c. Sensus Penduduk
   d. Komposisi Penduduk
8. Besarnya angka harapan hidup dipengaruhi oleh ...
   a. Umur maksimum yang mungkin dicapai
   b. Jumlah kematian bayi

c. Jumlah penduduk usia tua menurun
d. Pertumbuhan penduduk menurun

9. Berikut yang *bukan* merupakan tujuan transmigrasi adalah ...
   a. meningkatkan produksi pangan
   b. menciptakan manusia Indonesia seutuhnya
   c. meningkatkan taraf hidup penduduk
   d. menciptakan lapangan kerja
10. Pembangunan industri yang berkembang pesat telah menimbulkan kerusakan pada lingkungan karena ...
    a. kebutuhan semakin meningkat
    b. pengambilan sumber daya alam semakin besar
    c. jumlah penduduk semakin besar
    d. kemiskinan di beberapa negara meningkat
11. Hari lingkungan hidup sedunia diperingati setiap tanggal ...
    a. 5 januari
    b. 5 mei
    c. 5 juni
    d. 5 juli
12. Badan PBB yang dibentuk untuk menangani masalah lingkungan hidup ialah ...
    a. UNEP
    b. UNDP
    c. UNHCR
    d. UNIDO
13. Salah satu cara mengurangi polusi udara di kota adalah dengan ...
    a. reboisasi
    b. penataan ruang
    c. pengendalian banjir
    d. penghijauan
14. Bangsa Barat yang pertama kali menguasai kerajaan-kerajaan di Nusantara, yaitu ....
    a. Belanda
    b. Spanyol
    c. Inggris
    d. Portugis
15. Berikut yang bukan merupakan tujuan Belanda mendirikan VOC, yaitu ....
    a. menghindarkan persaingan antar pengusaha Belanda
    b. mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya
    c. agar mampu bersaing dengan kongsi dagang dari bangsa lain seperti Portugis dan Spanyol
    d. membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia

16. Perlawanan Bangsa Indonesia mengusir Bangsa Barat dilakukan sejak kedatangan bangsa Portugis di Indonesia dan mengalahkan Kerajaan Malaka pada tahun ...
    a. tahun 1511
    b. tahun 1115
    c. tahun 1512
    d. tahun 1215
17. Kongres perempuan pertama pada tahun 1929 diadakan di kota ...
    a. Bandung
    b. Jakarta
    c. Surabaya
    d. Medan
18. Sepulang sekolah Andi menjual ganja. Tindakan Andi termasuk ...
    a. mencari tambahan uang saku
    b. melanggar tata terbit sekolah
    c. melanggar hukum
    d. melanggar etika
19. Sebuah tatanan keluarga yang rapuh dan tidak harmonis akan menyebabkan anak menjadi ...
    a. lemah
    b. tidak percaya diri
    c. tidak bergairah
    d. antipati
20. Penyimpangan sosial di kalangan remaja disebabkan ...
    a. peredaran film-film cabul
    b. tayangan sinetron
    c. defresi
    d. mencari identitas diri
21. Miras, judi, dna memakai narkoba termasuk tindakan ...
    a. penyimpangan akidah
    b. penyimpangan sosial
    c. penyimpangan akhlak
    d. penyimpangan ekonomi
22. Barang yang berfungsi sebagai jaminan untuk mendapatkan kredit dalam jangka pendek disebut ...
    a. barang tidak bergerak
    b. barang komplementer
    c. barang bergerak
    d. barang jaminan
23. Berikut yang *bukan* termasuk pelaku utama ekonomi berdasarkan UUD 1945 pasal 33 adalah ...
    a. BUMN
    b. BUMS
    c. Koperasi
    d. BUMD
24. Undang-undang yang membahas tentang perkoperasian adalah ...
    a. UU No 25 tahun 1992
    b. UU No 52 tahun 1992
    c. UU No 25 tahun 1995
    d. UU No 52 tahun 1995
25. Salah satu pendirian koperasi primer diharuskan ada anggota sebanyak ...
    a. 10 orang
    b. 20 orang
    c. 30 orang
    d. 40 orang

II. Uraian

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan letak geografis dengan letak astronomis!
2. Faktor apa saja yang menyebabkan perbedaan jenis flora dna fauna di setiap daerah?
3. Jelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk!
4. Untuk mengurangi dampak negatif dari urbanisasi, upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan?
5. Jelaskan perbedaan lingkungan hidup alami dengan lingkungan hidup buatan!
6. Berikan tiga contoh bentuk kerusakan lingkungan hidup yang dikarenakan fkator manusia!
7. Jelaskan kebijakan-kebijakan apa saja yang ditetapka VOC dalam rangka menguasai wilayah Indonesia!
8. Uraikan secara singkat hasil kongres pertama Budi Utomo!
9. Berikan 3 penyebab terjadinya penyimpangan sosial dalam keluarga!
10. Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan sosial?
11. Jelaskan perbedaan antara barang substitusi dan barang komplementer!

Bab VIII

USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN

Standar Kompetensi

Memahami usaha persiapan kemerdekaan.

Kompetensi Dasar

1. Mendeskrisikan peristiwa-peristiwa sekitar proklamasi dan proses terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Menjelaskan proses persiapan kemerdekaan Indonesia.

Kamu pasti pernah atau selalu ikut upacara setiap tanggal 17 Agustus? Tahukah mengapa setiap tanggal tersebut selalu diperingati? Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Dengan demikian, bangsa Indonesia melepaskan diri dari penjajahan bangsa lain, khususnya Jepang, sehingga kedaulatan sepenuhnya ada pada tangan rakyat untuk membangun bangsa Indonesia.

Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Sumber: Sejarah Nasional Indonesia

Kemerdekaan tersebut tidak diraih begitu saja, melainkan dengan perjuangan keras dari para pejuang banga Indonesia di berbagai daerah. Oleh karena itulah setiap tanggal 17 Agustus kamu mengikuti upacara peringatan kemerdekaan bangsa Indonesia.

Pada bab ini akan diuraikan tentang usaha persiapan kemerdekaan beserta segala peristiwa yang berhubungan dengan pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia.

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Proklamasi
- Kemerdekaan
- BPUPKI
- PPKI
- Teks proklamasi
- Rengasdengklok
- Dasar negara
- Konstitusi

A. PEMBENTUKAN BPUPKI

1. Peristiwa Rengasdengklok

Informasi tentang menyerahnya Jepang kepada Sekutu sudah diketahui oleh pemuda Indonesia sehingga mereka menuntut agar Soekarno dan Moh. Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun, Soekarno dan Hatta berpendapat lain bahwa bangsa Indonesia lebih baik melanjutkan terlebih dahulu usaha yang sudah dimulai dari bawah atau lepas dari proses yang sudah berjalan. Hal itu tidak menjadi masalah, sebab Jepang sudah menyerah kalah. Hal yang penting adalah menghadapi keinginan Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Oleh karena itu, Soekarno dan Hatta ingin membicarakan pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dalam rapat PPKI pada 18 Agustus 1945.

Para pemuda tidak menyetujui pendapat tersebut, sebab mereka berpendapat bahwa PPKI dianggap badan buatan Jepang. Menurut mereka bangsa Indonesia harus memproklamasikan kemerdekaannya agar terlepas dari penjajahan Jepang. Selain itu, Sutan Syahrir yang termasuk golongan tua, juga mendesak Soekarno-Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya.

Akhirnya, pada 15 Agustus 1945 golongan pemuda mengadakan rapat di Jalan Pegangsaan Timur No. 13. Tepatnya di ruangan *Bacteriologis Laboratorium* yang diketahui oleh Chairul Saleh. Dalam pertemuan ini dihasilkan suatu gagasan untuk memproklamasikan kemerdekaan oleh bangsa Indonesia sendiri. Mereka mengajak Soekarno-Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan dan menyiapkan para pemuda, pelajar, dan mahasiswa untuk menghadapi situasi baru.

Dua orang pemuda yaitu Wikana dan Darwis diutus untuk menemui dan meminta agar Soekarno-Hatta menyatakan keinginan golongan pemuda. Akan tetapi, Soekarno-Hatta tidak menyetujui. Akhirnya, golongan pemuda ini memutuskan untuk mengamankan Soekarno-Hatta ke luar Kota Jakarta. Tugas ini dilaksanakan oleh Sukarni, Jusuf Kunto, dan Shodanco Singgih. Pada 16 Agustus 1945 Soekarno-Hatta dibawa ke Rengasdengklok, yaitu sebuah kota kewedanaan di sebelah utara Karawang. Namun pada sore harinya, seorang tokoh generasi tua, yaitu Ahmad Soebardjo menyusul ke Rengasdengklok untuk mengembalikan Soekarno-Hatta. Golongan tua dan pemuda berunding dan sepakat dengan adanya jaminan dari Mr. Ahmad Soebardjo bahwa proklamasi akan diumumkan pada kesekian harinya, yakni pada 17 Agustus 1945.

2. Perumusan Teks Proklamasi

Rombongan dari Rengasdengklok tiba di Jakarta pada pukul 20.00 WIB. Kemudian mereka berkumpul di rumah kediaman Laksamana Muda Maeda, seorang Kepala Perwakilan Angkatan Laut Jepang di Jakarta. Di antara peserta yang hadir di rumah tersebut

adalah para anggota PPKI dan para pemimpin pemuda. Dipilihnya rumah Laksamana Meida dimaksudkan agar tidak mengundang kecurigaan Jepang. Pada malam itu juga, dari rumah Laksamana Meida, Soekarno-Hatta menemui Somubuco (Kepala Pemerintahan Umum) Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Namun, jawabannya sangat mengagetkan Soekarno-Hatta. Oleh karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu, Jepang harus mempertahankan *status quo*. Ini berarti Jepang tidak dapat mengizinkan dilaksanakannya kemerdekaan Indonesia. Namun demikian, hal tersebut telah meyakinkan Jepang. Akhirnya mereka kembali ke rumah Laksamana Meida.

Di rumah Laksamana Meida telah hadir banyak pemuda dan sebagian anggota PPKI. Mereka akhirnya sepakat untuk merumuskan teks proklamasi. Perumus teks tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, dan Mr. Achmad Soebardjo. Perumusan itu disaksikan oleh Sayuti Melik, Sukarni, dan B.M. Diah.

Setelah selesai dirumuskan, konsep proklamasi yang ditulis tangan Ir. Soekarno dibacakan di hadapan pemimpin-pemimpin Indonesia yang menunggu di ruang depan. Mereka menyetujui isinya, tetapi memperdebatkan siapa yang akan menandatanganinya.

Akan tetapi, atas usul dari Sukarni, Soekarno-Hatta diminta untuk menandatangani teks tersebut atas nama bangsa Indonesia. Usul itu diterima oleh segenap hadirin. Kemudian naskah diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan yang disetujui oleh hadirin. Naskah yang diketik itu kemudian ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Naskah inilah yang dinamakan *naskah proklamasi yang otentik*. Pada malam itu juga disepakati bahwa naskah proklamasi akan dibacakan di tempat kediaman Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur Nomor 56 Jakarta pada pukul 10.00 pagi.

3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejak pagi hari 17 Agustus 1945 di kediaman Ir. Soekarno, yaitu Jalan Pegangsaan Timur No. 56 diadakan persiapan-persiapan untuk menyambut Proklamasi Kemerekaan Indonesia. Sekitar 1.000 orang hadir untuk ikut menyaksikan peristiwa penting tersebut. Pukul 10.00 kurang lima menit, Mohammad Hatta hadir dan langsung memasuki rumah untuk menemui Ir. Soekarno. Pukul 10.00 tepat acara dimulai, Soekarno tampil ke muka mengucapkan beberapa kalimat pengantar. Kemudian, ia membaca dengan khidmat naskah proklamasi yang sudah ditandatangani oleh Soekarno-Hatta.

Berikut ini adalah pidato Ir. Soekarno.

"Saudara-saudara sekalian! Saya telah diminta hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa mahapenting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untu kemerdekaan tanah air kita, bahkan telah beratus-ratus tahun. Gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan kita itu ada naik ada turunnya, tetapi jiwa kita menuju ke arah cita-cita kita. Juga di dalam zaman Jepang usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tidak berhenti. Di dalam zaman Jepang ini tampaknya saja kita menyandarkan diri kepada mereka. Akan tetapi, pada hakikatnya kita tetap menyusun tenaga kita sendiri dan kita percaya kepada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri, akan berdiri dengan kuatnya. Maka kami, tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari seluruh Indonesia. Permusyawaratan itu seia sekata berpendapat, bahwa sekaranglah datang saatnya untuk menyatakan kemerdekaan kita.

Dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu, dengarlah proklamasi kami.

PROKLAMASI

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan Kemerdekaan Indonesia.

Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05

Atas nama bangsa Indonesia.

Soekarno/Hatta.

Gambar 8.1 *Isi teks proklamasi*
Sumber: www.wikipedia.com

Demikian saudara-saudara!

Kita sekarang telah merdeka. Tidak ada satu ikatan yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita! Mulai saat ini kita menyusun negara Republik Indonesia. Merdeka, kekal, dan abadi Insya Allah, Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu."

Sumber: Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto 1993. Sejarah Nasional Indonesia Jilid VI. Hal 93-94.

Setelah pembacaan naskah selesai, sang Saka Merah Putih dikibarkan oleh pemuda Suhud dan Latief Hendraningrat dan disaksikan oleh hadirin. Upacara diakhiri dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Sejak itulah bangsa Indonesia terbebas dari pengaruh penjajahan Jepang.

Oleh karena situasi masih dalam keadaan rawan, setelah selesai proklamasi, Ir. Soekarno menyerukan kepada seluruh hadirin untuk kembali ke rumah masing-masing.

Peristiwa proklamasi ini merupakan titik puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam menentang penjajahan. Sejak itu, bangsa Indonesia berdiri sebagai bangsa yang memiliki kedaulatan sendiri. Kemerdekaan ini merupakan rahmat Allah Yang Mahakuasa selain merupakan keinginan luhur bangsa Indonesia.

B. PENYUSUNAN DASAR DAN KONSTITUSI NEGARA

Peristiwa sangat bersejarah tersebut disebarkan ke berbagai pelosok tanah air melalui berbagai cara di antaranya dilakukan secara perorangan dan melalui lembaga-lembaga pemberitaan. Lembaga pemberitaan seperti radio dan surat kabar berperan besar dalam penyebaran berita penting tersebut. Penyebaran berita secara perorangan dilakukan melalui pamflet-pamflet, pengeras suara, dan pawai. Adapun penyebaran berita secara lisan dilakukan secara berantai.

Pihak tentara Jepang yang kalah dalam Perang Dunia II tidak suka menyaksikan kegembiraan bangsa Indonesia dalam menyambut proklamasi. Sehingga pada 20 Agustus 1945, tentara Jepang berusaha menghalang-halangi penyebaran berita ini dengan cara menyegel pemancar radio dan melarang pegawainya untuk masuk. Namun, hal ini tidak menjadi penghalang bagi bangsa Indonesia untuk terus memberitakan peristiwa penting itu. Para pejuang, seperti Suhendar, Sukarman, Sutomo, dan Susilahardja segera membuat pemancar radio sendiri. Mereka merakit pemancar radio baru dengan kode panggilan DJK 1. Dengan pemancar tersebut, mereka dapat menyebarkan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia secara terus-menerus ke pelosok nusantara.

Selain melalui media radio, pemberitaan juga dilakukan melalui media surat kabar. Dengan membaca surat kabar, para pembaca dapat mengetahui bahwa Indonesia sudah berdiri sebagai negara yang berdaulat, memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan pemerintahan sendiri sehingga terbebas dari segala bentuk penjajahan.

Pihak-pihak di luar negeri, termasuk tentara suku yang diboncengi oleh Amerika Serikat, Australia, Belanda, dan Inggris memperoleh berita proklamasi kemerdekaan RI melalui Kantor Berita Antara (Yoshima) dan melalui jaringan komunikasi Domei yang dimiliki oleh tentara Jepang. Mereka terkejut dengan berita proklamasi ini dan tidak menyangka bangsa Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan langsung saat berakhirnya Perang Dunia II. Pihak yang paling terkejut adalah tentara sekutu karena merasa masih memiliki hak untuk menguasai wilayah yang pernah diduduki Jepang.

Sementara rakyat Indonesia yang berada di berbagai daerah tertentu saja menyambut berita kemerdekaan ini dengan penuh suka cita. Teriakan merdeka terdengar dari orang-orang yang mendengar kabar tentang peristiwa bersejarah ini. Mereka juga sangat menghargai tokoh-tokoh nasionalis yang mengantarkan bangsa Indonesia ke gerbang pintu kemerdekaan. Selain itu, rakyat Indonesia mengakui Soekarno-Hatta sebagai *proklamator*, yaitu orang yang memproklamasikan kemerdekaan. Sebagai wujud menyambut merdekanya bangsa Indonesia, para pemuda yang pernah bergabung dengan Heiho dan Peta kemudian melucu senjata tentara Jepang yang masih berkeliaran di wilayah Indonesia.

C. KRONOLOGIS PROKLAMASI KEMERDEKAAN

Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara yang berperan dalam proklamasi kemerdekaan RI segera menyiapkan perangkat negara dan pemerintahan negara. Badan yang didirikan sebelum proklamasi, yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945. Dalam persidangan tersebut mereka menyepakati pentingnya rumusan wilayah negara. Rakyat yang menjadi warga negaranya, pemerintahan yang menjalankan amanat rakyat, serta upaya untuk memperoleh pengakuan internasional. Melalui sidang tersebut, disepakati tiga hal penting bagi kehidupan kenegaraan bangsa Indonesia, yaitu:

1) menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945;
2) memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden;
3) pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

Pada sidang hari kedua tanggal 19 Agustus 1945, dipimpin oleh Otto Iskandardinata dan beranggotakan Achmad Soebardjo, Sajuti Melik, Iwa Kusumasumantri, Wiranatakusumah, dr. Amir, A.A. Hamidhan, Dr. Ratulangi, dan I Gusti Ketut Pudja tersebut mengambil tiga keputusan sebagai berikut.

1) Penetapan 12 kementerian dalam lingkungan pemerintahan, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri

Kemakmuran, Menteri Kesehatan, Menteri Pengajaran, Menteri Sosial, Menteri Keamanan Rakyat, Menteri Penerangan, Menteri Perhubungan, dan Menteri Pekerjaan Umum.

2) Pembentukan Komite Nasional Daerah.
3) Pembagian daerah Republik Indonesia dalam 8 provinsi, yaitu:

Tabel 8.1 Pembagian Daerah RI

No	Provinsi	Gubernur
1	Sumatra	Teuku Mohammad Hassan
2	Jawa Barat	Sutardjo Kartohadikusumo
3	Jawa Tengah	R. Pandji Soeroso
4	Jawa Timur	R. A. Soeryo
5	Borneo (Kalimantan)	Ir. Pangeran Mohammad Noor
6	Sulawesi	Dr. G.S.S.J. Ratulangi
7	Sunda Kecil (Nusa Tenggara)	I Gusti Ketut Pudja
8	Maluku	J. Latuharhary

Pada 22 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan sidang yang ke-2. Melalui sidang tersebut ditetapkan beberapa keputusan, di antaranya:

1) Komite Nasional Indonesia (KNI) merupakan badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau badan legislatif sebelum pemilihan umum diselenggarakan dan disusun dari tingkat pusat hingga daerah.
2) Partai Nasional Indonesia (PNI) yang dirancang menjadi partai tunggal Republik Indonesia, namun akhirnya dibatalkan.
3) Badan Keamanan Rakyat (BKR) berfungsi sebagai penjaga keamanan umum bagi masing-masing daerah.

Komite Nasional Indonesia (KNI) dibentuk sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia telah memiliki pengurus yang dilantik pada 29 Agustus 1945. Adapun yang menjadi pengurus Komite Nasional Indonesia (KNI) sebagai berikut.

Tabel 8.2 Pengurus Komite Nasional Indonesia

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Mr. Kasman Singodimedjo
2	Wakil Ketua I	Sutardjo Kartohadikusumo
3	Wakil Ketua II	Mr. J. Latuharhary
4	Wakil Ketua III	Adam Malik

Di tingkat daerah namanya ialah Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID). Provinsi-provinsi baru seperti Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi, dan Kalimantan telah memiliki KNID. Munculnya KNID menunjukkan adanya dukungan yang luas dari berbagai daerah di Indonesia.

Setelah rakyat Indonesia di berbagai daerah menerima kabar tentang proklamasi kemerdekaan, segera mereka memberikan dukungan terhadap para pemimpin nasional di Jakarta yang merumuskan dasar negara, lembaga negara, serta pemerintah di berbagai daerah. Salah satu bentuk dukungan yang paling besar adalah dengan terbentuknya KNID di berbagai provinsi yang baru saja dibentuk. Tanpa adanya dukungan dari seluruh rakyat, KNID tidak mungkin dapat diwujudkan.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai dewan perwakilan, KNI Pusat menyelenggarakan persidangan yang dihadiri oleh para anggotanya. Untuk Sidang pada 16 Oktober 1945, KNI pusat telah menghasilkan dua keputusan, yaitu:

1) membentuk Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP) dengan jumlah anggota 15 orang;
2) mengusulkan kepada presiden, suara KNI diberi kekuasaan legislatif selama MPR-DPR belum terbentuk.

Pasca terbentuknya BPKNIP, langkah pertama yang dilakukannya adalah mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai-partai politik. Usulan yang diumumkan pada 30 Oktober 1945 tersebut didasarkan atas pertimbangan berikut.

1) BPKNIP menganggap roda pemerintahan telah berjalan dengan baik dan oleh karena itu, dianggap telah tiba saatnya bagi pemerintah untuk memperoleh dukungan dan pengertian dan seluruh rakyat.
2) Untuk menegakkan asas demokrasi, BPKNIP tidak setuju dengan keputusan PPKI tentang pembentukan hanya satu partai politik. Usulan tersebut mendapat jawaban dari pemerintah melalui Maklumat Pemerintah No. 3 pada tanggal 30 November 1945, mengenai pembentukan partai politik kepada masyarakat yang menghendaki adanya partai-partai politik.

Sebagai tindak lanjut dari lahirnya maklumat tersebut di atas, maka masyarakat segera memberi jawaban dengan cara mendirikan partai-partai politik. Tujuannya ialah untuk menyalurkan aspirasi mereka sesuai dengan latar belakang ideologi, agama, politik, sosial,

dan budaya. Partai-partai politik yang lahir di antaranya ialah Masyumi, PNI, Partai Buruh Indonesia (PBI), Partai Katolik, Partai Kristen, dan Partai Sosialis, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Terbentuknya berbagai partai politik menunjukkan adanya dukungan dari para tokoh nasional, baik di pusat maupun di daerah terhadap pemerintah Indonesia. Rakyat Indonesia yang memberikan dukungan terhadap tindakan pemerintah berupa maklumat tersebut, segera bergabung dengan partai politik.

Dalam perkembangannya, PPKI membentuk berbagai lembaga lainnya seperti kementerian (departemen) serta lembaga pemerintah di tingkat daerah. Pemerintah daerah yang baru saja dibentuk dan terdiri atas delapan provinsi itu segera diikuti dengan pembentukan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang gubemur.

Lembaga pemerintahan seperti kementerian yang diputuskan dalam sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 tersebut terdiri atas 12 kementerian. Kementerian yang menggarap bidang tertentu itu disebut sebagai **Kabinet Republik Indonesia I** dan dipimpin oleh para menteri yang sesuai dengan keahliannya. Kabinet ini bersifat presidentil dan bertanggungjawab kepada presiden. Dalam kabinet yang bersifat presidentil, para menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. tugasnya membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan.

Adapun susunan kabinet yang diumumkan pada 20 Oktober 1945 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.3 Kabinet RI I

No	Kementerian	Nama
1	Menteri Dalam Negeri	R.A.A. Wiranatakusumah
2	Menteri Luar Negeri	Mr. Achmad Soebardjo
3	Menteri Kehakiman	Prof. Mr. Dr. Soepomo
4	Menteri Kemakmuran	Ir. Surachman Tjokroadisurjo
5	Menteri Keuangan	Mr. A.a. Maramis
6	Menteri Kesehatan	Dr. Boentaran Martoatmodjo
7	Menteri Pengajaran	Ki Hajar Dewantara
8	Menteri Sosial	Mr. Iwa Kusumasumantri
9	Menteri Penerangan	Mr. Amir Sjarifuddin
10	Menteri Perhubungan	R. Abikusno Tjokrosujoso
11	Menteri Keamanan Rakyat	Soeprijadi
12	Menteri Pekerjaan Umum	R. Abikusno Tjokrosujoso
13	Menteri Negara	R. Otto Iskandardinata
14	Menteri Negara	Mr. R.M. Sartono
15	Menteri Negara	K.H. Wahid Hasyim
16	Menteri Negara	Dr. Amir

Selanjutnya dibentuk pula lembaga pertahanan yang tujuannya adalah untuk mempertahankan kedaulatan negara. Sebelum terbentuknya tentara nasional yang kuat, Presiden Soekamo menganjurkan agar para pemuda yang memiliki keterampilan militer dan bergabung dengan barisan perjuangan pada zaman pendudukan Jepang, seperti Peta, Heiho, Seinendan, Keibodan, dan KNIL untuk segera bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat (BKR). Badan ini bukan sebagai lembaga kemiliteran, melainkan sebagai badan darurat sebelum terbentuknya tentara nasional.

Sambutan dan dukungan rakyat di berbagai daerah terhadap pembentukan BKR sangat besar. Setelah mereka mengetahui himbauan presiden melalui radio dan koran segera mereka bergabung dengan BKR.

Para pemuda bekas Peta dan barisan perjuangan lainnya di Jakarta dan berbagai daerah segera membentuk BKR. Maka lahirlah BKR Pusat yang berkedudukan di Jakarta dan BKR Daerah yang berkedudukan di daerah masing-masing.

Selain bergabung dengan BKR, sebagian rakyat Indonesia, terutama yang telah memperoleh pengalaman militer pada masa pendudukan militer Jepang segera membentuk laskar-laskar perjuangan. Tujuannya adalah menjaga keamanan daerah masing-masing serta lebih luas lagi mempertahankan kedaulatan negara yang baru berdiri. Oleh karena itu, sejak proklamasi lahirlah berbagai laskar rakyat, seperti Barisan Rakyat Indonesia (Bara), Pemuda Sosialis Indonesia (Pesindo), Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia (BPRI), Angkatan Pemuda Indonesia (API), Barisan Banteng (BB), Hizbullah, dan Sabilillah. Untuk menyatukan pandangan dan tujuan, pemerintah RI segera mengeluarkan maklumat baru pada 5 Oktober 1945.

Dalam perkembangan selanjutnya, BKR dirubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) melalui maklumat yang dikeluarkan pemerintah. Pada tanggal 6 Oktober 1945 keluar lagi maklumat yang isinya menetapkan Supriyadi, yang pernah memimpin pemberontakan Peta terhadap Jepang di Blitar sebagai Kepala TKR dan menugaskan Oerip Soemohardjo untuk membentuk markas tinggi TKR di Jogjakarta. Markas tersebut membawahi 10 divisi di Jawa dan 6 divisi di Sumatra. TKR yang dibentuk bulan Oktober 1945 ini menjadi dasar bagi lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI). Setiap tanggal 5 Oktober diperingati sebagai hari lahirnya TNI.

D. PROSES PENYEBARAN BERITA PROKLAMASI KEMERDEKAAN RI DAN SAMBUTAN RAKYAT

Pada akhir 1944, Jepang mulai terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, sehingga pada September 1944, Perdana Menteri Jepang yang bernama Koiso mengumumkan janji kemerdekaan kepada rakyat Indonesia. Namun, sesungguhnya janji Jepang ini hanyalah taktik agar perlawanan rakyat Indonesia berkurang sehingga menjadi berbalik simpatik kepada Jepang. Terhadap pengumuman PM Koiso, rakyat Indonesia tidak langsung

mempercayainya. Hal ini disebabkan karena dari pengalaman sebelumnya, Jepang selalu membuat janji-janji yang tidak pernah diwujudkan.

Sebagai tindak lanjut dari pengumuman PM Koiso tentang janji kemerdekaan, pemerintah Jepang memperbolehkan bangsa Indonesia mengibarkan bendera Merah Putih, padahal sebelumnya sangat terlarang. Pengibaran bendera Merah Putih ini harus berdampingan dengan bendera Jepang.

Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada, sebagai Panglima Tentara Jepang, mengumumkan dibentuknya badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Cosakai*). Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting berkenaan dengan masalah tata pemerintahan negara Indonesia yang merdeka.

Anggota Badan Penyelediidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berjumlah 67 orang yang terdiri atas tokoh-tokoh Indonesia dan tujuh orang anggota Jepang. Ketuanya adalah dr. KRT Rajiman Wediodiningrat dengan wakilnya masing-masing Raden Pandji Soeroso (dari Indonesia) dan Ichibangase (dari Jepang). Badan ini diresmikan pada 28 Mei 1945.

Dalam menjalankan tugasnya, BPUPKI pernah mengadakan sidang sebanyak dua kali. Pertama, 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dan sidang kedua 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Di antara sidang pertama dan kedua, diadakan pula sidang Panitia Kecil yang melahirkan Piagam Jakarta *(Jakarta Charter)* pada 22 Juni 1945.

E. PROSES TERBENTUKNYA NEGARA DAN PEMERINTAHAN

Melalui Sidang I BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945, para tokoh negara membahas tentang dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya untuk dapat mendirikan gedung Indonesia Merdeka.

Mengenai asas dan dasar negara Indonesia Merdeka usulan dimulai oleh pidato Mr. Muh. Yamin pada 29 Mei 1945 dengan judul "Asas dan Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia". Susunan dasar negara sebagaimana yang diusulkan Mr. Muh. Yamin dalam pidatonya adalah sebagai berikut:

1) Peri kebangsaan,
2) Peri kemanusiaan,
3) Peri ketuhanan,
4) Peri kerakyatan,
5) Kesejahteraan rakyat.

Setelah selesai pidato, Mr. Muh Yamin menyampaikan lampiran pidatonya tentang asas dan dasar negara seperti di bawah ini:

1) Ketuhanan Yang Maha esa,
2) Persatuan Kebangsaan Indonesia,
3) Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab,
4) Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan,
5) Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Gambar 8.2
Soekarno menyampaikan gagasannya tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI
Sumber: www.wikipedia.org

Selanjutnya, pada 1 Juni 1945 Ir. Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai asas dan dasar negara Indonesia merdeka. Dalam pidatonya Ir. Soekarno menyatakan bahwa atas saran dari salah seorang temannya, maka asas dasar negara yang dikemukakannya dinamakan Pancasila. *Panca* = lima; *sila* = dasar atau sendi. Beliau menyusun rumusan asas dasar negara Indonesia merdeka sebagai berikut:

1) Kebangsaan Indonesia,
2) Internasionalisme atau perikemanusiaan,
3) Mufakat atau demokrasi,
4) Kesejahteraan sosial,
5) Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selain Mr. Muh Yamin dan Ir. Soekarno, Mr. Soepomo juga memberikan usulan tentang asas dan dasar negara, yang isinya sebagai berikut:

1) Persatuan,
2) Kekeluargaan,
3) Keseimbangan lahir dan batin,
4) Musyawarah,
5) Keadilan rakyat.

Salah satu hasil Sidang I BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945 adalah disepakati untuk adanya sidang lanjutan menindaklanjuti rapat I, sehingga dibentuklah Panitia Kecil yang anggotanya terdiri atas sembilan orang. Oleh karena itu, panitia ini disebut Panitia Sembilan. Mereka adalah:

1) Ir. Soekarno,
2) Drs. Moh. Hatta,
3) A.A. Maramis, SH,
4) Abikusno Tjokrosuyoso,

5) Abdul Kahar Muzakir,
6) H. Agus Salim,
7) K.H. Wahid Hasyim,
8) Achmad Soebardjo. S.H.,
9) Mr. Muh. Yamin.

Rapat Panitia Kecil ini dilakukan di Gedung Jawa Hokokai yang menghasilkan beberapa keputusan sebagai berikut.

1) Menggolongkan usul-usul yang masuk sebagai berikut:
   a) usul minta Indonesia merdeka selekas-lekasnya;
   b) usul mengenai dasar negara;
   c) usul mengenai bentuk dan kepala negara;
   d) usul mengenai unifikasi dan federasi;
   e) usul mengenai warga negara;
   f) usul mengenai daerah;
   g) usul mengenai agama dan negara;
   h) usul mengenai kenegaraan.
2) Usul prosedur yang harus dilakukan, yaitu prosedur agar segera tercapai Indonesia Merdeka. Panitia mengusulkan kepada badan penyelidik untuk:
   a) menentukan bentuk negara dan menyusun hukum dasar;
   b) minta segera disyahkan hukum dasar itu oleh pemerintah agung di Tokyo dan minta agar selekas-lekasnya diadakan Badan Persiapan Kemerdekaan yang kewajibannya menyelenggarakan negara Indonesia merdeka atas hukum dasar yang ditentukan Badan Penyelidik dan melantik pemerintah nasional.
3) Menyusun usul rencana pembukaan hukum dasar yang disebut Piagam Jakarta oleh Mr. Moh. Yamin. Adapun isi *Piagam Jakarta* sebagai berikut.

   "Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai Jengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

   Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.

   Atas berkat rahmat Allah Yang Mahakuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan yang luhur, supaya kehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya.

   Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar negara Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan, dengan berdasar kepada Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, nenurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia."

Selanjutnya, melalui Sidang II BPUPKI 10 sampai 16 Juli 1945 dimusyawarahkan penyusunan Rencana Pembukaan Undang-Undang Dasar dan Rencana Undang-Undang Dasar serta rencana lain yang berhubungan dengan kemerdekaan Indonesia.

Pada rapat 11 Juli 1945, dibentuklah Panitia Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan sehagai berikut:

1) Ir. Soekarno,
2) Otto Iskandardinata,
3) BPH Purbaya,
4) K.H. Agus Salim,
5) Mr. Achmad Subardjo,
6) Mr. R. Soepomo,
7) Mr. Maria Ulfah Santoso,
8) K.H. Wachid Hasim,
9) Parada Harahap,
10) Mr. J. Latuharhary,
11) Mr. R. SusantoTirtoprojo,
12) Mr. Sartono,
13) Mr. R.P. Singgih,
14) KRTH. Wuryaningrat,
15) Mr. R.P Singgih,
16) Mr. Tan Eng Hoa,
17) Dr. P.A. Husen Djayadiningrat,
18) Dr. Sukirman Wirjosandjojo,
19) Mr. A.A. Maramis,
20) Miyano (Jepang).

Melalui usulan dari Husen Djajadiningrat dan Mr. Muh. Yamin, maka dalam Panitia Perancang Undang-Undang Dasar itu dibentuk Panitia Kecil dengan susunan sebagai berikut.

1) Panitia Kecil *Declaration of Right* dengan susunan anggota Mr. Achmad Subardjo (Ketua), Parada Harahap, dan Dr. Sukirman Wirjosandjojo.
2) Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dengan susunan Mr. Soepomo (ketua), Mr. Achmad Subardjo, KPRT Wongsonegoro, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, K.H. Agus Salim, Dr. Sukirman Wirjosandjojo.
3) Untuk Preambul tidak dibentuk panitia karena hasil Panitia Kecil 22 Juni 1945 telah diterima.

F. PERAN PPKI DALAM PROSES PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA

Ketika Jepang sudah makin terpojok dalam Perang Asia Timur Raya, tiga pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dr. Rajiman Wediodiningrat, Ir. Soekarno, dan Moh. Hatta dipanggil oleh Marskal Muda Terauci ke Dalat (Vietnam Selatan) dalam rangka membicarakan keputusan Jepang yang hendak memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan wilayah yang mencakup seluruh bekas jajahan Belanda.

Dalam pertemuan antara ketiga tokoh bangsa Indonesia dengan Marsekal Muda Terauci, dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada 9 Agustus 1945, sebab BPUPKI telah dibubarkan pada 7 Agustus 1945. Mula-mula, anggota PPKI berjumlah 21 orang, yang terdiri atas wakil-wakil dari seluruh Indonesia. Ketuanya Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah Drs. Moh. Hatta. Dalam perkembangannya, badan ini tanpa seizin Jepang menjadi alat perjuangan rakyat Indonesia sendiri untuk merdeka. Adapun susunan anggota PPKI adalah sebagai berikut:

1) Ir. Soekarno (ketua),
2) Drs. Mohammad Hatta (wakil ketua),
3) dr. Radjiman Wediodiningrat,
4) Otto Iskandardinata,
5) K.H. Wahid Hasyim,
6) Ki Bagushadikusumo,
7) B.P.K.A. Suryoharnodjojo,
8) M. Soetadjo Kartodikusumo,
9) R. Panji Soeroso,
10) Prof. Dr. Mr. Supomo,
11) Abdul Kadir,
12) B.P.H. Purboyo,
13) dr. Amir (mewakili wilayah Sumatra),
14) Mr. Tengku Mohammad Hasan,

15) Mr. Abdul Abbas,
16) A.A. Hamidhan (mewakili wilayah Kalimantan),
17) I Gusti Ketut Puja (mewakili wilayah Sunda Kecil atau sekarang Nusa Tenggara),
18) Mr. J. Latuharhary (mewakili wilayah timur),
19) Dr. G.S.S.J. Ratu (mewakili wilayah Sulawesi),
20) Andi Pangeran,
21) Dr. Yap Twan Bing (mewakili golongan minoritas Cina).

Pada 18 Agustus 1945, PPKI *(Dokuritso Zunbi Inkai)* rencananya akan mengadakan sidang yang membicarakan persiapan kemerdekaan Indonesia. Tetapi karena pada 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah memproklamasikan berdirinya negara Republik Indonesia, lepas dari pemerintah Jepang, maka akhirnya sidang PPKI pada 18 Agustus 1945 dimanfaatkan untuk melengkapi syarat-syarat berdirinya negara. Adapun secara garis besarnya kegiatan PPKI pada 18 Agustus 1945 dibagi ke dalam dua tahap sebagai berikut.

1) Rapat Pendahuluan PPKI

Kegiatan ini berupa rapat kecil yang terdiri atas Drs. Moh. Hatta, Ki Bagus Hadikusumo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Teuku Moh. Hasan. Para tokoh melaksanakan rapat pendahuluan dan menghasilkan kesepakatan mengubah kalimat "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dengan perubahan tersebut, maka seluruh hukum Undang-Undang Dasar dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam. Menurut Drs. Moh. Hatta, dengan adanya perubahan itu memberikan tanda bahwa para pemimpin bangsa pada waktu itu lebih mengutamakan nasib persatuan dan kesatuan bangsa.

2) Rapat Utama PPKI

Dalam rapat tersebut dipimpin oleh Ir. Soekarno dan Moh. Hatta yang melahirkan tiga keputusan utama, yakni sebagai berikut.

a) Menetapkan dan mengesahkan UUD 45 sebagai hukum dasar. Dalam UUD 45 tercantum dasar negara. Dengan demikian, PPKI pun telah menetapkan dasar negara RI yang harus diproklamasikan sehari sebelumnya.
b) Memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden.
c) Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berfungsi membantu presiden dan wakil presiden sebelum lembaga-lembaga negara yang diharapkan UUD 1945 terbentuk secara resmi.

Rancangan yang digunakan dalam penetapan UUD 1945 adalah Rencana Undang-Undang Dasar yang dirumuskan oleh BPUPKI pada 16 Juli 1945. Adapun untuk pembukaan Undang-Undang Dasar menggunakan bahan usul Rencana Pembukaan Hukum Dasar yang dirumuskan Panitia Sembilan 22 Juni 1945.

RANGKUMAN

1. Pada 1 Maret 1945, Letnan Jenderal Kumakici Harada mengumumkan dibentuknya badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia (*Dokuritsu Zyunbi Cosakai*).Tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk mempelajari serta menyelidiki hal-hal penting berkenaan dengan masalah tata pemerintahan negara Indonesia yang merdeka.
2. Anggota Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) berjumlah 67 orang, ketuanya adalah dr. Rajiman Wediodiningrat dengan wakilnya masing-masing Raden Pandji Soeroso (dari Indonesia) dan Ichibangase (dari Jepang). Badan ini diresmikan pada 28 Mei 1945.
3. Pada Sidang I BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 para tokoh negara membahas tentang dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yaitu dasar negara, filsafat, dan pikiran yang sedalam-dalamnya.
4. Pada 9 Agustus 1945 dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), ketuanya Ir. Soekarno.
5. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No. 56
6. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang pada 18 Agustus 1945 dan menyepakati tiga hal penting:
   a) menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945;
   b) memilih Ir. Soekarno sebagai presiden dan Drs. Mohammad Hatta sebagai wakil presiden;
   c) pembentukan Komite Nasional untuk membantu presiden selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. BPUPKI dipimpin oleh ....
   a. R.P Suroso
   b. A.K Pringgondigdo
   c. dr. Radjiman Wediodiningrat
   d. Ichibangase
2. Orang yang mengusulkan tentang sila persatuan sebagai sila pertama dasar negara dikemukakan dalam Sidang BPUPKI oleh ....
   a. M. Yamin
   b. Mr. Supomo
   c. Ir. Soekarno
   d. K.H. Zaenal Mustafa
3. Tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ....
   a. M. Yamin
   b. Mr. Supomo
   c. Ir. Soekarno
   d. K.H. Zaenal Mustafa
4. Sila yang menjadi pembeda antara Piagam Jakarta dengan rumusan Pancasila yang dikenal sekarang adalah ....
   a. pertama
   b. kedua
   c. ketiga
   d. keempat
5. Janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia pertama kali dikemukakan oleh ....
   a. penguasa militer Angkatan Darat
   b. penguasa militer Angkatan Laut
   c. Perdana Menteri Jepang
   d. Kaisar Jepang

6. Orang yang memimpin PPKI adalah ....
   a. M.Yamin
   b. Mr. Supomo
   c. Ir. Soekarno
   d. Soeharto
7. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada ....
   a. 17 Agustus 1945
   b. 18 Agustus 1945
   c. 19 Agustus 1945
   d. 18 Agustus 2007
8. Berikut yang *bukan* merupakan keputusan hasil Sidang PPKI adalah ....
   a. menetapkan dan mengesahkan UUD 45 sebagai hukum dasar
   b. memilih dan mengangkat Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta masing-masing sebagai presiden dan wakil presiden
   c. membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP)
   d. menetapkan batas wilayah negara
9. Berikut yang *bukan* merupakan golongan muda yang mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengasdengklok adalah ....
   a. Sukarni
   b. Jusuf Kunto
   c. Shodanco Singgih
   d. Supomo
10. Orang yang menjadi Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Republik Indonesia I adalah ....
    a. R.A.A. Wiranatakusumah
    b. Mr. Achmad Soebardjo
    c. Prof. Mr. Dr. Soepomo
    d. Ir. Surachman Tjokroadisurjo

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan tujuan dibentuknya BPUPKI oleh Jepang!
2. Sebutkan susunan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muh. Yamin!
3. Sebutkan keputusan-keputusan apa saja yang dihasilkan dalam Rapat Umum PPKI pada 18 Agustus 1945!
4. Kemukakan pendapat kaum muda tentang pelaksanaan proklamasi kemerdekaan!
5. Setujukah kamu dengan gerakan para pemuda yang menculik Soekarno-Hatta ke Rengadengklok ? Jelaskan alasan anda !

TUGAS

Buatlah kliping tentang foto-foto para pejuang kemerdekaan minimal 10 lembar disertai dengan biodata masing-masing pejuang secara lengkap. Informasi dapat kamu peroleh di internet, koran, majalah atau mewawancarai tokoh perjuangan yang berada di lingkungan tempat tinggalmu!

Bab IX

PRANATA DAN PENYIMPANGAN SOSIAL

Standar Kompetensi

Memahami pranata dan penyimpangan sosial.

Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan bentuk-bentuk hubungan sosial.
2. Mendeskripsikan pranata sosial dalam kehidupan masyarakat.
3. Mendeskripsikan upaya pengendalian penyimpangan sosial.

Pernahkah kamu berbicara kepada temanmu dengan menggunakan telepon genggam? Mengirim telegram? Atau mungkin mengirim kartu ucapan hari raya melalui pos giro? Tindakan yang pernah kamu lakukan merupakan salah satu contoh bentuk hubungan sosial.

Pada bab ini, kamu akan belajar tentang bentuk-bentuk hubungan sosial; identifikasi faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial; dampak hubungan sosial; pengertian pranata sosial; peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian; identifikasi fungsi pranata sosial; jenis-jenis pranata sosial; jenis pengendalian sosial; dan peran lembaga-lembaga pengendalian sosial.

Berkirim surat melalui kantor pos
Sumber: Dokumentasi penerbit

PETA KONSEP
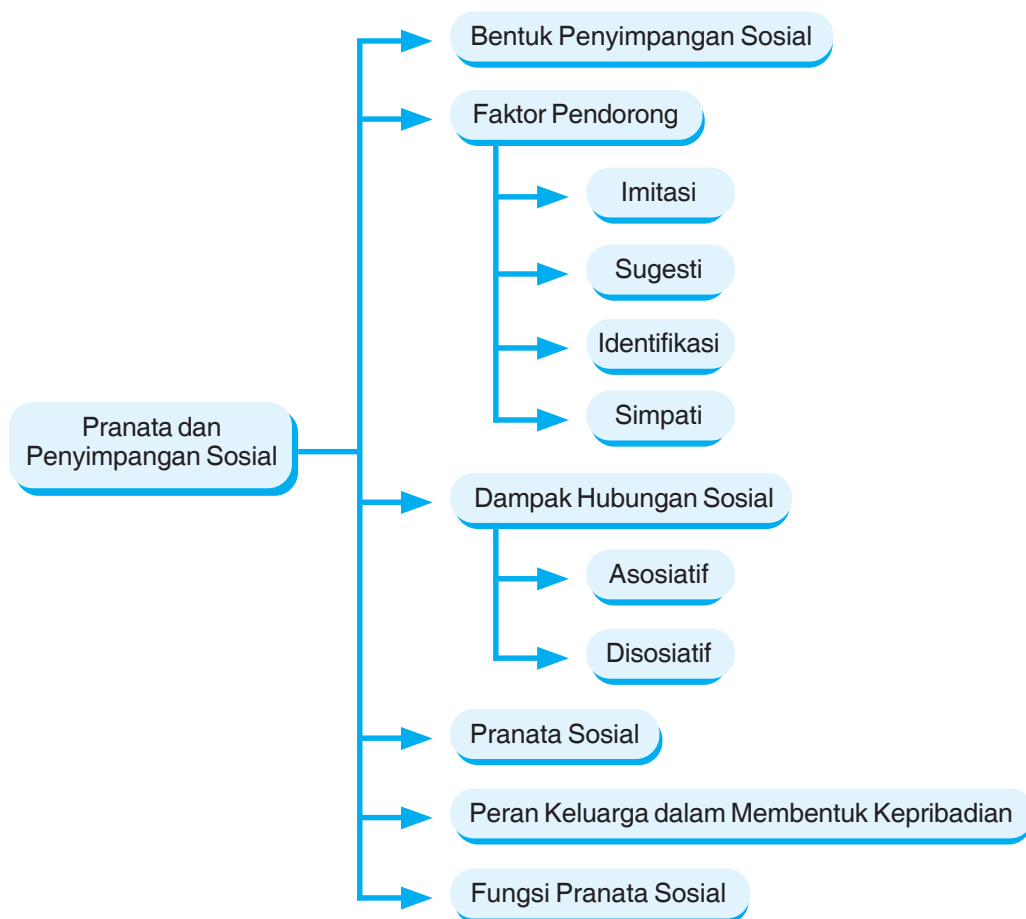
Kata Kunci

- Pranata sosial
- Penyimpangan sosial
- Imitasi
- Sugesti
- Identifikasi
- Simpati
- Asosiatif
- Disosiatif

A. BENTUK-BENTUK HUBUNGAN SOSIAL

Dalam ilmu sosiologi kita mengenal istilah interaksi. *Interaksi* menurut Poerwitaatmadja (1987) adalah hubungan timbal balik yang saling memengaruhi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok.

Adapun pengertian *interaksi sosial* adalah dasar dari proses sosial yang menunjukkan hubungan sosial yang dinamis. Bentuk proses sosial adalah hubungan sosial atau interaksi sosial. Karena, interaksi sosial merupakan syarat utama terjadinya aktivitas sosial. Interaksi sosial juga melibatkan proses sosial yang bermacam-macam, yaitu proses tingkah laku yang dikaitkan dengan struktur sosial.

Sisi lain yang tidak bisa dipisahkan dari hubungan sosial adalah dampak positif dan negatif yang ditimbulkannya. Salah satu contoh yang dikemukakan Poerwitaatmadja, misalnya apabila dua orang bertemu atau beberapa orang bertemu berarti interaksi sosial sudah dimulai. Pada saat itu mereka saling menegur, berjabat tangan, dan saling berbicara (bentuk positif). Akan tetapi, dapat juga pembicaraan itu meningkat menjadi pertikaian yang akhirnya berubah menjadi perkelahian (bentuk negatif). Aktivitas-aktivitas semacam itu merupakan bentuk-bentuk dari hubungan sosial.

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa bentuk-bentuk hubungan sosial terdiri atas tiga macam yaitu sebagai berikut.

1) Kerja sama (*cooperation*), yaitu kerja sama yang dilakukan masyarakat karena didasari oleh kebersamaan dan rasa memiliki. Misalnya, memperbaiki jalan, kerja bakti mendirikan gereja, mendirikan mesjid, dan sebagainya.
2) Persaingan (*competation*), yaitu hubungan sosial antar-individu yang saling berlomba atau bersaing untuk maju. Dalam bentuk ini, mereka tidak melakukan kerja sama. Misalnya, antarpedagang, masyarakat pengusaha, antarkaryawan, dan sebagainya.
3) Pertikaian (*conflict*), yaitu hubungan sosial ketika salah satu pihak merasa dirugikan. Di antara mereka saling mencemooh, saling mencurigai, dan bermusuhan. Hubungan sosial ini bisa mengakibatkan kerusuhan atau peperangan.

B. FAKTOR-FAKTOR PENDORONG TERJADINYA HUBUNGAN SOSIAL

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Sejak ia dilahirkan, manusia sangat ketergantungan pada kelompok di sekitarnya. Demikian juga ketika beranjak dewasa dan bermasyarakat. Manusia membutuhkan dan memiliki naluri yang kuat untuk selalu hidup bersama orang lain.

Itulah sebabnya, manusia kemudian membentuk kelompok-kelompok. Secara bersama-sama, mereka membangun kesadaran untuk hidup, tolong-menolong, saling memengaruhi, dan menentukan tujuan yang sama.

Cikal bakal dari dorongan inilah kemudian terjadi interaksi sosial atau hubungan sosial. Menurut Poerwitaatmadja, setidaknya ada tiga faktor lain yang menyebabkan terjadinya hubungan sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Faktor Imitasi

   Peranan faktor ini sangat penting dalam proses interaksi sosial. Faktor imitasi dapat mendorong seseorang untuk memusuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku. Tetapi juga bisa mengakibatkan terjadinya hal-hal yang negatif, karena yang ditiru mungkin tindakan-tindakan yang menyimpang.

2. Faktor Sugesti

   Faktor ini berlangsung bila seseorang memberi suatu pandangan atau sikap yang berasal dari dirinya yang kemudian diterima oleh pihak lain. Berlangsungnya sugesti, dapat juga terjadi karena pihak yang menerima dilanda oleh emosi yang menghambat daya berpikirnya secara rasional.

3. Faktor Identifikasi

   Faktor identifikasi ialah kecenderungan-kecenderungan atau keinginan-keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan pihak lain. Identifikasi bersifat lebih mendalam daripada imitasi dan sugesti. Karena, kepribadian seseorang dapat terbentuk atas dasar proses ini. Proses identifikasi dapat berlangsung dengan sendirinya ataupun dengan disengaja, karena seringkali seseorang memerlukan tipe-tipe ideal tertentu di dalam proses kehidupannya.

4. Faktor Simpati

   Faktor simpati ialah suatu proses ketika seseorang merasa tertarik kepada pihak lain. Di dalam proses ini, perasaan seseorang memegang peranan yang sangat penting walaupun dorongan utama pada simpati adalah keinginan untuk kerja sama dengannya. Proses simpati akan dapat berkembang jika terdapat saling pengertian pada kedua belah pihak secara mantap.

C. DAMPAK-DAMPAK HUBUNGAN SOSIAL

Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam melakukan interaksi sosial, masalah selalu muncul. Kondisi itu cenderung disebabkan karena manusia memiliki watak dan keinginan yang berbeda.

Menurut Gillin and Gillin ada dua macam dampak yang muncul sebagai akibat adanya hubungan sosial, yaitu sebagai berikut.

1. Asosiatif

Dampak asosiatif mencakup hal-hal berikut ini.

a. Akomodasi (saling menyesuaikan)

Maksudnya, usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu konflik sosial dengan saling mengadakan penyesuaian diri satu sama lain. Misalnya, proses akomodasi zaman Alexander Agung dengan Hellenismenya.

b. Asimilasi (perpaduan hasil dari saling penyesuaian)

Maksudnya, suatu proses sosial yang ditandai oleh adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memerhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Misalnya, pertukaran pemuda atau pelajar antarnegara.

c. Akulturasi (proses penerimaan unsur budaya asing)

Maksudnya, proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing. Selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Misalnya, penyebaran agama.

2. Disosiatif

Dampak disosiatif mencakup hal-hal berikut ini.

a. Persaingan

Persaingan menurut Gilin and Gilin adalah suatu proses sosial ketika para individu atau kelompok manusia bersaing mencari keuntungan melalui bidang-bidang yang pada suatu masa menjadi pusat perhatian publik tanpa menggunakan kekerasan. Misalnya, persaingan antarperusahaan.

b. Pertentangan

Maksudnya, suatu bentuk proses sosial yang terletak di antara persaingan dengan pertikaian yang ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang atau suatu rencana yang disembunyikan serta keragu-raguan terhadap pribadi seseorang. Misalnya, penolakan, menyangkal, dan memaki.

3) Pertikaian

Maksudnya, suatu proses sosial ketika orang perorang atau kelompok manusia berusaha memenuhi tujuan dengan jalan memandang pihak lawan dengan ancaman atau kekerasan. Misalnya, tawuran dan berkelahi.

D. PENGERTIAN PRANATA SOSIAL

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995), *pranata* adalah sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu dan seluruh perlengkapannya, guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat.

Sementara itu, Hartomo (2004) menjelaskan *pranata* adalah sistem pola sosial yang tersusun rapi dan bersifat permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang bersifat kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

Pranata sosial adalah terjemahan dari istilah asing *social institution*. Walaupun *social institution* ada yang menerjemahkan dengan istilah lembaga kemasyarakatan. Dipergunakan istilah pranata sosial karena *social institution* menunjuk pada adanya unsur-unsur yang mengatur perilaku para anggota masyarakat.

Koentjaraningrat (1974) dalam bukunya berjudul *Pengantar Antropologi* mengatakan bahwa *pranata sosial* adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang terpusat kepada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kompleks kebutuhan khusus dalam kebutuhan masyarakat.

Adapun menurut Cohen (1983) menyatakan bahwa *pranata sosial* adalah sistem pola-pola sosial yang tersusun rapi dan relatif permanen serta mengandung perilaku-perilaku tertentu yang kokoh dan terpadu demi pemuasan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok masyarakat.

Dengan demikian, pranata sosial adalah suatu aturan atau kaidah yang mengatur perilaku seseorang di masyarakat agar sesuai dengan adat istiadat yang berlaku dan telah disepakati bersama oleh masyarakat setempat.

E. PERAN PRANATA KELUARGA DALAM PEMBENTUKAN KEPRIBADIAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang terdiri atas suami, istri, dan anak-anak (termasuk anak tiri dan anak angkat). Ada juga keluarga yang tidak mempunyai anak, tetapi biasanya mengambil anak angkat.

Di dalam suatu keluarga kadang-kadang seorang suami mempunyai beberapa orang istri (poligami). Bahkan, pada masyarakat yang primitif ada seorang istri yang memiliki beberapa orang suami (poliandri).

Lingkungan keluarga adalah tempat pembentukan watak dan pendidikan budi pekerti yang paling penting. Sebab, hal itu diberikan sejalan dengan perkembangan kejiwaan anak. Oleh karena itu, di dalam keluarga juga perlu adanya pranata-pranata sosial yang harus ditaati oleh seluruh anggota keluarga. Salah satu pranata yang sangat berperan membentuk pribadi anak adalah ibu, bapak, dan saudara yang lebih tua.

F. FUNGSI PRANATA SOSIAL

Pada dasarnya, fungsi pranata sosial dibentuk untuk membangun kebersamaan sehingga tercipta hidup rukun, aman, nyaman sehingga bisa mencapai tujuan yang sama.

Pranata sosial menurut Cohen (1983) memiliki 5 fungsi, yaitu keluarga, pendidikan, keagamaan, ekonomi, dan pemerintahan. Kelima fungsi ini saling terkait dan memengaruhi.

1. Fungsi Lembaga Keluarga

Fungsi lembaga keluarga meliputi:

a) pengaturan perilaku keturunan;
b) memelihara kelangsungan keturunan melalui kelahiran;
c) merawat dan melindungi anak-anak;
d) mensosialisasikan anak;
e) mengatur penempatan status sebagai penerus warisan sosial;
f) mencukupi kebutuhan ekonomi sebagai unit pokok produksi dan konsumsi ekonomi.

2. Fungsi Lembaga Pendidikan

Fungsi lembaga pendidikan meliputi:

a) memberikan persiapan bagi peranan-peranan pekerja;
b) bertindak sebagai perantara pemindahan warisan kebudayaan;
c) memperkenalkan kepada individu-individu tentang berbagai peranan dalam keluarga;
d) mempersiapkan para individu dengan berbagai peranan sosial yang dikehendaki;
e) memberi landasan bagi penilaian dan pemahaman status relatif;
f) meningkatkan kemajuan melalui pengikutsertaan dalam riset-riset ilmiah;
g) memperkuat penyesuaian diri dan pengembangan hubungan sosial.

3. Fungsi Lembaga Keagamaan

Fungsi lembaga keagamaan meliputi:

a) bantuan terhadap pencarian identitas moral;
b) memberikan penafsiran-penafsiran untuk membantu menjelaskan keadaan lingkungan fisik dan sosial seseorang;
c) peningkatan kadar keramahan bergaul, kohesi sosial, dan solidaritas kelompok.

4. Fungsi Lembaga Ekonomi

Fungsi lembaga ekonomi meliputi:

a) produksi barang dan jasa;
b) distribusi barang dan jasa serta pendistribusian sumber-sumber daya ekonomi (tenaga peralatan);
c) konsumsi barang dan jasa.

5. Fungsi Lembaga-Lembaga Pemerintahan

Fungsi lembaga pemerintahan meliputi:

a) pelembagaan norma meliputi undang-undang yang disampaikan oleh badan-badan legislatif;
b) melaksanakan undang-undang yang telah disetujui;
c) menyelesaikan konflik yang terjadi di antara para anggota masyarakat;
d) penyelenggaraan pelayanan-pelayanan seperti perawatan kesehatan, dan kesejahteraan;
e) melindungi para warga negara dari serangan bangsa-bangsa dan memelihara kesiapsiagaan menghadapi bahaya.

G. JENIS-JENIS PRANATA SOSIAL

Jenis pranata sangat ditentukan oleh kondisi heterogen masyarakat. Artinya, semakin berkembangnya suatu masyarakat maka semakin kompleks pula pranata di dalamnya.

Jenis-jenis pranata sosial menurut Cohen, seorang pakar sosiologi adalah:

1) kekeluargaan,
2) pendidikan,
3) keagamaan,
4) ekonomi,
5) pemerintahan.

Sementara menurut Koentjaraningrat, jenis pranata sosial terdiri atas 8 jenis, yaitu sebagai berikut.

1) *Pranata kekeluargaan* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan. Misalnya, pelamaran, perkawinan, poligami, pengasuh anak, dan perceraian.
2) *Pranata ekonomi* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta dan benda. Misalnya, pertanian, peternakan, pemburuan, industri, koperasi, dan penjualan.
3) *Pranata pendidikan* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna. Misalnya, pengasuhan anak-anak, pendidikan rakyat, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pemberantasan buta huruf, pendidikan agama, pers, dan perpustakaan umum.
4) *Pranata ilmiah* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Misalnya, metode ilmiah dan penelitian pendidikan ilmiah.

5) *Pranata keindahan dan rekreasi* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia menyatakan rasa keindahan dan untuk rekreasi. Misalnya, seni rupa, seni suara, seni gerak, seni drama, kesusastraan, dan olahraga.
6) *Pranata keagamaan* ialah pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib. Misalnya, mesjid, gereja, doa, kenduri, upacara keagamaan, penyiaran agama, pantangan, dan ilmu gaib.
7) *Pranata pemerintahan* ialah pranata yang bertujuan untuk mengatur kehidupan berkelompok secara besar-besaran atau kehidupan bernegara. Misalnya, pemerintahan, demokrasi, kehakiman, kepartaian, kepolisian, dan ketentaraan.
8) *Pranata kesehatan jasmaniah* ialah pranata yang bertujuan untuk mengurus kebutuhan jasmani manusia. Misalnya, pemeliharaan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan kedokteran.

H. JENIS PENGENDALIAN SOSIAL

Sebagai upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap norma, kaidah, dan aturan yang telah disepakati maka dibutuhkan sosial kontrol. Sosial kontrol cenderung sebagai pengendalian sosial.

Sosial kontrol terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.

1. Sosial kontrol yang bersifat preventif

   Preventif, artinya sebuah upaya atau usaha pencegahan sebelum terjadi. Misalnya, pemerintah mensosialisasikan iklan tentang akibat penggunaan napza di televisi pada masyarakat. Layanan iklan ini merupakan strategi preventif agar masyarakt tidak terdorong untuk memakai napza.
2. Sosial kontrol yang bersifat represif

   Represif, artinya sebuah upaya atau usaha untuk mengembalikan kesesuaian akibat adanya gangguan. Misalnya, memberikan sanksi atau hukuman terhadap masyarakat yang melanggar hukum.

I. PERAN LEMBAGA-LEMBAGA PENGENDALIAN SOSIAL

Pada dasarnya, eksistensi antara lembaga-lembaga pengendalian sosial seperti lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi, dan lembaga pemerintah merupakan satu kesatuan.

Peran dan fungsi kelima lembaga tersebut, tidak akan seimbang jika dalam praktiknya berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu dibuat suatu tatanan, aturan, dan norma yang bisa meningkatkan kestabilan antarlembaga yang dimaksud. Misalnya, lembaga keluarga

mendidik dan membina anggota keluarganya. Sementara lembaga pendidikan secara formal mendukung nilai pendidikan yang dibangun keluarga. Contoh lain, lembaga ekonomi dan pemerintah menyiapkan lahan sebagai sarana produktivitas pasca pendidikan formal. Ketidakseimbangan antarlembaga hanya akan menimbulkan pengangguran yang bisa berujung pada tindak kriminal, karena sulitnya mendapatkan pekerjaan.

RANGKUMAN

1. Bentuk-bentuk hubungan sosial meliputi:
   a) bentuk kerja sama (*cooperation*),
   b) bentuk persaingan (*competation*),
   c) bentuk pertikaian (*conflict*).
2. Faktor-faktor pendorong terjadinya hubungan sosial adalah:
   a) faktor imitasi,
   b) faktor sugesti,
   c) faktor identifikasi,
   d) faktor simpati.
3. Dampak-dampak hubungan sosial terdiri atas dua jenis, yaitu sebagai berikut.
   a) Asosiatif yang mencakup:
      1) akomodasi (saling menyesuaikan),
      2) asimilasi (perpaduan hasil dari saling penyesuaian),
      3) akulturasi (proses penerimaan unsur budaya asing).
   b) Disosiatif yang mencakup:
      1) persaingan,
      2) pertentangan,
      3) pertikaian.
4. Peran pranata keluarga dalam pembentukan kepribadian sangat penting. Salah satu pranata yang sangat berperan membentuk pribadi anak adalah orang tua.
5. Jenis-jenis pranata sosial menurut Cohen, yaitu: a) kekeluargaan, b) pendidikan, c) keagamaan, d) ekonomi, dan e) pemerintahan. Adapun menurut Koentjaraningrat, yaitu: a) pranata kekeluargaan, b) pranata ekonomi, c) pranata pendidikan, d) pranata ilmiah, e) pranata keindahan dan rekreasi, f) pranata keagamaan, g) pranata pemerintahan, dan h) pranata kesehatan jasmaniah.
6. Jenis pengendalian sosial terdiri atas dua bagian, yaitu preventif dan represif.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Berikut ini merupakan bentuk-bentuk hubungan sosial, *kecuali* ....
   a. kerja sama
   b. pertahanan
   c. persaingan
   d. pertentangan
2. Berikut ini merupakan contoh tindakan *cooperation,* yaitu ....
   a. membangun rumah
   b. kerja bakti
   c. renovasi garasi
   d. mencuci mobil
3. Terjadinya pemberontakan merupakan bentuk interaksi sosial jenis ....
   a. pertikaian
   b. persaingan
   c. kerja sama
   d. kebersamaan
4. Berjejernya pedagang kelontongan di pasar merupakan contoh dari hubungan sosial ....
   a. pertikaian
   b. persaingan
   c. kerja sama
   d. kebersamaan
5. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat merupakan contoh pengendalian secara ....
   a. sukarela
   b. preventif
   c. represif
   d. informasi
6. Berikut ini merupakan tujuan terbentuknya hubungan sosial secara akomodasi, *kecuali* ....
   a. mengurangi pertentangan
   b. mencegah perpecahan
   c. stabilitas
   d. pembentukan kelompok baru

7. Proses asimilasi akan timbul apabila ....
   a. ada perbedaan budaya
   b. homogen
   c. kebersamaan tujuan
   d. kerja sama
8. Faktor yang dapat menghambat asimilasi ....
   a. adanya toleransi
   b. adanya sikap menghargai
   c. adanya perbedaan warna kulit dan ciri jasmani
   d. adanya kesamaan unsur budaya
9. Dua orang tokoh partai bersaing untuk menduduki jabatan perdana menteri. Jika salah satu berhasil, maka yang kalah tetap diajak bekerja sama. Tindakan tersebut merupakan contoh hubungan sosial dalam proses ....
   a. akomodasi
   b. asimilasi
   c. konflik
   d. pertentangan
10. Berikut ini merupakan faktor-faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, *kecuali* ....
    a. ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan
    b. adanya pergaulan secara intensif
    c. budaya dari kedua kelompok bisa beradaptasi
    d. saling memusuhi

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan 3 bentuk hubungan sosial!
2. Sebutkan 4 faktor pendorong terjadinya hubungan sosial!
3. Sebutkan fungsi pranata sosial!
4. Jelaskan pengendalian sosial secara preventif!
5. Menurutmu, sudah optimalkah upaya pemerintah dalam mengendalikan masalah-masalh sosial ? Jelaskan alasan anda !

TUGAS

Berkunjunglah ke kantor kepolisian yang paling dekat dengan tempat tinggalmu. Mintalah informasi tentang bentuk-bentuk penyimpangan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat selama satu tahun terakhir. Berilah usulan solusi penanggulangan dan pencegahannya secara tertulis dengan mendiskusikannya bersama teman sekelasmu!

Bab X

KETENAGAKERJAAN DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA

Standar Kompetensi

Memahami Kegiatan perekonomian Indonesia.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan permasalahan angkatan kerja dan tenaga kerja sebagai sumber daya dalam kegiatan ekonomi, serta peranan pemerintah dalam upaya penanggulangannya.

Sudah terbayangkah di benak kamu setelah lulus sekolah nanti, apakah akan melanjutkan sekolah atau bekerja? Ketika tidak melanjutkan sekolah, mencari kerja adalah alternatif yang pasti kamu lakukan. Apabila sudah mendapatkannya, status kamu tentunya berubah dari pelajar menjadi pekerja. Namun, apabila tidak mendapatkan pekerjaan, maka kamu termasuk pengangguran.

Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep ketenagakerjaan, mulai dari penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan segala sesuatu yang terkait dengannya.

Demo menuntut perbaikan kesejahteraan dan hak-hak buruh.
Sumber: Pikiran Rakyat

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Kesempatan kerja
- Tenaga kerja
- Pengangguran
- Padat karya
- Bursa kerja

A. TENAGA KERJA, ANGKATAN KERJA DAN KESEMPATAN KERJA

Pernahkah Anda mendengar istilah tenaga kerja ilegal? Mereka adalah tenaga kerja yang masuk dari suatu negara kepada negara lainnya untuk bekerja, tetapi tidak memiliki perizinan yang lengkap untuk bekerja. Lantas, apa yang dimaksud dengan tenaga kerja? Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja serta siap bekerja jika terdapat kesempatan kerja.

Batasan usia kerja yang ditetapkan setiap negara berbeda, karena situasi tenaga kerja dan nilai-nilai budaya di masing-masing negara juga berbeda. Tujuan dari pemilihan batas usia kerja tersebut adalah supaya definisi yang diberikan sedapat mungkin menggambarkan kenyataan yang sebenarnya.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Adapun undang -undang sebelumnya yakni UU No 25 tahun 1997 mendefinisikan tenaga kerja sebagai penduduk yang sudah memasuki usia 15 tahun atau lebih. Dengan demikian, mereka yang berusia di luar itu termasuk bukan tenaga kerja. Namun, Undang-undang terbaru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No 13 tahun 2003 tidak memberikan batasan usia yang jelas dalam definisi tenaga kerja. UU tersebut hanya melarang mempekerjakan anak. Anak menurut UU tersebut adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun. Lebih lanjut UU tersebut mengungkapkan bahwa anak yang berumur antara 13 tahun sampai 15 tahun dapat dipekerjakan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosialnya.

Tiap-tiap negara memberikan batasan umur yang berbeda, India misalnya menggunakan batasan umur 14 tahun sampai 60 tahun, sedangkan orang yang berumur di bawah 14 tahun atau d atas 60 tahun digolongkan sebagai bukan tenaga kerja. Adapun di Amerika Serikat pada awalnya menggunakan batas umur minimum 14 tahun tanpa batas umur maksimal, kemudian sejak tahun 1967 batas umur dinaikan menjadi 16 tahun tanpa adanya batasan maksimum usia kerja.

Adapun kesempatan kerja adalah suatu keadaan dimana peluang kerja tersedia bagi para pencari kerja. Kesempatan kerja merupakan pertemuan antara permintaan tenaga kerja dengan penawaran tenaga kerja di pasar tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja datang dari para pencari pekerja, sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari pihak yang membutukan tenaga kerja, baik swasta maupun pemerintahan. Kesempatan kerja dapat diartikan juga sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat, baik yang sudah ditempati maupun jumlah lapangan kerja yang masih kosong (permintaan tenaga kerja).

Sebagian dari tenaga kerja ada yang tidak siap, tidak bersedia, tidak mampu dan atau tidak sedang mencari pekerjaan, mereka disebut dengan bukan angkatan kerja.

Sedangkan tenaga kerja yang siap dan mampu bekerja, baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun sedang mencari pekerjaan disebut dengan angkatan kerja.

Tenaga Kerja = Angkatan Kerja + Bukan Angkatan Kerja

Dengan demikian, tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi dua sebagai berikut:

1. Angkatan Kerja (*labor force*)

Adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berkeinginan atau bersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Baik yang sudah mendapat pekerjaan maupun yang sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja yang sudah mendapat pekerjaan disebut pekerja, sedangkan angkatan kerja yang sedang mencari atau belum mendapat pekerjaan di sebut pengangguran.

Pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang yang mempunyai pekerjaan dan (saat disensus atau disurvai) memang sedang bekerja, serta orang yang mempunyai pekerjaan, namun untuk sementara waktu kebetulan sedang tidak bekerja, cotohnya petani yang sedang menanti panen atau wanita karir yang tengah menjalani cuti melahirkan.

Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, atau orang yang tidak bekerja dan masih atau sedang mencari pekerjaan, pembahasan tentang pengangguran akan diuraikan dalam bagian selanjutnya.

Angkatan Kerja = Pekerja + Pengangguran

Gambar: 10.1 *Angkatan kerja yang sedang mencari peluang kerja* (Job Opportinity)
Sumber: www.e-dukasi.net

2. Bukan Angkatan Kerja

Adalah tenaga kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Tenaga kerja yang bukan angkatan kerja dibedakan menjadi penduduk dalam usia kerja yang sedang bersekolah atau kuliah, mengurus rumah tangga (tanpa mendapat upah), serta penerima pendapatan lain yakni mereka yang tidak melakukan suatu kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti tunjangan pensiun, bunga atas simpanan, atau sewa atas milik, serta mereka yang hidupnya tergantung dari orang lain, seperti karena lanjut usia, cacat, di penjara atau sakit kronis.

Bukan Angkatan Kerja = Siswa/Mahasiswa + Ibu Rumah Tangga + Penerima Pendapatan Lain

Berdasarkan uraian di atas, penduduk dalam konsep ketenagakerjaan dapat dipetakan menjadi sebagai berikut
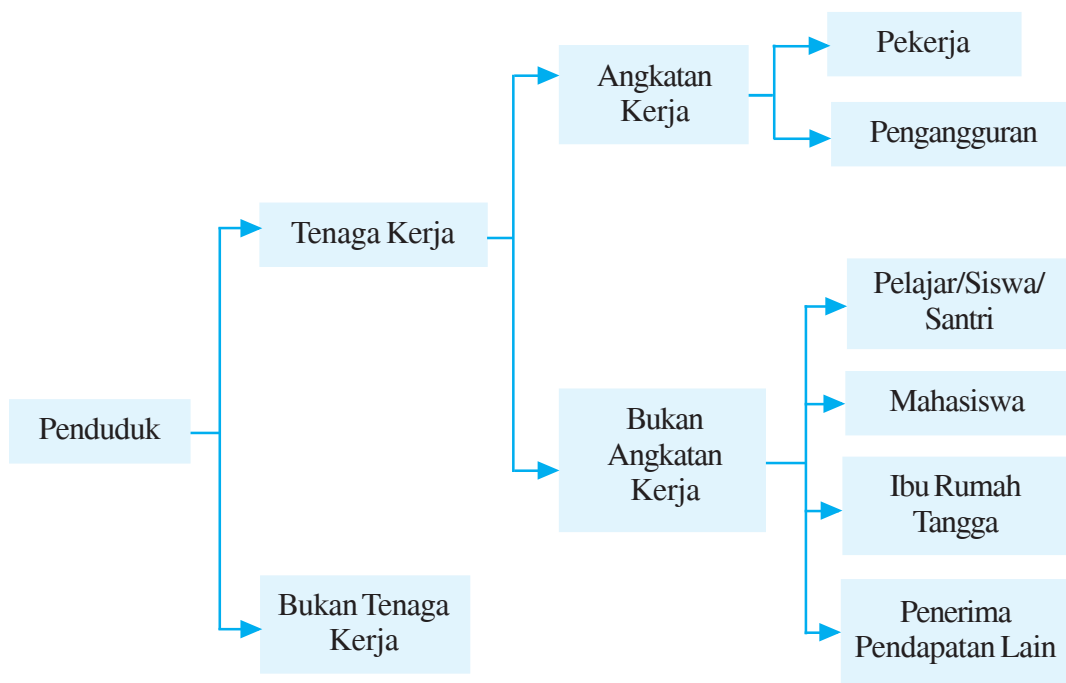
Bagan 10.1 *Penggolongan angkatan kerja*

B. HUBUNGAN JUMLAH PENDUDUK, ANGKATAN KERJA, KESEMPATAN KERJA, DAN PENGANGGURAN

Membahas masalah ketenagakerjaan tidak akan terlepas dari masalah penduduk, karena subjek dan objek masalah ketenagakerjaan adalah manusia sebagai seorang penduduk. Untuk mengawali pemahaman tentang konsep ketenagakerjaan, pembahasan akan dimulai dengan menguraikan masalah penduduk.

Tahukah kamu apa yang disebut dengan penduduk? Berapa banyak jumlah penduduk di Indonesia? Penduduk menurut UUD 1945 Bab X Pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sampai dengan tahun 2005 penduduk Indonesia berjumlah 208.819.860 jiwa dan berada pada peringkat ke empat setelah Cina, India, Amerika Serikat. Penduduk Indonesia yang begitu banyak merupakan potensi tenaga kerja. Di dalamnya ada yang sudah betul-betul termasuk tenaga kerja dan sebagian yang lain merupakan calon-calon tenaga kerja.

Penduduk di Indonesia setiap tahun senantiasa mengalami pertumbuhan. Dalam rangka menekan angka pertumbuhan penduduk tersebut berbagai program dilaksanakan oleh pemerintah, seperti dengan program Keluarga Berencana (KB) yang dilaksanakan sejak zaman Orde Baru. Satu keluarga disarankan untuk cukup dengan memiliki dua anak saja.

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun terus bertambah. Di sisi lain, peningkatan kemampuan ekonomi, baik pemerintah maupun swasta tidak secepat peningkatan jumlah penduduk. Dengan kata lain, laju permintaan lapangan kerja tidak sebanding dengan laju penawaran lapangan kerja. Akibatnya, rentetan dampak negatif dari semakin tingginya pengangguran semakin meningkat.

Secara singkat, pengangguran diartikan sebagai kelompok angkatan kerja yang ingin berkerja, tetapi belum mendapat pekerjaan. Menurut data dari Bappenas tahun 2005, penduduk Indonesia yang termasuk kategori pengangguran terbuka, yaitu penduduk yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan adalah sebesar 11 sampai dengan 12 juta jiwa. Selain itu, ada yang dikategorikan sebagai pengangguran terselubung dan jika dijumlahkan dengan pengangguran terbuka maka jumlah total pengangguran di Indonesia sampai dengan tahun 2005 adalah sebesar 40 juta jiwa. Adapun menurut data Pidato Presiden di hadapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Agustus 2006 disebutkan bahwa angka pengangguran tahun 2004 sebesar 11,2 persen dan tahun 2005 sebesar 10,4 persen. Hal ini merupakan suatu tantangan berat bagi pemerintah, karena tingginya tingkat pengangguran dapat menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kehidupan bermasyarakat.

Selanjutnya, dalam istilah pengangguran ada yang disebut dengan tingkat pengangguran, yaitu perbandingan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Jika diformulasikan sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Pengangguran} = \frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%$$

Pengangguran pada dasarnya dapat dibagi menjadi sebagai berikut.

1) *Pengangguran volunter* atau *pengangguran sukarela* adalah orang yang tidak bekerja disebabkan merasa sudah tercukupi hidupnya. Kalaupun bekerja, mereka menginginkan pekerjaan dengan pendapatan yang besar.
2) *Pengangguran involunter* atau *pengangguran terpaksa* adalah mereka yang ingin bekerja, namun permintaan tenaga kerja belum tersedia. Pengangguran involunter terdiri atas berikut ini.
   a) *Pengangguran konjungtur* atau *pengangguran siklis,* yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya fluktuasi aktivitas ekonomi suatu negara. Misalnya, krisis moneter, atau depresi sehingga berdampak pada PHK karyawan dan buruh perusahaan.
   b) *Pengangguran struktural,* yaitu pengangguran yang disebabkan perubahan struktur ekonomi suatu negara. Misalnya, struktur ekonomi agraris kemudian berubah menjadi struktur ekonomi industri. Akibatnya, tenaga kerja yang semula bekerja di sektor agraris, tidak bisa bekerja di sektor industri. Pengangguran struktural dapat diakibatkan oleh dua kemungkinan, yaitu:
      (1) karena permintaan berkurang,
      (2) karena kemajuan dan penggunaan teknologi.
   c) *Pengangguran musiman,* yaitu pengangguran yang terjadi karena faktor musim. Contoh, para petani dan pekerja bangunan.
   d) *Pengangguran terbuka,* yaitu mereka yang benar-benar menganggur atau tidak memiliki pekerjaan. Contoh, siswa yang baru lulus sekolah dan belum bekerja.
   e) *Pengangguran terselubung,* yaitu mereka yang tidak sepenuhnya menganggur.

Terdapat beberapa cara mengatasi pengangguran yang dapat dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta, yaitu sebagai berikut.

1) Pengembangan sektor informal seperti *home industry.*
2) Pengembangan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal lainya di wilayah tertentu.
3) Perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran.
4) Peningkatan investasi, baik yang bersifat pengembangan maupun investasi untuk mendirikan usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja.
5) Pembukaan proyek-proyek umum. Hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan, dan lain-lain.
6) Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan para pencari kerja, melainkan ia sendiri mengembangkan usaha sendiri yang menjadikannya bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan sendiri.

C. PERMASALAHAN TENAGA KERJA INDONESIA

Permasalahan tenaga kerja dapat dikelompokkan menjadi permasalahan kuantitas dan permasalahan kualitas. Permasalahan kuantitas, yaitu tersedianya jumlah tenaga kerja yang melebihi kesempatan kerja sehingga menimbulkan pengangguran. Sampai dengan tahun 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 40 juta jiwa lebih. Adapun pengangguran terbuka, yaitu yang betul-betul tidak memiliki pekerjaan kurang lebih 12 juta jiwa.

Masalah kependudukan lainya adalah terkait dengan kualitas. Hasil survei UNDP (*United Nations Development Programe*) tentang *Human Development Indeks 2003* terungkap bahwa dari 174 negara yang diurutkan berdasarkan kualitas manusianya, Indonesia hanya berada pada peringkat ke-112. Sementara negara tetangga seperti Singapura sudah mencapai peringkat ke-28, Brunei Darussalam ke-31, Malaysia ke-58, Thailand ke-74 dan Filipina ke-85.

D. DAMPAK PENGANGGURAN

Dewasa ini jika kita mengamati berbagai berita yang disampaikan oleh media massa dan elektronik, setiap harinya tidak lepas dari berita-berita miring, mulai dari pencurian yang diikuti dengan pembunuhan, kasus-kasus pencabulan, penodongan, penipuan, dan sebagainya. Para pelaku biasanya mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau para pengangguran. Kasus-kasus tersebut merupakan bagian dari dampak pengangguran yang terjadi. Semakin tinggi tingkat pengangguran di suatu negara maka semakin besar peluang untuk terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Untuk mengetahui dampak pengangguran, berikut ini akan diuraikan secara lebih rinci.

Gambar 10.1 *Berdasarkan data dari BPS, angka pengangguran di Indonesia saat ini mencapai 12 juta jiwa*
Sumber: www.suarapembaruan.com

1. Dampak Pengangguran terhadap Perekonomian Nasional

Pengangguran pada dasarnya akan berdampak buruk terhadap perekonomian suatu bangsa. Di antara dampak yang bisa kita ketahui adalah sebagai berikut.

a) Pengangguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka pendapatan ril masayakat akan lebih rendah daripada pendapatan potensialnya sehingga tingkat kemakmurannya akan rendah pula.

b) Pengangguran bisa menimbulkan turunnya tingkat pendapatan negara dari pajak. Hal ini terjadi karena ketika ada pengangguran maka kegiatan ekonomi masyarakat turun. Dengan demikian, tingkat pendapatannya pun turun sehingga berdampak pula kepada kemampuannya untuk membayar pajak.

c) Pengangguran bisa mendorong naiknya tingkat kriminalitas. Hal ini dapat meningkatkan risiko usaha akibat kondisi keamanan yang terjamin dan akibatnya investasi.

d) Pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat turun sehingga berdampak pula terhadap tingkat permintaan terhadap barang dan jasa.

2. Dampak Pengangguran terhadap Individu yang Mengalaminya serta terhadap Masyarakat

Secara psikologis, pengangguran akan berdampak negatif terhadap individu yang mengalaminya. Begitu pun terhadap masyarakat dikarenakan tingginya tingkat pengangguran dapat membuka peluang terjadinya tindakan-tindakan kriminal. Untuk lebih rincinya dapat diuraikan sebagai berikut:

a) pengangguran dapat menghilangkan mata pencarian dan pendapatan individu yang mengalaminya;

b) pengangguran dapat menghilangkan keterampilan;

c) pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial.

Gambar 10.2 *Dipenjara karena perbuatan kriminal*
Sumber: CD Clip Art Volume 3

E. CARA-CARA MENGATASI PENGANGGURAN

1. Bagi penganggur sendiri, dapat mengembangkan kreativitasnya melalui berwirausaha mandiri.
2. Pengembangan sekolah-sekolah yang mengarah kepada peningkatan kecakapan hidup, seperti SMK.
3. Pengembangan program kerjama dengan luar negeri dalam pemanfaatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
4. Pengembangan sektor informal seperti *home industry*.
5. Pengembangan program transmigrasi, untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor informal lainya diwilayah tertentu.
6. Perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembukaan industri padat karya di wilayah yang banyak mengalami pengangguran.
7. Peningkatan investasi, baik yang bersifat pengembangan maupun investasi melalui pendirian usaha-usaha baru yang dapat menyerap tenaga kerja.
8. Pembukaan proyek-proyek umum, hal ini bisa dilakukan oleh pemerintah seperti pembangunan jalan raya, jembatan dan lain-lain.
9. Mengadakan pendidikan dan pelatihan yang bersifat praktis sehingga seseorang tidak harus menunggu kesempatan kerja yang tidak sebanding dengan para pencari kerja, melainkan ia sendiri mengembangkan usaha sendiri yang menjadikannya bisa memperoleh pekerjaan dan pendapatan sendiri.

Selain upaya-upaya di atas, Sinuraya (2004) mengungkapkan beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mengatasi pengangguran di Indonesia sebagai berikut:

1. Pengembangan *mindset* dan wawasan penganggur**,** berangkat dari kesadaran bahwa setiap manusia sesungguhnya memilki potensi dalam dirinya namun sering tidak menyadari dan mengembangkan secara optimal. Dengan demikian, diharapkan setiap pribadi sanggup mengaktualisasikan potensi terbaiknya dan dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik, bernilai dan berkualitas bagi dirinya sendiri maupun masyarakat luas.
2. Pengembangan kawasan-kawasan, khususnya yang tertinggal dan terpencil sebagai prioritas dengan membangun fasilitas transportasi dan komunikasi. Ini akan membuka lapangan kerja bagi para penganggur di berbagai jenis maupun tingkatan. Harapan akan berkembangnya potensi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) baik potensi sumber daya alam, sumber daya manusia maupun keuangan (finansial).
3. Pembangunan lembaga sosial yang dapat menjamin kehidupan penganggur. Hal itu dapat dilakukan serentak dengan pendirian Badan Jaminan Sosial Nasional dengan embrio mengubah PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PT Jamsostek) menjadi Badan Jaminan Sosial Nasional yang terdiri dari berbagai devisi menurut sasarannya. Dengan

membangun lembaga itu, setiap penganggur di Indonesia akan tercatat dengan baik dan mendapat perhatian khusus. Secara teknis dan rinci, keberadaaan lembaga itu dapat disusun dengan baik.

4. Penyederhanaan perizinan, karena dewasa ini terlalu banyak jenis perizinan yang menghambat investasi baik Penanamaan Modal Asing (PMA), Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan investasi masyarakat secara perorangan maupun berkelompok. Itu semua perlu segera dibahas dan disederhanakan sehingga merangsang pertumbuhan investasi untuk menciptakan lapangan kerja baru.
5. Menghubungkan secara erat (sinergi) masalah pengangguran dengan masalah di wilayah perkotaan lainnya, seperti sampah, pengendalian banjir, dan lingkungan yang tidak sehat. Sampah, misalnya, terdiri dari bahan organik yang dapat dijadikan kompos dan bahan non-organik yang dapat didaur ulang.
6. Mengembangkan suatu lembaga antarkerja secara profesional. Lembaga itu dapat disebutkan sebagai *job center* dan dibangun dan dikembangkan secara profesional sehingga dapat membimbing dan menyalurkan para pencari kerja. Pengembangan lembaga itu mencakup, antara lain sumber daya manusianya (*brainware*), perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), manajemen dan keuangan. Lembaga itu dapat di bawah lembaga jaminan sosial penganggur atau bekerja sama tergantung kondisinya.
7. Menyeleksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan dikirim ke luar negeri. Perlu seleksi lebih ketat terhadap pengiriman TKI ke luar negeri. Sebaiknya diupayakan tenaga-tenaga terampil (*skilled*). Hal itu dapat dilakukan dan diprakarsai oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.
8. Penyempurnaan kurikulum dan sistem pendidikan nasional (Sisdiknas). Sistem pendidikan dan kurikulum sangat menentukan kualitas pendidikan. Karena itu, Sisdiknas perlu reorientasi supaya dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal.
9. Mengupayakan untuk mencegah perselisihan hubungan industrial (PHI) dan pemutusan hubungan kerja (PHK). PHI dewasa ini sangat banyak berperan terhadap penutupan perusahaan, penurunan produktivitas, penurunan permintaan produksi industri tertentu dan seterusnya. Akibatnya, bukan hanya tidak mampu menciptakan lapangan kerja baru, justru sebaliknya bermuara pada PHK yang berarti menambah jumlah penganggur.
10. Mengembangkan potensi kelautan. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai letak geografis yang strategis yang sebagian besar berupa lautan dan pulau-pulau yang sangat potensial sebagai negara maritim. Potensi kelautan Indonesia perlu dikelola lebih baik supaya dapat menciptakan lapangan kerja yang produktif.

F. PERAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI PENGANGGURAN

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Itulah bunyi Pasal 27 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara menjamin setiap penduduk untuk bisa mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hal itu dilakukan oleh pemerintah melalui beberapa programnya. Salah satunya dengan dibentuknya Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di antaranya sebagai berikut:

1) melaksanakan bursa tenaga kerja dalam rangka mempertemukan antarpermintaan dan penawaran tenaga kerja
2) mengadakan perluasan kesempatan kerja, misalnya melalui pembangunan proyek-proyek umum atau mendirikan industri-industri yang bersifat padat karya, dan program transmigrasi yang ditujukan selain dalam rangka persebaran tenaga kerja, tapi juga dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
3) meningkatkan mutu tenaga kerja;
4) menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan meningkatkan pendidikan formal, misalnya dengan program wajib belajar;
5) menyiapkan tenaga kerja yang mampu bekerja keras, ulet, tekun, serta produktif melalui peningkatan kesehatan dan perbaikan gizi penduduk;
6) mengadakan pelatihan-pelatihan kerja sesuai dengan formasi kerja yang tersedia;
7) mengadakan proyek magang bagi calon tenaga kerja;
8) mendirikan balai-balai latihan kerja.
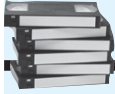
RANGKUMAN

1. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja dan telah memiliki pekerjaan. Tenaga Kerja (*man power*) dikelompokkan menjadi dua kelompok, yaitu:
   a) angkatan kerja (*labor force*),
   b) bukan angkatan kerja.
2. Penduduk menurut UUD 1945 Bab X Pasal 26 adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
3. Pengangguran diartikan sebagai kelompok angkatan kerja yang ingin berkerja, tetapi belum mendapat pekerjaan.
4. Pengangguran pada dasarnya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:
   a) pengangguran volunter atau pengangguran sukarela,
   b) pengangguran involunter atau pengangguran terpaksa.
5. Pengangguran pada dasarnya akan berdampak buruk terhadap perekonomian suatu bangsa. Dampak yang bisa kita ketahui di antaranya sebagai berikut.
   a) Penganguran dapat menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimumkan tingkat kemakmuran yang dapat dicapainya.
   b) Pengangguran bisa menimbulkan turunnya tingkat pendapatan negara dari pajak.
   c) Pengangguran bisa mendorong naiknya tingkat kriminalitas.
   d) Pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat turun.
6. Peranan pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan di antaranya sebagai berikut:
   a) melaksanakan bursa tenaga kerja;
   b) mengadakan perluasan kesempatan kerja;
   c) meningkatkan mutu tenaga kerja;
   d) menyiapkan tenaga kerja terdidik dan terlatih dengan meningkatkan pendidikan formal, misalnya dengan program wajib belajar.

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Di Indonesia, yang dimaksud dengan penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia ....
   a. di atas 15 tahun
   b. di bawah 15 tahun
   c. di atas 65 tahun
   d. di atas 10 tahun
2. Mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pekerja penuh disebut ....
   a. *employment*
   b. *unemployment*
   c. *labour force*
   d. *full employment*
3. Berikut merupakan hal-hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan ....
   1. Pengangguran
   2. Kesempatan kerja
   3. Bukan angkatan kerja
   4. Bekerja penuh
   5. Pengangguran

   Berdasarkan data tersebut, yang merupakan angkatan kerja adalah ....
   a. 1 dan 2
   b. 2 dan 4
   c. 2 dan 5
   d. 3 dan 5

4. Kelompok angkatan kerja disebut juga ....
   a. *man power*
   b. *labour force*
   c. *labour*
   d. *nonlabour force*
5. Pengangguran yang timbul karena tenaga kerja tidak bersedia bekerja meskipun ada permintaan kerja disebut ....
   a. pengangguran tersembunyi
   b. pengangguran sukarela
   c. pengangguran terpaksa
   d. pengangguran terselubung
6. Berikut ini merupakan jenis-jenis pengangguran:
   1. Pengangguran volunter
   2. Pengangguran konjungtur
   3. Pengangguran sukarela
   4. Pengangguran struktural
   5. Pengangguran terbuka

   Jenis-jenis pengangguran involunter adalah ....
   a. 1,2 dan 3
   b. 3,4 dan 5
   c. 2,3 dan 4
   d. 2,4 dan 5
7. Pengangguran yang timbul karena adanya gelombang naik turunnya kehidupan ekonomi disebut ....
   a. pengangguran struktural
   b. pengangguran kongjuntural
   c. pengangguran musiman
   d. pengangguran terbuka
8. Berikut ini *bukan* merupakan dampak pengangguran terhadap perekonomian, yaitu ....
   a. industri padat karya berkembang
   b. tingkat kemakmuran masyarakat rendah
   c. pertumbuhan ekonomi lambat
   d. hilangnya keterampilan yang dimiliki

9. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah ....
   a. mendirikan pabrik yang berorientasi mesin
   b. mendirikan industri padat karya
   c. mendirikan industri padat modal
   d. mengirimkan TKI ke luar negeri
10. John Maynard Keynes berpendapat bahwa pengangguran timbul karena ....
   a. daya beli masyarakat rendah
   b. tenaga kerja yang berlimpah
   c. rendahnya modal yang dimiliki
   d. rendahnya keterampilan tenaga kerja

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan tenaga kerja dengan angkatan kerja!
2. Jelaskan dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional!
3. Menurutmu, bagaimana kondisi pengangguran dewasa ini di Indonesia? Jelaskan!
4. Jelaskan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia!
5. Sebutkan peran pemerintah dalam mengatasi masalah ketenagakerjaan!

TUGAS

1. Berkunjunglah ke Biro Pusat Statistik atau lihat di internet tentang data jumlah penduduk dan jumlah pengangguran di Indonesia selama 5 (lima) tahun terakhir!
2. Diskusikan dalam kelompok kecil (maksimal 5 orang) tentang program-program yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mengatasi masalah pengangguran!
3. Diskusikan pula upaya apa yang dapat kamu lakukan supaya setelah keluar sekolah nanti tidak menjadi seorang pengangguran!

Bab XI

PELAKU EKONOMI DAN PERPAJAKAN DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

Standar Kompetensi

Memahami kegiatan perekonomian Indonesia.

Kompetensi Dasar

1. Mendeskripsikan pelaku-pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia.
2. Mendeskripsikan fungsi pajak dalam perekonomian nasional.

Di antara kamu pasti ada yang pernah menggunakan warung telkom (wartel) untuk menghubungi teman atau saudara. Tahukah kamu bahwa ketika kamu membayar tarif telepon yang kamu gunakan, harga pulsanya ditambah pajak pertambahan nilai (PPN). Lihatlah dalam struk telepon yang diberikan operatornya, pasti tercantum biaya pulsa plus PPN 10 %.

Salah satu kewajiban membayar pajak (PPh)
Sumber: www.tempo.co.id

PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung yang dipungut pemerintah, selain PPN terdapat pula PBB dan PPh. Tahukah kamu apa artinya pajak? Untuk apa pemerintah memungut pajak? Bagaimana cara menghitung pajak?

Bab ini akan membantu kamu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selain pajak, bab ini juga akan menguraikan tentang sistem ekonomi dan pelaku ekonomi yang terdapat dalam sistem perekonomian Indonesia.

PETA KONSEP

Kata Kunci

- Sistem ekonomi
- Kapitalis
- Sosialis
- Pajak
- Tarif pajak
- NPWP
- Wajib pajak

A. PENGERTIAN DAN MACAM-MACAM SISTEM EKONOMI

Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen ekonomi yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga dan dengan segala aktivitas ekonominya yang berada di masyarakat. Secara umum, sistem perekonomian yang dianut oleh setiap negara digolongkan menjadi empat kelompok, yaitu sebagai berikut.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat zaman dahulu. Dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai sosial, kebudayaan, dan kebiasaan masyarakat setempat sangat berpengaruh kuat. Dalam bidang produksi, biasanya mereka hanya memproduksi untuk diri sendiri saja. Oleh karena itu, sistem ekonomi tradisional ini sangat sederhana sehingga tidak lagi bisa menjawab permasalahan ekonomi yang semakin berkembang.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi tradisional sebagai berikut:

a) aturan yang dipakai adalah aturan tradisi, adat istiadat, dan kebiasaan;
b) kehidupan masyarakatnya sangat sederhana;
c) kehidupan gotong-royong dan kekeluargaan sangat dominan;
d) teknologi produksi yang digunakan masih sangat sederhana.

2. Sistem Ekonomi Sosialis atau Komando

Sistem ekonomi komando sering juga disebut sebagai sistem ekonomi sosialis atau terpusat. Sistem ekonomi komando merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengaturan perekonomian dilakukan oleh pemerintah secara terpusat. Oleh karena itu, dalam sistem ekonomi ini peranan pemerintah dalam berbagai kegiatan ekonomi sangat dominan.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi komando adalah **Karl Marx**. Ia adalah seorang ahli filsafat berkebangsaan Jerman. Bukunya yang terkenal berjudul *Das Capital*. Dalam sistem ekonomi komando, semua kegiatan ekonomi diatur dan direncanakan oleh pemerintah. Pihak swasta tidak memiliki kewenangan dalam kegiatan perekonomian. Semua permasalahan perekonomian yang meliputi *what, how,* dan *for whom* semuanya dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat sehingga semua alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Sistem ekonomi komando banyak dianut oleh negara-negara di Eropa Timur dan Cina.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan ciri-ciri sistem perekonomian komando adalah sebagai berikut:

a) semua permasalahan ekonomi dipecahkan oleh pemerintah pusat;
b) kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi diatur oleh negara;
c) semua alat produksi dikuasai oleh negara sehingga kepemilikan oleh individu atau pihak swasta tidak diakui.

3. Sistem Ekonomi Pasar

Sistem ekonomi pasar sering juga disebut sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi yang menghendaki pengolahan dan pemanfaatan sumber daya di dalam perekonomian yang dilakukan oleh individu dan terbebas dari campur tangan pemerintah. Jadi, sistem ekonomi pasar sangat bertolak belakang dengan sistem ekonomi komando.

Tokoh yang memopulerkan sistem ekonomi pasar adalah **Adam Smith**. Bukunya yang terkenal berjudul *The Wealth of Nation*. Adam Smith menyatakan bahwa "perekonomian akan berjalan dengan baik apabila pengaturannya diserahkan kepada mekanisme pasar atau mekanisme harga". Teori ini kemudian dikenal dengan sebutan *The Invisible Hands*. Sistem ekonomi pasar banyak dianut oleh negara Eropa Barat dan Amerika Serikat.

Terdapat beberapa ciri sistem perekonomian pasar, di antaranya sebagai berikut:

a) setiap individu memiliki kebebasan untuk memiliki faktor-faktor produksi;
b) perekonomian diatur oleh mekanisme pasar;
c) peranan modal dalam perekonomian sangat menentukan bagi setiap individu untuk menguasai sumber-sumber ekonomi sehingga dapat menciptakan efisiensi;
d) peranan pemerintah dalam perekonomian sangat kecil;
e) hak milik atas alat-alat produksi dan distribusi merupakan hak milik perseorangan yang dilindungi sepenuhnya oleh negara.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan sistem ekonomi yang lahir sebagai alternatif dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi campuran ini mengambil kelebihan dari sistem ekonomi komando dan sistem ekonomi pasar.

Dalam sistem ekonomi campuran, persoalan organisasi ekonomi sebagian dipecahkan melalui mekanisme pasar dan sebagian lagi dipecahkan melalui perencanaan pemerintah pusat.

Terdapat beberapa ciri sistem ekonomi campuran, di antaranya sebagai berikut:

a) hak milik individu atas faktor-faktor produksi diakui, tetapi ada pembetasan dari pemerintah;

b) kebebasan bagi individu untuk berusaha tetap ada sehingga setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan kreativitasnya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya;
c) kepentingan umum lebih diutamakan;
d) campur tangan pemerintah dalam perekonomian hanya menyangkut faktor-faktor yang menguasai hajat hidup orang banyak.

Dalam kenyataan dewasa ini, dua kubu sistem ekonomi, yaitu kapitalis, liberalis, dan sosialislah yang banyak berkembang. Bahkan yang menganut sistem campuran pun pada kenyataannya lebih condong ke salah satunya. Seiring dengan globalisasi dunia yang semakin gencar, sistem kapitalis-liberalis cenderung lebih banyak dipraktikan.

B. SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA DAN CIRI-CIRINYA

Mohammad Hatta selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Konferensi Ekonomi di Yogyakarta pada tanggal 3 Februari 1946 mengungkapkan bahwa dasar politik perekonomian Republik Indonesia terpancang dalam Undang-undang Dasar 1945 dalam bab "Kesejahteraan Sosial" Pasal 33. Dalam pidatonya, Mohammad Hatta menegaskan bahwa dasar perekonomian yang sesuai dengan cita-cita tolong-menolong ialah koperasi. Seluruh perekonomian rakyat harus berdasarkan koperasi, tetapi tidak segala usaha harus dilakukan secara koperasi. Dikatakan selanjutnya bahwa usaha-usaha yang dapat dikerjakan oleh orang seorang dengan tidak menguasai hidup orang banyak boleh terus dikerjakan oleh orang seorang itu. Bahkan juga dikatakan oleh Hatta waktu itu, "Paksaan berkoperasi kepada perusahaan-perusahaan kecil yang tersebar letaknya tidak pada tempatnya, malahan melanggar dasar koperasi.

Adapun Sumitro Djojohadikusumo dalam pidatonya di hadapan *"School of Advanced International Studies"* Washington, D.C. tanggal 22 Februari 1949 juga menegaskan bahwa yang dicita-citakan ialah suatu macam ekonomi campuran: lapangan-lapangan tertentu akan dinasionalisasi dan dijalankan oleh pemerintah, sedangkan yang lain-lain akan terus terletak dalam lingkungan usaha partikelir. Yang terakhir ini harus tunduk kepada politik pemerintah mengenai syarat kerja, upah gaji, dan politik pegawai.

Walaupun sistem perekonomian Indonesia itu sudah cukup jelas dirumuskan oleh tokoh-tokoh ekonomi Indonesia yang sekaligus juga menjadi tokoh-tokoh pemerintahan pada awal Republik Indonesia berdiri, dalam perkembangannya pembicaraan tentang sistem perekonomian Indonesia tidak hanya berkisar pada sistem ekonomi campuran. Akan tetapi, sistem itu mengarah pada suatu bentuk baru yang disebut sebagai *Sistem Ekonomi Pancasila.* Diskusi tentang Sistem Ekonomi Pancasila itu masih terus berlangsung dan menjadi tugas bangsa Indonesia untuk ikut memikirkannya.

Diskusi itu kemudian dipertegas oleh rumusan yang dicantumkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara yang merupakan pedoman bagi kebijaksanaan pembangunan di

bidang ekonomi di Indonesia. Rumusan itu berbunyi: “Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada Demokrasi Ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya, pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha. Sebaliknya, dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata.

Demokrasi Ekonomi yang menjadi dasar pelaksanaan pembangunan memiliki ciri - ciri positif sebagai berikut.

1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4) Sumber-sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan permufakatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat pula.
5) Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak.
6) Hak milik perorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
7) Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara diperkembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
8) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

Dalam Demokrasi Ekonomi harus dihindarkan ciri-ciri negatif sebagai berikut.

1) Sistem *free fight liberalism* yang menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain dalam sejarahnya di Indonesia telah menimbulkan dan mempertahankan kelemahan struktural posisi Indonesia dalam ekonomi dunia.
2) Sistem etatisme dalam negara beserta aparatur ekonomi negara bersifat dominan serta mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3) Pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.

Adapun berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, pelaku utama dalam Sistem Demokrasi Ekonomi atau dikenal juga dengan Sistem Ekonomi Kerakyatan terdiri atas BUMN, BUMS dan koperasi. Untuk memahami ketiga pelaku ekonomi tersebut coba kamu pelajari ulang Bab 6 (enam) tentang Kegiatan Pelaku Ekonomi dalam Masyarakat.

C. PENGERTIAN DAN FUNGSI PAJAK

Pajak dapat diartikan sebagai pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (*kontraprestasi*) yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayarnya.

Berdasarkan definisi di atas, ciri-ciri pajak adalah sebagai berikut:

1) merupakan pungutan wajib yang dibayar wajib pajak kepada pemerintah;
2) dipungut berdasarkan undang-undang;
3) wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung;
4) dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum pemerintah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pajak memiliki peran yang sangat besar dalam pelaksanaan proses pembangunan. Kontribusinya menentukan kelancaran dan percepatan gerak langkah pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Jika diuraikan minimal terdapat empat fungsi pajak bagi negara, keempat fungsi tersebut sebagai berikut.

1. Fungsi Budgeter

   Pajak berfungsi sebagai sumber utama kas negara yang tercatum dalam APBN sehingga kontribusi terbesar pemasukan yang bersumber dari dalam negeri adalah pajak. Kelancaran proses pemasukannya akan menentukan kelancaran proses pembangunan dan sebaliknya.

2. Fungsi Alokasi

   Pajak berfungsi sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Proses pembangunan yang dilaksanakan oleh negera dalam rangka menyejahterakan rakyatnya memerlukan sejumlah dana dan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan dalam melaksanakan segala aktivitas pembangunan.

3. Fungsi Distribusi

   Pajak yang diterima oleh pemerintah dipergunakan dan disebarkan ke berbagai sektor pembangunan dan berbagai wilayah pembangunan secara merata.

4. Fungsi Regulasi

   Pajak berfungsi sebagai salah satu alat pengatur kegiatan ekonomi. Jika perekonomian mengalami kecenderungan terjadinya inflasi, maka pajak dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen pengendaliannya. Pemerintah dapat menaikkan pajak dengan harapan jumlah uang beredar dapat terkurangi dan inflasi dapat terkendali. Sebaliknya, jika perekonomian mengalami deflasi maka pemerintah menurunkan pajak dengan harapan jumlah uang yang beredar dapat bertambah dan deflasi lebih terkendali.

Seperti sudah diuraikan di atas bahwa penerimaan negara yang bersumber dari dalam negeri tidak hanya dari pajak, melainkan terdapat juga penerimaan-penerimaan lain berupa

pungutan resmi di luar pajak. Untuk pungutan resmi nonpajak ini biasanya pemerintah memberikan imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung kepada pembayarnya. Pungutan ini bisa berbentuk retribusi atau sumbangan wajib.

Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran, contohnya retribusi parkir, karcis masuk pelabuhan, retribusi pasar, iuran pungutan hasil hutan, dan iuran sampah. Adapun pungutan resmi yang termasuk kategori sumbangan wajib, di antaranya adalah sumbangan wajib perbaikan jalan (SWPJ) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya (SWDKLLJR). Untuk lebih memperjelas perbedaan antara pajak dengan pungutan resmi lainya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 11.1 Perbedaan antara Pajak dan Pungutan Resmi Lainnya

No	Keterangan	Pajak	Pungutan Resmi Lainya
1	Imbalan jasa (kontraprestasi)	Tidak diterima secara langsung	Diterima secara langsung
2	Dasar pungutan	Berdasarkan undang-undang	PP, Kepmen, Perda
3	Cara perhitungan	Dihitung sendiri oleh wajib pajak	Oleh aparatur pemerintah
4	Jatuh tempo	Sesuai tahun pajak	Sesuai dengan pemakaian
5	Sanksi hukum	Terdapat dalam undang-undang	Sesuai dengan kebijaksanaan pemeritah
6	Surat ketetapan (kohir)	Terdapat surat ketetapan pajaknya	Tidak terdapat kohirnya
7	Sifat pungutan	Bayar paksa	Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah

D. JENIS DAN TARIF PAJAK

Jenis pajak beranekaragam, tergantung sudut pandang dalam pengelompokkannya, berikut jenis-jenis pajak berdasarkan sudut pandang masing-masing.

1. Pajak Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. *Pajak langsung* adalah pajak yang dipungut setahun sekali berdasarkan surat ketetapan pajak (*kohir*) dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Adapun *pajak tidak langsung* adalah pajak yang dipungut setiap terjadi transaksi tanpa adanya surat ketetapan pajak dan dapat dilimphakan kepada orang lain. Yang termasuk pajak langsung, contohnya PPh dan PBB, sedangkan pajak tidak langsung, di antaranya PPN dan BBN.

2. Pajak Menurut Instansi yang Memungutnya

Menurut instansi yang memungutnya, pajak dibagi menjadi dua yaitu sebagai berikut.

a) Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dan pengelolaanya dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, misalnya PPh dan PPN.

b) Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota. Contohnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

3. Jenis Pajak Menurut Objeknya

Menurut objeknya, pajak dapat dibagi menjadi 4 (empat) sebagai berikut.

a) Objek pajak kejadian, contohnya bea masuk dan bea keluar.

b) Objek pajak perbuatan, contohnya PPN dan BBN.

c) Objek pajak keadaan, contohnya PPh dan PBB.

d) Objek pajak pemakaian, contohnya bea materai dan cukai.

4. Jensi pajak menurut Subjeknya

Menurut subjeknya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut.

a) Pajak perorangan, yaitu pajak yang dikenakan bagi seseorang atau seorang wajib pajak, seperti PPh.

b) Pajak badan, yaitu pajak yang dikenakan pada sebuah organisasi atau badan usaha, seperti PT, CV, yayasan, dan sebagainya.

5. Jenis Pajak menurut Asalnya

Menurut asalnya, pajak dapat dibagi menjadi 2 (dua) sebagai berikut.

a) Pajak dalam negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada setiap warga negara yang tinggal di Indonesia yang memiliki salah satu objek pajak.

b) Pajak luar negeri, yaitu pajak yang dipungut kepada warga negara asing yang memiliki usaha atau penghasilan di Indonesia.

Selanjutnya, tentang sistem tarif pajak, secara umum dibagi menjadi 3 sistem tarif pajak, yaitu sebagai berikut.

1. Tarif Progresif
   Pajak dikatakan progresif apabila pajak itu dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi dengan semakin tingginya objek pajak.
2. Tarif Proporsional
   Tarif proporsional adalah tarif yang menggunakan persentase tetap, berapa pun jumlah objek pajaknya, contoh tarif PBB adalah sama, yaitu sebesar 0,5 % dari total jumlah objek PBB yang dimiliki oleh wajib pajak.
3. Tarif Regresif atau Degresif
   Pajak dikatakan regresif apabila objek pajak semakin tinggi, maka tarif pajaknya semakin turun.

E. SISTEM PERPAJAKAN INDONESIA

Sistem perhitungan pajak setiap negara berbeda-beda tergantung kepada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintahnya. Seiring dengan penyempurnaan yang dilakukan secara berkesinambungan, sistem perhitungan pajak di Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan. Hal tersebut tercermin dari perubahan yang terjadi pada undang-undang yang terkait dengan masalah perpajakan sebagai landasan hukum bagi berlakunya sistem perpajakan di Indonesia.

1. Landasan Hukum

Landasan hukum adalah acuan hukum dasar yang menguatkan dilakukannya suatu kegiatan atau yang melandasi pelaksanaan suatu kebijakan. Ada landasan hukum yang bersumber dari hukum dasar, yaitu UUD 1945. Ada juga yang berbentuk undang-undang sebagai turunan dari UUD 1945, landasan hukum pajak yang dimaksud adalah sebagai berikut.

a) UUD 1945 Pasal 23 Ayat 1 sampai dengan 3.

b) Undang-Undang Perpajakan sebagai turunan dari UUD 1945 Pasal 23 yang telah mengalami beberapa kali penyempurnaan, dan terakhir disyahkan serta berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001 sebagai berikut:
   1) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
   2) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh).

3) UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
4) UU No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
5) UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

2. Cara Pemungutan

Dalam perkembangan pembangunan di Indonesia, terdapat tiga cara pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan sebagai berikut.

a. *Official Assessment System*

Sistem ini dilaksanakan sampai dengan tahun 1967. *Official Assessment System* adalah suatu cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak (*fiscus*). Dalam hal ini Dirjen Pajak.

b. *Semi Self Assessment System* dan *With Holding System*

Kedua sistem ini dilaksanakan di Indonesia dari tahun 1968 sampai dengan 1983. *Semi Self Assessment System* adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak bersama dengan *fiscus. With Holding System* adalah cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pihak ketiga yang ditunjuk.

c. *Full Self Assessment System*

System ini dilaksanakan sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang. *Full Self Assessment System* adalah suatu cara pemungutan pajak dengan penentuan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang melakukan perhitunganya sendiri. *Fiscus* tidak ikut campur, ia hanya memberikan petunjuk dan bantuan kepada wajib pajak yang belum bisa atau belum memahami cara perhitunganya serta mengingatkan atau melakukan penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajibannya pada saat jatuh tempo.

3. Perhitungan Pajak

Untuk dapat melakukan perhitungan pajak, terlebih dahulu perlu diketahui pokok-pokok peraturannya yang terdapat dalam undang-undang tentang perpajakan. Adapun peraturan yang perlu diketahui di antaranya sebagai berikut.

a. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di Indonesia

Undang-undang di antaranya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

1) Tanggung jawab pelaksanaan pajak ada pada anggota masyarakat.
2) Sistem pemungutan dan perhitungan pajak menggunakan sistem "*self assessment*" yang artinya masyarakat diberi kepercayaan untuk menghitung dan menyetor pajak sendiri kepada pemerintah.
3) Undang-undang ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2001.

b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang PPh

Hal-hal yang diatur dalam undang-undang ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Objek pajak

   Objek pajak penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima wajib pajak, baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri atau segala sesuatu yang menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2) Bentuk penghasilan

   Maksud bentuk penghasilan adalah balas jasa yang diterima wajib pajak berupa hadiah, laba usaha, honor, keuntungan, maupun warisan.

3) Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)

   Besarnya penghasilan kena pajak yang diatur dalam UU No. 17 ini adalah sebagai berikut:

   a) wajib pajak bujangan sebesar Rp2.880.000,00;
   b) istri atau suami status kawin sebesar Rp1.440.000,00;
   c) istri atau suami yang bekerja dan penghasilannya apabila digabung sebesar Rp2.880.000,00;
   d) anak atau anggota keluarga seketurunan maksimal tiga orang @ Rp1.440.000,00.

4) Tarif pajak penghasilan

   Tarif pajak yang ditetapkan menurut UU No. 17 Tahun 2000 dari pendapatan kena pajak (PKP) terdapat dalam tabel-tabel sebagai berikut.

a) Wajib pajak perseorangan

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp0,00 – Rp25.000.000,00	5 %
2	Rp25.000.000,00 – Rp50.000.000,00	10 %
3	Rp50.000.000,00 – Rp100.000.000,00	15 %
4	Rp100.000.000,00 – Rp200.000.000,00	25 %

b) Wajib pajak badan usaha

No	Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1	Rp0,00 – Rp25.000.000,00	10 %
2	Rp25.000.000,00 – Rp50.000.000,00	15 %
3	Rp50.000.000,00 ke atas	30 %

c. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM

Di antara isi dari UU Nomor 18 Tahun 2000 ini adalah sebagai berikut.

1) Objek pajak PPN dan PPnBM

Objek pajak dalam PPN dan PPnBM adalah penyerahan barang dan jasa dari produsen ke produsen lain atau produsen ke perantara perdagangan atau langsung ke konsumen.

2) Dasar pengenaan pajak

Dasar pengenaan pajak dalam PPN dan PPnBM adalah harga jual, nilai penggantian, nilai impor, atau nilai lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.

3) Tarif pajak

Ketentuan besarnya tarif pajak dalam PPN dan PPnBM yang ditetapkan dalam UU No. 18 Tahun 2000 ini adalah sebagai berikut:

No	Jenis Pajak	Sifat	Tarif
1	Pertambahan nilai	Umum	10 %
2	Pertambahan nilai	Khusus	5 – 15 %
3	Pertambahan nilai atas ekspor	–	0 %
4	Penjualan atas barang mewah umum	Umum	10 – 15 %
5	Barang kena pajak barang mewah eskpor	–	0 %

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang PBB

Hal-hal yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2000 ini di antaranya adalah sebagai berikut.

1) Objek pajak

   Objek PBB adalah bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi, termasuk kandungan di dalam permukaan bumi. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam dan diletakan secara tetap di dalam tanah atau perairan.

2) Tarif PBB

   Besarnya objek bangunan yang tidak kena pajak sebesar Rp8.000.000,00 dari nilai jual objek PBB. Besarnya tarif PBB adalah sebagai berikut:

   1) tarif tanah 0,5 % dari nilai jual;
   2) tarif bangunan 0,5 % dari nilai jual;
   3) nilai jual kena pajak (NJKP) minimal 20 % dan maksimal 100 %.

Contoh soal:

1. Jika diketahui pendapatan kena pajak (PKP) Tn. Diki sebesar Rp150.000.000,00 per tahun, hitung berapa pajak terutang yang harus dibayar oleh Tn. Diki!

   Jawab:

   a. PPh Tn. Diki terutang adalah:

      $10\ \% \times 25.000.000 = 2.500.000,00$

      $15\ \% \times 25.000.000 = 3.750.000,00$

      $30\ \% \times 100.000.000 = 30.000.000,00$

      Total PPh terutang per tahun adalah sebesar Rp36.250.000,00

   b. Jika dibayar per bulan maka Rp36.250.000,00 : 12 = Rp3.020.833,33

2. Jika diketahui pendapatan Tn. Dani sebesar Rp20.000.000 per tahun, maka pajak terutang yang harus dibayar Tn. Dani sebesar ....

   Jawab:

   $10\ \% \times 20.000.000,00 = 2.000.000,00$ per tahun

   Jika dibayar per bulan, maka Rp2.000.000,00 : 12 = Rp166.666,67

3. Jika diketahui pendapatan Tn. Jepri sebesar Rp100.000.000 per tahun, dia memilki 2 orang anak dan seorang istri. Hitung PPh yang harus dibayar Tn. Jepri!
Jawab:
Pendapatan tidak kena pajak Tn. Jepri adalah sebagai berikut:

Wajib pajak	Rp2.880.000,00
Istri	Rp1.440.000,00
2 anak @ Rp1.440.000	Rp2.880.000,00
Jumlah	Rp7.200.000,00

Maka penghasilan kena pajaknya (PKP) adalah:
Rp100.000.000,00 – Rp7.200.000,00 = Rp92.800.000
Sehingga PPh terutangnya sebagai berikut:
10 % × 25.000.000,00 = 2.500.000,00
15 % × 25.000.000,00 = 3.750.000,00
30 % × 42.800.000,00 = 12.840.000,00
Total PPh terutang adalah sebesar Rp19.090.000,00 per tahun
Jika dibayar per bulan maka Rp19.090.000,00 : 12 = Rp1.590.833,33

RANGKUMAN

1. Sistem ekonomi merupakan sekumpulan unsur atau komponen yang saling berhubungan dalam masyarakat. Komponen-komponen tersebut adalah lembaga ekonomi yang berada di masyarakat.
2. Sitem ekonomi secara umum dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:
   a) sistem ekonomi tradisional,
   b) sistem ekonomi sosialis atau komando,
   c) sistem ekonomi pasar,
   d) sistem ekonomi campuran.
3. Pajak dapat diartikan sebagai pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (*kontraprestasi*) yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayarnya.
4. Fungsi pajak terdiri atas:
   a) fungsi budgeter,
   b) fungsi alokasi,
   c) fungsi distribusi,
   d) fungsi regulasi.
5. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan jasa atau fasilitas tertentu yang diberikan oleh pemerintah secara langsung dan nyata kepada pihak yang melakukan pembayaran.

6. Landasan hukum pajak di Indonesia adalah sebagai berikut:
    a) UU No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
    b) UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (PPh);
    c. UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai barang dan Jasa (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM);
    d. UU No. 20 Tahun 2000 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
    e. UU No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Salah satu ciri sistem ekonomi tradisional adalah ....
    a. alat produksi yang digunakan sudah modern
    b. menggunakan teknologi padat modal
    c. adanya perencanaan ekonomi
    d. kegiatan ekonomi didasarkan pada adat isitiadat
2. Dalam sistem ekonomi pasar, peranan pemerintah relatif sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh ....
    a. seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat
    b. modal yang dimiliki masyarakat lebih banyak
    c. untuk meningkatkan efisiensi
    d. pemerintah tidak memiliki modal

3. Salah satu ciri perekonomian komando, yaitu ....
   a. pemerintah tidak campur tangan dalam kegiatan perekonomian
   b. kesejahteraan masyarakat lebih utama
   c. pemerintah mengatur semua kegiatan perekonomian
   d. kegiatan perekonomian diserahkan pada mekanisme pasar
4. Ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi campuran adalah ....
   a. keberadaan swasta dalam perekonomian sangat diakui sebagai mitra pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
   b. masyarakatnya bersifat agraris
   c. peranan swasta tidak penting
   d. pemerintah mengatur seluruh kegiatan perekonomian
5. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 33, pelaku utama dalam sistem demokrasi ekonomi adalah ....
   a. BUMN, BUMS, dan koperasi
   b. BUMD, PT, dan koperasi
   c. PT, CV, dan koperasi
   d. BUMN, Telkom, dan Pertamina
6. Pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (*kontraprestasi*) secara langsung disebut ....
   a. pajak
   b. retribusi
   c. iuran
   d. sumbangan
7. Berikut yang *bukan* merupakan ciri-ciri pajak adalah ....
   a. merupakan pungutan wajib yang dibayar wajib pajak kepada pemerintah
   b. wajib pajak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung
   c. dipungut berdasarkan undang-undang
   d. wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung
8. Berikut yang *bukan* merupakan fungsi pajak adalah ....
   a. fungsi alokasi
   b. fungsi distribusi
   c. fungsi registrasi
   d. fungsi regulasi
9. Cara pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada pemungut pajak (*fiscus*), dalam hal ini Dirjen Pajak adalah ....

a. *Official Assessment System*
b. *Semi Self Assessment System*
c. *With Holding System*
d. *Full Self Assessment System*

10. Undang-Undang Perpajakan yang mengatur tentang PPh adalah ....
    a. UU No. 17 Tahun 2000
    b. UU No. 18 Tahun 2000
    c. UU No. 19 Tahun 2000
    d. UU No. 20 Tahun 2000

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi!
2. Jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis!
3. Sebutkan kelemahan dan kelebihan sistem demokrasi ekonomi!
4. Jelaskan pendapatmu, seberapa penting rakyat harus membayar pajak kepada pemerintah !
5. Jika diketahui pendapatan kena pajak (PKP) Tn. Rozaktana sebesar Rp200.000.000,00 per tahun, hitung berapa pajak terutang yang harus dibayar oleh Tn. Rozaktana!

TUGAS

Berdiskusilah dengan orang tuamu tentang kekayaan dalam bentuk bumi dan bangunan yang dimiliki orang tuamu. Kemudian hitunglah jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus orang tuamu bayar setiap tahun dan setiap bulannya dengan merujuk kepada Undang-Undang Perpajakan yang sudah kamu pelajari!

Bab XII

PERMINTAAN, PENAWARAN, DAN HARGA KESEIMBANGAN

Standar Kompetensi

Memahami kegiatan perekonomian Indonesia.

Kompetensi Dasar

Mendeskripsikan permintaan dan penawaran serta terbentuknya harga pasar.

Untuk keperluan sekolahmu, orang tuamu pergi ke toko alat tulis kantor (ATK) melihat-lihat alat tulis. Ia bertanya tentang harga suatu barang kemudian terjadi proses tawar-menawar harga dengan pedagang. Apabila sudah mencapai kesepakatan terjadilah transaksi.

Tokok ATK
Sumber: www.geogle.com

Aktivitas yang dilakukan orang tuamu biasanya terjadi di pasar. Toko ATK dapat dimaknai sebagai pasar. Di dalamnya ada permintaan yang datang dari orang tuamu, adapula penawaran dari pedagang serta adapula harga keseimbangan atau harga pasar yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara orang tuamu sebagai pembeli dan pedagang.

Pada bab ini akan diuraikan tentang konsep permintaan, penawaran, serta harga keseimbangan atau harga pasar sebagai hasil interaksi antara permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar.

PETA KONSEP
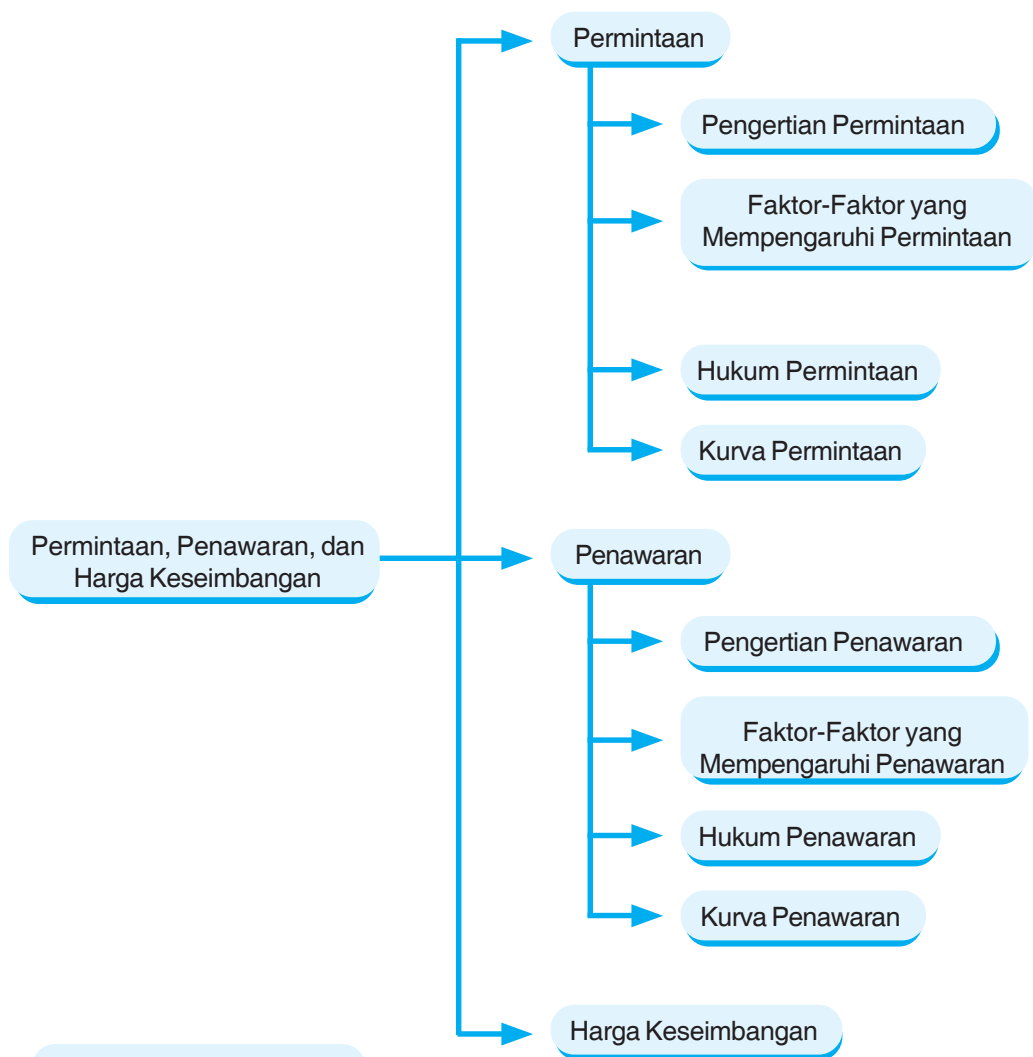
Kata Kunci

- Permintaan
- Penawaran
- Harga keseimbangan
- Hukum permintaan
- Hukum penawaran
- Kurva penawaran
- Kurva permintaan

A. PERMINTAAN (*DEMMAND*)

1. Pengertian Permintaan (*Demand*)

Dalam kehidupan sehari-hari, kamu tentunya sudah tidak asing lagi dengan kata permintaan. Kamu sering meminta uang untuk membeli semua perlengkapan sekolah kepada orang tuamu. Kamu juga tentunya sering melihat orang membeli suatu produk. Semua kegiatan itu merupakan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan permintaan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan permintaan? Dalam ilmu ekonomi, *permintaan* diartikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu.

Agar lebih akurat, untuk menerangkan permintaan ini dimasukkan dimensi geografis. Contohnya, ketika kita berbicara tentang permintaan beras di Jawa Barat, kita akan berbicara berapa jumlah (satuan kg, kwintal, atau ton) beras yang akan dibeli pada berbagai tingkat harga dalam satu periode waktu tertentu, misalnya per bulan atau per tahun di Jawa Barat.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Permintaan

Setelah kamu mengetahui pengertian permintaan, tentunya kamu pun perlu mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhi permintaan, di antaranya sebagai berikut.

a. Harga Barang Itu Sendiri

Jika harga suatu barang semakin murah, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, jika harga suatu barang semakin mahal, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan berkurang. Contohnya, pada saat harga buah apel merah murah, banyak orang yang membelinya karena harganya terjangkau oleh kalangan ekonomi ke bawah. Oleh karenanya, permintaan akan apel merah bertambah. Sebaliknya, pada saat harga buah apel mahal, tidak semua orang dapat membelinya. Dengan kata lain, hanya golongan masyarakat tertentu saja yang mampu membelinya.

b. Harga Barang Lain yang Terkait

Harga barang lain dapat memengaruhi permintaan akan suatu barang. Dengan catatan, kedua barang itu saling berkaitan. Keterkaitan dua barang tersebut dapat bersifat subtitusi (pengganti) atau bersifat komplementer (pelengkap). Hubungan antara harga barang dengan

barang komplementernya bersifat positif, sedangkan hubungan dengan harga barang subtitusi bersifat negatif.

Suatu barang menjadi substitusi barang lain jika memiliki fungsi yang sama dan atau memiliki kandungan yang sama. Contohnya, jagung merupakan barang substitusi beras. Jika harga beras naik, harga relatif jagung menjadi murah. Oleh karena itu, permintaan terhadap jagung akan meningkat.

c. Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan konsumen akan menunjukkan daya beli konsumen. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli konsumen kuat, sehingga akhirnya akan mendorong permintaan terhadap suatu barang.

d. Selera atau Kebiasaan

Selera atau kebiasaan juga akan memengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Contohnya, pada bulan Ramadhan, selera masyarakat terhadap buah kurma meningkat. Karena dijadikan sebagai menu untuk berbuka puasa. Hal ini tentu saja menyebabkan permintaan terhadap buah kurma meningkat.

e. Jumlah Penduduk

Sifat hubungan jumlah penduduk dengan permintaan suatu barang adalah *positif*. Contohnya, permintaan terhadap beras di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia. Artinya, semakin banyak jumlah penduduk, semakin tinggi permintaan terhadap beras karena beras merupakan makanan pokok di Indonesia.

f. Perkiraan Harga di Masa Mendatang

Apabila kita memperkirakan harga suatu barang di masa mendatang naik, kita lebih baik membeli barang tersebut sekarang guna menghemat belanja di masa mendatang. Contohnya, diperkirakan harga bahan bakar minyak (BBM) di masa mendatang akan naik. Hal ini tentu saja mendorong orang berbondong-bondong membeli BBM sekarang. Bahkan, orang cenderung membeli BBM dalam jumlah besar sebagai persediaan. Sebaliknya, jika diperkirakan harga BBM di masa mendatang akan turun, kecenderungan orang akan menunda atau mengurangi permintaannya terhadap BBM tersebut hingga turun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hubungan antara permintaan dan perkiraan harga di masa mendatang adalah *positif*.

g. *Usaha-Usaha Produsen Meningkatkan Penjualan*

Dalam perekonomian modern, bujukan para penjual untuk membeli barang besar sekali peranannya, terutama untuk memengaruhi selera konsumen. Pengiklanan suatu produk baru memungkinkan masyarakat lebih mengenal produk tersebut dan terdorong untuk membelinya. Di samping itu, pengiklanan terhadap produk-produk lama pun akan mengingatkan masyarakat terhadap produk tersebut sehingga diharapkan masyarakat akan tertarik membeli produk tersebut. Dengan kata lain, permintaan terhadap produk tersebut akan meningkat. Contohnya, pengiklanan onderdil asli suatu merek motor terkenal mendorong masyarakat untuk membeli produk tersebut karena kualitasnya tinggi dan harga terjangkau.

Selain pengiklanan, usaha-usaha lain yang dilakukan produsen untuk meningkatkan penjualan bisa dalam bentuk pemberian potongan harga dan peningkatan jasa pelayanan. Sebagai contoh, kita ambil upaya peningkatan jasa pelayanan. Sekarang ini, banyak produsen motor terkenal yang membuka cabang di mana-mana. Hal ini tentu saja dilakukan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas dan memberikan jasa pelayanan berupa jasa *service* secara optimal sehingga diharapkan permintaan masyarakat terhadap merek motor tersebut akan meningkat.

3. Hukum Permintaan

Di atas telah dijelaskan bahwa banyak sekali faktor-faktor yang memengaruhi permintaan suatu barang. Namun, dalam hukum permintaan hanya terdapat hubungan antara jumlah barang yang diminta dengan harga barang yang bersangkutan. Dengan kata lain, hukum permintaan berlaku dengan asumsi *ceteris paribus*. Tahukah kamu apa itu *ceteris paribus*? *Ceteris paribus* merupakan asumsi berlakunya hukum permintaan dengan faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap (konstan). Dengan demikian, *hukum permintaan* berbunyi: "Jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah," dengan asumsi ceteris paribus.

Berdasarkan bunyi hukum permintaan tersebut, dapat dikatakan bahwa harga barang merupakan variabel bebas, sedangkan jumlah barang yang diminta merupakan variabel tidak bebas atau variabel yang dipengaruhi.

4. Kurva Permintaan

Setelah kamu mengetahui apa itu permintaan, faktor-faktor yang memengaruhinya, dan bagaimana bunyi hukumnya, sekarang kamu akan memperoleh penjelasan tentang

kurva permintaan. Namun, sebelumnya perlu kamu ketahui bahwa permintaan konsumen terhadap suatu barang dapat dinyatakan dalam berbagai bentuk, antara lain sebagai berikut.

a) Permintaan dapat dinyatakan dalam bentuk *tabel permintaan.* Tabel permintaan akan suatu barang ini disebut juga sebagai skedul permintaan. contohnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 12.1 Permintaan tepung terigu

No	Harga Terigu/ kg (Rp)	Jumlah Permintaan (Ton)
1	1.500	25
2	2.000	20
3	3.000	15
4	4.000	10

b) Permintaan dapat dinyatakan dalam bentuk grafis, yaitu berupa *kurva permintaan* atau *grafis permintaan*. Contohnya, berdasarkan tabel permintaan di atas, kita dapat membuat kurvanya, seperti gambar kurva berikut ini.
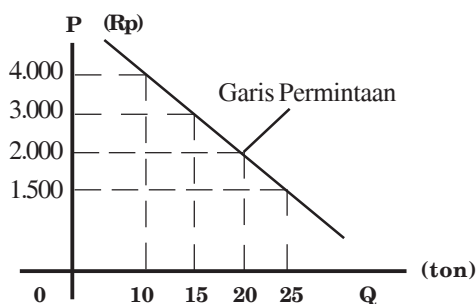
Gambar 12.1 Kurva permintaan tepung terigu

Berdasarkan gambar tersebut, dapat dilihat bahwa kurva permintaan memiliki lereng negatif. Artinya, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta berbanding terbalik.

c) Permintaan dapat pula dinyatakan dalam bentuk persamaan matematika yang kemudian disebut dengan *fungsi permintaan*. *Fungsi permintaan* adalah permintaan yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan faktor-faktor yang memengaruhinya. Dengan fungsi permintaan, kita dapat mengetahui hubungan antara variabel bebas dan variabel tidak bebas. Karena dalam hukum permintaan hanya terdapat hubungan antara jumlah barang yang diminta dan harga barang, sedangkan faktor lainnya dianggap tetap maka fungsi permintaan dapat ditulis seperti berikut ini:

$$Qd = F(p) \quad \text{atau persamaan linier} \quad Qd = a - bp$$

Dibaca: Qd (jumlah barang yang diminta) merupakan fungsi dari harga (p). Artinya, jumlah barang yang diminta akan bergantung pada harga barang.

B. PENAWARAN (*SUPPLY*)

1. Pengertian Penawaran

Setelah kamu memperoleh penjelasan tentang permintaan dan hal-hal yang berkaitan dengan permintaan, tiba saatnya kita membahas tentang penawaran (*supply*). Apakah yang dimaksud dengan penawaran? Tentu kamu pernah melihat pedagang asongan yang menjajakan dagangannya di lampu merah atau kamu melihat para pedagang yang menjajakan dagangannya di pasar. Menurut kamu apakah mereka sedang melakukan kegiatan penawaran? Jadi, apakah penawaran itu? Dalam ilmu ekonomi, *penawaran* diartikan sebagai sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu.

2. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penawaran

Penawaran terhadap suatu barang banyak dipengaruhi oleh berbagai hal, di antaranya adalah sebagai berikut.

a. Harga barang itu sendiri

Apabila harga suatu barang naik, produsen akan menaikkan jumlah barang yang dihasilkannya. Hal ini akan membawa kita pada **hukum penawaran** yang menjelaskan hubungan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan harga barang tersebut.

b. Harga barang lain yang terkait

Harga barang lain yang terkait maksudnya adalah harga barang substitusi dan harga barang komplementer. Apabila harga barang substitusi naik, penawaran suatu barang akan bertambah. Begitu juga sebaliknya, sementara jika harga barang komplementer naik, penawaran akan suatu barang akan berkurang.

c. *Harga faktor produksi*

Pada jumlah anggaran yang tetap, kenaikan harga faktor produksi, seperti tingkat upah, harga bahan baku, atau kenaikan tingkat bunga modal akan menyebabkan perusahaan memproduksi output-nya lebih sedikit. Hal ini tentu saja menyebabkan penawaran barang tersebut berkurang.

d. *Biaya produksi*

Apabila biaya produksi suatu barang naik, perusahaan akan mengurangi produksinya pada tingkat jumlah anggaran yang tetap. Oleh karena itu, menurunnya tingkat produksi ini tentu saja menyebabkan penawaran barang tersebut berkurang.

e. *Teknologi produksi*

Adanya kemajuan pada teknologi produksi dapat menyebabkan penurunan biaya produksi dan dapat menciptakan barang-barang baru. Dengan demikian, kemajuan teknologi ini dapat mendorong bertambahnya penawaran terhadap suatu barang.

f. *Jumlah pedagang atau penjual*

Apabila jumlah pedagang atau penjual suatu barang semakin banyak, secara otomatis jumlah barang yang ditawarkan pun akan semakin bertambah.

3. Hukum Penawaran

Sama halnya seperti hukum permintaan, hukum penawaran pun menunjukkan hubungan antara tingkat harga dengan jumlah barang. Hanya saja, yang dimaksud dengan jumlah barang di sini adalah jumlah barang yang ditawarkan. Dapatkah kamu menyebutkan bunyi hukum penawaran? Berikut ini merupakan bunyi hukum penawaran:

> "Jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik, sebaliknya jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun."

Pada bahasan sebelumnya kamu telah memperoleh penjelasan tentang faktor-faktor yang memengaruhi penawaran. Adapun hukum penawaran hanya menjelaskan hubungan antara tingkat dan jumlah barang yang ditawarkan. Oleh karena itu, hukum penawaran berlaku dengan asumsi *ceteris paribus*, yaitu faktor-faktor lain selain harga dianggap **konstan**.

4. Kurva Penawaran

Sama halnya dengan permintaan, penawaran pun dapat dinyatakan dalam bentuk tabel, grafis dan matematis. Kurva penawaran merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Perhatikan tabel berikut ini.

Tabel 12.2 Penawaran terhadap beras cianjur

No	Harga beras cianjur per kg (Rp)	Penawaran beras cianjur (ton/hari)
1	5.000,00	30
2	4.500,00	27
3	4.000,00	25
4	3.500,00	20

Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa turunnya harga beras cianjur menyebabkan penawaran terhadap beras cianjur pun mengalami penurunan. Tentang penawaran beras cianjur ini dapat kita buat kurva penawarannya, yaitu sebagai berikut:
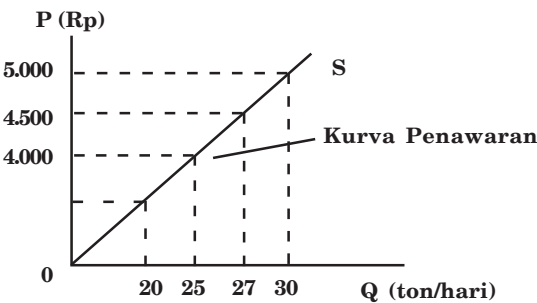
Gambar 12.2 Kurva penawaran beras cianjur

Bentuk kurva penawaran bisa berbentuk garis lurus atau melengkung. Kurva penawaran bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Hal ini menujukkan bahwa hubungan antara tingkat harga dan jumlah barang yang ditawarkan *positif*. Artinya, jika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik.

Fungsi penawaran merupakan penawaran yang dinyatakan dalam hubungan matematis dengan asumsi *ceteris paribus*. Oleh karena itu, fungsi penawaran dapat dinyatakan:

$Qs = F(p)$ atau dalam bentuk persamaan linier $Qs = -a + bp$

C. HARGA KESEIMBANGAN

Setiap calon pembeli datang ke pasar sama-sama didorong oleh kebutuhan tertentu dan boleh jadi memiliki kebutuhan yang sama, namun berbeda dalam kemampuan transaksinya. Secara umum, pembeli dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1) pembeli supermarginal, yaitu pembeli yang daya belinya di atas harga pasar;
2) pembeli marginal, yaitu pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar;
3) pembeli submarginal, yaitu pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar.

Sama halnya dengan pembeli, penjual pun dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

1) penjual supermarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar;
2) penjual marginal, yaitu penjual yang harga pokoknya sama dengan harga pasar;
3) penjual submarginal, yaitu penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar.

Pertemuan antara pembeli dan penjual atau antara permintaan dan penawaran menimbulkan proses tawar-menawar tentang harga dan kuantitas barang. Jika telah mencapai kesepakatan maka terjadilah transaksi. Harga yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli disebut **harga keseimbangan**. Adapun jumlah yang disepakati disebut jumlah keseimbangan. Jika digambarkan dengan kurva adalah sebagai berikut:
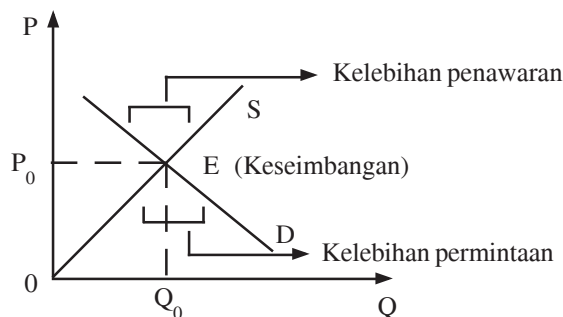
Gambar 12.3 Kurva keseimbangan pasar

Berdasarkan gambar kurva tersebut, keseimbangan pasar terjadi pada saat titik E, yaitu pada tingkat harga P_0 dan jumlah barang sebesar Q_0. Harga keseimbangan dapat berubah seiring perubahan permintaan dan penawaran.
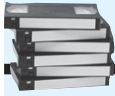
RANGKUMAN

1. *Permintaan* diartikan sebagai keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu.
2. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan:
   a) harga barang itu sendiri,
   b) harga barang lain yang terkait,
   c) tingkat pendapatan,
   d) selera atau kebiasaan,
   e) jumlah penduduk,
   f) perkiraan harga di masa mendatang,
   g) usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan.
3. Hukum permintaan: "Permintaan berbanding terbalik dengan harga: jika suatu barang naik, jumlah barang yang diminta akan berkurang. Sebaliknya, jika harga barang turun, jumlah barang yang diminta akan bertambah," dengan asumsi *ceteris paribus*.
4. *Penawaran* diartikan sebagai sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu.
5. Faktor-faktor yang memengaruhi penawaran:
   a) harga barang itu sendiri,
   b) harga barang lain yang terkait,
   c) harga faktor produksi,
   d) biaya produksi,
   e) teknologi produksi,
   f) jumlah pedagang atau penjual.
6. Hukum penawaran: "Penawaran berbanding lurus dengan harga: jika harga suatu barang naik, jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, jumlah barang yang ditawarkan pun akan turun."

REFLEKSI

Jika terdapat materi yang belum dipahami, pelajari kembali secara seksama dan diskusikan bersama kelompok belajarmu, carilah referensi lain yang relevan, termasuk Internet. Lebih lanjut, tanyakan kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu agar semua materi dapat dikuasai!

SOAL LATIHAN

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu disebut ....
   a. permintaan
   b. penawaran
   c. barang jadi
   d. barang setengah jadi
2. Permintaan yang disertai daya beli disebut ....
   a. permintaan
   b. permintaan efektif
   c. permintaan absolut
   d. permintaan potensial
3. Berikut yang *bukan* termasuk faktor yang memengaruhi permintaan adalah ....
   a. harga barang
   b. selera masyarakat
   c. biaya produksi
   d. tingkat pendapatan
4. Jika selera konsumen terhadap bakso menurun, konsumsi baksonya akan ....
   a. naik
   b. turun
   c. tetap
   d. stabil

5. Perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dan harga adalah ....
   a. berbanding terbalik
   b. berbanding lurus
   c. tetap
   d. sama
6. Kurva penawaran anak bergeser ke kanan bawah jika ....
   a. harga barang naik
   b. teknologi maju
   c. selera menurun
   d. harga faktor produksi naik
7. Jika pendapatan masyarakat naik, permintaan masyarakat akan suatu barang akan ....
   a. naik
   b. turun
   c. tetap
   d. stabil
8. Pasar barang disebut juga pasar ....
   a. pasar input
   b. pasar konkret
   c. pasar output
   d. pasar abstrak
9. Berikut yang *bukan* merupakan faktor-faktor yang memengaruhi penawaran adalah ....
   a. harga barang itu sendiri
   b. harga barang lain yang terkait
   c. harga faktor produksi
   d. selera masyarakat
10. Harga yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli disebut ....
   a. harga keseimbangan
   b. harga potensial
   c. harga barang itu sendiri
   d. harga barang lain yang terkait

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Jelaskan perbedaan antara permintaan dan penawaran!
2. Faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap permintaan?
3. Apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan?
4. Jelaskan perbedaan antara pembeli supermarginal dengan pembeli marginal!
5. Hal-hal apa saja yang berpengaruh ketika seorang pedagang memberikan penawarannya?

TUGAS

Catatlah daftar kebutuhan pokok yang setiap minggu dibeli oleh orang tuamu beserta harganya. Amatilah perubahan harga atas barang-barang tersebut. Analisislah faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya fluktuasi harga kebutuhan pokok tersebut. Laporkan secara tertulis kepada guru bidang studi IPS di sekolahmu!

SOAL LATIHAN SEMESTER 2

I. Pilihan Ganda

Pilihlah jawaban yang kamu anggap paling benar!

1. Orang mengusulkan tentang sila persatuan sebagai sila pertama dasar negara dikemukakan dalam sidang BPUPKI oleh ...
   a. M. Yamin
   b. Mr. Supomo
   c. Ir. Soekarno
   d. K.H. Zaenal Mustafa
2. Tokoh yang pertama kali mengemukakan istilah Pancasila sebagai dasar negara pada tanggal 1 Juni 1945 adalah ...
   a. M. Yamin
   b. Mr. Supomo
   c. Ir. Soekarno
   d. K.H. Zaenal Mustafa
3. Janji kemerdekaan dari Jepang untuk bangsa Indonesia pertama kali dikemukakan oleh ...
   a. Penguasa militer Angkatan Darat
   b. Penguasa militer Angkatan Laut
   c. Perdana Menteri Jepang
   d. Kaisar Jepang
4. Sidang pertama PPKI dilaksanakan pada ...
   a. 17 Agustus 1945
   b. 18 Agustus 1945
   c. 19 Agustus 1945
   d. 18 Agustus 2007
5. Orang yang menjadi menteri dalam negeri dalam *Kabinet Republik Indonesia I* adalah ...
   a. R.A.A. Wiranatakusumah
   b. Mr. Achmad Soebardjo
   c. Prof. Mr. Dr. Soepomo
   d. Ir. Surachman Tjokroadisurjo
6. Berikut ini merupakan contoh tindakan *co-operation* yaitu ...
   a. membangun rumah
   b. kerja bakti
   c. renovasi garasi
   d. mencuci mobil
7. Berjejernya pedagang kelontongan di pasar merupakan contoh hubungan sosial ...
   a. pertikaian
   b. persaingan
   c. kerjasama
   d. kebersamaan
8. Proses asimilasi akan timbul apabila ...
   a. ada perbedaan budaya
   b. homogen
   c. kebersamaan tujuan
   d. kerjasama

9. Dua orang tokoh partai bersaing untuk menduduki jabatan Perdana Menteri. Bila salah satu berhasil, maka yang kalah tetap diajak bekerjasama. Tindakan tersebut merupakan contoh hubungan sosial dalam proses ...
   a. Akomodasi
   b. Asimilasi
   c. Konflik
   d. Pertentangan
10. Berikut bukan faktor yang mempermudah terjadinya asimilasi, yaitu ...
   a. ada kelompok manusia yang berbeda kebudayaan
   b. adanya pergaulan secara intensif
   c. budaya dari kedua kelompok bisa beradaftasi
   d. saling memusuhi
11. Mereka yang sudah bekerja dan memenuhi syarat-syarat sebagai seorang pekerja penuh disebut ...
   a. Employment
   b. Unemployment
   c. Labour Force
   d. Full Employment
12. Kelompok angkatan kerja disebut juga ...
   a. Man Power
   b. Labour Force
   c. Labour
   d. Non Labour Force
13. Berikut jenis-jenis pengangguran
   1. Pengangguran volunter
   2. Pengangguran kongjuntur
   3. Pengangguran sukarela
   4. Pengangguran struktural
   5. Pengangguran terbuka

   Jenis pengangguran involunter yaitu ...
   a. 1, 2, dan 3
   b. 3, 4, dan 5
   c. 2, 3, dan 4
   d. 2, 4, dan 5
14. Salah satu upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran adalah ...
   a. mendirikan pabrik yang berorientasi mesin
   b. mendirikan industri pada karya
   c. mendirikan industri padat modal
   d. mengirimkan TKI ke luar negeri
15. John Maynard Keynes berpendapat bahwa pengangguran timbul karena ...
   a. daya beli masyarakat rendah
   b. tenaga kerja yang berlimpah
   c. rendahnya modal yang dimiliki
   d. rendahnya keterampilan tenaga kerja

16. Dalam sistem ekonomi pasar, peranan pemerintah relatif sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh ...
    a. seluruh kegiatan ekonomi diserahkan kepada masyarakat
    b. modal yang dimiliki masyarakat lebih banyak
    c. untuk meningkatkan efisiensi
    d. pemerintah tidak memiliki modal
17. Ciri yang paling menonjol dari sistem ekonomi campuran adalah ...
    a. keberadaan swasta dalam perekonomian sangat diakui sebagai mitra pemerintah dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
    b. masyarakat bersifat agraris
    c. peranan swasta tidak penting
    d. pemerintah mengatur seluruh kegiatan perekonomian
18. Berikut yang *bukan* merupakan ciri-ciri pajak adalah ...
    a. merupakan pungutan wajib yang dibayar wajib pajak kepada pemerintah
    b. wajib pajak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung
    c. dipungut berdasarkan undang-undang
    d. wajib pajak tidak mendapat imbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung
19. Berikut yang *bukan* merupakan fungsi pajak adalah ...
    a. fungsi alokasi
    b. fungsi distribusi
    c. fungsi registrasi
    d. fungsi regulasi
20. Undang-undang perpajakan di Indonesia yang mengatur tentang PPh adalah ...
    a. UU No 17 tahun 2000
    b. UU No 18 tahun 2000
    c. UU No 19 tahun 2000
    d. UU No 20 tahun 2000
21. Sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu disebut ...
    a. permintaan
    b. penawaran
    c. barang jadi
    d. barang setengah jadi
22. Berikut yang *bukan* termasuk faktor yang mempengaruhi permintaan adalah ...
    a. harga barang
    b. selera masyarakat
    c. biaya produksi
    d. tingkat pendapatan
23. Perbandingan jumlah barang yang ditawarkan dan harga adalah ...
    a. berbanding terbalik
    b. berbanding lurus
    c. tetap
    d. sama

24. Kurva penawaran anak bergeser ke kanan bawah jika ...
    a. harga barang naik
    b. teknologi maju
    c. selera menurun
    d. harga faktor produksi naik
25. Pasar barang disebut juga pasar ...
    a. pasar input
    b. pasar konkret
    c. pasar output
    d. pasar abstrak

II. Uraian

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan tepat!

1. Sebutkan susunan dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Muh. Yamin!
2. Siapa saja yang menjadi pengurus Komite Nasional yang dilantik pada 29 Agustus 1945?
3. Sebutkan 3 bentuk hubungan Sosial!
4. Sebutkan 4 faktor pendorong terjadinya hubungan sosial!
5. Jelaskan perbedaan tenaga kerja dengan angkutan kerja!
6. Jelaskan permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi di Indonesia!
7. Jelaskan perbedaan sistem ekonomi kapitalis dengan sosialis!
8. Jelaskan perbedaan pajak dengan retribusi!
9. Jelaskan perbedaan antara permintaan dan penawaran!
10. Apa yang dimaksud dengan harga keseimbangan?

GLOSARIUM

Angkatan kerja (labor force)	:	penduduk dalam usia kerja atau mempunyai pekerjaan, namun untuk sementara sedang tidak bekerja dan yang mencari kerja.
Angin muson	:	gerakan massa udara yang terjadi karena perbedaan tekanan udara antara benua dan laut.
Akomodasi	:	usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu konflik sosial dengan saling mengadakan penyesuaian diri satu sama lain.
Asimilasi	:	suatu proses sosial yang ditandai oleh adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan-perbedaan yang terdapat antara orang perorangan atau kelompok-kelompok manusia dan usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindak, sikap dan proses-proses mental dengan memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Misalnya, pertukaran pemuda atau pelajar antarnegara.
Akulturasi	:	proses sosial yang timbul jika suatu kelompok manusia dengan kebudayaannya yang tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaan sendiri, tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian kebudayaan itu sendiri. Misalnya, penyebaran agama.
Bukan angkatan kerja	:	penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Misalnya, orang-orang yang kegiatannya bersekolah (pelajar, mahasiswa), mengurus rumah tangga (ibu-ibu yang bukan wanita karir), serta menerima pendapatan, tetapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya (pensiun, penderita cacat).
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara, seperti Pertamina, Telkom, PLN, dan Bank Mandiri.
BUMS	:	Badan Usaha Milik Swasta, seperti Indosat, BCA, dan Bank Danamon.

Ceteris paribus	:	asumsi berlakunya hukum permintaan dan penawaran dengan faktor-faktor lain selain harga dianggap tetap (konstan).
Fertilasi	:	tingkat kelahiran riil dari seorang wanita selama masa reproduksi.
Garis bujur	:	garis pada peta yang ditarik dari Kutub Utara menuju Kutub Selatan.
Garis lintang	:	garis pada peta yang sejajar dengan garis khatulistiwa.
Garis Wallacea	:	garis pada peta yang membatasi antara fauna Indonesia bagian barat dengan Indonesia tengah.
Garis Weber	:	garis pada peta yang membatasi antara fauna Indonesia bagian timur dengan Indonesia bagian tengah.
Gross National Product	:	pendapatan negara dalam satu tahun.
Harga keseimbangan	:	harga yang terbentuk sebagai hasil kesepakatan antara penjual dan pembeli.
Kepadatan penduduk	:	jumlah penduduk di suatu daerah per satuan luas.
Komposisi penduduk	:	struktur penduduk yang didasarkan atas kriteria-kriteria tertentu, seperti komposisi geografis atau biologis.
Koperasi	:	badan usaha yang beranggotakan orang perorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya kepada prinsip-prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan.
Kohir	:	surat ketetapan pajak.
Kualitas penduduk	:	keadaan penduduk, baik secara perorangan maupun kelompok berdasarkan tingkat kemajuan yang telah dicapai.
Lahan	:	hamparan permukaan bumi yang berupa daratan.
Ledakan penduduk	:	pertumbuhan jumlah penduduk yang sangat cepat.
Letak astronomis	:	posisi suatu wilayah berdasarkan garis lintang dan garis bujur.
Letak geografis	:	kedudukan suatu tempat dibandingkan dengan daerah lain di sekitarnya.

Lingkungan abiotik	:	segala sesuatu yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang bukan organisme hidup, seperti tanah dan batuan.
Lingkungan biotik	:	segala makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai dengan tumbuhan, hewan dan manusia.
Migrasi	:	bagian dari mobilitas penduduk yang bertujuan untuk menetap.
Mortalitas	:	peristiwa menghilangkan tanda-tanda kehidupan dari manusia secara permanen.
NPWP	:	nomor pokok wajib pajak.
Pajak	:	pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa (kontraprestasi) yang secara langsung dirasakan oleh wajib pajak yang membayarnya.
Pengangguran volunter atau pengangguran sukarela	:	orang yang tidak bekerja disebabkan merasa sudah tercukupi hidupnya, kalaupun bekerja mereka menginginkan pekerjaan dengan pendapatan yang besar.
Pengangguran involunter atau pengangguran terpaksa	:	orang yang ingin bekerja, namun permintaan tenaga kerja belum tersedia.
Permintaan	:	keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu.
Penawaran	:	sejumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu.
Pembeli supermarginal	:	pembeli yang daya belinya di atas harga pasar.
Pembeli marginal	:	pembeli yang daya belinya sama dengan harga pasar.
Pembeli submarginal	:	pembeli yang daya belinya di bawah harga pasar.
Penjual supermarginal	:	penjual yang harga pokoknya di bawah harga pasar.
Penjual marginal	:	penjual yang harga pokoknya sama dengan harga pasar.

Penjual submarginal	:	penjual yang harga pokoknya di atas harga pasar.
Pencemaran lingkungan	:	suatu kejadian di lingkungan yang dapat menimbulkan gangguan atau kerusakan lingkungan.
Pendapatan per kapita	:	pendapatan rata-rata setiap orang yang berada di suatu negara selama satu tahun.
Penduduk	:	orang yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu.
Persaingan (competation)	:	hubungan sosial antar-individu yang saling berlomba atau bersaing untuk maju. Dalam bentuk ini, mereka tidak melakukan kerja sama. Misalnya antarpedagang, masyarakat pengusaha, antarkaryawan, dan sebagainya.
Pertikaian (conflict)	:	hubungan sosial dengan salah satu pihak merasa dirugikan. Di antara mereka saling mencemooh, saling mencurigai, dan bermusuhan. Hubungan sosial ini bisa mengakibatkan kerusuhan atau peperangan.
Sensus penduduk	:	keseluruhan proses pengumpulan, pengolahan, dan publikasi data demografis dari suatu negara untuk seluruh penduduk pada periode waktu tertentu.
Tenaga kerja	:	penduduk yang telah memasuki usia kerja dan telah memiliki pekerjaan.

INDEKS

Daftar Pustaka

Anwar Prabu Mangkunagara. 2003. *Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Anorga, Wien's. 2004. *Kamus Istilah Ekonomi*. Bandung: M2S

Anonim. 2003. Geosains, Institute Teknologi Bandung, Bandung

Bale, Win. 2004. *Atlas Pelajar Indonesia dan Dunia*. Jakarta:Erlangga

Dadang Hawari. 2000. *Terapi Detoksifikasi dan Rehabilitasi (pesantren) Mutahir system Terpadu."NAZA*" (Narkotika, Alkohol, dan Zat Adiktif lain) Jakarta: Universitas Indonesia

Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Ilmu Pengetahuan Sosial SMP*. Jakarta: Pusat Perbukuan dan Badan Penelitian dan Pengembangan.

Eka Putra, Dianata. 2005. *Berburu Uang di Pasar Modal*, Semarang: Efhar

Faisal Salam. 2008. *Pemberdayaan Koperasi di Indonesia*. Bandung: Pustaka Bandung.

Firdaus, dkk. 2002. *Perkoperasian, Sejarah, Teori dan Praktek.* Jakarta*:* Ghalia

Diddes, Anthony. 2000. *Sociology, Third Edition*. Cambridge Palicy Press

Hartomo dan Arnicun Aziz. 2004. *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ike Kusdyah. 2007. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta

Kuntowodjoyo. 2003. *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana

Malam, John. 2001. *Seri intisari ilmu, Planet Bumi*. Jakarta: Erlangga

Mantra, I Bagoes. 2003. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Muin, Idianto. 2004. *Pengetahuan Sosial, Geografi.* Jakarta: Grasindo

Pindyck, Robert S dan Rubinfeld, Daniel L. 2003. *Mikro Ekonomi Edisi Kelima*, Jakarta: PR. Indeks

Poloma Margaret. 2003. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press

Sri Wiludjeng. 2007. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Samuleson, Paul. A. 2001. *Makro Ekonomi*. Edisi Keempatbelas. Jakarta: Erlangga

Sedarmayanti. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Refika Aditama

Sudarsono. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta

Suryana. 2000. *Kewirausahaan.* Jakarta: Salemba Empat

Sukirna, Sadomo. 2004. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sunarto. 2000. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: FEUI

Suharyadi, dkk. 2008/ *Kewirausahaan, membina usaha sukses sejak usia muda*. Jakarta: Salemba Empat.

Sue Birley. 2006. *Memahami Seluk Belum Perusahaan*. Jakarta: PT.Indeks

Soekanto, Soerjono. 2000. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Soebadio, Haryati. 2002. *Sejarah Awal Indonesia Heritage*. Jakarta: Jayakarta Agung Offset

Tim penyusun, *Geologi dan Perubahan, Hamparan Dunia Ilmu,* Jakarta*:* Tira Pustaka

Tim Penyusun. 2002. *ATLAS, Indonesia dan Dunia.* Jakarta: Indo Buwana.

Williams, Brian, 2001. *Fakta Paling Top, Planet Bumi.* Jakarta: Erlangga.

www.pikiran-rakyat.com

www. wikipedia.org

www.google.com

www.bi.go.id

www.indosat.com

www.telkom.com